



Buku ini merupakan kumpulan 50 tulisan penulis yang terpilih dari sekitar 200 tulisan yang pernah dipublikasikan di berbagai media massa pertanian, peternakan, dan umum, seperti Poultry Indonesia, Infovet, Trobos, Warta Pertanian, Ayam Telur, Bisnis Peternakan Ayam dan Telur, dan Suara Muhammadiyah.

Tulisan-tulisan dalam buku ini merupakan kajian atas berbagai permasalahan yang terjadi pada agribisnis peternakan mulai pengadaan sarana produksi, produksi, pengolahan, sampai pemasaran, khususnya dari sudut pandang ekonomi. Kajian-kajian dalam buku ini dilengkapi fakta, data (dengan perbaikan seperlunya), dan analisis berupa hasil pemikiran, hasil penelitian, dan teori yang mendukung.

UMM
Developing
The Next Generation.



Kritik dan saran mengenai buku ini via *E-mail*: ummpress@yahoo.com

Ir. Sutawi M.P.

Kapita Selekta

Agribisnis

Peternakan



Kapita Selekta Agribisnis Peternakan

Ir. Sutawi M.P.



KAPITA SELEKTA
AGRIBISNIS PETERNAKAN

Program Penulisan Buku Teks Pembelajaran
Periode X

Oleh :
Ir. S u t a w i, M.P

KAPITA SELEKTA AGRIBISNIS PETERNAKAN

Program Penulisan Buku Teks Pembelajaran
Periode X

Oleh :
Ir. Sutawi, M.P

FAKULTAS PETERNAKAN-PERIKANAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

PEBRUARI 2007

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini kedalam bentuk apapun baik secara elektronik maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, menyalin, dan cara lainnya tanpa ijin tertulis dari penulis dan / atau penerbit.

@ HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Sanksi Pelanggaran Pasal 44 :
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang
Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan buku berjudul “Kapita Selekta Agribisnis Peternakan”. Buku ini merupakan kumpulan 50 tulisan penulis yang terpilih dari sekitar 200 tulisan yang pernah dipublikasikan di berbagai media massa pertanian, peternakan, dan umum, seperti Poultry Indonesia, Infovet, Trobos, Warta Pertanian, Ayam Telur, Bisnis Peternakan Ayam dan Telur, dan Suara Muhammadiyah.

Tulisan-tulisan dalam buku ini merupakan kajian atas berbagai permasalahan yang terjadi pada agribisnis peternakan mulai pengadaan sarana produksi, produksi, pengolahan, sampai pemasaran, khususnya dari sudut pandang ekonomi. Kajian-kajian dalam buku ini dilengkapi fakta, data (dengan perbaikan seperlunya), dan analisis berupa hasil pemikiran, hasil penelitian, dan teori yang mendukung.

Dengan selesainya buku ini, tak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih terutama kepada Mamah Daru, mBak Wiwid, Mas Fajar, Dik Alya, dan berbagai pihak yang telah membantu. Khusus kepada Pimpinan Universitas Muhammadiyah Malang penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan adanya kebijakan program penulisan buku ajar bagi dosen UMM. Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi pembangunan agribisnis peternakan, dan menambah perbendaharaan pustaka agribisnis peternakan.

Malang, 12 Pebruari 2007
Penulis,

Ir. Sutawi, M.P

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | III |
| DAFTAR ISI | V |

Bab I

| | |
|---|----------|
| PEMBANGUNAN PETERNAKAN | 1 |
| 1.1 TRILOGI PEMBANGUNAN PETERNAKAN | 2 |
| 1.2. MODERNISASI AGRIBISNIS PETERNAKAN | 11 |
| 1.3. TAHUN KEBANGKITAN PETERNAKAN | 16 |
| 1.4. SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN PETERNAKAN INDONESIA | 21 |
| 1.5. MEMBANGUN DAYA SAING AGRIBISNIS PETERNAKAN | 29 |
| 1.6. PEMBANGUNAN AGRIBISNIS PETERNAKAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL | 34 |
| 1.7. MASA DEPAN INDUSTRI PETERNAKAN | 44 |
| 1.8. PETERNAKAN SEBAGAI BASIS EKONOMI | 48 |
| 1.9. BIOTERORISME FLU BURUNG | 51 |
| 1.10. PETERNAKAN PADA ERA OTONOMI DAERAH | 55 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |

Bab II

| | |
|--|-----------|
| EKONOMI PRODUKSI PETERNAKAN | 59 |
| 2.1 TEORI PRODUKSI PETERNAKAN | 60 |
| 2.2 EFISIENSI PAKAN, KONSEPSI DAN PENGUKURANNYA | 67 |
| 2.3 AGRIBISNIS JAGUNG UNTUK INDUSTRI MAKANAN TERNAK | 72 |
| 2.4 MENUJU SWASEMBADA TEPUNG IKAN | 79 |
| 2.5 SIKLUS GEJOLAK AGRIBISNIS AYAM RAS | 85 |
| 2.6 REVITALISASI PETERNAKAN RAKYAT | 92 |

| | | |
|------|--|-----|
| 2.7 | TUJUH PENYAKIT PETERNAKAN KECIL | 95 |
| 2.8 | KAMBING, TERNAK KECIL UNTUNG BESAR | 99 |
| 2.9 | SWASEMBADA DAGING SAPI TAHUN 2005 | 103 |
| 2.10 | NASIB PETERNAKAN SAPI PERAH | 108 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 113 |

Bab III

| | | |
|------|--|------------|
| | KOPERASI DAN KEMITRAAN PETERNAKAN | 115 |
| 3.1 | PENGEMBANGAN KOPERASI PERUNGGASAN | 116 |
| 3.2 | PERBEDAAN KOPERASI TRADISIONAL DAN KOPERASI GENERASI BARU | 122 |
| 3.3 | AGRIBISNIS PETERNAKAN DENGAN POLA KEMITRAAN | 128 |
| 3.4 | KEMITRAAN AGRIBISNIS AYAM PEDAGING DI AMERIKA SERIKAT | 137 |
| 3.5 | SERBA-SERBI KEMITRAAN USAHA AYAM RAS | 143 |
| 3.6 | POLITIK KEMITRAAN PETERNAKAN | 152 |
| 3.7 | EKONOMI KEMITRAAN AYAM RAS | 157 |
| 3.8 | KEMITRAAN TIGA SERANGKAI | 163 |
| 3.9 | ANALISIS KEUNTUNGAN PETERNAK PLASMA | 169 |
| 3.10 | PENILAIAN PLASMA TERHADAP INTI PADA KEMITRAAN AYAM PEDAGING | 176 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 182 |

Bab IV

| | | |
|------|--|------------|
| | EKONOMI PEMASARAN PETERNAKAN | 183 |
| 4.1. | POLA KONSUMSI PRODUK PETERNAKAN | 184 |
| 4.2. | TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN PADA USAHA PETERNAKAN | 192 |
| 4.3. | STRUKTUR PASAR DALAM AGRIBISNIS PETERNAKAN | 198 |
| 4.4. | MANFAAT TARIF BAGI PENGEMBANGAN PETERNAKAN DI INDONESIA | 206 |
| 4.5. | PELUANG PASAR EKSPOR PRODUK PETERNAKAN | 214 |
| 4.6. | AGRIBISNIS PETERNAKAN DALAM | |

| | | |
|-------|---|-----|
| | PEREKONOMIAN GLOBAL | 223 |
| 4.7. | PENERAPAN UU No. 5/1999 PADA AGRIBISNIS PETERNAKAN | 227 |
| 4.8. | STABILISASI HARGA KOMODITAS PERUNGGASAN | 231 |
| 4.9. | KEUNGGULAN KOMODITAS PETERNAKAN | 235 |
| 4.10. | PERBANDINGAN HARGA TELUR INTERNASIONAL | 242 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 246 |

Bab V

| | | |
|-------|---|------------|
| | ILMU DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN | 247 |
| 5.1. | MEMILIH DAN MEMBEDAKAN DAGING TERNAK .. | 248 |
| 5.2. | DAGING HALAL DAN TAYYIB | 254 |
| 5.3. | PEMOTONGAN UNGGAS SECARA HALAL | 259 |
| 5.4. | PROTEIN HEWANI BAGI TUBUH MANUSIA | 263 |
| 5.5. | LEMAK IKAN MENCEGAH JANTUNG KORONER | 273 |
| 5.6. | BENARKAH TELUR PENYEBAB PENYAKIT JANTUNG ? | 276 |
| 5.7. | MENINGKATKAN PRODUKSI TELUR AYAM BURAS | 281 |
| 5.8. | EMPAT TAHAP PENYUSUNAN RANSUM | 285 |
| 5.9. | PAKAN ALTERNATIF PENGGANTI JAGUNG | 288 |
| 5.10. | MEMANFAATKAN AZOLLA UNTUK MAKANAN TERNAK | 295 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 301 |
| | RIWAYAT HIDUP | 302 |



Bab I

**PEMBANGUNAN
PETERNAKAN**

1.1. **TRILOGI PEMBANGUNAN PETERNAKAN**

Istilah pembangunan yang digunakan dalam bahasa Indonesia, seringkali merupakan terjemahan dari kata-kata *development*, *growth*, *change*, *modernization* dan bahkan *progress*. Karena itu, pengertian yang melekat pada istilah pembangunan sebenarnya mencakup banyak aspek yang harus didekati dari berbagai sudut pandang lintas disiplin yang mencakup ekonomi, politik, sosial budaya dan sebagainya. Di Indonesia kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala aspek kehidupan. Secara umum, kata ini diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Maka, pembangunan seringkali diartikan pula sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi.

Pembangunan Pertanian

Dalam perjalanan sejarah pertumbuhan bangsa-bangsa di dunia baik yang sekarang menjadi negara maju (*developed country*) maupun yang masih tergolong negara berkembang (*developing country*), selalu pernah mengalami dilema dalam menentukan prioritas pembangunan ekonomi nasionalnya. Kiranya sulit untuk menentukan pembangunan sektor industri atau sektor pertanian yang harus diutamakan terlebih dahulu.

Di negara berkembang, termasuk Indonesia, selalu menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasionalnya menduduki posisi yang sangat vital. Pernyataan ini didukung oleh kenyataan bahwa (1) sebagian besar penduduk masih beratapencarian di sektor pertanian, (2) pada umumnya masih menghadapi masalah pangan,

(3) sulit bersaing dengan negara maju untuk menghasilkan produk-produk industri di pasar internasional baik karena keterbatasan modal, ketidakmampuan melakukan riset dan pengembangan, maupun karena adanya kebijakan politik proteksionisme oleh negara-negara maju, (3) adanya ketegaran sektor pertanian dalam menghadapi gejolak perekonomian dunia, dan (5) masih besarnya sumbangan sektor pertanian bagi pembangunan sektor industri (Mardikanto, 1993). Sejalan dengan kenyataan empiris di atas, maka kerangka pembangunan nasional sampai pada era Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009) masih memberikan prioritas pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian.

Trilogi Pembangunan

Kebijakan pembangunan nasional selalu bertumpu pada Trilogi pembangunan. Ketiga unsur trilogi pembangunan tersebut adalah (1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya (*equity*), (2) pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi (*growth*) dan (3) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis (*stability*) Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya tidak mungkin terwujud tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak mungkin tercapai tanpa adanya stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis tidak akan terwujud tanpa adanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya karena tanpa adanya pemerataan, lambat atau cepat akan terjadi gangguan dan gejolak sosial. Dalam hubungan ini stabilitas menjadi syarat pokok bagi usaha pembangunan yang lestari. Dalam pada itu stabilitas yang bersifat dinamis harus pula merupakan hasil dari pola pembangunan yang seimbang. Artinya, pembangunan senantiasa memelihara keseimbangan antara peningkatan produksi dengan laju yang cukup tinggi dan pola pembagian hasil yang lebih merata. Pertumbuhan dengan hasil produksi yang hanya dinikmati oleh selapisan masyarakat yang terbatas menimbulkan ketidakadilan dan keresahan yang dengan sendirinya mengganggu stabilitas nasional. Sebaliknya, pemerataan tanpa peningkatan produksi membawa akibat pada kemiskinan yang

meluas dan ini mengganggu stabilitas.

Stabilitas

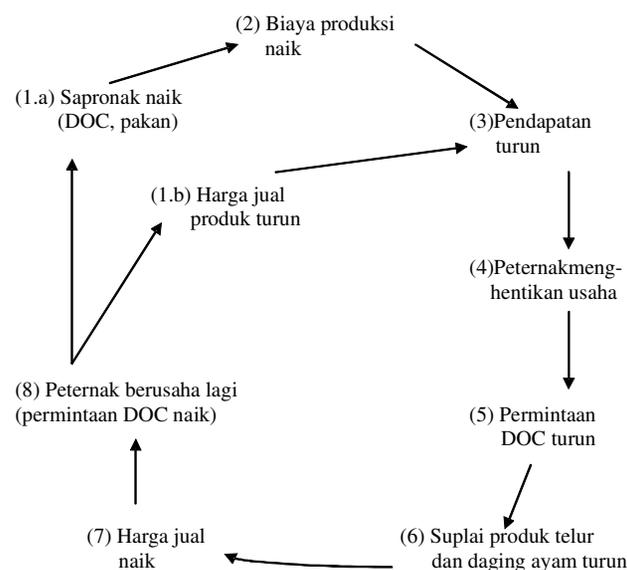
Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis mengandung arti bahwa (1) stabilitas adalah suatu kondisi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mantap, aman, tenteram dan tertib, (2) sehat dimaksudkan bahwa kondisi di atas harus tercipta atas dasar berlakunya aturan yang disepakati secara nasional, dan (3) dinamis dimaksudkan bahwa dalam kondisi tersebut tetap berkembang kreativitas dan otonomitas masyarakat yang memungkinkan peningkatan produktivitas nasional.

Dalam bidang ekonomi, stabilitas juga mengandung arti tidak adanya fluktuasi, tidak adanya gangguan pada keadaan ekonomi yang menyatakan terhambatnya usaha pembangunan. Stabilitas ekonomi ini terutama dikaitkan dengan harga-harga sumberdaya yang lain. Harga-harga barang dan jasa yang lain secara umum dapat meningkat tetapi dapat juga menurun. Apabila harga-harga barang dan jasa secara umum menunjukkan kenaikan maka keadaan ekonomi negara itu dikatakan menderita penyakit inflasi, sedangkan jika harga-harga barang dan jasa secara umum menunjukkan penurunan maka keadaan ekonomi negara itu dikatakan menderita penyakit deflasi.

Dalam pembangunan bidang peternakan, utamanya perunggasan, pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pada setiap tahun dijumpai gejala harga dengan intensitas yang berbeda dan selalu menempatkan peternak pada posisi yang rawan. Menurut Soehadji (1992) siklus gejala ini dapat digambarkan pada Gambar 1.1.1.

Siklus gejala biasanya diawali dengan naiknya harga sarana produksi (siklus 1.a) dan sering diikuti dengan turunnya harga jual produk (siklus 1.b). Naiknya harga sarana produksi menyebabkan pendapatan peternak menurun sampai di bawah ambang batas titik impas (siklus 3). Turunnya pendapatan peternak yang berkepanjangan menyebabkan peternak menghentikan usahanya (siklus 4). Hal ini mengakibatkan permintaan DOC berkurang (siklus 2). Berkurangnya permintaan DOC menyebabkan supply (penawaran) produk (telur dan daging ayam)

menurun sehingga penawaran lebih rendah daripada permintaan (siklus 6). Terganggunya supply-demand meningkatkan harga jual produk (siklus 7), sehingga menarik minat peternak untuk berusaha kembali dan akibatnya permintaan DOC naik. Meningkatnya permintaan DOC menyebabkan harga DOC naik (siklus 8). Demikian siklus tersebut akan dapat selalu terulang kembali yang menyebabkan kestabilan perunggasan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi gejala perunggasan ini adalah pemangkasan produksi DOC di berbagai perusahaan pembibitan ayam ras dan pembatasan impor hasil peternakan.



Gambar 1.1.
Siklus gejala perunggasan

Pertumbuhan

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut

cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi mengandung arti bahwa laju pertumbuhan ekonomi dapat lebih tinggi daripada laju pertumbuhan penduduk, tetap memperhatikan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, dan tetap memperhatikan pembangunan bidang-bidang lainnya. Pertumbuhan ekonomi diukur dari produktivitas masyarakat atau produktivitas suatu negara setiap tahunnya. Dalam bahasa teknis ekonomisnya, produktivitas diukur oleh Produk Nasional Bruto (PNB) dan Produk Domestik Bruto (PDB). Karena PNB dan PDB mengukur hasil keseluruhan dari sebuah negara, padahal besar negara (jumlah penduduknya) berlainan, untuk bisa membandingkan, dipakai ukuran PNB/kapita atau PDB/kapita.

Pertumbuhan biasanya berkaitan dengan modernisasi. Adanya kenaikan PNB karena adanya peranan teknologi tinggi dan alat padat modal modern menyebabkan hasil produksi sektor modern ini dapat diekspor dan bersaing. Kebaikan yang lain, menurut Prayitno (1986), adalah meningkatkan produktivitas, penggunaan peralatan modern, peningkatan produk nasional, perkembangan teknologi dan adanya gerakan ekonomi yang dapat menyebabkan peningkatan pendapatan, perubahan struktur perekonomian dan perubahan perdagangan internasional.

Dalam kurun waktu PJPT I telah terjadi transformasi struktural perekonomian dengan pergeseran sektor primer (pertanian dan pertambangan) sebesar 56,3% (1969) menjadi 36,1% (1989) ke sektor sekunder (industri) yang meningkat dari 11,1% menjadi 24,5% dan sektor tersier (jasa) yang berkembang dari 32,6% menjadi 39,4%. Dengan transformasi struktural ini, pertumbuhan sektor pertanian menunjukkan trend penurunan yakni 4,0% (Pelita I - III), 3,8% (Pelita IV) dan 3,6% (Pelita V).

Pembangunan peternakan Pelita VI sasarannya ditetapkan berdasar parameter ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi nasional ditetapkan 6,2%, sektor pertanian 3,4% dan sub sektor peternakan 6,4%. Sasaran ekonomi ini meliputi pertumbuhan PDB peternakan, penyerapan tenaga kerja dan potensi ekspor impor. Selama Pelita VI, PDB peternakan diharapkan tumbuh sebesar 6,4% per tahun. Tingkat pertumbuhan ini dibandingkan pertumbuhan sektor pertanian dan sub sektor lain

dalam sektor pertanian lebih tinggi, tanaman pangan 2,5%, perikanan 5,2%, perkebunan 4,2% dan kehutanan 0,5% (Tabel 1.1.1).

Tabel 1.1.
Sasaran PDB sektor pertanian Pelita VI (Rp trilyun)

| No. | Sub sektor | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | r (%/th) |
|-----|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 1. | Tanaman Pangan | 26,59 (60,62) | 27,24 (60,04) | 27,91 (59,45) | 28,57 (58,80) | 29,18 (58,01) | 2,5 |
| 2. | Peternakan | 5,22 (11,91) | 5,55 (12,23) | 5,90 (12,56) | 6,27 (12,91) | 6,65 (13,23) | 6,4 |
| 3. | Perikanan | 3,39 (8,96) | 4,13 (9,10) | 4,34 (9,24) | 4,56 (9,39) | 4,90 (9,74) | 5,2 |
| 4. | Perkebunan | 8,12 (18,51) | 8,45 (18,62) | 8,80 (18,75) | 9,18 (18,90) | 9,56 (19,01) | 4,2 |
| 5. | Pertanian | 43,87 (100,0) | 45,36 (100,0) | 46,95 (100,0) | 48,59 (100,0) | 50,29 (100,0) | 3,4 |

Ket. : Angka dalam kurung menunjukkan pangsa (%)

Sumber : BPS (1993)

Selama Pelita VI sub sektor peternakan juga diharapkan menyerap tenaga kerja 454.000 orang dengan target pertambahan rata-rata per tahun 3,60%. Produktivitas kerja peternak diharapkan meningkat rata-rata 2,70% per tahun dan tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja 2,80% per tahun.

Kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia yang menekankan pada strategi pertumbuhan atau model produktivitas dengan mendasarkan pada akumulasi modal dan penggunaan teknologi yang mengutamakan pemakaian tenaga kerja trampil dipandang sebagai pendekatan yang paling efisien untuk meningkatkan output produksi. Kunci utama bagi pertumbuhan adalah akumulasi modal atau kapitalisasi, yang memperlancar peningkatan produksi dengan mempercepat pola-pola investasi. Masuknya investasi perusahaan dapat mendorong menuju industrialisasi peternakan. Oleh karenanya pemerintah mengizinkan masuknya investasi di subsektor peternakan. Kebijakan tersebut sama sekali tidak mematikan usaha peternakan

rakyat bahkan sebaliknya akan mendorong modernisasi menuju industrialisasi peternakan rakyat. Rencana investasi sub sektor peternakan periode 2001-2005 disajikan pada Tabel 1.1.2.

Tabel 1.2.
Rencana investasi subsektor peternakan 2001-2005

| Uraian | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Naik (%) |
|------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|
| I. Proyek PDB Rendah | | | | | | |
| 1. Milyar | 7.853,5 | 8.082,0 | 8.366,7 | 8.715,6 | 9.136,9 | 3,22 |
| 2. Pertumbuhan | 2,30 | 2,91 | 3,52 | 4,17 | 4,82 | 25,52 |
| II. Investasi (Rp juta) | | | | | | |
| 1. Sasaran rendah | 601,1 | 777,1 | 967,9 | 1.186,3 | -432,4 | 28,78 |
| 2. Sasaran tinggi | 742,5 | 950,0 | 1.195,6 | 1.465,5 | -769,4 | 28,78 |
| III. Tenaga Kerja (000 org) | | | | | | |
| 1. Kesempatan kerja | 3.197,9 | 3.255,1 | 3.316,4 | 3.382,2 | 3.453,3 | 1,84 |
| 2. Penambahan | 53,4 | 57,2 | 61,3 | 65,8 | 71,1 | 7,23 |
| I. Proyek PDB Tinggi | | | | | | |
| 1. Milyar | 8.565,8 | 8.891,0 | 9.346,9 | 9.934,2 | 10.568,8 | 4,34 |
| 2. Pertumbuhan | 2,16 | 3,80 | 5,13 | 6,28 | 6,39 | 36,21 |
| II. Investasi (Rp juta) | | | | | | |
| 1. Sasaran rendah | 614,7 | 1.105,7 | 1.550,0 | 1.996,9 | 2.157,4 | 40,62 |
| 2. Sasaran tinggi | 759,3 | 1.365,90 | 1.914,8 | 2.466,8 | 2.605,0 | 40,62 |
| III. Tenaga Kerja (000 org) | | | | | | |
| 1. Kesempatan kerja | 3.413,0 | 3.503,4 | 3.599,6 | 3.705,9 | 3.817,7 | 2,78 |
| 2. Penambahan | 92,7 | 90,4 | 96,2 | 106,3 | 111,9 | 3,54 |

Sumber : Ditjen Bina Produksi Peternakan (2001)

Pemerataan

Setelah melaksanakan pembangunan nasional selama 50 tahun, kebijakan ekonomi Indonesia mempunyai dampak besar. Pendapatan per kapita mengalami kenaikan pesat dari 200 US\$ pada awal orde Baru menjadi 1000 US\$ pada saat ini. Namun, ada kenyataan yang menarik dibalik peningkatan pendapatan per

kapita ini. Swasta yang dalam hal ini lapisan masyarakat menengah ke atas yang lebih banyak menikmati hasil pembangunan selama ini, sedangkan 25 juta yang lain masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki, atau yang diproduksi oleh sebuah bangsa tidak berarti bahwa kekayaan ini merata dimiliki oleh semua penduduknya. Bisa terjadi sebagian kecil orang di dalam negara tersebut memiliki kekayaan yang melimpah, sedangkan sebagian besar orang hidup dalam kemiskinan. Oleh karena itu, timbul keinginan untuk memasukkan aspek pemerataan dalam ukuran pembangunan.

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya mengandung arti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Tanah Air dan bahwa hasil-hasil pembangunan pun harus dirasakan oleh rakyat secara adil dan merata, dalam arti bahwa setiap warga negara harus menerima hasil pembangunan yang layak bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai darma baktinya kepada bangsa dan negara. Pemerataan secara sederhana diukur dengan melihat berapa persen pendapatan nasional diraih oleh 40% penduduk termiskin, berapa persen oleh 40% penduduk golongan menengah, dan berapa persen oleh 20% penduduk terkaya. Dalam ilmu ekonomi, bila 40% penduduk termiskin menerima kurang dari 12%, ketimpangan yang ada dianggap mencolok. Kalau 40% penduduk termiskin menerima antara 12% sampai 17%, ketimpangan dianggap sedang. Bila penerimaan golongan ini lebih dari 17% ketimpangan dianggap lumayan kecil (Budiman, 1995). Kalau terjadi ketimpangan yang luar biasa, misalnya 20% penduduk terkaya meraih lebih dari 50% PNB, sedangkan sisanya dibagi diantara 80% penduduknya, ketimpangan antara orang-orang kaya dan miskin dianggap besar.

Selama PJPT I PDB sub sektor peternakan secara relatif mengalami penurunan terhadap PDB nasional yaitu dari 2,54% menjadi 1,91%, meskipun pangsaanya terhadap pertanian mengalami kenaikan yaitu dari 6,0% menjadi 10,84%. Sumbangan PDB sub sektor peternakan terhadap pertanian dan nasional selama periode 2001-2004 tertera pada Tabel 1.1.3.

Meskipun industri peternakan hingga saat ini telah

1.2.

MODERNISASI AGRIBISNIS PETERNAKAN

berkembang pesat, dari sisi pelakunya 90% masih didominasi oleh usaha peternakan rakyat (Soehadji, 1993), sementara dari jumlah produksi dikuasai oleh perusahaan peternakan. Pada industri perunggasan, sekitar 7,5% dari pengusaha ayam petelur menguasai produksi sekitar 51,2%, sedangkan untuk ayam pedaging 14,6% pengusaha menguasai 50,5% produksi (Prawirokusumo, 1987).

Tabel 1.3
Sumbangan PDB Peternakan terhadap Pertanian dan Nasional
(Atas Dasar Harga Konstan, Milyar Rp)

| No. | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. PDB Nasional | 1.442.984,6 | 1.506.124,4 | 1.579.558,8 | 1.660.578,8 |
| 2. PDB Pertanian | 225.685,7 | 232.973,5 | 243.076,0 | 252.952,9 |
| 3. PDB Peternakan | 27.770,1 | 29.393,5 | 30.726,9 | 32.157,6 |
| 4. PDB Peternakan thd. Nasional (%) | 1,92 | 1,95 | 1,95 | 1,94 |
| 5. PDB Peternakan thd. Pertanian (%) | 12,30 | 12,62 | 12,64 | 12,71 |

Sumber : Statistik Peternakan 2005

Dari fakta-fakta di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional pada sub sektor peternakan sebesar itu (Tabel 1.1.3) sebagian besar dinikmati oleh pemilik perusahaan peternakan yang jumlahnya hanya 10% dari keseluruhan masyarakat peternakan. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi kesenjangan ini diantaranya adalah program IDT dengan usaha peternakan, pola PIR maupun kemitraan usaha, meskipun hasilnya belum memuaskan. ***

(Poultry Indonesia No. 204 Pebruari 1997)

Ketika Prof. Dr. Bungaran Saragih, M.Ec. pada 23 Agustus 2000 diangkat sebagai Menteri Pertanian dan Kehutanan pada Kabinet Presiden Gus Dur, dan dilanjutkan sebagai Menteri Pertanian Kabinet Presiden Megawati, ada secercah harapan agribisnis peternakan akan semakin berkembang. Mentan Saragih yang terkenal sebagai pakar agribisnis, menetapkan visi sistem pembangunan agribisnis sebagai penggerak ekonomi nasional.

Melalui visi tersebut pemerintah (Departemen Pertanian) akan membangun suatu sistem atau struktur agribisnis dari hulu sampai hilir dan jasa pendukung yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi. Menurut Mentan Saragih, agribisnis berdaya saing dicirikan antara lain, berorientasi pasar, meningkatkan pangsa pasar khususnya pasar internasional, mengandalkan produktivitas dan nilai tambah melalui pemanfaatan modal (*capital driven*), pemanfaatan inovasi teknologi (*innovation-driven*), serta kreativitas sumberdaya manusia (*skill-driven*).

Modernisasi sistem agribisnis bidang peternakan akan diwujudkan tahap demi tahap. Dalam rangka mengembangkan industri hilir akan dibangun industri perbibitan dan perbenihan (jagung dan kedelai) modern, yang kelak menjadi sumber pertumbuhan agribisnis di dalam negeri. Di sektor budidaya, selain mengupayakan peningkatan kualitas SDM peternakan juga dukungan fasilitas permodalan berupa kredit berbunga rendah. Menyusul kemudian, perlunya dikembangkan industri hilir dengan membangun infrastruktur pascapanen, seperti RPH, RPA, IPS, yang pada akhirnya menghasilkan produk-produk olahan dengan nilai tambah tinggi dan terbuka peluangnya sebagai komoditas ekspor. Dengan menempuh langkah-langkah tersebut secara simultan,

obsesi membangun dan modernisasi agribisnis peternakan akan dapat diwujudkan tidak lama lagi.

Setelah empat tahun Prof. Bungaran Saragih menjabat Mentan, masyarakat peternakan dapat menilai sudah sampai sejauh mana langkah-langkah modernisasi agribisnis peternakan berhasil dilaksanakan. Dari penilaian itu selanjutnya dapat disimpulkan, apakah modernisasi agribisnis itu sudah mendekati atau menjadi kenyataan, ataukah masih tetap sebagai impian.

Pertama, kepastian hukum bagi pelaku bisnis peternakan belum jelas. Upaya merevisi UU No. 6/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah dirintis sejak 1972 sampai sekarang belum selesai. Berbagai diskusi, seminar dan lokakarya yang banyak melibatkan stake-holders telah dilaksanakan dalam rangka penyempurnaan UU tersebut. Tahun 2003 saja sedikitnya telah berlangsung 19 kali pertemuan yang diakhiri pada penyelenggaraan "Seminar Pembahasan RUU tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Pengganti UU No. 6/1967" pada 7 Januari 2004. Namun demikian, sampai sekarang RUU tersebut belum juga disahkan sebagai UU. Bandingkan dengan UUD 1945 atau UU Pemilu yang secara periodik disempurnakan. Tanpa kepastian hukum yang kondusif, berakibat daya tarik investor pada bidang peternakan rendah. Bahkan, PT. Japfa Comfeed Indonesia (JCI) yang sudah puluhan tahun berinvestasi di bisnis peternakan di Indonesia pun mengancam akan hengkang ke Vietnam.

Kedua, di sektor hilir tampak tidak ada perubahan, sebagian besar masih bergantung impor. Impor telur dan DOC GPS (bibit ayam nenek) mencapai 100%. Impor bahan baku pakan seperti jagung, bungkil kedelai, pollard, dan tepung ikan mencapai 70%, serta bahan baku vaksin serta obat-obatan 95%. Sedangkan peralatan dan mesin-mesin pabriknya memiliki komponen impor 90%. Tahun 2003 impor jagung, kedelai, dan bungkil kedelai masing-masing sebesar 1,5-juta ton, 1,2-juta ton, dan 1,544-juta ton. Di negara yang konon *gemah ripah loh jinawi* (subur makmur) ini bahan baku pakan lokal yang memenuhi persyaratan teknis, tersedia sepanjang tahun dan terdistribusi dengan baik, ternyata tidak cukup tersedia.

Upaya menggenjot produksi bahan pakan pernah dilakukan oleh Mentan kabinet Presiden Habibie, Soleh Solahuddin, melalui

Gema Palagung 2001 (Gerakan Mandiri Padi, Kedelai, dan Jagung). Operasionalisasi Gema Palagung dilaksanakan melalui Proksidatani (Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani) dengan cara mengecor Rp. 8-triliun KUT memobilisasi 5.000 tenaga pendamping di 164 kabupaten di 13 provinsi. Keberhasilan program ini tampak dari peningkatan produksi pangan, peningkatan ekspor komoditas pangan, dan PDB sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif, sementara sektor-sektor yang lain pertumbuhannya negatif. Sayangnya, setelah Presiden Habibie dan Kabinetnya lengser, program-program pengembangan sektor pertanian tidak "bergema" lagi sampai sekarang.

Ketiga, sektor budidaya bahkan nyaris bangkrut. Peternakan sapi kereman pingsan akibat melimpahnya daging dan sapi impor. Peternak sapi perah resah karena susunya ditolak IPS. Peternak ayam ras mengenas akibat wabah flu burung. Dukungan fasilitas permodalan berupa kredit bunga rendah tidak ada. Kredit Ketahanan Pangan (KKP) dan Surat Utang Pemerintah (SUP) yang diupayakan Deptan tidak dlsalurkan plhak perbankan dengan berbagai alasan. Dana kompensasi kerugian wabah flu burung sebesar Rp. 74 miliar yang pernah dijanjikan juga belum diberikan. Anggaran Departemen Pertanian juga rendah, hanya sekitar Rp3-triliun (3% APBN), sehingga tentu saja tidak memadai untuk membiayai pembangunan sektor pertanian. Sebagai perbandingan, di negara-negara ASEAN lainnya, anggaran pembangunan pertanian rata-rata mencapai 15% dari anggaran negara. Di Thailand terdapat bank pertanian yang melayani masyarakat pertanian, sementara di Indonesia perbankan masih menghindari kredit pertanian.

Keempat, di sektor pemasaran, produk peternakan impor baik legal maupun ilegal semakin membanjiri pasar lokal. Kompas (19 Mei 2004) melaporkan ratusan ton daging ilegal dari tiga negara, yaitu India, Brasil, dan Argentina, masuk ke Indonesia, dan hampir setiap hari sekitar dua juta butir telur diselundupkan dari Malaysia ke Sumatera dan Kalimantan tanpa ada upaya penghentian. Selain merusak harga, masuknya daging dan telur ilegal dikhawatirkan turut membawa penyakit.

Sementara itu, sampai sekarang peternak ayam petelur Jawa Timur masih dilarang memperdagangkan produksi telurnya keluar

pulau dalam upaya mencegah penyebaran flu burung ke daerah lain. Meskipun wabah flu burung sudah mereda, larangan tersebut sampai saat ini masih diterapkan, sehingga pasokan telur di Jatim melimpah dan harganya jatuh. Aturan tersebut jelas sangat merugikan peternak ayam Jatim karena selama ini sebanyak 285 ton (30%) dari total produksi telur Jatim yang mencapai 950 ton/hari dipasarkan ke Kawasan Timur Indonesia setiap harinya (Kompas, 21 April 2004).

Kelima, tidak tampak SDM kreatif yang mampu menghasilkan inovasi teknologi peternakan. Vaksin flu burung saja impor dari Cina padahal Deptan memiliki banyak lembaga litbang. Lembaga litbang yang seharusnya secara intensif melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ternyata “sulit berkembang”. Di perguruan tinggi juga banyak doktor dan guru besar peternakan, di Litbang Deptan juga banyak Ahli Peneliti Utama (APU) bidang peternakan, tetapi mereka belum menghasilkan produk nyata yang bisa dimanfaatkan masyarakat peternakan. Fakta demikian semakin memperkuat bukti bahwa SDM Indonesia memang berkualitas rendah. Peringkat Indeks Pembangunan Manusia (PM) Indonesia 2003 merosot pada urutan 112 dari 175 negara yang berarti 3 tingkat di bawah Vietnam yang berada pada urutan 109.

Dalam penggunaan teknologi, menurut Menristek Hatta Radjasa, Indonesia menempati peringkat ke 43 dari 46 negara dalam *Achievement Technology Index* (Indeks Pencapaian Teknologi). Dengan peringkat ini, Indonesia dikategorikan sebagai *adopter country*, atau negara yang masih dalam taraf menggunakan teknologi yang diadopsi dari karya bangsa lain. Penemuan teknologi dalam wujud hasil produksi sendiri yang dapat diterapkan dalam kehidupan masih sangat rendah. Kalau peringkat Indonesia melorot menjadi 44, maka Indonesia akan disebut sebagai *isolated country*, atau negara yang terisolasi. Kata lainnya, Indonesia dianggap terkungkung karena tidak mampu menghasilkan produk dengan teknologi sendiri karena bisanya hanya menjadi pengguna.

Atas dasar kelima bukti tersebut dapat disimpulkan, moderhisasi agribisnis peternakan ternyata masih jadi impian yang jauh dari kenyataan. Pengalaman membuktikan bahwa departemen teknis akan lebih maju jika dipimpin oleh praktisi profesional, bukan oleh akademisi dari perguruan tinggi. Karena itu, siapapun

presiden mendatang, masyarakat peternakan perlu mengusulkan agar Menteri Pertanian mendatang dijabat oleh praktisi profesional yang peduli terhadap perbaikan nasib peternakan dan segenap pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. ***

(Trobos Juli 2004)

1.3.

TAHUN KEBANGKITAN PETERNAKAN

Tanggal 26 Agustus telah ditetapkan sebagai Hari Kelahiran Peternakan dan Kesehatan Hewan yang akan diperingati setiap tahun, dan tahun 2003 yang lalu dicanangkan secara nasional sebagai Tahun Kebangkitan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Indonesia. Melalui kedua momentum tersebut, diharapkan seluruh pelaku usaha (*stakeholders*) di bidang peternakan dan kesehatan hewan terus termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan produktivitas ternak beserta produknya di Indonesia. Juga, diharapkan peternakan Indonesia dapat bangkit dengan sumberdaya lokal dan inovasi ilmu dan teknologi hasil karya para sarjana Indonesia.

Sayangnya, ternyata cita-cita luhur tersebut hanya sebatas wacana tanpa realita, dan sekedar seremonial tahunan tanpa makna. Sejak hari kelahiran ditetapkan, dan tahun kebangkitan dicanangkan, peternakan Indonesia menghadapi berbagai persoalan demi persoalan yang tidak pernah terselesaikan. Akibatnya, perlahan namun pasti peternakan Indonesia tidak mengalami kebangkitan namun menuju kebangkrutan.

Pertama, pada pertengahan tahun 2003, bisnis sapi potong mengalami kelesuan. Melimpahnya pasokan sapi di pasaran menyebabkan harga jual sapi potong di tingkat peternak anjlok. Harga jual sapi hidup di tingkat peternak saat itu hanya sekitar Rp. 11.000 per kg, padahal beberapa bulan sebelumnya masih Rp. 14.500 per kg. Peternak merugi Rp. 500.000 sampai Rp. 700.000 setiap menjual satu ekor sapi, padahal dia sudah mengurus sapi selama berbulan-bulan.

Kelesuan bisnis sapi potong disebabkan melimpahnya imporsapi hidup dan daging yang lebih murah. Harga sapi hidup impor hanya 0,9 dollar AS per kg, sedangkan sapi lokal harganya

10,5 dollar AS per kg sapi hidup. Dampak melimpahnya impor sapi dan daging, harga karkas turun dari Rp. 25.000 menjadi Rp. 23.000 per kg. Demikian pula harga daging dari sekitar Rp. 37.000 menjadi Rp. 36.000 per kg.

Maraknya sapi dan daging impor tidak lepas dari politik perdagangan sapi Australia. Industri sapi potong Australia dengan populasi sekitar 27 juta ekor, setiap tahunnya memotong sekitar 4 juta ekor untuk ekspor daging dan 3 juta ekor bagi keperluan dalam negerinya, sedangkan yang diekspor dalam bentuk sapi hidup hanya sekitar 900 ribu ekor. Dari sejumlah tersebut, potensi pasar Australia tertuju ke Indonesia sekitar 300-400 ribu ekor, Timur Tengah dan Philipina masing-masing 100-200 ribu ekor, dan negara lainnya rata-rata kurang dari 100 ribu ekor.

Pada tahun 2002 Australia dilanda kekeringan luar biasa, sehingga peternak Australia harus menjual ternaknya secara besar-besaran dengan harga murah. Akibatnya, impor sapi Indonesia pada waktu itu juga meningkat sangat tajam menjadi 430 ribu ekor. Tahun 2003 harga sapi Australia anjlok karena pasar sapi Australia ke Timur Tengah terganggu perang Irak, dan berdampak melimpahnya sapi dan daging impor Indonesia dengan harga lebih murah daripada sapi lokal.

Kedua, sejak Agustus 2003 peternakan ayam ras Indonesia dilanda wabah penyakit "misterius", yang ketika itu diduga hanya tetelo (*New Castle Disease*, ND). Banyak ayam ras mati di kandang dan produksi telur menurun drastis. Negara importir daging ayam Indonesia mulai menghentikan impornya, karena mereka percaya bahwa wabah penyakit ayam di Indonesia bukanlah tetelo yang konon tidak cukup berbahaya bagi kesehatan manusia, melainkan flu burung yang bisa mencabut nyawa manusia. Padahal, ketika itu harga pakan juga semakin mahal, karena Indonesia menghentikan impor bahan pakan dari Amerika yang ketika itu dilanda penyakit sapi gila. Akibatnya, beberapa peternak terpaksa menjual lahan peternakannya.

Pada Januari 2004 diyakini bahwa penyakit misterius tersebut adalah flu burung (*avian influenza*), yang juga sedang mewabah di Asia. Data pemerintah menyebutkan sekitar 4,7 juta (data Pinsar mencapai 10 juta) ayam mati karena penyakit yang disebabkan virus mematikan tersebut. Akibatnya, investasi perunggasan sebesar

15 triliun dengan perputaran uang 600 triliun per tahun terancam hancur. Belum lagi dampak sosial ekonomi lanjutannya, seperti PHK, bangkrutnya 2 juta keluarga peternak, dan penurunan kualitas SDM akibat berkurangnya konsumsi protein hewani.

Di berbagai daerah pasokan daging dan telur ayam menurun, permintaan daging dan telur ayam juga menurun 40-70%. Pemberitaan media massa yang begitu gencar menyebabkan sebagian besar konsumen berhenti mengkonsumsi daging dan telur ayam karena takut terinfeksi virus flu burung, meskipun tidak satu pun orang Indonesia diketahui mati karena penyakit tersebut. Harga daging dan telur ayam pun anjlok. Jutaan peternak merugi dan terpaksa gulung tikar. Pemerintah memang berjanji memberikan ganti rugi kepada peternak kecil yang ayamnya mati. Namun, janji itu tidak terbukti setelah masyarakat melupakan penyakit flu burung seiring dengan datangnya penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Ketiga, ketika penanganan masalah flu burung belum selesai, perunggasan Indonesia dikejutkan oleh rencana relokasi PT. Japfa Comfeed Indonesia Terbuka (PT. JCI Tbk), salah satu investor perunggasan terbesar di Indonesia, ke Vietnam dan Myanmar. Alasannya, pemerintah dinilai semena-mena menuding pimpinan PT. JCI Tbk telah merugikan negara sebesar 841 milyar rupiah dengan cara melanggar harga dasar pakan ternak yang telah ditetapkan pemerintah pada tahun 1998. Saat itu, pemerintah menetapkan harga Rp. 1.200 per kg, dengan alasan sudah mensubsidi harga bahan baku. Padahal, pemerintah sendiri menegaskan harga dasar pakan ternak itu ke PT. JCI Tbk tanpa komitmen tertulis. PT. JCI Tbk tidak menjual pakan ternak dengan harga dasar yang telah ditetapkan pemerintah, karena membeli bahan baku tanpa subsidi. Jika rencana relokasi PT. JCI Tbk ke Vietnam dan Myanmar dilaksanakan, maka sekitar 14.000 karyawan akan kehilangan pekerjaan, ribuan peternak dan pedagang ayam akan kehilangan mata pencaharian, pasokan daging dan telur ayam akan berkurang, dan ekonomi perunggasan akan mengalami kemunduran.

Kemelut yang menimpa PT. JCI Tbk tersebut semakin mempertegas hasil survey yang diterbitkan sebuah lembaga penelitian yang berbasis di Hongkong, *Political and Economic Risk*

Consultancy (PERC) pada Maret 2002, bahwa Indonesia merupakan negara kedua termahal dan tidak nyaman bagi investor dan pengusaha untuk berbisnis, setelah India. Dari sisi tingkat responsivitas, Indonesia juga berada di urutan pertama pemerintah yang paling tidak tanggap terhadap keluhan-keluhan investor. Selain itu, Indonesia juga berada pada peringkat terburuk dalam hal risiko sistemik, risiko sosio-politik, dan variabel iklim investasi. Satu-satunya alasan mengapa Indonesia lebih baik posisinya dibanding India adalah karena pasarnya masih terbuka untuk impor.

Keempat, di wilayah Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu), salah satu sentra produksi susu nasional, saat ini peternak sapi perah juga terancam bangkrut. Pasalnya, PT. Nestle sebagai pasar monopsoni (pembeli utama) produksi susu peternak, memberlakukan kebijakan baru yaitu menurunkan kuota pembelian susu. Untuk Kota Batu misalnya, kuota dibatasi dari 22 ribu menjadi 16,8 ribu liter per hari. Padahal, produksi susu di wilayah ini tidak kurang dari 25 ribu liter per hari. Secara keseluruhan, di wilayah Malang Raya terdapat 22 KUD yang menampung susu peternak sekitar 160.000 liter susu per hari, dan sebagian besar (98%) dipasarkan ke PT. Nestle.

Kebijakan baru itu juga dibarengi dengan penurunan kadar bakteri susu dari lima juta menjadi tiga juta bakteri yang terkandung dalam setiap liter susu. Secara bertahap, PT. Nestle kabarnya juga akan terus menurunkan kadar bakteri susu sampai tidak boleh lebih dari satu juta. Jika kebijakan baru ini diberlakukan, maka tidak tertutup kemungkinan semua koperasi susu dan peternak sapi perah di Malang Raya akan gulung tikar. Sebab, dari seluruh peternak di Malang Raya ini tidak satu pun yang bisa menurunkan kadar bakteri susunya di bawah 3 juta, apalagi di bawah satu juta.

Berbagai persoalan yang dihadapi peternak, dan juga persoalan bangsa, datang silih berganti tiada henti, dan tak satu pun teratasi. Seorang teman penulis secara bercanda menawarkan sebuah "solusi" untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Untuk "menghilangkan" flu burung, datangkanlah DBD. Untuk "menghilangkan" DBD, datangkanlah banjir. Untuk "menghilangkan" banjir, laksanakanlah pemilu, dan seterusnya. Jika

persoalan-persoalan peternak sapi potong, ayam ras, dan sapi perah tersebut tidak teratasi dengan baik, maka pada 26 Agustus 2004 mendatang masyarakat peternakan akan memperingati hari ulang tahun kedua “Kelahiran Peternakan dan Kesehatan Hewan”, sekaligus pencanangan “Tahun Kebangkrutan Peternakan Indonesia!”.**

(Poultry Indonesia Mei 2004)

1.4. **SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PEMBANGUNAN PETERNAKAN INDONESIA**

Orang Jepang : sedikit kata, banyak karya; sedikit diskusi, banyak aksi

Orang Amerika : banyak kata, banyak karya; banyak diskusi, banyak aksi

Orang Indonesia : banyak kata, sedikit karya; banyak diskusi, sedikit aksi

Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat di segala bidang baik material maupun spiritual. Namun demikian, seringkali kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material. Sehingga, pembangunan seringkali hanya diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sebuah masyarakat di bidang ekonomi. Hal ini terjadi karena teori pembangunan masih sangat didominasi oleh para ahli ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah jumlah keseluruhan kekayaan yang dimiliki, atau yang diproduksi oleh sebuah masyarakat, bangsa atau negara setiap tahunnya.

Selain sumber daya alam, teknologi, dan modal, sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur pendukung utama dalam proses pembangunan. Bahkan, berbagai fakta membuktikan bahwa SDM berkualitas merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan. Pengalaman negara-negara industri baru (*new industrial countries*) seperti Korea Selatan dan Taiwan, dan negara-negara industri maju (*developed industrial countries*) seperti Singapura, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat,

yang sebagian adalah negara yang miskin sumber daya alam, menunjukkan bahwa pertumbuhan pembangunan bersumber pada produktivitas ekonomi masyarakat yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Seperti dikemukakan oleh **Djojonegoro** (1997) bahwa faktor yang paling menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa bukanlah kekayaan alam yang dipunyainya, melainkan kualitas SDM yang dimilikinya. Atas dasar kenyataan tersebut kemudian banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, menekankan pengembangan SDM sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan pembangunannya.

Kualitas SDM

Masalah utama berkaitan dengan kondisi SDM Indonesia saat ini adalah kualitas SDM yang terus merosot tingkatannya. Data tentang *Human Development Index (HDI)* yang disajikan oleh *United Nations for Development Program (UNDP)* menunjukkan bahwa peringkat kualitas SDM Indonesia tahun 2000 ini berada pada urutan 109. Jika tidak ada upaya perbaikan, situasi ini akan terus memburuk ke titik yang lebih rendah mengingat sejak tahun 1996 peringkat HDI Indonesia selalu mengalami penurunan. Terakhir pada tahun 1999, HDI Indonesia adalah 105, sementara tahun sebelumnya pada urutan 99. Peringkat HDI tahun 2000 ini satu tingkat lebih baik daripada Vietnam yang berada pada urutan 110, namun sangat jauh berbeda dengan negara ASEAN lainnya. HDI Singapura berada pada urutan 22, Brunei 25, Malaysia 56, serta Thailand 67, dan Philipina 77. Masalah tersebut tentu saja membutuhkan penanganan yang serius dan mendesak yang tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah semata, melainkan juga seluruh masyarakat Indonesia.

Menurut **World Bank** (1990) unsur terpenting dalam peningkatan kualitas SDM (*human resource development*) adalah pelatihan (*training*) dan pendidikan (*education*). Pelatihan adalah kegiatan untuk menambah kemampuan dan keahlian, sedangkan pendidikan dipandang tidak hanya meningkatkan keahlian dan ketrampilan (psikomotorik), melainkan juga dapat memperbaiki sikap (afektif) dan menambah pengetahuan (kognitif) sumber daya manusia, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas.

Produktivitas di satu pihak dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di lain pihak dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Kualitas, produktivitas, dan ketrampilan SDM yang terlibat dalam pembangunan pertanian umumnya dan peternakan khususnya relatif masih rendah. Untuk sub sektor peternakan tahun 1995 menunjukkan bahwa dari 2,82 juta orang tenaga kerja, sebanyak 24,2% ternyata tidak pernah mengenyam bangku sekolah, 32% tidak tamat SD, 33,4% tamat SD, 5,9% tamat SLTP, 3,8% tamat SMU, dan hanya 0,7% berpendidikan PT, sedangkan dari penyebarannya terlalu terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia 91,6% dan sisanya 8,04% di Kawasan Timur Indonesia (**Dirjennak**, 1997). Tingkat produktivitas tenaga kerja pertanian tahun 1998 sebesar 1,6 juta rupiah/orang/tahun, atau hanya 17% dibandingkan produktivitas tenaga kerja industri yang mencapai 9,5 juta rupiah/orang/tahun (**Badan Agribisnis**, 1999). Tingkat ketrampilan yang rendah dapat dilihat dari jumlah kelompok tani *pemula* yang masih mendominasi kelompok tani yang ada. Dari sekitar 55.000 kelompok tani ternak yang ada saat ini, 45% tergolong kelompok tani *pemula*, 35% lanjut, 15% *madya*, sedangkan kelompok tani *utama* baru 5%. Kondisi ini, menurut **Soehadji** (1994), masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu kelompok tani *pemula* dan *lanjut* diusahakan masing-masing 5% dan 20%, sedangkan kelompok tani *madya* dan *utama* masing-masing 50% dan 25%.

Pengembangan SDM sebenarnya tidak hanya sekadar meningkatkan kemampuannya saja, tetapi juga menyangkut pemanfaatan kemampuan manusia dalam pembangunan. Indonesia sebenarnya memiliki SDM peternakan potensial yang berkualitas yang dapat dioptimalkan peranannya dalam pembangunan agribisnis peternakan. Mereka adalah para sarjana peternakan dan dokter hewan, master, doktor, Guru Besar (Professor) dan Ahli Peneliti yang banyak tersebar di perguruan tinggi, lembaga birokrasi, dan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) pertanian.

Di Indonesia saat ini terdapat 40 Perguruan Tinggi Peternakan dan Kedokteran Hewan dengan alumni sekitar 4.000 sarjana muda, sarjana, master dan doktor setiap tahunnya. Masalahnya, sebagian besar mereka tidak siap mental untuk

berkarya sebagai praktisi langsung di bidang keilmuannya. Sebagai contoh, data survey alumni Faperta IPB 1992 mengungkapkan bahwa hanya 3% alumni yang mau berwirausaha, itupun 20% diantaranya di luar bidang pertanian (Manuwoto, 1996). Tuntutan pasar kerja telah membuat banyak sarjana pertanian maupun peternakan terpaksa tidak bekerja pada bidang yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ditempuhnya dalam waktu selama 5 tahun berkuliah. Keterbatasan sektor riil dalam menyerap tenaga kerja yang semakin membesar, dan PHK pekerja yang dilakukan banyak perusahaan sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan telah berperan dalam menggelembungkan jumlah pengangguran sarjana di Indonesia. Dari sejumlah 38,5 juta penganggur di Indonesia tahun 2000 ini, sebanyak 1,95 juta adalah penganggur dari kelompok perguruan tinggi (Irianto, 2000). Jumlah ini meningkat sekitar 500 ribu orang setiap tahun, karena dari 615.000 orang lulusan perguruan tinggi hanya 115.000 orang yang terserap di lapangan kerja. Rendahnya minat sarjana berwirausaha dan ketergantungan mereka terhadap dunia kerja formal merupakan kegagalan dunia pendidikan tinggi dalam membentuk SDM yang memiliki kemandirian, seperti diamanatkan oleh UU 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selain itu, peningkatan jumlah pengangguran sarjana juga membuktikan bahwa peningkatan pendidikan tidak berarti peningkatan kualitas SDM, karena tingginya angka pengangguran menyebabkan produktivitas ekonomi nasional menjadi rendah.

Di lingkungan perguruan tinggi dan lembaga litbang pertanian, berkat usaha pengembangan staf yang cukup intensif dua puluh tahun terakhir jumlah dosen dan peneliti penyandang gelar S2 dan S3 maupun jabatan Guru Besar (Professor) dan Ahli Peneli Utama (APU) di lingkungan Ilmu Pertanian saat ini sudah mencapai melebihi 50%, dimana salah satu bentuk darma bakti mereka adalah penelitian. Sayangnya, penelitian-penelitian yang mereka hasilkan masih banyak yang tidak terkait dan sepadan (*link and match*) dengan kebutuhan praktisi dan industri. Akibatnya, selama 30 tahun pembangunan peternakan di Indonesia, praktisi dan industri peternakan Indonesia masih berperan sebagai “tukang jahit” atas sarana produksi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) impor, bukan sebagai “desainer” atas kekayaan alam yang

melimpah, dan iptek hasil karya putra-putri bangsa Indonesia. Jika akademisi dan peneliti tidak mampu mengadakan penyesuaian diri secara tepat waktu, maka akan terus terjadi terjadi kesenjangan (*mismatch*) dengan kehidupan sekitarnya. Kesenjangan ini terjadi karena akademisi dan peneliti dalam kesibukan kesehariannya lebih banyak membenahi dan memikirkan dirinya sendiri, atau terlampau banyak berorientasi pada gambaran diri ideal yang disusun berdasarkan parameter-parameter teoritis semata, serta kurang berorientasi pada kenyataan yang terdapat dalam masyarakat besar yang berada di sekitarnya. Untuk mengurangi kesenjangan ini, akademisi dan peneliti perlu mengenali kenyataan-kenyataan baru yang terdapat di masyarakat (industri dan praktisi), dan kemudian mengadakan perubahan-perubahan terhadap sistem yang ada berdasarkan tuntutan-tuntutan yang lahir dari kenyataan yang baru.

Tantangan Masa Depan

Pembangunan peternakan Indonesia mendatang akan memasuki dua era baru yaitu otonomi daerah sesuai amanat UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan perdagangan bebas internasional. Jiwa dan makna pelaksanaan UU 22/1999 adalah pemberian wewenang yang luas kepada daerah dalam pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya pembangunan di wilayahnya. Selanjutnya akan terjadi pemisahan kewenangan antara pemerintah (Pusat dan Daerah) dengan masyarakat. Dalam hal ini prinsip yang harus dipegang adalah bahwa hal-hal yang sudah dapat dikerjakan oleh masyarakat, pemerintah tidak perlu ikut campur tangan lagi. Menurut Dirjennak (1999) peran pemerintah dalam pembangunan peternakan mendatang hanya akan meliputi aspek pengaturan (*regulation*), pelayanan (*services*), penyuluhan (*extension*) dan penggerak pembangunan (*agent of development*), sedangkan peran masyarakat atau swasta adalah sebagai subyek atau pelaku pembangunan mulai bidang sarana produksi, budidaya, penampungan, pengolahan, sampai pemasaran.

Dalam tataran global, khususnya berkaitan dengan pemberlakuan perdagangan bebas, pembangunan peternakan akan terbebas dari segala bentuk proteksi sehingga tercipta akses pasar

yang lebih luas. Era globalisasi yang semakin meluas telah mengakibatkan batas-batas politik, ekonomi, dan sosial budaya antar bangsa menjadi semakin transparan. Dari perspektif ekonomi, globalisasi merupakan tantangan untuk dimanfaatkan secara optimal. Dengan demikian, pembangunan peternakan masa depan akan berada pada kondisi persaingan ganda, yaitu persaingan antar daerah dan persaingan antar negara. Kata kunci dalam menghadapi lingkungan ekonomi yang semakin bersaing adalah kemampuan daya saing (*competitiveness*). Bila peternakan Indonesia mampu bersaing, maka akan mampu meningkatkan pangsa pasarnya di pasar internasional disamping pasar domestik. Sebaliknya, bila peternakan Indonesia tidak mampu bersaing, maka akan terdesak baik di pasar domestik apalagi di pasar internasional.

Sebagai antisipasi terhadap tuntutan perkembangan dan perubahan-perubahan besar yang terjadi pada masa mendatang, dan dalam upaya mencapai peternakan yang berdaya saing, pembangunan peternakan diwujudkan melalui paradigma agribisnis. Pengertian agribisnis meliputi semua aktivitas sebagai suatu rangkaian sistem yang terdiri dari subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumber daya pertanian, subsistem produksi pertanian atau usaha tani, subsistem pengolahan hasil-hasil pertanian atau agroindustri, dan subsistem distribusi dan pemasaran hasil-hasil pertanian (Amang, 1994). Oleh karena sistem ini merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir, maka keberhasilan pengembangan agribisnis sangat tergantung pada kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai pada setiap simpul yang menjadi subsistemnya. Pengembangan agribisnis Indonesia mendatang diperkirakan akan berjalan lebih pesat setelah Prof. Bungaran Saragih, pakar ekonomi pertanian yang saat ini menjabat Menteri Pertanian, menetapkan modernisasi agribisnis sebagai lokomotif baru di bidang perekonomian. Menurutnya, agar dapat menjadi lokomotif perekonomian bangsa, agribisnis Indonesia harus secepat mungkin ditransformasi menjadi agribisnis yang digerakkan oleh modal dan tenaga kerja terampil atau yang biasa disebut sebagai *capital driven* (Poultry Indonesia, 2000).

Keberhasilan pembangunan agribisnis berbasis peternakan akan sangat ditentukan oleh keharmonisan kerjasama tim (*team-*

work) sumber daya manusia yang berada pada keseluruhan subsistem agribisnis dari hulu sampai hilir. Hasil studi mutakhir mengungkapkan bahwa ketidakefisienan, kelambatan perkembangan, dan kekurangmampuan beradaptasi dari suatu agribisnis banyak bersumber dari ketidakharmonisan kerjasama tim pada agribisnis itu sendiri (Saragih, 1998). Kunci keberhasilan mewujudkan suatu kerjasama tim yang harmonis pada agribisnis maka setiap SDM yang terlibat di dalamnya tidak cukup hanya memiliki wawasan mengenai bidang pekerjaannya sendiri (*on-job oriented*), melainkan juga harus memiliki wawasan pengetahuan mengenai bagaimana pekerjaan bidang lain dilaksanakan (*how to do each other's job*). Selain itu, setiap SDM yang terlibat dalam agribisnis peternakan juga perlu memiliki wawasan tentang kondisi dan perilaku makro (*macro behavior*) dan kondisi serta perilaku dunia secara global (*global behavior*). Dengan demikian, setiap SDM yang ada mampu memposisikan diri dan mengetahui konsekuensi dari pekerjaannya pada masing-masing tingkatan baik mikro, perusahaan, industri, makro, maupun internasional.

Kebijakan SDM

Otonomi khususnya dan globalisasi umumnya, menimbulkan persaingan yang semakin tajam terutama dalam bidang ekonomi dan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti dikemukakan oleh Norton dan Alwang (1993) bahwa dua faktor terpenting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah akumulasi capital (investasi) dan kemajuan teknologi. Dengan demikian, hanya bangsa yang unggul dalam bidang ekonomi dan penguasaan iptek yang akan dapat mengambil manfaat besar dari otonomi maupun globalisasi.

Untuk menyongsong era otonomi dan menghadapi perubahan-perubahan dunia, SDM Indonesia perlu diberdayakan (ditingkatkan kualitas dan pemanfaatannya). Berdasarkan pengalaman kondisi SDM di negara-negara ASEAN Chowdury *et al.* (1998) dalam Effendi (1993) berpendapat bahwa pemberdayaan SDM diarahkan dengan mengubah potensi (keunggulan komparatif) yang ada menjadi SDM aktual berdayaguna, yang mampu menyerap teknologi terapan (*applied technology*) dan

1.5. **MEMBANGUN DAYA SAING AGRIBISNIS PETERNAKAN**

menghasilkan barang dan jasa bernilai tambah (*value added*). Kebanyakan teknologi di negara berkembang termasuk Indonesia adalah teknologi impor. Agar kemampuan dalam negeri untuk menyerap teknologi memadai, perlu diadakan evaluasi tentang kondisi dan penggunaan teknologi yang ada. Dalam pengalihan teknologi, kebijakan perlu diarahkan agar pusat-pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM membantu atau mempermudah dalam proses transfer teknologi, dengan tetap mengembangkan teknologi setempat (*indigenous technology*). Selain itu, perlu tindakan nyata yang dapat mempengaruhi penanaman modal asing dan tindakan yang tepat untuk merumuskan strategi restrukturisasi perekonomian yang saat ini hancur akibat berbagai krisis di berbagai bidang kehidupan.

Tanpa kemampuan penguasaan iptek yang didukung permodalan yang cukup, bangsa Indonesia akan tetap menjadi konsumen, bukan produsen, dari berbagai produk teknologi, dengan daya saing yang rendah dalam persaingan global. Dengan ungkapan lain, Indonesia akan mengalami keterjajahan baru, yaitu menjadi obyek dari hegemoni teknologi negara-negara maju. ***

(Poultry Indonesia Desember 2000)

Agribisnis peternakan pada awal millenium ketiga menghadapi persaingan ganda, yaitu persaingan antara daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, dan persaingan antar negara sebagai konsekuensi kesepakatan liberalisasi perdagangan barang dan jasa internasional. Kata kunci dalam memenangkan persaingan tersebut adalah daya saing (*competitiveness*). Pada awalnya, daya saing suatu negara ditentukan oleh keunggulan mutlak (*absolute advantage*) atau keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimilikinya. Keunggulan mutlak menunjukkan kemampuan suatu negara menghasilkan barang/jasa yang mempunyai efisiensi lebih tinggi daripada negara lain (misalnya kekayaan alam yang melimpah), sedangkan keunggulan komparatif menunjukkan kemampuan suatu negara menghasilkan barang/jasa dengan harga yang relatif lebih rendah daripada negara lainnya. Dalam perkembangannya, daya saing lebih ditentukan oleh keunggulan bersaing (*competitive advantage*) yang diciptakan suatu negara, yaitu kemampuannya menghasilkan barang/jasa yang sesuai dengan preferensi konsumen.

Ada tiga kunci sebagai *prime determinant* (penentu utama) untuk dapat meningkatkan daya saing suatu negara. *Pertama*, produktivitas yang merupakan nilai output yang dihasilkan oleh suatu unit sumber daya yang digunakan. Dengan konsep pemasaran yang benar, maka produk yang dihasilkan dengan produktivitas tinggi akan menghasilkan *return on investment* (tingkat pengembalian investasi) yang tinggi, yang selanjutnya menarik investor untuk menanamkan modalnya lebih banyak. *Kedua*, inovasi (pembaharuan). Dengan inovasi dalam aspek luas akan menghasilkan produk baru, desain baru, proses produksi baru, pendekatan pemasaran baru, yang selanjutnya dapat meningkatkan

daya saing suatu negara. *Ketiga*, segmentasi (fokus). Tidak ada suatu negara yang mempunyai daya saing dalam semua industri (*No nation can be competitive in everything*). Karena itu, suatu negara harus berkonsentrasi pada salah satu industri yang mempunyai *core competence* (kompetensi inti).

Selain ketiga penentu utama tersebut di atas, suatu negara akan menunjukkan keunggulan bersaingnya apabila setiap individu atau unit sistemnya menjadi pendukung empat lambang keunggulan (*advantage attribute*) suatu negara sebagai syarat terjadinya *national advantage* (keunggulan nasional). Keempat lambang keunggulan yang oleh Michail E. Porter (1990) disebut "*The diamond of national advantage*" adalah (1) kondisi faktor produksi suatu negara, (2) kondisi permintaan domestik, (3) adanya industri pendukung, dan (4) kondisi persaingan domestik dan strategi serta struktur perusahaan.

Pengalaman negara-negara industri baru (*new industrial countries*) seperti Korea Selatan dan Taiwan, dan negara-negara industri maju (*developed industrial countries*) seperti Singapura, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat, yang sebagian adalah negara miskin sumber daya alamnya, menunjukkan bahwa kemajuan bangsa bersumber pada produktivitas ekonomi masyarakat yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Indonesia mempunyai kelemahan mendasar pada *syarat pertama* yaitu kondisi faktor produksi (*factor conditions*) untuk menjadi negara dengan daya saing tinggi jika hanya mengandalkan sumberdaya alam yang melimpah. Pengalaman membuktikan bahwa meskipun memiliki kekayaan alam melimpah Indonesia adalah importir netto sarana produksi peternakan baik bibit, bahan pakan maupun teknologinya. Bahkan, akhir-akhir ini pengusaha dan pemerintah sering mengambil jalan pintas dengan mengimpor hasil produksi seperti daging, susu, dan telur konsumsi, sehingga tidak saja melemahkan daya saing tetapi juga tidak menimbulkan semangat bersaing bagi pengusaha peternakan Indonesia.

Untuk menjadi bangsa yang kompetitif, kapasitas dan mutu sumber daya manusia (SDM) harus menjadi tumpuan. Masalahnya, kualitas SDM Indonesia terus merosot tingkatannya. Data tentang *Human Development Index (HDI)* yang disajikan oleh *United Nations for Development Program (UNDP)* menunjukkan bahwa peringkat

kualitas SDM Indonesia tahun 2000 berada pada urutan 109, tahun 1999 pada urutan 105, tahun 1998 pada urutan 99. Upaya perbaikan yang harus terus dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan sumber daya manusia terampil dan memiliki keahlian khusus (*skilled and specialized human resources*) melalui basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu sumber ekonomi penting yang tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan kemajuan teknologi dan tentu saja kualitas sumber daya manusia. Manfaat pendidikan dan pelatihan terhadap pertumbuhan ekonomi berasal dari perbaikan kualitas SDM, perbaikan kualitas manajemen, dan kontribusinya dalam menciptakan teknologi baru dan memperbaiki teknologi yang ada.

Syarat kedua suatu negara dapat menjadi kompetitif harus memiliki basis permintaan (*demand conditions*), karena dengan itu perusahaan atau industri dapat mengalahkan pesaingnya. Indonesia mempunyai pasar domestik yang besar karena jumlah penduduknya yang mencapai 210 juta, meskipun saat ini daya belinya masih rendah. Jika kondisi ekonomi semakin membaik, maka peningkatan pendapatan masyarakat akan mendorong permintaan pangan hewani (daging, susu, dan telur) yang semakin meningkat. Pasar domestik ini telah lama menjadi incaran pemasaran negara maju, karena itu dengan berbagai upaya mereka telah memaksakan pemberlakuan perdagangan bebas internasional agar mereka dengan mudah memasarkan produknya ke seluruh dunia tanpa hambatan. Jika kondisi pasar domestik yang demikian besar tidak dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka Indonesia akan mengalami keterjajahan baru yaitu menjadi obyek dari hegemoni ekonomi negara-negara maju.

Syarat ketiga merupakan peneguhan kekuatan bersaing suatu industri yaitu adanya industri pendukung dan terkait (*supporting and related industries*). Pengalaman Indonesia selama ini menunjukkan bahwa pengembangan agribisnis peternakan tidak disertai dengan industri pendukung dan terkait yang kuat (*foot loose industry*), seperti pembibitan, bahan pakan, dan teknologi produksi. Akibatnya, meski memiliki basis permintaan yang besar, agribisnis peternakan kurang kompetitif dalam bersaing dengan agribisnis peternakan luar negeri.

Menurut Prof. Bungaran Saragih, pakar ekonomi pertanian yang saat ini menjadi Menteri Pertanian, paradigma pembangunan peternakan yang mampu menciptakan daya saing global adalah paradigma pembangunan agribisnis berbasis peternakan. Menurut beliau, sistem agribisnis berbasis peternakan mencakup empat subsistem, yaitu (1) subsistem agribisnis hulu (*upstream agribusiness*) yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sapronak, (2) subsistem agribisnis budidaya (*on-farm agribusiness*) yakni kegiatan yang menggunakan sapronak untuk menghasilkan komoditas peternakan primer, (3) subsistem agribisnis hilir (*downstream agribusiness*) yakni kegiatan ekonomi yang mengolah komoditas peternakan primer menjadi produk olahan, dan (4) subsistem jasa penunjang (*supporting institution*) yaitu kegiatan ekonomi yang menyediakan jasa yang dibutuhkan ketiga subsistem yang lain. Dengan kekuasaan yang dimiliki saat ini, mudah-mudahan Mentan Bungaran Saragih mampu mewujudkan paradigma pembangunan agribisnis peternakan yang berdaya saing seperti yang selama ini selalu diucapkannya.

Syarat keempat yaitu kondisi persaingan domestik, sangat dipengaruhi oleh kesiapan SDM karena menyangkut gaya dan praktek manajemen, dan struktur dan persaingan usaha. Tidak ada satu praktek manajemen dan struktur usaha yang dapat berlaku untuk semua negara. Setiap negara memiliki keunggulan bersaing sendiri, khas, dan sesuai dengan struktur usaha dan kemampuan SDM-nya. Amerika lebih mengandalkan teknologi informasi, Jepang pada teknologi otomotif, Italia pada industri rumah tangga, Thailand pada industri pertanian, dan sebagainya. Semua keberhasilan tersebut berkat sistem pendidikan yang benar yang menghasilkan SDM berbakat, bertanggungjawab, tekun, dan bekerja keras. Akibatnya, industri dalam negeri mereka tumbuh dan saling berkompetisi di dalam maupun di luar negeri. Persaingan lokal (*local rivalry*) akan mendorong industri ke arah inovasi, efisiensi, perbaikan kualitas, serta selalu mendorong penciptaan produk dan teknologi baru. Hal inilah yang menjadi modal bersaing di tingkat global. Untuk mencapai kondisi demikian, persaingan yang bersifat monopoli dan oligopoli harus diubah menjadi kerjasama kemitraan yang saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan.

Untuk menjadi negara yang mempunyai daya saing di pasar

global khususnya dalam agribisnis peternakan baik ternak unggas, ternak potong, atau ternak perah, Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan basis sumber daya lokal seperti tercantum pada visi pembangunan peternakan yang dicanangkan oleh Ditjen Peternakan sekarang, namun lebih dari itu harus dapat mengadopsi empat lambang keunggulan "*the diamond of national advantage*" tersebut. Tanpa itu semua, maka Indonesia akan bisa menjadi negara tanpa kompetitif apapun, atau "*A nation that be competitive in nothing*".***

(Infovet Edisi Mei 2001)

1.6.

PEMBANGUNAN AGRIBISNIS PETERNAKAN BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL

Pembangunan agribisnis peternakan pada awal millenium ketiga menghadapi tantangan yang tidak ringan, yaitu persaingan antara daerah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, dan persaingan antar negara sebagai konsekuensi kesepakatan liberalisasi perdagangan barang dan jasa internasional. Menghadapi permasalahan tersebut, paradigma pembangunan peternakan ditempuh dengan visi baru yaitu “*Terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif serta kreatif melalui pembangunan peternakan tangguh berbasis sumber daya lokal*”. Visi serupa juga pernah dikemukakan pada masa Dirjen Peternakan sebelumnya yaitu “*Menciptakan peternakan yang maju, efisien dan tangguh sebagai prasyarat lepas landas*”. Dari kedua visi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan **sumber daya lokal** merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) dalam upaya mewujudkan ketangguhan pembangunan agribisnis peternakan.

Dari empat sumber daya utama dalam proses pembangunan yaitu manusia, modal, teknologi, dan alam, Indonesia hanya memiliki keunggulan mutlak (*absolute advantage*) dalam hal sumber daya alam, namun memiliki kelemahan dalam tiga sumber daya yang lain. Dengan mempertimbangkan kelemahan yang lain, pembangunan agribisnis peternakan pada masa mendatang sedikitnya menghadapi empat kendala yaitu : (1) kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, (2) penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta modal yang lemah, (3) kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan berkelanjutan, dan (4) pelaku agribisnis yang rasional.

Kualitas SDM

Pengalaman negara-negara industri baru (*new industrial countries*) seperti Korea Selatan dan Taiwan, dan negara-negara industri maju (*developed industrial countries*) seperti Singapura, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat, yang sebagian adalah negara miskin sumber daya alamnya, membuktikan bahwa kunci pertama dan paling utama yang menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa bukanlah kekayaan alam yang dipunyainya, melainkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimilikinya. Atas dasar kenyataan tersebut kemudian banyak negara berkembang (*developing countries*), termasuk Indonesia, menekankan pengembangan SDM sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan tujuan-tujuan pembangunannya.

Data tentang *Human Development Index (HDI)* yang disajikan oleh *United Nations for Development Program (UNDP)* menunjukkan bahwa peringkat kualitas SDM Indonesia sejak tahun 1996 selalu mengalami penurunan. Peringkat HDI tahun 2000 ini berada pada urutan 109, satu tingkat lebih baik daripada Vietnam yang berada pada urutan 110, namun sangat jauh berbeda dengan negara ASEAN lainnya. HDI Singapura berada pada urutan 22, Brunei 25, Malaysia 56, Thailand 67, dan Philipina 77. Sebelumnya, HDI Indonesia pada tahun 1999 adalah 105, sementara tahun 1998 pada urutan 99.

Kualitas, produktivitas, dan ketrampilan SDM yang terlibat dalam pembangunan pertanian umumnya dan peternakan khususnya relatif masih rendah. Untuk sub sektor peternakan tahun 1995 menunjukkan bahwa dari 2,82 juta orang tenaga kerja, sebanyak 24,2% ternyata tidak pernah mengenyam bangku sekolah, 32% tidak tamat SD, 33,4% tamat SD, 5,9% tamat SLTP, 3,8% tamat SMU, dan hanya 0,7% berpendidikan PT. Tingkat produktivitas tenaga kerja pertanian tahun 1998 sebesar 1,6 juta rupiah/orang/tahun, atau hanya 17% dibandingkan produktivitas tenaga kerja industri yang telah mencapai 9,5 juta rupiah/orang/tahun. Tingkat ketrampilan yang rendah dapat dilihat dari jumlah kelompok tani *pemula* yang masih mendominasi kelompok tani yang ada. Dari sekitar 55.000 kelompok tani ternak yang ada saat ini, 45% tergolong kelompok tani *pemula*, 35% *lanjut*, 15% *madya*, sedangkan kelompok

tani *utama* baru 5%. Kondisi ini masih jauh dari target yang ingin dicapai yaitu kelompok tani *pemula* dan *lanjut* diusahakan masing-masing 5% dan 20%, sedangkan kelompok tani *madya* dan *utama* masing-masing 50% dan 25%.

Sementara itu, SDM peternakan potensial yang berkualitas, seperti peneliti dan akademisi, belum berperan secara optimal dalam pembangunan peternakan. Penelitian-penelitian yang dilakukan lembaga penelitian maupun perguruan tinggi tidak komprehensif dari sisi teknis, ekonomis, maupun sosial, sehingga hasilnya tidak layak secara ekonomi untuk diadopsi oleh sektor industri dan praktisi. Banyak sekali hasil penelitian yang hanya berupa laporan penelitian yang hanya bermanfaat sebagai angka kredit bagi kepentingan kenaikan pangkat dan jabatan para peneliti maupun akademisi, dan kurang bermanfaat bagi kepentingan pembangunan dan masyarakat. Demikian juga, kurikulum di perguruan tinggi dinilai tidak *link and match* (terkait dan sepadan) dengan kebutuhan lapangan, sehingga sarjana yang dihasilkan tidak siap bekerja sebagai praktisi di bidangnya.

Penguasaan Iptek dan Modal

Akumulasi kapital dan perkembangan teknologi telah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi terpenting di banyak negara pada beberapa tahun terakhir ini. Akumulasi kapital yang juga disebut investasi dapat meningkatkan penggunaan teknologi, sehingga dapat meningkatkan output atau produksi marjinal, yang selanjutnya dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Kemajuan teknologi merupakan hasil ilmu terapan (*applied science*) dan pengetahuan baru (*new knowledge*) yang berbasis keilmuan. Kemajuan teknologi baru dapat meningkatkan produksi melalui dengan cara meningkatkan skala spesialisasi (*scale of specialization*) dan meningkatkan efisiensi (*increases in efficiency*).

Indonesia dan negara-negara berkembang lain yang sebagian besar penduduknya hidup bergantung pada sektor pertanian, pada umumnya masih menghadapi masalah pangan. Kenyataan ini tidak disia-siakan oleh negara maju dengan mengekspor sarana produksi, teknologi, dan produksi pertaniannya ke negara-negara berkembang. Akibatnya, perkembangan sektor pertanian di negara-

negara berkembang sangat bergantung pada sarana produksi impor dari negara-negara industri maju dengan mengalahkan potensi sumberdaya alam lokal yang dimiliki sendiri.

Pengembangan agribisnis peternakan Indonesia selama tiga puluh tahun terakhir sebagian besar masih bergantung pada teknologi dan kapital impor. Hal ini dapat dilihat terutama pada sektor industri sarana produksi (pabrik pakan ternak, obat-obatan, dan pembibitan ayam), dan industri pengolahan (daging dan susu) yang banyak menggunakan teknologi dan modal dari luar negeri (PMA). Pada agribisnis ayam ras, meskipun impor ayam dan telur konsumsi mendekati 0%, namun impor telur dan DOC GPS (bibit ayam nenek) mencapai 100%. Sementara impor bahan baku pakan seperti jagung, pollard, dan tepung ikan mencapai 70%, bahan baku vaksin serta obat-obatan mencapai 95%, sedangkan peralatan dan mesin-mesin pabriknya memiliki komponen impor 90%. Demikian pula pada sektor penggemukan sapi dan pengolahan susu banyak menggunakan sapi bakalan, bibit sapi perah, dan bahan susu impor. Dengan demikian, selama 30 tahun pembangunan agribisnis peternakan di Indonesia, praktisi dan industri peternakan Indonesia masih berperan sebagai "*tukang jahit*" atas berbagai sarana produksi, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) peternakan impor, bukan sebagai "*designer*" (perancang) atas kekayaan alam yang melimpah, dan inovasi iptek hasil karya putra-putri bangsa Indonesia sendiri.

Selain menjual produksi dan teknologi, negara-negara maju juga menyediakan berbagai pinjaman dan bantuan dalam upaya meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani di negara berkembang. Bagi negara donor, pinjaman yang diberikan bukanlah bermotif sosial semata, tetapi memiliki muatan ekonomis yang diperhitungkan secara cermat. Bagi negara donor, pinjaman yang diberikan bukanlah bermotif sosial semata, tetapi memiliki muatan ekonomis yang diperhitungkan secara cermat. Menurut studi **Anderson dan Cohen** (1998) setiap peningkatan nilai produksi pertanian satu dolar di negara berkembang akan mendorong 73 sen dolar impor baru termasuk 24 sen dolar impor produk pertanian, dan setiap satu dolar pinjaman untuk investasi di sektor pertanian, berarti 29 sen dolar peningkatan impor negara berkembang termasuk 10 sen dolar impor produk pertanian.

Pengalaman Korea Selatan merupakan contoh nyata hubungan antara bantuan dengan impor pertanian. Sepanjang tahun 1950-an sampai 1980, negara ini merupakan resipien utama bantuan Amerika Serikat, termasuk bantuan pertanian. Sekarang, meskipun negara ini tidak menerima bantuan AS lagi, tetapi menjadi negara kelima terbesar pasar ekspor pertanian AS. Contoh lain, pada tahun 1970-an banyak petani AS menentang bantuan AS kepada Brasilia yang menjadikan negara ini sebagai kompetitor AS di pasar global. Tetapi, pada tahun 1997, Brasilia mengimpor produk pertanian AS senilai 500 juta US\$.

Tanpa disadari, selain bermanfaat dalam meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan masyarakat, introduksi berbagai bentuk teknologi dan kapital impor adalah merupakan upaya terencana yang dilakukan negara industri maju dalam melakukan kolonialisme baru melalui bidang politik dan ekonomi terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Konsistensi dan Keberlanjutan Program

Berbagai diskusi menyimpulkan bahwa kunci untuk mencapai ketangguhan agribisnis peternakan terletak pada kemampuan berswasembada pakan. Berbagai program pembangunan baik yang langsung maupun tidak langsung untuk mewujudkan swasembada pakan sudah banyak dilakukan. Namun berbagai program itu belum atau bahkan tidak mencapai sasaran karena tidak konsisten, tidak terpadu, dan tidak berlanjut pada setiap era pemerintahan. Ketidak-konsistenan kebijakan dapat dilihat pada saat pemerintah melaksanakan program peningkatan produksi pangan di satu sisi, di sisi lain pemerintah banyak mengimpor bahan pangan. Ketidakpaduan kebijakan dapat dilihat dari berbagai program yang dilaksanakan masing-masing departemen yang tidak saling mendukung program departemen lainnya. Ketidak-berlanjutan kebijakan dapat dilihat pelaksanaan program yang selalu berganti setiap ganti pemerintahan (Presiden dan Kabinetnya).

Pada era Orde Baru yang dipimpin **Presiden Soeharto** selama 32 tahun, dikenal program Bimas, Inmas, Insus, Supra Insus, dan lain-lainnya. Puncak keberhasilan berbagai program tersebut adalah

tercapainya swasembada beras pada tahun 1984, yang secara salah kaprah sering dikatakan swasembada pangan. Setelah itu, konsentrasi pembangunan bidang pertanian mulai dikurangi dan dialihkan ke sektor industri. Padahal, berbagai program untuk mencapai swasembada bahan pangan yang lain seperti jagung, kedelai, ternak, dan ikan belum tercapai. Sayangnya, industri yang dibangun bukan industri pertanian di pedesaan yang padat karya, melainkan industri manufaktur yang padat modal, berteknologi tinggi (*high-tech*), dan terkonsentrasi di perkotaan, serta mengandalkan bahan baku impor. Sementara sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup 80% penduduk dan menjadi ladang usaha 95% pengusaha Indonesia justru dikesampingkan. Dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997, industri-industri ini banyak yang bangkrut karena tidak mampu membeli bahan baku impor dengan dolar yang semakin mahal nilai tukarnya.

Pada era reformasi, **Presiden Habibie** menyadari pentingnya sektor pertanian (bukan industri pesawat terbang), baik untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi waktu itu, maupun untuk menghadapi gejolak perekonomian. Dalam upaya mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan pangan, Kabinet Reformasi Pembangunan melaksanakan tiga macam *crash program* yaitu Gema Palagung, 2001, Gema Protekan 2003 dan Gema Proteina 2003. Gema Palagung 2001 diharapkan menjadi jalan terobosan mencapai ketahanan pangan dan memulihkan swasembada beras, jagung, dan kedelai secara berkelanjutan. Operasionalisasi Gema Palagung dilaksanakan melalui Proksidatani (Program Aksi Pemberdayaan Masyarakat Tani) dengan cara mengecur 8 trilyun KUT, memobilisasi 5000 tenaga pendamping di 164 kabupaten di 13 propinsi. Keberhasilan program ini tampak dari peningkatan produksi pangan, peningkatan ekspor komoditas pangan, dan PDB sektor pertanian mengalami pertumbuhan positif, sementara sektor-sektor yang lain pertumbuhannya negatif. Sayangnya, keberhasilan program ini dicoreng oleh kemacetan KUT yang mencapai lebih dari 50% dari kredit yang telah disalurkan. Presiden Habibie dan Kabinetnya lengser setelah berkuasa hampir dua tahun, dan program-program pengembangan sektor pertanian pun tidak ber-"gema" lagi.

Presiden Abdurrahman Wahid yang melanjutkan Habibie

tampak kebingungan menentukan prioritas kebijakan untuk mengatasi krisis di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, sosial, maupun hankam. Pada awal masa kerjanya Kabinet Gus Dur sempat hampir mematikan sektor pertanian dengan tidak mampu menghentikan importasi berbagai komoditas pertanian, dan hanya menganggarkan 2,7 trilyun pengeluaran pembangunan untuk sektor pertanian dan kebutuhan pada RAPBN 2000 yang berarti hanya 59% dari RAPBN 1999/2000 sektor tersebut yang telah mencapai 4,6 trilyun rupiah. Akibatnya, performa pertumbuhan sektor pertanian selama triwulan pertama tahun 2000 mengalami kontraksi paling parah diantara lapangan usaha lain yaitu minus 8,49%, padahal pada triwulan yang sama tahun 1999 pertumbuhannya positif 5,24%. Bahkan, dalam dialog umum pada 21 Maret 2000 Presiden Gus Dur sempat melontarkan pokok pikiran agar petani beralih profesi saja dari kegiatan di sektor pertanian ke sektor industri. Karena, kata Gus Dur, "Negara agraris itu rata-rata negara miskin".

Menteri Pertanian Kabinet Gus Dur, **Dr. M. Prakosa**, mencoba menawarkan konsep pembangunan pertanian yang dikenal dengan "*corporate farming*" (usaha tani korporasi), yaitu upaya meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan dimana sekelompok petani sehamparan menyerahkan pengelolaan lahannya pada suatu lembaga agribisnis yang dipimpin oleh seorang manajer profesional dengan suatu perjanjian ekonomi tertentu, dimana petani sebagai pemegang saham sesuai dengan luas lahan yang dimiliki. Sebelum dilengserkan tanpa alasan jelas, Dr. M. Prakosa sempat mewariskan Proyek Pengembangan Ketahanan Pangan dengan menghibahkan dana 600 milyar kepada 15.000 kelompok tani di 167 kabupaten, yang diharapkan akan berkembang ke arah usaha tani korporasi.

Pengembangan agribisnis Indonesia selanjutnya diperkirakan akan berjalan lebih pesat setelah **Prof. Bungaran Saragih**, pakar ekonomi pertanian yang dikenal memiliki segudang teori dan konsep pembanguan agribisnis yang ditunjuk menjabat Menteri Pertanian menggantikan Dr. M. Prakosa, menetapkan **modernisasi agribisnis** sebagai lokomotif baru di bidang perekonomian. Menurutnya, agar dapat menjadi lokomotif perekonomian bangsa, agribisnis Indonesia harus secepat mungkin ditransformasi menjadi

agribisnis yang digerakkan oleh modal dan tenaga kerja terampil atau yang biasa disebut sebagai *capital driven*.. Ternyata, merealisasi cita-cita tidak semudah bermain kata-kata. Prof. Bungaran Saragih mengalami kesulitan mencari modal untuk memodernisasi agribisnis Indonesia. Karena, meskipun Kredit Ketahanan Pangan (KKP) telah disetujui banyak pihak, namun pihak perbankan tidak mau mengucurkan kredit itu dengan berbagai alasan klasik seperti risiko yang tinggi dan banyaknya tunggak kredit pertanian sebelumnya. Belum jelas program aksi apa yang akan diandalkan Prof. Bungaran Saragih untuk merealisasikan pemikiran-pemikiran idealnya selanjutnya. Pengalaman bongkar pasang Kabinet Gus Dur membuktikan bahwa seorang yang ahli teori, tidak merupakan jaminan dapat menjadi birokrat atau praktisi ahli pada saat tugas besar diamanahkan kepadanya.

Pelaku Agribisnis yang Rasional

Salah satu sifat dasar perilaku ekonomi adalah rasional, artinya bertindak atas dasar akal, dan mementingkan dirinya sendiri (*self interested*). Dengan sifat demikian, pelaku agribisnis peternakan Indonesia, baik produsen, pedagang, dan konsumen, selalu berusaha untuk memaksimalkan tujuan ekonominya (keuntungan, atau kepuasan) dengan cara mencari dan memperoleh sumber daya peternakan yang paling mudah, murah dan memuaskan. Sumber daya demikian banyak diperoleh dari komoditas peternakan impor baik sarana produksi, teknologi maupun hasil-hasil produksinya. Karena itu, pelaku agribisnis dan bahkan pemerintah banyak melakukan importasi berbagai komoditas peternakan, meskipun dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Bahkan, akhir-akhir ini komoditas yang diimpor tidak lagi sarana produksi, melainkan hasil produksi. Jika pada awalnya hanya mengimpor telur tetas, bibit ayam, bahan baku pakan, bahan baku susu, atau sapi bakalan, saat ini komoditas yang diimpor sudah dalam bentuk telur dan daging ayam konsumsi, susu kaleng, dan daging sapi. Akibatnya, peluang agribisnis peternakan semakin termarjinalisasi dan neraca ekspor impor komoditas peternakan selama ini pun selalu mengalami defisit, sehingga menjadikan Indonesia sebagai net importir komoditas peternakan. **Ditjennak** dan

Asohi (1999) mencatat bahwa pada tahun 1994 neraca ekspor impor mengalami defisit sebesar 492.799,40 ribu US\$, 660.892,90 ribu US\$ (1995), 601.835,00 ribu US\$ (1996), 514.629,10 ribu US\$ (1997), dan 237.933,60 ribu US\$ (1998).

Upaya mengurangi ketergantungan terhadap komoditas impor sekaligus untuk promosi ekspor dapat ditempuh dengan peningkatan investasi penelitian pertanian. Namun demikian, pemerintah dan sektor swasta Indonesia dan di banyak negara berkembang lainnya tidak mengalokasikan dana yang cukup untuk melakukan penelitian tentang pemanfaatan sumber daya alam yang dimiliki demi kesejahteraan bangsa dan negaranya sendiri. Menurut studi **Anderson** (1999), pemerintah negara-negara berkembang hanya menginvestasi kurang dari 0,5% dari nilai produksi pertaniannya untuk penelitian pertanian, dibandingkan dengan 2% di negara maju, meskipun secara umum penelitian pertanian memberikan tingkat pengembalian ekonomi (*rate of return*) per tahun yang tinggi. Evaluasi pada lebih dari 1000 proyek dan program penelitian pertanian menghasilkan tingkat pengembalian per tahun 88%. Investasi sektor swasta juga masih terbatas untuk penelitian pertanian meskipun profit yang ditawarkan cukup tinggi. Pendanaan penelitian swasta dapat memberi manfaat banyak bagi petani dan konsumen, seperti digambarkan oleh studi terbaru mengenai distribusi manfaat dari penggunaan transgenik di Amerika Serikat. Pemilik paten dan perusahaan benih swasta memperoleh sepertiga dari manfaat ekonomi, sedangkan petani dan konsumen memperoleh dua per tiganya. Sementara penelitian pertanian sektor swasta meningkat pesat di negara industri selama 10-15 tahun, penelitian pertanian serupa masih sedikit dilakukan di negara berkembang, dimana Indonesia termasuk di dalamnya.

Penutup

Dengan memperhatikan perilaku pelaku agribisnis Indonesia selama ini, baik aparat birokrasi, peneliti, akademisi, praktisi, maupun konsumen, tampaknya keempat kendala yang dipaparkan di atas akan semakin parah dan tidak teratasi, dan akan selalu menjadi bahaya laten yang mengancam kelangsungan pengembangan agribisnis peternakan dan pertanian Indonesia masa

depan. Pertanyaan besar yang perlu pemecahan mendesak adalah, "Mungkinkah mewujudkan agribisnis peternakan berbasis sumber daya lokal?" Jika ditanyakan pada "Perjalanan" Ebiet G.Ade, akan diperoleh jawaban, "Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang ...".***

(Poultry Indonesia Maret 2001)

1.7. **MASA DEPAN INDUSTRI PETERNAKAN**

The world is a global marketplace, dunia adalah sebuah pasar global. Barang, jasa, modal, tenaga kerja, teknologi, dan berbagai sumberdaya lainnya mengalir bebas seperti air menembus batas-batas negara, menggerakkan investasi, pembangunan, dan menciptakan kesejahteraan global. Tidak ada satu negara pun yang mampu melakukan isolasi diri dari perkembangan ekonomi dunia saat ini. Secara teoritis, sistem pasar global akan memberi keuntungan kepada seluruh masyarakat dunia. Namun, seperti halnya air yang hanya mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah, pada sistem pasar global barang dan jasa akan mengalir dari negara maju ke negara berkembang atau negara miskin, dan tentu saja memberikan keuntungan yang besar bagi negara maju.

Kecenderungan perubahan dunia yang ditandai dengan perdagangan bebas akan berpengaruh terhadap kelangsungan masa depan industri peternakan Indonesia. Dengan mencermati berbagai perkembangan pada industri peternakan di Tanah Air selama ini, dapat diduga bahwa sistem pasar global akan memberikan pengaruh negatif terhadap masa depan industri peternakan Indonesia.

Pertama, perkembangan industri peternakan Indonesia selama ini mengandalkan sumber daya impor, mulai bibit ternak, bahan pakan, teknologi, kapital sampai tenaga ahlinya. Defisit neraca ekspor impor komoditas peternakan Indonesia tahun 1994-1998 rata-rata mencapai lebih dari 500 juta US\$ per tahun (*Ditjennak dan ASOHI, 1999*), sementara realisasi investasi PMA sub sektor peternakan tahun 1998-1999 rata-rata mencapai 28 juta US\$ per tahun. Hasil riset *Japan External Trade Organization (JETRO)* menunjukkan bahwa alasan penanaman modal asing ke Indonesia adalah pasar dalam negeri (60,4%), tenaga kerja murah (61,4%),

kestabilan politik (38,6%), insentif (15,2%), dan infrastruktur (9,6%) (*Gatra, 17 Agustus 1996*). Dari hasil riset tersebut menjadi jelas mengapa pada saat krisis seperti sekarang ini banyak investor yang mengalihkan investasinya keluar Indonesia, yaitu karena stabilitas politik, insentif, dan infrastruktur tidak mendukung investasi, sementara jumlah penduduknya yang saat ini mencapai 210 juta merupakan pasar yang besar bagi berbagai komoditas. Dalam perkembangannya, investor dan pelaku pasar mengambil jalan pintas yang berisiko rendah dengan mengimpor langsung hasil produksi peternakan seperti daging, susu, dan telur dari luar negeri yang lebih berkualitas dan lebih murah untuk dipasarkan ke Indonesia. Akibatnya, persaingan usaha peternakan semakin ketat dan peluang usaha semakin sempit.

Kedua, kemampuan teknologi peternakan Indonesia masih bersifat *Operation Intensive (Group IV)* untuk peternakan rakyat yang ditandai dengan rendahnya pemanfaatan teknologi, dan *Skill Intensive (Group III)* untuk perusahaan peternakan yang ditandai dengan adanya adopsi teknologi impor dan perbaikan teknologi yang ada. Untuk meningkatkan daya saing perlu ada perubahan karakteristik industri menjadi *Technology Intensive (Group II)* yang ditandai diversifikasi dan perbaikan teknologi impor, dan bahkan sampai *Brain Intensive (Group I)* yang ditandai dinamisasi dan kreasi teknologi baru berdasar kemajuan ilmu pengetahuan. Berdasar pengalaman, tampaknya mustahil teknologi peternakan Indonesia bisa sampai pada *Brain Intensive Technology*. Lihat saja misalnya pengalaman 30 tahun membina peternakan rakyat sapi potong dan ayam buras yang ternyata hasilnya omong kosong, peternakan rakyat tetap tradisional, dan peternaknya tetap miskin, seperti dipaparkan **Dr. Yusmichad Yusdja** pada PI Maret 2001 yang lalu. Pengalaman lain adalah kegagalan alih teknologi pembibitan yang pernah dilakukan oleh PT Anputraco dengan bibit ayam Bromo-nya. Oleh karena tidak didukung tenaga ahli yang mampu melakukan perbaikan mutu genetik, akibatnya mutu ayam Bromo semakin menurun, tidak laku dijual, dan perusahaannya bubar. Pembibitan ayam merupakan bentuk teknologi *Brain Intensive (Padat Akal)* yang tidak dikuasai oleh para Profesor maupun Doktor peternakan Indonesia. Akibatnya, perkembangan industri peternakan ayam ras di Indonesia selamanya akan tergantung pada bibit ayam impor.

Ketiga, berdasarkan luas cakupan yang dikerjakan, industri peternakan Indonesia termasuk industri lisensi dan/atau industri relokasi, bukan industri mandiri. Industri mandiri adalah industri yang memiliki merek sendiri atas produk yang dihasilkan, melaksanakan seluruh kegiatan produksi yang dimulai dari kebutuhan produk oleh masyarakat sampai dengan penjualan produknya. Industri lisensi adalah industri yang melakukan kegiatan seperti pada industri mandiri, kecuali merek produk yang dijual masih menggunakan pemberi lisensi. Industri relokasi adalah jenis industri yang kegiatannya hanya melaksanakan proses produk saja sedangkan kegiatan lainnya dilakukan oleh industri prinsipalnya. Dilihat dari struktur nilai tambah yang dihasilkan, maka industri relokasi dan lisensi hanya memperoleh sebagian kecil dari total nilai tambah yang ada, sedangkan sebagian besar nilai tambah dinikmati oleh industri prinsipalnya. Industri mandiri dapat menikmati nilai tambah yang terbentuk dalam porsi yang paling besar.

Dengan melihat ketiga jenis industri tersebut di atas, maka sangat wajar jika jenis industri yang diinginkan untuk dikembangkan di suatu negara adalah industri mandiri. Untuk mewujudkan industri peternakan yang mandiri sebenarnya tidak harus berswasembada segalanya. Italia misalnya, adalah negara pengimpor bahan baku kaolin putih untuk keperluan industri keramik. Tetapi, Italia memiliki sumber daya manusia yang ditunjang bidang penelitian dan pengembangan (litbang) yang *highly specialized*, sehingga mampu menjadikan negara ini sebagai pelopor industri keramik tingkat dunia. Lagi-lagi, kuncinya adalah sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, Sayangnya, lembaga litbang peternakan Indonesia tidak didukung oleh SDM berkualitas sehingga menyebabkan industri peternakan pun menjadi *sulit berkembang*.

Keempat, era otonomi daerah yang salah arah. Pemberlakuan otonomi daerah pada hakekatnya adalah pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah untuk mengelola daerahnya sesuai potensi daerah yang dimiliki demi mencapai kesejahteraan masyarakat di daerah. Kesejahteraan masyarakat daerah seharusnya diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat sesuai sumberdaya yang

dimilikinya. Namun, yang terjadi adalah penarikan berbagai bentuk pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah, yang tentu saja sangat merugikan masyarakat di daerah. Sebagai contoh, menyusul Propinsi Lampung yang telah memungut retribusi ternak sejak 1 Agustus 2000, semua Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara juga sudah menetapkan Perda tentang retribusi peternakan (Laporan Utama PI Maret 2001). Lain lagi yang terjadi di Propinsi Jawa Timur. Sebagai propinsi yang menjadi salah satu sentra produksi sapi potong di Indonesia, seharusnya Pemprop Jatim menjadikan peternakan sapi potong sebagai salah satu andalan pembangunan daerahnya dengan cara memberdayakan peternak sapi potong di daerahnya. Namun, Pemprop Jatim justru menghamburkan dana untuk mengimpor sapi potong dari Australia yang tentu saja merugikan peternak sapi di Jawa Timur.

Keempat masalah yang dipaparkan di atas merupakan ancaman serius bagi perkembangan industri peternakan di Indonesia. Tidak ada penyakit yang tidak terobati, tetapi juga tidak ada obat yang mampu mengobati segala penyakit. Jika industri peternakan Indonesia ingin tetap dikembangkan, *pertama* tentu saja harus dipilih industri peternakan apa yang layak untuk diunggulkan. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang memiliki daya saing pada semua industrinya, *no nation can be competitive in everything*. Tetapi, jangan sampai Indonesia menjadi negara yang tidak memiliki daya kompetisi apapun, *a nation that be competitive in nothing*. *Kedua*, melaksanakan program aksi yang terencana, terkoordinasi, dan terpadu, karena hanya dengan perbuatanlah nasib industri peternakan akan berubah. Sayangnya, bidang peternakan bukanlah bidang yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga tidak cukup menarik bagi kalangan legislatif, eksekutif, maupun publik untuk memikirkan dan terlibat aktif dalam mengembangkan industri peternakan ini. ***

(Poultry Indonesia Mei 2001)

1.8.

PETERNAKAN SEBAGAI BASIS EKONOMI

Sektor pertanian masih merupakan sektor andalan perekonomian nasional. Terbukti dengan ditetapkannya program Revitalisasi Pertanian sebagai salah satu strategi pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin Presiden SBY. Sub sektor peternakan yang merupakan bagian sektor pertanian merupakan sub sektor strategis dalam menopang perekonomian regional maupun nasional. Pada tahun 2004 sub sektor peternakan menyumbang 12,71% terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) pertanian dan 1,94% terhadap PDB nasional.

Untuk mengetahui kemampuan sub sektor peternakan sebagai basis perekonomian suatu daerah dapat dilakukan analisis dengan metode *Location Quotient* (Budiharsono, 2001). Metode *Location Quotient* (LQ) merupakan perbandingan antara pangsa relatif pendapatan sektor *i* pada tingkat daerah terhadap pendapatan total daerah dengan pangsa relatif pendapatan sektor *i* pada tingkat nasional terhadap pendapatan nasional. Secara matematis penerapan metode LQ pada sub sektor peternakan dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$LQ = (v_i / v_t) / (V_i / V_t)$$

dimana: v_i = PDRB sub sektor peternakan propinsi

v_t = PDRB propinsi

V_i = PDB sub sektor peternakan nasional

V_t = PDB nasional

Apabila nilai $LQ > 1$, maka sub sektor peternakan merupakan sektor basis perekonomian, atau dengan kata lain suatu daerah potensial secara ekonomis untuk pengembangan sub sektor peternakan.. Apabila $LQ < 1$, maka sub sektor peternakan merupakan sektor non-basis, atau dengan kata lain suatu daerah kurang potensial secara ekonomis untuk pengembangan sub sektor

peternakan. Apabila $LQ = 1$, maka sub sektor peternakan mempunyai kekuatan seimbang dengan sub sektor atau sektor lain di suatu daerah.

Berdasarkan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 30 propinsi yang terdapat pada Statistik Peternakan 2005 diketahui bahwa nilai rata-rata LQ sub sektor peternakan di Indonesia sebesar 1,35 (Tabel 1). Ini berarti bahwa sub sektor peternakan merupakan sektor basis dalam perekonomian Indonesia. Pada Tabel 1 juga diketahui bahwa sebanyak 16 (53%) propinsi di Indonesia merupakan daerah basis sektor peternakan, 13 (43%) propinsi merupakan daerah non basis peternakan, dan 1 propinsi (Kalbar) merupakan daerah seimbang. Jika dilihat dari masing-masing pulau, Sumatera merupakan daerah basis peternakan kecuali Riau, Babel, dan Sumsel, Jawa merupakan daerah non basis peternakan kecuali Jateng, Bali dan Nusra merupakan daerah basis peternakan, Kalimantan merupakan daerah non basis peternakan kecuali Kalteng, Sulawesi merupakan daerah basis peternakan kecuali Sulsel, dan Maluku dan Papua merupakan daerah non basis peternakan.

Hasil analisis tersebut meyakinkan bahwa sub sektor peternakan perlu mendapat perhatian yang lebih serius baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para pelaku usaha, agar peranannya dalam menyediakan kesempatan kerja, bahan pangan, sumber devisa, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

(Poultry Indonesia, Oktober 2006)

Tabel 8.1
Perhitungan LQ 30 propinsi di Indonesia

| No | Propinsi | PDRB Peternakan | PDRB Propinsi | LQ | Keterangan |
|----|-----------------------|--------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 1 | NAD | 510,190 | 9.272,6 | 2,90 | Sektor Basis |
| 2 | Sumut | 729,124 | 25.925,4 | 1,48 | Sektor Basis |
| 3 | Sumbar | 180,710 | 8.505,6 | 1,12 | Sektor Basis |
| 4 | Riau | 95,061 | 23.544,9 | 0,21 | Non Basis |
| 5 | Jambi | 87,195 | 3.707,2 | 1,24 | Sektor Basis |
| 6 | Sumsel | 221,345 | 12.775,4 | 0,91 | Non Basis |
| 7 | Bengkulu | 55,570 | 1.892,9 | 1,55 | Sektor Basis |
| 8 | Lampung | 490,911 | 7.817,3 | 3,31 | Sektor Basis |
| 9 | Babel | 27,404 | 2.070,4 | 0,70 | Non Basis |
| | <i>Sumatera</i> | | | <i>1,49</i> | <i>Sektor Basis</i> |
| 10 | Banten | 379,141 | 18.246,3 | 1,10 | Sektor Basis |
| 11 | DKI Jakarta | 10,176 | 64.338,8 | 0,01 | Non Basis |
| 12 | Jabar | 717,557 | 60.594,2 | 0,62 | Non Basis |
| 13 | Jateng | 1.865,616 | 43.775,7 | 2,25 | Sektor Basis |
| 14 | DI Jogjakarta | 92,919 | 5.395,1 | 0,91 | Non Basis |
| 15 | Jatim | 968,273 | 60.754,1 | 0,84 | Non Basis |
| | <i>Jawa</i> | | | <i>0,95</i> | <i>Non Basis</i> |
| 16 | Bali | 388,606 | 8.021,7 | 2,56 | Sektor Basis |
| 17 | NTB | 165,158 | 4.950,9 | 1,76 | Sektor Basis |
| 18 | NTT | 287,274 | 3.287,9 | 4,61 | Sektor Basis |
| | <i>Bali + Nusra</i> | | | <i>2,98</i> | <i>Sektor Basis</i> |
| 19 | Kalbar | 142,741 | 7.559,2 | 1,00 | Seimbang |
| 20 | Kalteng | 93,917 | 4.341,4 | 1,14 | Sektor Basis |
| 21 | Kalsel | 84,530 | 6.920,4 | 0,64 | Non Basis |
| 22 | Kaltim | 232,208 | 24.622,5 | 0,50 | Non Basis |
| | <i>Kalimantan</i> | | | <i>0,82</i> | <i>Non Basis</i> |
| 23 | Sulut | 68,350 | 3.490,7 | 1,03 | Sektor Basis |
| 24 | Sulteng | 88,368 | 2.643,1 | 1,76 | Sektor Basis |
| 25 | Sulse | 113,119 | 11.093,0 | 0,54 | Non Basis |
| 26 | Sultra | 76,286 | 1.881,0 | 2,14 | Sektor Basis |
| 27 | Gorontalo | 33,619 | 1.030,2 | 1,72 | Sektor Basis |
| | <i>Sulawesi</i> | | | <i>1,44</i> | <i>Sektor Basis</i> |
| 28 | Maluku | 16,495 | 1.315,3 | 0,66 | Non Basis |
| 29 | Malut | 14,365 | 891,2 | 0,85 | Non Basis |
| 30 | Papua | 77,333 | 80.915,6 | 0,46 | Non Basis |
| | <i>Maluku + Papua</i> | | | <i>0,66</i> | <i>Non Basis</i> |
| | Indonesia | 8.331,561 | 439.580,0 | 1,35 | Sektor Basis |

Catatan : Data PDRB Propinsi 2002 Atas Dasar Harga Konstan (Rp Milyar)

1.9. BIOTERRORISME FLU BURUNG

Sejak kali pertama ditemukan di Indonesia pada 23 Agustus 2003 di Pekalongan (Jawa Tengah), sampai saat ini telah tercatat dua kali terjadi ledakan wabah flu burung (*Avian Influenza, AI*). Pertama, antara September 2003 sampai Januari 2004 wabah penyakit yang disebabkan virus AI subtype H5N1 ini telah menyebar di 62 kabupaten di 10 propinsi. Sebulan kemudian, pada Pebruari 2004 virus AI menyebar luas di 84 Kabupaten di 11 propinsi di Indonesia. Melalui berbagai tindakan penanggulangan yang serempak, seperti biosekuriti, vaksinasi, sanitasi, isolasi lokasi, pengawasan lalu lintas ternak, dan pemusnahan ayam (*stamping out*), pusat-pusat produksi perunggasan yang sebelumnya cukup parah terinfeksi virus AI berangsur-angsur mulai pulih. Pada April 2004 virus AI hanya ditemukan di 19 Kabupaten di lima propinsi, dan pada akhir Mei 2004 wabah AI dinyatakan sudah dapat terkendali dan tidak timbul kasus baru.

Kerumitan birokrasi dan penanganan wabah flu burung yang lambat ketika itu, telah menimbulkan kerugian besar pada agribisnis perunggasan nasional. Menurut data Departemen Pertanian, dengan populasi unggas 1,3 milyar ekor dan nilai investasi Rp 60 triliun, agribisnis perunggasan Indonesia mampu menggulirkan peredaran uang Rp 600 triliun per tahun, dan menjadi mata pencaharian bagi 15 juta penduduk. Akibat flu burung, sebanyak 9,4 juta ekor unggas mati dengan total kerugian diperkirakan lebih dari Rp 10 triliun. Wabah AI juga menyebabkan 1,25 juta orang kehilangan lapangan pekerjaan. Jika satu orang pekerja menghidupi 4 orang, maka sebanyak 5 juta orang ikut menderita akibat wabah AI ini.

Selain itu, pemberitaan media massa yang begitu gencar menyebabkan permintaan daging dan telur ayam menurun hingga

70%. Sebelum AI muncul, konsumsi telur berkisar 50-60 butir per kapita per tahun, dan daging 3,5-4,0 kg per kapita per tahun. Harga ayam potong di tingkat peternak juga anjlok setelah pengumuman resmi pemerintah tentang AI. Pada 11 Pebruari 2004, tercatat harga broiler mencapai titik terendah, turun dari Rp 7.100 per kg menjadi hanya Rp 2.500,- per kg. Padahal, biaya pokok produksi (*Break Even Point, BEP*) saat itu mencapai Rp 6.650,- per kg.

Wabah AI kali kedua terjadi antara Mei 2005 sampai awal 2006 sekarang ini dan menyebabkan kematian sekitar 1 juta ekor unggas. Bagi peternak ayam, beban terbesar bukanlah pada kematian ayamnya, melainkan merosotnya penjualan sebagai dampak gencarnya pemberitaan media massa, khususnya televisi, tentang serangan flu burung pada manusia. Gencarnya berita wabah flu burung akhir-akhir ini telah merosotkan omzet penjualan ternak ayam ras pedaging dan petelur hingga 40%. Meski demikian, dampak ekonominya terhadap peternak ayam tidak begitu besar. Peternak masih tertolong oleh cukup tingginya harga jual daging dan telur ayam dibandingkan dengan nilai BEP usaha peternakan ayamnya.

Berbeda dengan wabah AI periode 2003-2004 yang tidak menelan korban jiwa, wabah AI periode 2005-2006 ini telah merenggut 25 nyawa manusia. Untuk mencegah korban lebih banyak, pemerintah proaktif melakukan upaya pencegahan dengan membagikan vaksin flu burung dan memusnahkan unggas yang diduga terinfeksi dengan janji memberi uang kompensasi. Pemprop DKI Jakarta memberi kompensasi Rp 10.000 per ekor terhadap unggas yang dimusnahkan, sedangkan di Surabaya Rp 5.000 per ekor.

Kajian mengenai flu burung selama ini masih terbatas pada sudut pandang ilmiah dan ekonomi. Padahal, tidak tertutup kemungkinan penyakit ini juga berkaitan dengan bioterorisme, yaitu tindakan teror dengan menggunakan agen biologi untuk menyebarkan penyakit pada manusia, hewan, maupun tanaman. Aksi ini bervariasi, mulai dari penyebaran agen penyakit sampai kontaminasi pada produk makanan dan sumber air. Teror dengan agen biologi ini jauh lebih murah, mudah dan sangat efektif dibanding dengan senjata kimia atau konvensional. Bioterrorisme sangat efektif untuk membunuh secara massal, dimana dampak

yang terjadi setara dengan senjata nuklir dan senjata kimia. Sebagai pemusnah massal, agen biologi dapat menyebabkan kematian manusia dalam jumlah besar, bahkan dapat mencapai jutaan jiwa dalam satu serangan saja. Jika dibandingkan senjata kimia, apalagi nuklir, biaya untuk pembuatan agen biologi jauh lebih efisien dan murah. Tidak heran apabila para teroris kini mengembangkan agen biologi daripada nuklir dan kimia.

Indonesia ditengarai merupakan salah satu negara yang berada di bawah ancaman bahaya bioterorisme. Hal itu terkait dengan isu bioterorisme yang melanda di Amerika Serikat (AS) pasca ditabraknya gedung kembar WTC dan Pentagon pada 11 September 2001, yang diikuti teror penyebaran racun antraks dan kewaspadaan ekstra terhadap distribusi catering di seluruh wilayah negara itu. Meskipun AS sempat mengembangkan penelitian antraks dan toxin botulinum sebagai senjata biologi, namun pada 12 Juni 2002 AS akhirnya mengesahkan Undang-undang (UU) Antiterorisme Biologi alias Bioterrorism Act, sebagai upaya memproteksi warga negaranya dari ancaman bioterorisme.

Virus flu burung memang belum secara tegas dikelompokkan sebagai agen bioterorisme. Namun, dilihat dari cara penyebaran dan besarnya kerugian yang ditimbulkan bagi manusia, ternak, maupun ekonomi nasional, virus flu burung dapat disebut sebagai agen bioterorisme gaya baru. Tujuannya jelas, menghancurkan ekonomi perunggasan Indonesia, sedangkan motivasinya dapat diduga dari siapa dalangnya. Jika teror ini didalangi oleh pihak luar negeri, motivasinya adalah menghancurkan perunggasan Indonesia, yang selanjutnya menciptakan ketergantungan produk perunggasan dari negaranya. Jika didalangi oleh pihak dalam negeri, motivasinya adalah menghancurkan kepentingan negara kapitalis tertentu di negeri ini. Mereka tidak rela negaranya dijajah secara ekonomi oleh negara kapitalis, meskipun tindakan teror yang mereka lakukan juga berdampak negatif bagi bangsanya sendiri. Motivasi lain adalah mengalihkan perhatian publik dari berbagai persoalan politik yang tidak pernah selesai di negeri ini.

Tanpa disadari, bukan tidak mungkin kelompok tertentu dari dalam maupun luar negeri akan, sedang, atau sudah menebar bioterorisme di Indonesia. Teror bom yang dulu menjadi kemustahilan di Indonesia, kini juga biasa terjadi. Sebelum Indo-

nesia memiliki UU atau peraturan yang dapat melindungi warga negara dari ancaman ini, maka yang dapat dilakukan hanyalah selalu waspada.***

(Poultry Indonesia Mei 2005)

1.10. **PETERNAKAN PADA ERA OTONOMI DAERAH**

Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah menurut rencana akan diberlakukan mulai Mei 2001. Di antara isi UU 22/1999 yang juga dikena UU Otonomi Daerah (Otonoda), yang dianggap vital bagi pengembangan pertanian adalah masalah pembentukan dinas dan lembaga teknis lainnya di daerah. Kewenangan di bidang pertanian yang selama ini ditangani pemerintah pusat beralih menjadi kewenangan daerah otonomi kabupaten/kota. Artinya, organisasi kelembagaan di daerah tidak harus mengikuti kelembagaan pusat dan tidak perlu seragam pada setiap kabupaten/kota. Ada atau tidaknya dinas atau subdinas dalam organisasi kelembagaan pertanian di pemerintah kabupaten/kota sangat bergantung pada kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, dan pertimbangan lainnya.

Kelembagaan peternakan pada era otoda tampaknya akan mengalami degradasi. Sesuai dengan Surat Mentan No. OT.210/Mentan/IV/2000 tanggal 27 April 2000 perihal Penataan Kelembagaan Pertanian di Daerah Otonomi Kabupaten/Kota, bahwa Dinas Peternakan di Kabupaten/Kota disarankan untuk bergabung bersama Dinas Pertanian menjadi satu dinas saja, sehingga kedudukan Dinas Peternakan (Disnak) hanya akan menjadi Subdinas atau Seksi Peternakan dalam lembaga Dinas Pertanian. Di Propinsi Jawa Timur, yang merupakan salah satu sentra produksi peternakan nasional, keberadaan Dinas Peternakan juga direncanakan dilikuidasi sesuai surat Mentan menjadi Seksi Peternakan (Eselon IV). Degradasi kelembagaan peternakan di daerah otonomi sedikitnya disebabkan oleh dua hal. Pertama, dari sisi ekonomi, peranan peternakan terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan nasional masih sangat rendah, yaitu sekitar 3%. Kedua, peternakan meskipun memiliki nilai strategis tetapi tidak

bernilai politis, baik dari sisi komoditas maupun di tingkat legislatif. Meskipun komoditas peternakan dinilai sangat strategis dalam menyediakan pangan bergizi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, namun kelebihan dan kekurangan ketersediaan komoditas ini tidak berpengaruh nyata terhadap stabilitas sosial politik. Di tingkat legislatif, suara peternak tidak terwakili (tidak ada peternak yang menjadi anggota legislatif), sehingga wakil rakyat di lembaga legislatif pun tidak pernah membicarakan atau memperjuangkan kepentingan pembangunan peternakan.

Ada tidaknya Disnak di daerah otonomi kabupaten/kota memang tidak berpengaruh nyata terhadap kemajuan usaha peternakan. Karena, peran pemerintah dalam membangun peternakan pasca Bimas sudah mulai diserahkan atau diambil alih oleh swasta. Sejak saat itu, fungsi pemerintah mulai bergeser dari fungsi pembangunan (*development*) menjadi fungsi pengaturan (*regulatory*). Namun demikian, masalah yang dihadapi oleh masyarakat peternakan pada era otoda mendatang tampaknya justru semakin berat.

Pertama, usaha peternakan akan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebagai contoh, Pemda Lampung melalui Perda No. 6/2000 yang berlaku efektif sejak 1 Agustus 2000 telah melakukan pungutan retribusi ternak seperti DOC Rp. 25,-/ekor, ayam hidup Rp. 65,-/kg, telur Rp. 20,-/kg, sapi dan kerbau Rp. 20.000,-/ekor, kambing Rp. 2000/ekor, dan babi Rp. 30.000,-/ekor (PI Juli 2000). Jika setiap daerah mendirikan Pos Pemeriksaan Lalulintas Ternak (semacam pabean) yang memungut retribusi angkutan ternak di setiap perbatasan dengan daerah sekitarnya, maka fenomena ekonomi biaya tinggi akan terjadi pada usaha peternakan. Kedua, pemerintah pusat sudah membekukan berbagai peraturan yang melindungi usaha peternakan rakyat dari persaingan dengan perusahaan peternakan, dan yang melindungi usaha peternakan nasional dari persaingan dengan usaha peternakan internasional. Melalui Keppres 4/1998 tanggal 2 Pebruari 1998 pemerintah menghapuskan ketentuan tentang tataniaga susu, kewajiban serap susu lokal, pengendalian susu impor dan harga susu. Disusul dengan Keppres 99/1998 yang di antaranya membuka semua usaha peternakan untuk penanaman modal baik PMA maupun PMDN, kecuali ayam buras. Terakhir, melalui Keppres

85/2000 tanggal 23 Juni 2000 Presiden Gus Dur membekukan Keppres 22/1990 yang mengatur usaha peternakan ayam ras.

Dengan demikian, peraturan perundangan yang mengatur usaha peternakan saat ini hampir tidak ada, kecuali UU No. 6/1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yang sudah ketinggalan jaman. Persaingan usaha peternakan tentu saja akan semakin ketat, tidak saja antar peternak lokal, atau antara peternak besar dengan peternak kecil di dalam negeri, lebih dari itu adalah persaingan peternak tingkat internasional. Dapat diterka siapa yang akan memenangkan persaingan tersebut. Ketiga, pada era otoda, setiap daerah memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk berhubungan langsung dengan pasar internasional. Dengan demikian, bukan tidak mungkin pemerintah daerah akan mengimpor langsung kebutuhan hasil ternaknya (susu, telur, dan daging) karena harga yang lebih murah, dan kualitas yang lebih baik.

Mengakhiri tulisan ini, ada baiknya kita renungkan kembali pernyataan Presiden Gus Dur dalam dialog umum tanggal 21 Maret 2000 yang lalu di stasiun TVRI. Serius atau tidak, pada kesempatan tersebut Presiden Abdurrahman Wahid antara lain melontarkan pokok pikiran yang menyinggung masalah petani, yaitu agar petani alih profesi saja dari kegiatan di sektor pertanian ke sektor industri. Karena, kata Gus Dur, "Negara agraris itu rata-rata negara miskin". Tentu saja yang dimaksud pertanian di sini termasuk peternakan dan peternaknya. Ucapan Presiden ini sungguh merisaukan dan bisa menjadi sinyal bahwa nasib sektor pertanian dan peternakan, serta petani dan peternaknya belum atau bahkan tidak akan semakin baik pada era otoda. ***

(Poultry Indonesia Nopember 2000)

DAFTAR PUSTAKA

- 1.1. Sutawi. 1997. Trilogi Pembangunan Peternakan. Poultry Indonesia No. 204 Pebruari 1997.
- 1.2. Sutawi. 2004. Evaluasi Janji Kerja Mentan. Trobos Juli 2004.
- 1.3. Sutawi. 2004. Tahun Kebangkitan atau Kebangkrutan ?. Poultry Indonesia Mei 2004
- 1.4. Sutawi. 2000. Sumberdaya Manusia dan Tantangan Agribisnis Peternakan Masa Depan. Poultry Indonesia Desember 2000.
- 1.5. Sutawi. 2001. Membangun Daya Saing Agribisnis Peternakan. Infovet Edisi 082 Mei 2001.
- 1.6. Sutawi. 2001. Kendala Pembangunan Agribisnis Peternakan Berbasis Sumberdaya Lokal. Poultry Indonesia Maret 2001.
- 1.7. Sutawi. 2001. Tantangan Masa Depan Industri Peternakan. Poultry Indonesia Mei 2001.
- 1.8. Sutawi. 2006. Peternaka sebagai Basis Ekonomi. Poultry Indonesia Nopember 2006.
- 1.9. Sutawi. 2005. Bioterrorisme Flu Burung. Poultry Indonesia Mei 2005.
- 1.10. Sutawi. 2000. Era Otoda, Disnak Tiada, Peternak(an) Bagaimana ?. Poultry Indonesia Nopember 2000.

Bab II

EKONOMI PRODUKSI PETERNAKAN

2.1

TEORI PRODUKSI PETERNAKAN

Dalam ilmu pertanian, manajemen dapat berarti proses pengambilan keputusan tentang bagaimana mengalokasikan sumberdaya yang terbatas pada sejumlah alternatif produksi dalam mengorganisasikan dan mengoperasikan aktivitas bisnis sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan tertentu (Kay, 1981). Pada definisi tersebut terkandung maksud bahwa pada dasarnya prinsip manajemen adalah aktivitas pemecahan masalah (*problem solving*) dan pengambilan keputusan (*decision making*).

Tiga Masalah Produksi

Pada usaha peternakan, masalah manajemen dapat dibagi menjadi tiga tipe masalah, yang masing-masing dapat dinyatakan dalam sebuah pertanyaan. Pertama, *how much to produce* ? (berapa banyak yang diproduksi ?). Seorang peternak dihadapkan pada masalah seperti berapa ternak yang akan dipelihara, berapa pakan yang dibutuhkan, berapa luas kandang yang dibangun, berapa tenaga kerja dipekerjakan, peralatan apa yang dipasang, berapa modal yang harus tersedia dan sebagainya. Produksi yang dihasilkan dan keuntungan yang diperoleh tergantung pada masukan (input) yang digunakan.

Kedua, *how to produce* ? (bagaimana cara memproduksi ?). Berbagai usaha peternakan dapat dijalankan dengan beberapa cara. Ayam buras dapat dipelihara dengan sistem ekstensif, semi intensif atau intensif. Sapi potong dapat dipelihara dengan sistem ranc atau feedlot. Sapi perah dapat diusahakan dengan banyak alat sedikit pekerja atau sedikit alat banyak pekerja. Peternak harus memilih kombinasi input yang tepat yang meminimumkan biaya produksi untuk menghasilkan jumlah produksi tertentu.

Ketiga, *what to produce* ? (apa yang diproduksi ?). Masalah ini menyangkut pemilihan kombinasi produk yang akan diproduksi. Apakah ternak sapi potong saja, ayam pedaging saja atau kombinasi dua jenis ternak ? Peternak harus memilih antara berbagai alternatif kombinasi yang dapat menghasilkan keuntungan maksimum atau sesuai dengan tujuan usahanya.

Setiap keputusan produksi pada usaha peternakan akan berkaitan dengan salah satu atau kombinasi tiga masalah tersebut di atas. Selain itu, terdapat juga tiga masalah ekonomi yaitu tujuan yang akan dicapai, keterbatasan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan dan berbagai alternatif cara untuk menggunakan sumberdaya dalam upaya mencapai tujuan usahanya.

Fungsi produksi

Masalah manajemen *how much to produce* secara sederhana dapat dijawab dengan sebanyak mungkin. Tetapi, jawaban ini seringkali tidak tepat. Jawaban yang tepat atas pertanyaan berapa banyak yang diproduksi dapat dijelaskan dengan mengetahui hubungan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Keluaran dari suatu sistem produksi peternakan merupakan fungsi dari masukan yang digunakan dalam proses produksi. Tingkat keluaran bergantung pada faktor jumlah ternak, jumlah pakan, tenaga kerja, keahlian pengelolaan dan teknologi yang digunakan. Hubungan antara masukan dan keluaran biasanya mengacu pada fungsi produksi, dan sebagian besar ekonomi produksi berkenaan dengan metode untuk menentukan hubungan masukan-keluaran fisik ini, ditambah dengan unsur ekonomi serta menginterpretasikan perilaku produsen berdasarkan hasil itu. Karena itu, keluaran merupakan fungsi variabel dan tetap, yang secara matematis dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = f(X_1 | X_2, \dots, X_n)$$

dimana Y = keluaran, X_1 = masukan variabel, dan $X_2 \dots X_n$ adalah masukan-masukan tetap.

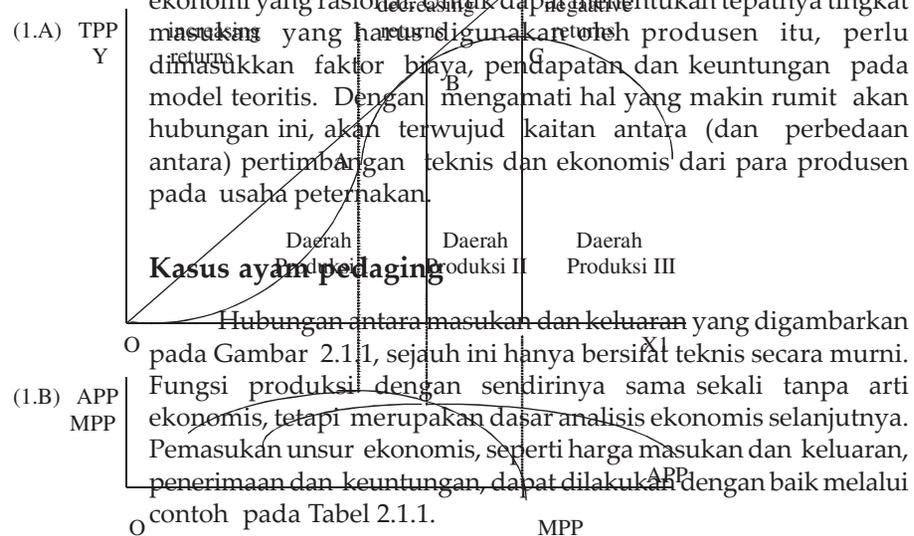
Pada usaha peternakan, keluaran Y (misalnya daging ayam) bergantung pada banyaknya masukan X_1 (misalnya pakan ternak) yang digunakan. Semua masukan lainnya, seperti tenaga kerja dan obat-obatan, dipertahankan secara konstan. Kalau masukan

variabel tambahan diberikan, produksi fisik total (*total physical produk, TPP*) seperti ditunjukkan pada kurva fungsi produksi (Gambar 2.1.1.A). Pertama-tama, fungsi produksi naik makin cepat (tambahan hasilnya meningkat, *increasing returns*), kemudian naik makin lambat (tambahan hasil menurun, *decreasing returns*), dan akhirnya dengan pemberian pakan yang berlebihan, fungsi produksi akan menurun (*negative returns*).

Selanjutnya, dari kurva produksi fisik total (TPP), dapat diturunkan kurva produksi fisik rata-rata (*average physical product, APP*) dan produksi fisik marjinal (*marginal physical product, MPP*), yang diperlukan untuk menentukan daerah rasional dari penggunaan masukan dan produksi untuk produsen peternakan. Hubungan-hubungan diantara ketiga kurva ini ditunjukkan pada Gambar 2.1.1.B.

APP = produksi fisik rata-rata
MPP = produksi fisik marjinal
X1 = faktor produksi (input) variabel
Sumber : Debertin (1986)

Titik A adalah akhir garis tambahan hasil yang meningkat (titik belok), karena itu merupakan titik maksimum MPP. Tetapi, produksi fisik rata-rata (APP) pada penggunaan masukan sebanyak ini, masih naik sehingga wajarlah bagi produsen meningkatkan penggunaan masukan variabel paling tidak sampai titik B, dimana APP berada pada titik maksimumnya. Karena itu, titik B menentukan batas antara Daerah Produksi I dan II, atau menentukan permulaan daerah produksi ekonomis yang rasional. Dengan menggunakan masukan variabel yang bertambah terus, akhirnya akan dicapai titik C dimana MPP mencapai nol, dan TPP mulai menurun. Melewati titik ini adalah Daerah Produksi III, suatu daerah produksi yang tidak rasional, karena keluaran yang sama dapat dicapai dengan tingkat penggunaan masukan dan biaya yang lebih rendah. Dengan demikian Daerah Produksi II dikenal sebagai daerah produksi ekonomi yang rasional. Untuk dapat menentukan tepatnya tingkat



Gambar 2.1.1.
Grafik fungsi produksi

Keterangan :
TPP = Y = produksi fisik total

masukan yang harus digunakan oleh produsen itu, perlu dimasukkan faktor biaya, pendapatan dan keuntungan pada model teoritis. Dengan mengamati hal yang makin rumit akan hubungan ini, akan terwujud kaitan antara (dan perbedaan antara) pertimbangan teknis dan ekonomis dari para produsen pada usaha peternakan.

Kasus ayam pedaging

Hubungan antara masukan dan keluaran yang digambarkan pada Gambar 2.1.1, sejauh ini hanya bersifat teknis secara murni. Fungsi produksi dengan sendirinya sama sekali tanpa arti ekonomis, tetapi merupakan dasar analisis ekonomis selanjutnya. Pemasukan unsur ekonomis, seperti harga masukan dan keluaran, penerimaan dan keuntungan, dapat dilakukan dengan baik melalui contoh pada Tabel 2.1.1.

Pada Tabel 2.1.1 diasumsikan seorang produsen (peternak) sedang menangani sistem produksi ayam pedaging, dimana ayam hidup (dalam gram) merupakan satu-satunya keluaran dan masukan variabel tunggalnya adalah makanan ternak (dalam gram). Semua masukan lain (tenaga kerja, obat-obatan, peralatan dan lain-lain) dianggap tetap. Harga pakan ternak (Px) dianggap konstan Rp 700,00/kg dan harga jual ayam hidup (Py) adalah Rp 2.400/kg. Diasumsikan pula bahwa harga keluaran tidak berubah dengan meningkatnya jumlah keluaran dari produsen. Produsen mengikuti harga pasar yang bersaing. Pertanyaan yang harus dijawab oleh peternak ayam adalah "Berapa pakan ternak harus digunakan untuk memaksimalkan keuntungan dari produksi ayam pedaging?"

Tabel 2.1.1.
Data hipotesis yang menunjukkan kaidah keuntungan maksimum pada peternakan ayam pedaging

| Minggu ke (X1) | Jumlah pakan (TPP) g | Bobot badan (APP) g | Produksi rata-rata (MPP) g | Produksi rata-rata marjinal (VMP) g | Nilai produksi marjinal (VMP) Rp | Biaya marjinal (Px) Rp | Total marjinal (TR) Rp | Total penerimaan (TC) Rp | Keuntungan biaya (TR - TC) Rp |
|----------------|----------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 | 120 | 127 | 1,058 | - | - | 700 | 304,80 | 84,00 | 220,00 |
| 2 | 390 | 315 | 0,808 | 0,696 | 1.671,11 | 700 | 756,00 | 273,00 | 483,00 |
| 3 | 765 | 545 | 0,712 | 0,613 | 1.472,00 | 700 | 1.308,00 | 535,50 | 772,50 |
| 4 | 1.305 | 845 | 0,648 | 0,556 | 1.333,33 | 700 | 2.028,00 | 913,50 | 1.114,50 |
| 5 | 2.025 | 1.190 | 0,588 | 0,479 | 1.150,00 | 700 | 2.856,00 | 1.417,50 | 1.438,50 |
| 6 | 2.890 | 1.545 | 0,535 | 0,410 | 985,00 | 700 | 3.708,00 | 2.023,00 | 1.685,00 |
| 7 | 3.910 | 1.909 | 0,488 | 0,357 | 856,47 | 700 | 4.581,60 | 2.737,00 | 1.844,60 |
| 8 | 4.960 | 2.225 | 0,449 | 0,301 | 722,29 | 700 | 5.340,00 | 3.472,00 | 1.868,00 *) |
| 9 | 6.100 | 2.545 | 0,417 | 0,281 | 673,68 | 700 | 6.108,00 | 4.270,00 | 1.838,00 |

Ket. : VMP = MPP x Py, Py = harga ayam hidup = Rp 2.400,00/kg

Px = harga masukan (pakan) = Rp 700,00/kg

*) Keuntungan (income over feed cost) maksimum tercapai.

Pada Tabel 2.1.1 diketahui bahwa keuntungan maksimum Rp 1.868,00 akan diterima jika peternak menggunakan pakan sebanyak 4,96 kg (pada minggu ke 8). Pada tingkat penggunaan masukan (pakan) yang lebih rendah (sebelum minggu ke 8), nilai produksi fisik marjinal (the value of the marginal physical product, VMP, atau penerimaan marjinal) yang diperoleh dari setiap

masukan yang ditambahkan adalah lebih besar daripada biaya marjinal (Px) atas masukan yang ditambahkan. Penggunaan pakan yang lebih banyak (setelah minggu ke 8), biaya marjinalnya akan lebih tinggi daripada penerimaan marjinal. Dengan kata lain, produsen harus tetap menambah masukan selama penerimaan tambahan yang diperoleh lebih tinggi daripada biaya tambahan.

Secara matematis, keuntungan akan maksimum bila VMP = Px (nilai produksi marjinal sama dengan harga masukan) karena VMP = MPP x Py (produksi marjinal dikalikan harga keluaran). Produsen juga dapat menentukan tingkat penggunaan masukan yang memaksimalkan keuntungan dengan menyamakan produksi fisik marjinal sama dengan perbandingan harga masukan/harga keluaran, MPP = Px/Py. Perlu diketahui bahwa keuntungan yang dimaksud dalam kasus ini adalah keuntungan atas biaya pakan (income over feed cost), bukan keuntungan riil yang diterima peternak. Untuk memperoleh keuntungan riil harus diperhitungkan biaya tetap seperti tenaga kerja, pembelian bibit ayam (DOC), obat-obatan, penyusutan peralatan dan sebagainya.

Dalam prakteknya tentu saja ada faktor pertimbangan lain yang mempengaruhi ketepatan analisis tersebut, sehingga tidak dianjurkan peternak memelihara ayam pedaging sampai umur delapan minggu. Misalnya, faktor risiko penyakit, selera konsumen yang lebih menyukai ayam bobot rendah, faktor fluktuasi harga pakan dan harga jual ayam, besarnya biaya tetap dan faktor ekonomi yang lain.

Kesimpulan

Ada tiga kesimpulan yang berhubungan dari kasus di atas, yaitu : (1) Memaksimalkan produksi tidak berarti memaksimalkan keuntungan. Pada contoh di atas, produksi maksimum dicapai pada penggunaan pakan 6,100 kg (minggu ke 9), tetapi keuntungan yang diperoleh hanya Rp 1.838,00 lebih rendah daripada Rp 1.868,00 yang diperoleh hanya dengan menggunakan pakan 4,960 kg (minggu ke 8). Karena itu keuntungan maksimum diperoleh di tingkat keluaran lebih rendah dan penggunaan masukan lebih rendah pula daripada tingkat masukan yang memaksimalkan produksi. (2) Patokan

pengambilan keputusan yang memaksimalkan keuntungan didasarkan pada prinsip-prinsip marjinal. Seorang produsen yang mendasarkan keputusan produksinya atas prinsip produksi rata-rata atau produksi dan penerimaan total, akan memperoleh keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan produsen yang menggunakan analisis marjinal seperti diuraikan di atas. (3) Tingkat biaya tetap tidak mempengaruhi keputusan produsen mengenai penggunaan masukan yang optimum dari masukan variabel. Perhatikan bahwa keputusan produsen tersebut berdasarkan pada persamaan antara penerimaan marjinal dan biaya marjinal dari masukan variabel. Para produsen akan tetap memproduksi selama mereka mampu menutup biaya variabel mereka. ***

(Poultry Indonesia, No. 196 Agustus 1996)

2.2

EFISIENSI PAKAN, KONSEPSI DAN PENGUKURANNYA

Dalam agribisnis peternakan ayam ras seorang peternak akan selalu berpikir bagaimana memperoleh produksi (output) yang sebanyak-banyaknya dengan penggunaan sarana produksi (input) yang sekecil-kecilnya, atau bagaimana memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengorbanan biaya yang semurah-murahnya. Cara pemikiran yang demikian adalah wajar karena tujuan peternak adalah memperoleh keuntungan maksimum dari usaha peternakannya. Dalam ilmu ekonomi cara berpikir demikian sering disebut profit maximization. Tujuan tersebut dapat tercapai jika peternak dapat mengalokasikan penggunaan sarana produksi yang dimilikinya secara efisien. Untuk mengetahui apakah sarana produksi yang digunakan efisien atau tidak, perlu diketahui tingkat efisiensi penggunaan sarana produksinya.

Efisiensi Teknis dan Alokatif

Ada tiga macam ukuran efisiensi yaitu efisiensi teknis (*technical efficiency*), efisiensi harga (*allocative efficiency*) dan efisiensi ekonomis (*economic efficiency*). Pengertian efisiensi ini sangat relatif. Efisiensi teknis dapat diartikan sebagai upaya penggunaan input sekecil-kecilnya untuk mendapatkan produksi sebesar-besarnya. Efisiensi teknis tercapai jika produksi rata-rata setiap unit input mencapai maksimum. Efisiensi alokatif adalah upaya untuk memperoleh keuntungan maksimum dengan tingkatan penggunaan input tertentu. Efisiensi alokatif tercapai kalau nilai produksi marjinal (produksi marjinal dikalikan harga produksi) untuk suatu input sama dengan harga input tersebut, atau jika produksi marjinal sama dengan nisbah antara harga input dengan harga output. Efisiensi ekonomi merupakan gabungan antara

efisiensi teknis dan efisiensi harga.

Pada usaha peternakan ayam ras baik petelur maupun pedaging, secara teknis produksi daging maupun telur sangat ditentukan oleh banyaknya pakan, dan secara ekonomis keuntungan yang diperoleh juga sangat ditentukan oleh biaya pakan, karena biaya pakan mencapai 70-80% dari biaya produksi total. Pada peternakan ayam pedaging, efisiensi teknis untuk pakan dihitung dari bobot badan dibagi dengan jumlah pakan yang dihabiskan, sedangkan pada peternakan ayam petelur dihitung dari produksi telur yang dihasilkan dibagi dengan jumlah pakan yang dihabiskan. Semakin tinggi nilai perbandingan (nisbah) antara output dengan input tersebut berarti secara teknis penggunaan pakan semakin efisien. Cara lain untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pakan adalah dengan melihat angka konversi pakan (*feed conversion ratio*), semakin kecil angka konversi pakan berarti secara teknis penggunaan pakan semakin efisien. Dengan melihat angka konversi pakan ini dapat diketahui pula bahwa efisiensi teknis tidak selalu identik dengan produksi maksimum. Pada ayam pedaging angka konversi terkecil terjadi pada minggu pertama pertumbuhan, sedangkan pada ayam petelur angka konversi terkecil terjadi pada saat produksi telur mencapai maksimum. Dengan ukuran efisiensi teknis ini tidak dapat diketahui berapa penggunaan input yang optimum yaitu tingkat penggunaan input agar keuntungan yang diperoleh peternak mencapai maksimum. Karena itu dalam analisis keuntungan ekonomi, penggunaan efisiensi alokatif lebih banyak digunakan.

Keuntungan Maksimum

Keuntungan adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Penerimaan total adalah produksi total (output) dikalikan dengan harga produksi, sedangkan biaya produksi adalah banyaknya input dikalikan dengan harga input. Keuntungan semakin besar jika selisih antara nilai penerimaan dengan biaya produksi semakin besar. Hubungan antara keuntungan dengan penerimaan dan biaya produksi ini disebut dengan fungsi keuntungan.

Secara matematis fungsi keuntungan di atas dapat ditulis :

$$(1) \quad \mu = Y.Py - X.Px$$

dimana μ = keuntungan
 Y = produksi total
 Py = harga produksi
 X = input
 Px = harga input

Keuntungan akan maksimum jika turunan pertama fungsi keuntungan sama dengan nol atau dapat ditulis :

$$dY/dX = 0$$
$$dY/dX = (dY/dX).Py - Px = 0$$
$$(2) \quad dY/dX = Px/Py$$

dimana dY = perubahan produksi
 dX = perubahan input
 dY/dX = produksi marjinal.

Berdasarkan persamaan (2) maka keuntungan maksimum tercapai jika produksi marjinal sama dengan nisbah antara harga input dengan harga output. Dengan formula ini dapat diketahui efisiensi alokatif suatu input yaitu berapa penggunaan input yang optimum agar keuntungan maksimum.

Kasus Ayam Pedaging

Dalam suatu usaha peternakan ayam pedaging diketahui data bobot badan mingguan dan jumlah pakan yang dihabiskan selama sembilan minggu, seperti disajikan pada Tabel 2.2.1.

Untuk menentukan efisiensi alokatif penggunaan pakan maka pada tabel tersebut dihitung pula produksi rata-rata dan produksi marjinal. Jika diketahui harga produksi ayam pedaging hidup (Py) Rp 2400,-/kg dan harga input pakan ternak (Px) Rp 700,-/kg maka nisbah harga $Px/Py = 0,292$. Berdasarkan persamaan (2) di mana : $dY/dX = Px/Py = 0,292$, maka keuntungan maksimum tercapai pada saat penggunaan pakan mencapai 6735 gram dan bobot badan 2885 gram (pada minggu ke sembilan). Namun, bukan berarti bahwa semakin tinggi harga pakan atau semakin rendah harga jual produksi keuntungan maksimum lebih cepat tercapai, karena bila ini terjadi tentu saja keuntungan yang diperoleh peternak akan semakin kecil atau bahkan menyebabkan kerugian.

Tabel 2.2.1.
Hubungan antara produksi total, produksi rata-rata dan produksi marjinal pada peternakan ayam pedaging

| Minggu ke | Pakan (g) | | Bobot badan (g) | | Produksi marjinal (Y/X) | Produksi (dY/dX) |
|-----------|-----------|------|-----------------|-----|-------------------------|------------------|
| | X | dX | Y | dY | | |
| 1 | 120 | | 132 | | 1.015 *) | |
| | | 270 | | 193 | | 0,715 |
| 2 | 390 | | 325 | | 0,833 | |
| | | 400 | | 255 | | 0,638 |
| 3 | 790 | | 580 | | 0,734 | |
| | | 570 | | 320 | | 0,561 |
| 4 | 1360 | | 900 | | 0,662 | |
| | | 785 | | 400 | | 0,510 |
| 5 | 2145 | | 1300 | | 0,606 | |
| | | 985 | | 415 | | 0,421 |
| 6 | 3130 | | 1715 | | 0,548 | |
| | | 1110 | | 410 | | 0,369 |
| 7 | 4240 | | 2125 | | 0,501 | |
| | | 1195 | | 370 | | 0,310 |
| 8 | 5435 | | 2495 | | 0,459 | |
| | | 1300 | | 390 | | 0,300 **) |
| 9 | 6735 | | 2885 | | 0,428 | |

Ket. : *). Efisiensi teknis penggunaan pakan

**). Efisiensi alokatif penggunaan pakan

Ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa keuntungan maksimum sulit dicapai peternak. Pertama, peternak belum memahami prinsip hubungan input-output. Seringkali, terutama peternak kecil, ditemui peternak yang memberikan pakan berlebihan, sehingga keuntungan maksimum dicapai pada saat input pakan sudah terlalu banyak diberikan. Akibatnya, jumlah keuntungan yang diterima menjadi semakin sedikit. Kedua, peternak seringkali dihadapkan pada faktor risiko yang tinggi, sehingga kadang-kadang keuntungan maksimum tidak dicapai. Misalnya, serangan penyakit gumboro atau ND yang menyebabkan kematian ayam secara massal. Ketiga, peternak

sering dihadapkan pada faktor ketidakpastian harga jual di masa mendatang sehingga pada saat panen sering harga turun dan akhirnya keuntungan menjadi kecil. Keempat, keterbatasan peternak dalam menyediakan input, yang kadang-kadang diikuti dengan kurangnya ketrampilan peternak dalam memelihara ayam yang menyebabkan rendahnya produksi yang dihasilkan. Pada akhirnya keuntungan yang diperoleh peternak juga semakin berkurang.***

(Poultry Indonesia No. 190 Desember 1995)

2.3

AGRIBISNIS JAGUNG UNTUK INDUSTRI MAKANAN TERNAK

Perkembangan agribisnis perunggasan selalu dibayangi oleh berbagai permasalahan mulai dari pengadaan sapronak, budidaya, sampai pemasarannya. Permasalahan ini setiap tahun selalu berulang dengan intensitas yang berbeda sehingga menjadi siklus gejolak. Menurut Soehadji (1992) siklus gejolak perunggasan diawali dengan naiknya harga sarana produksi yang sering diikuti dengan turunnya harga jual produksi. Naiknya harga sarana produksi menyebabkan pendapatan peternak menurun sampai di bawah ambang batas titik impas. Turunnya pendapatan peternak yang berkepanjangan menyebabkan peternak menghentikan usahanya. Hal ini mengakibatkan permintaan DOC (anak ayam) berkurang. Berkurangnya permintaan DOC menyebabkan penawaran produk (telur dan daging ayam) menurun sehingga penawaran lebih rendah daripada permintaan. Terganggunya permintaan-penawaran ini meningkatkan harga jual produk sehingga menarik minat peternak untuk berusaha kembali dan akibatnya permintaan DOC kembali naik. Meningkatnya permintaan DOC menyebabkan harga DOC naik. Demikian siklus tersebut dapat terulang kembali yang menyebabkan kestabilan agribisnis perunggasan terganggu.

Pengadaan bahan pakan merupakan salah satu penyakit kambuhan yang sering menjangkiti agribisnis perunggasan. Meski Indonesia dikenal subur makmur, gemah ripah lohjinawi, dan berbagai pujian indah atas kekayaan dan kesuburan alamnya, namun kenyataan membuktikan bahwa agribisnis perunggasan di negara ini masih menggantungkan kebutuhan bahan pakan sebesar 85% dari luar negeri. Padahal, ketersediaan bahan pakan dari dalam negeri yang cukup, utamanya jagung, merupakan kunci sukses bagi pengembangan agribisnis perunggasan pada masa mendatang.

Produksi dan Konsumsi

Pulau Jawa merupakan pusat produksi jagung di Indonesia. Dari produksi jagung 8-10 juta ton/tahun, sebanyak 5,3 juta ton (57%) berasal dari Jawa (60% dari Jatim), disusul Sumatera 24% (53% dari Lampung), dan Sulawesi 11% (66% dari Sulsel). Di beberapa daerah penghasil jagung utama, selain ditanam di tegalan, tanaman ini dimasukkan dalam pola pergiliran tanaman di sawah yang ditanam menjelang musim kemarau setelah panen padi. Dari sisi lahan, dari 3,5 juta hektar luas panen jagung, sebanyak 55% (1,9 juta hektar) berada di Jawa, dimana 1,12 juta hektar (60%) berada di Jatim. Penyusutan lahan pertanian di Jawa yang mencapai 40.000 ha/per tahun akan berdampak pada penurunan produksi pertanian di Jawa, termasuk jagung. Untuk itu, perlu diusahakan perluasan lahan pertanian di luar Jawa.

Tabel 2.3.1.
Perkembangan produksi dan penggunaan jagung 2000-2004

| Tahun | Areal (000 ha) | Produksi (000 ton) | Konsumsi (000 ton) | Industri pangan (000 ton) | Pakan (000 ton) |
|-------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 2000 | 3.500 | 9.677 | 4.657 (43,45%) | 2.340 (21,83%) | 3.713 (34,64%) |
| 2001 | 3.286 | 9.165 | 4.567 (41,76%) | 2.415 (22,08%) | 3.955 (36,16%) |
| 2002 | 3.127 | 9.654 | 4.478 (40,11%) | 2.489 (22,29%) | 4.197 (37,59%) |
| 2003 | 3.359 | 10.886 | 4.388 (38,53%) | 2.564 (22,51%) | 4.438 (38,96%) |
| 2004 | 3.403 | 11.355 | 4.299 (37,01%) | 2.638 (22,71%) | 4.680 (40,29%) |

Sumber : Deptan (2006)

Pada periode 1990-2003 produksi jagung rata-rata mencapai 8.716 ribu ton/tahun, sehingga belum dapat mengimbangi laju permintaan jagung yang mencapai rata-rata 8.726 ribu ton/tahun. Produksi jagung mencapai titik tertinggi untuk pertama kali pada tahun 1998 yaitu mencapai 10.169 ribu ton, melebihi kebutuhan sebesar 9.357 ribu ton. Pada waktu itu jagung telah diekspor oleh daerah-daerah Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, Jatim, serta Sulsel,

dengan negara tujuan Malaysia, Vietnam, dan Hongkong.

Kebutuhan konsumsi jagung pada dasarnya terdiri tiga komponen besar yaitu untuk pangan langsung dan industri pangan (31%), industri pakan dan non-pangan (58%), serta benih dan susut (11%). Sebagai pangan, jagung sudah merupakan barang inferior dengan elastisitas pendapatan (*income elasticity of demand*) sebesar -0,26, sedangkan sebagai pakan, jagung merupakan barang normal dengan elastisitas pendapatan 1,50 (Amang dan Silitonga, 1990). Artinya, jika pendapatan masyarakat meningkat 10%, permintaan jagung sebagai pangan akan menurun 2,6%, dan sebagai pakan akan meningkat 15%. Penggunaan jagung sebagai pakan secara intensif diawali dengan berkembangnya peternakan ayam ras beserta industri pakannya sejak tahun 1970-an. Dalam ransum ayam komponen terbesar (52%) adalah jagung, sehingga dengan semakin tumbuhnya industri pakan menuntut penyediaan jagung yang semakin meningkat (Tabel 2.3.1).

Untuk mencukupi kebutuhan jagung yang terus meningkat, pemerintah sebenarnya telah berusaha mencapai swasembada jagung pada tahun 1994, namun hingga tahun 2000 ini target tersebut diperkirakan belum akan terwujud. Masalah tersebut terjadi karena kenaikan produksinya kalah berpacu dibandingkan kenaikan kebutuhannya. Lambannya peningkatan produksi jagung disebabkan harga jualnya yang relatif murah, sehingga tidak merangsang petani untuk menanamnya. Meskipun, di sisi lain industri pakan seringkali harus membeli jagung dengan harga yang relatif mahal. Pada saat panen raya jagung April 1999 misalnya, harga jagung di tingkat petani Lampung anjlok mencapai Rp 400,-/kg, sementara pabrik pakan Jabotabek sebagai konsumen jagung justru menghadapi kelangkaan jagung dan terpaksa membeli dengan harga mahal Rp 1.200,-/kg, itupun barangnya sulit diperoleh. Pada kondisi kritis saat itu, Mentan Soleh Solahuddin, serta merta mengajukan permohonan ke Bank Indonesia untuk mengalokasikan dana sebesar 400 milyar untuk membeli jagung petani.

Anjloknya harga jagung pada setiap panen raya antara lain disebabkan sistem pemasarannya yang belum terjamin, dimana petani menjual hasil panennya langsung ke pedagang pengumpul sebelum dikeringkan (dengan kadar air tinggi). Pada kondisi ini petani tidak punya pilihan lain dan terpaksa melepas

panennya dengan harga murah. Kondisi demikian sebenarnya dapat diatasi misalnya dengan menyediakan fasilitas pengeringan dan gudang penyimpanan bagi kelompok tani atau koperasi, yang sekaligus dapat berfungsi dalam pengaturan suplai jagung dengan kualitas dan harga yang stabil. Namun, fasilitas demikian tampaknya tidak akan mudah terwujud. Pertama, karena jagung merupakan komoditas strategis yang tidak bernilai politis, artinya kelebihan dan kelangkaannya tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kestabilan politik. Kedua, pendirian fasilitas pengeringan dan penyimpanan jagung secara ekonomi masih dinilai tidak layak, karena membutuhkan investasi yang besar, dan penyimpanan jagung (seperti halnya beras) dalam waktu yang cukup lama dapat menyebabkan penurunan kualitas (penyusutan dan kerusakan) yang mengakibatkan penurunan harga jualnya.

Ekspor dan Impor

Meskipun produksi jagung meningkat setiap tahun, namun produksinya berfluktuasi tergantung musim yaitu melimpah pada waktu musim tanam, dan menyusut pada waktu musim kemarau, sehingga pada bulan-bulan tertentu pemerintah melakukan ekspor dan impor jagung. Impor biasanya dilakukan pada periode Juli-Oktober (musim kemarau) saat dimana produksi jagung dalam negeri di bawah tingkat kebutuhan, dan di luar periode Juli-Oktober dimana produksi jagung melebihi kebutuhan biasanya dilakukan ekspor. Namun, kuantitas ekspor jagung jauh rata-rata masih di bawah kuantitas impor jagung, sehingga menempatkan Indonesia sebagai negara net importir jagung.

Sebagai gambaran, pada periode 1990-2003 impor jagung rata-rata mencapai 749,9 ribu ton/tahun, sedangkan ekspor jagung hanya 102,8 ribu ton/tahun. Volume ekspor jagung mencapai titik tertinggi pada tahun 1998 yang mencapai 632,5 ribu ton, lebih dari dua kali lipat dibanding volume impor 313,5 ribu ton. Selain karena peningkatan produksi, peningkatan volume ekspor jagung tahun 1998 didorong oleh penurunan permintaan jagung untuk pakan yang tinggal 30% akibat hancurnya agribisnis perunggasan, penurunan produksi jagung di negara-negara penghasil jagung utama akibat fenomena cuaca El Nino dan La Nina, dan

menguatnya nilai dolar terhadap rupiah akibat krisis moneter yang mencapai Rp 10.000,-/US\$, sehingga ekspor jagung dirasakan lebih menguntungkan. Namun, mulai 1999, volume impor jagung kembali jauh melebihi volume ekspornya (Tabel 2.3.2).

Tabel 2.3.2.

Perkembangan ekspor, impor, dan kebutuhan jagung 1998-2003

| Tahun | Ekspor (000 ton) | Impor | | Kebutuhan (000 ton) |
|-------|---------------------|------------------|------------|------------------------|
| | | Volume (000 ton) | Pangsa (%) | |
| 1998 | 632,5 | 313,5 | 3,35 | 9.357,0 |
| 1999 | 90,6 | 618,1 | 6,69 | 9.244,5 |
| 2000 | 28,1 | 1.264,6 | 12,20 | 10,366,5 |
| 2001 | 90,5 | 1.035,8 | 10,79 | 9,595,3 |
| 2002 | 16,3 | 1.154,1 | 11,19 | 10.309,2 |
| 2003 | 33,7 | 1.345,5 | 11,52 | 11.676,4 |

Sumber : Deptan (2006)

Hibridasi Jagung

Sebagian besar areal pertanaman jagung di Indonesia adalah varietas biasa (komposit) karena jagung ini dapat dikonsumsi langsung manusia, sehingga pasarnya relatif terjamin, sedangkan jagung hibrida tidak disenangi sebagai konsumsi langsung dan hanya untuk pakan ternak. Sehingga, di beberapa daerah terutama pada wilayah yang tidak terdapat pabrik pakan, maka pasar jagung hibrida tidak terjamin (Hafsah, 1999). Oleh karena itu, salah satu upaya terobosan dalam mempercepat peningkatan produksi jagung adalah dengan perluasan pertanaman jagung hibrida. Sampai saat ini tingkat hibridasi jagung di Indonesia baru sekitar 14% dari 3,5 juta hektar yang ada dan selebihnya jagung lokal. Jika perluasan pertanaman jagung hibrida dapat ditingkatkan sampai 50% saja, produksi jagung akan dapat mencapai 15 juta ton/tahun. Jika kondisi tersebut tercapai, bukan hanya kebutuhan jagung untuk industri pakan yang terjamin, lebih dari itu dapat menempatkan Indonesia sebagai eksportir jagung terbesar di Asia.

Agar dapat menjamin pasar dan harga, maka pengembangan jagung hibrida dapat dipercepat dengan kemitraan usaha antara petani/kelompok tani dengan pabrik pakan ternak. Seperti halnya

kemitraan budidaya ayam ras pedaging, kegagalan pola kemitraan jagung pada tahap awal utamanya menyangkut ketidakpuasan petani plasma terhadap harga kesepakatan yang sangat menentukan tingkat pendapatan dan keuntungannya (Sutawi, 2000). Namun, fluktuasi dan anjloknya harga jagung pada setiap panen raya secara bertahap akan menyadarkan petani untuk menjalin kemitraan dengan pabrik pakan.

Tabel 2.3.3.

Analisis usaha tani jagung hibrida per hektar.

| Komponen biaya | Benih P5 (20 kg/ha) | Benih P7 (16 kg/ha) | Benih P10 (20 kg/ha) | Benih lokal (25 kg/ha) |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Benih | 350.000 | 293.600 | 350.000 | 200.000 |
| Pupuk | 852.500 | 852.500 | 852.500 | 852.000 |
| Pestisida | 354.000 | 354.000 | 354.000 | 354.000 |
| Tenaga kerja | 262.500 | 262.500 | 262.500 | 262.500 |
| Panen dan pasca panen | 445.000 | 485.000 | 477.000 | 395.000 |
| Total biaya/ha | 2.264.000 | 2.247.600 | 2.296.000 | 2.064.000 |
| Rerata panen (ton/ha) | 6 | 8 | 7,6 | 3,5 |
| Harga panen (Rp/kg) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Penerimaan (Rp/ha) | 3.600.000 | 4.800.000 | 4.560.000 | 2.100.000 |
| % biaya benih thd penerimaan | 9,72 | 6,12 | 7,68 | 9,52 |
| Keuntungan (Rp/ha) | 1.336.000 | 2.552.400 | 2.264.000 | 36.000 |
| % biaya benih thd. keuntungan | 26,2 | 11,5 | 15,46 | 555,46 |
| Pengembalian investasi (%) | 59 | 114 | 99 | 2 |

Sumber : PT Pioneer Hibrida Indonesia dalam Sinar Tani (Januari 2000).

Penanaman jagung hibrida memberi nilai tambah yang tinggi, karena tingkat produktivitas yang dihasilkan jagung hibrida jauh lebih banyak yaitu antara 6-9 ton/ha tergantung jenisnya. Sementara jagung komposit, hanya menghasilkan produksi sekitar 2-3 ton/ha. Meskipun untuk pengusahaan pertanaman jagung hibrida lebih mahal, tetapi penambahan biaya usahatani akan tertutup oleh peningkatan produktivitasnya. Selain itu, kebutuhan modal dapat dipenuhi melalui pola kemitraan, atau melalui kredit murah (KUT) pada program Gema Palagung 2001.

Dengan perhitungan sederhana seperti Tabel 2.3.3, apabila rata-rata produktivitas jagung hibrida dapat dicapai 6 ton pipilan kering per hektar dengan harga Rp 600,-/kg, maka penerimaan petani sebanyak Rp 3.600.000,-. Dengan biaya usahatani sebanyak Rp 2.264.000,-, akan diperoleh keuntungan sebesar Rp 1.336.000,-.

Sementara usaha jagung komposit dengan produktivitas 3,5 ton/ha, penerimaan petani sebanyak Rp 2.100.000,- dan dengan biaya Rp 2.064.000, akan diperoleh keuntungan hanya sebanyak Rp 36.000,-. Dengan demikian, peningkatan pendapatan petani yang menanam jagung hibrida dapat mencapai 57 kali lipat yang menanam jagung komposit.

Kesimpulan

Jagung memiliki arti strategis baik untuk diversifikasi pangan maupun untuk industri pakan, dan memiliki peluang pasar yang jelas baik untuk ekspor maupun keperluan pasar dalam negeri. Sebagai negara agraris yang subur, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar mencapai swasembada jagung dalam waktu singkat. Permasalahan yang masih dihadapi adalah produktivitas yang rendah, produksi musiman, dan harga jual di tingkat petani yang murah. Langkah strategis untuk mengatasinya adalah dengan perluasan pertanaman jagung hibrida dengan pola kemitraan sehingga dapat menjamin keuntungan dan mendorong keagairahan usaha berkelanjutan bagi petani, serta dapat menjamin pasokan bahan baku jagung untuk industri pakan ternak maupun keperluan industri lainnya. ***

(Trobos No. 9 Th. I Juni 2000)

2.4

MENUJU SWASEMBADA TEPUNG IKAN

Kehancuran agribisnis perunggasan diyakini disebabkan oleh tingginya ketergantungan industri ini terhadap bahan baku impor seperti bibit, pakan, teknologi, peralatan, dan obat-obatan. Meskipun impor ayam dan telur konsumsi mendekati 0%, namun impor telur dan DOC GPS (bibit ayam ras nenek) mencapai 100%. Sementara impor bahan baku pakan seperti pollard, tepung ikan dan jagung mencapai 70%, bahan baku vaksin dan obat-obatan mencapai 95%, sedangkan peralatan dan mesin-mesin pabriknya memiliki komponen impor mencapai 90% pula. Kelemahan ini sebenarnya sudah sejak lama disadari oleh semua pihak yang terkait dengan agribisnis perunggasan ini. Namun, saponak impor yang lebih berkualitas dan harga lebih murah, lebih memberi daya tarik sebagai jalan pintas daripada harus bersusah payah meningkatkan produksi saponak dalam negeri. Dengan meningkatnya apresiasi dolar Amerika yang telah mendekati 15000 rupiah/US\$, industri perunggasan mengalami "sesak napas" karena sudah tidak mampu lagi membeli saponak impor. Tidak ada jalan lain yang lebih bijaksana, kecuali berusaha meningkatkan dan memanfaatkan saponak produksi dalam negeri.

Kendala Produksi

Tepung ikan merupakan salah satu komponen pakan ternak yang sebagian besar masih harus diimpor. Kebutuhan tepung ikan untuk industri pakan ternak mencapai 285.000 ton per tahun. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara bahari dengan 2/3 wilayahnya lautan, dari kebutuhan tepung ikan tersebut hanya 10% yang dapat dipenuhi dari dalam negeri, sedangkan 90% sisanya terpaksa harus diimpor dari mancanegara. Dalam komposisi pakan ternak, tepung ikan memberikan sumbangan yang tidak terlalu

banyak yaitu antara 5-10%, sedangkan bagian terbesar adalah bungkil kedelai 10-20% dan jagung 50-60%. Antara tepung ikan dan bungkil kedelai dalam penggunaannya sering terjadi perubahan komposisi. Artinya, bila harga tepung ikan mahal dan harga bungkil kedelai lebih murah, maka pabrik pakan cenderung meningkatkan jumlah pemakaian bungkil kedelai. Sebaliknya, bila harga tepung ikan murah dan harga bungkil kedelai lebih mahal, maka pabrik pakan cenderung meningkatkan jumlah pemakaian tepung ikan.

Upaya meningkatkan produksi tepung ikan di Tanah Air selama ini selalu menghadapi berbagai kendala antara lain (1) sumber bahan baku tersebar di berbagai wilayah, sementara pabrik pengolahannya banyak terkonsentrasi di Jawa, (2) kualitas bahan baku rendah karena merupakan hasil samping tangkapan dan industri pengolahan ikan, (3) masih bersaing dengan kebutuhan konsumsi manusia, (4) produksi ikan musiman, (5) rendemennya kecil yaitu 20%, artinya untuk setiap 5 kg ikan hanya menghasilkan 1 kg tepung ikan, dan (6) memerlukan paket teknologi intensif dan biaya yang besar. Menurut Dr. Ato Suprpto, Kepala Badan Agribisnis Deptan, langkah-langkah untuk mengatasi hambatan dalam meningkatkan produksi tepung ikan adalah (1) pelatihan dan penyuluhan para petani nelayan untuk mengadopsi paket teknologi pengolahan tepung ikan, (2) menyalurkan KUT untuk kalangan pengolah tepung ikan, (3) mendorong investasi pengolahan tepung ikan pada kelompok nelayan dengan bahan baku hasil samping industri pengolahan ikan, (4) memberi dukungan fasilitas pengolahan tepung ikan kepada kelompok nelayan produsen, (5) memitirakan pengusaha pakan ternak dengan kelompok nelayan pengolah secara langsung, dan (6) intensifikasi pembinaan mutu tepung ikan pada nelayan pengolah (PI 217 April 1998).

Proses Pengolahan

Bahan baku berupa ikan mentah atau ikan potongan (*by product*) yang telah mengalami sortasi melalui *conveyor* (semacam ban berjalan) dimasukkan ke dalam mesin pemasakan (*cooker*) dengan suhu 90 oC dan tekanan 300-600 psi. Ikan yang telah

dimasak secara berkesinambungan dilakukan pemerasan (*pressing*) sedemikian rupa, sehingga dihasilkan ikan-ikan potongan, minyak, dan air. Selanjutnya ikan-ikan tersebut disaring sedemikian rupa sehingga memberi hasil samping berupa minyak, air, dan ampas ikan. Ikan-ikan hasil pemerasan tersebut, secara berlanjut dan tertutup dalam suatu jalur proses masuk ke dalam mesin pengeringan. Pengeringan dilakukan dengan menggunakan mesin "*continuous dryer*" dengan suhu terendah mulai dari 90 oC, dengan suhu optimumnya 200 oC. Ikan yang keluar dari mesin ini keadaannya telah kering. Dengan cara disedot, semua ikan yang telah dikeringkan tersebut masuk ke dalam suatu kolom *deodorisasi* (penghilang bau). Dengan menggunakan mesin "*hammer mill*" ikan yang telah diproses sebelumnya digiling sedemikian rupa menjadi bentuk tepung. Keluaran akhir dari proses ini adalah tepung ikan, yang selanjutnya dikemas dalam karung dengan berat tertentu. Seluruh proses kerja tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan merupakan suatu lingkaran kerja tertutup. Pada pabrik tepung ikan modern, alat-alat kontrol dilakukan untuk setiap tahap secara otomatis melalui panel-panel kendali di ruang kontrol.

Kualitas tepung ikan didasarkan pada persyaratan antara lain kadar protein lebih dari 60% (standar Eropa 72%), mineral 13-15%, garam maksimum 0,5%, dan lemak rendah sekali. Konsumen yang membeli tepung ikan sebagai bahan baku pembuatan pakan ternak pada umumnya melihat kandungan proteinnya. Disamping kualitas secara laboratoris ini gambaran fisik tepung ikan juga mempengaruhi harga. Beberapa hal yang biasanya diperhatikan adalah kemurnian bahan, apakah tepung ikan ini berasal dari ikan murni atau dicampur bahan tertentu. Seringkali beberapa tepung ikan di dalamnya mengandung serbuk gergaji, tepung bulu ayam, tepung kerang laut, pasir putih, kotoran ayam, tepung galek, bahkan batu merah giling. Selain itu, kondisi tepung ikan seperti warna, serta apakah tepung ikan tersebut mengalami perubahan kimia seperti terkena "*hot spot*", dapat merendahkan nilai jualnya.

Tepung Ikan Muncar

Muncar adalah kota perikanan yang berjarak 40 km di sebelah selatan ibukota Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kota ini terletak di ujung timur Pulau Jawa yang berhadapan dengan Selat Bali. Di Muncar yang merupakan pusat produksi tepung ikan di Jawa Timur terdapat 30 pabrik pengolahan tepung ikan dengan kapasitas produksi masing-masing 5-10 ton/hari pada saat musim ikan. Bahan baku yang digunakan adalah ikan lemuru atau ikan layang dengan harga 400-600 rupiah/kg. Untuk menghasilkan 1 kg tepung ikan diperlukan bahan baku 5 kg (rendemen 20%). Tepung ikan di sini dijual dengan harga 3000-4000 rupiah/kg, dengan kandungan protein 50-60%.

Ikan lemuru dan layang merupakan bahan baku utama industri tepung ikan di Muncar. Lemuru dalam Inggris lebih dikenal dengan nama "*sardine*". Salah satu jenis lemuru yang sangat terkenal di Selat Bali adalah *Sardinella longiceps*. Di daerah ini orang memberi nama berlainan untuk ukuran lemuru yang berbeda, semenit untuk yang kecil berukuran 10-12,5 cm, protolan 13-14,5 cm, lemuru 15-17,5 cm, dan lemuru kucing 17,9-19 cm. Pada saat menjelang pemijahan, badan ikan ini umumnya mengandung banyak lemak, karena itu ikan jenis ini dikenal pula dengan nama "*oil sardine*".

Di selat Bali ini, lemuru dikenal sebagai ikan musiman karena kehadirannya hanya pada musim tertentu saja. Setiap tahun pada permulaan musim hujan yakni pada bulan September-Oktober lemuru mulai muncul di daerah ini dengan ukuran semenit. Lama kelamaan jumlahnya semakin banyak dan mencapai puncaknya pada bulan Desember-Januari dan ukurannya pun semakin besar. Ukuran lemuru kucing banyak ditemukan pada akhir musim lemuru sekitar Pebruari-Maret. Setelah Maret ikan ini kemudian lenyap seakan-akan tanpa meninggalkan bekas, dan baru akan muncul lagi pada musim berikutnya. Kehadiran lemuru yang musiman ini menyebabkan kegiatan di daerah ini juga sangat ditentukan oleh musim. Pada musim lemuru, Muncar menjadi luar biasa sibuknya. Malam hari orang sibuk mengadakan penangkapan, sementara di darat siang-malam orang ramai mengolah hasil tangkapan. Belakangan ini kegiatan penangkapan

menunjukkan gejala tangkap lebih (*overfishing*).

Ikan layang (*Decapterus*) merupakan salah satu komponen perikanan pelagis yang penting di Indonesia. Ikan yang tergolong suku Carangidae ini biasanya hidup bergerombol dengan ukuran sekitar 15-25 cm. Ciri khas yang dapat dijumpai pada ikan layang ialah terdapatnya sirip kecil (*finlet*) di belakang sirip punggung dan sirip dubur, serta terdapat sisik berlinggir yang tebal (*lateral scrute*) pada bagian belakang garis sisi (*lateral line*). Dari lima jenis ikan layang yang umum terdapat di perairan Indonesia, hanya dua yang senang hidup di selat Bali yaitu *Decapterus macrosoma* (disebut juga layang deles) dan *Decapterus kurroides*. Puncak produksi ikan layang terjadi dua kali dalam setahun masing-masing jatuh pada bulan Januari-Maret (akhir musim Barat) dan pada bulan Juli-September (musim Timur). Puncak-puncak musim ini dapat maju atau mundur waktunya sesuai dengan perubahan musim. Di luar waktu itu layang tidak tertangkap.

Pengolahan dan Pemasaran

Manajemen pengolahan tepung ikan di Muncar, ada yang dilakukan secara terbuka atau tertutup. Pada manajemen terbuka, konsumen dapat melihat secara langsung proses pengolahan dari memasukkan bahan baku sampai tepung ikan dimasukkan karung. Cara ini dilakukan misalnya oleh "UD Air Buana" milik Pak Muji Sucipto, untuk meyakinkan konsumen bahwa tepung ikan yang diproduksinya tidak dicampur bahan baku lain. Untuk ini Pak Muji mematok harga 4000 rupiah/kg tepung ikannya. Cara tertutup dapat diketahui pada pabrik-pabrik yang menulis "Selain karyawan dilarang masuk!" pada dinding pabriknya. Pada pabrik yang demikian biasanya menjual tepung ikan yang lebih murah daripada yang terbuka.

Pemasaran tepung ikan Muncar ini tidak terbatas di Jawa saja, melainkan sudah sampai di luar Jawa. Sistem pemasaran ada yang dilakukan dengan kontrak maupun secara langsung. Sistem kontrak misalnya, dilakukan oleh "UD Sinar Tratas" yang melakukan kontrak 400 ton tepung ikan dengan salah satu pabrik pakan di Surabaya. Sementara pada sistem pemasaran langsung, produsen mengirim tepung ikan pada konsumen yang

memesannya, atau menjual langsung pada konsumen yang datang di pabriknya. Pada masa krisis ekonomi saat ini produsen menerapkan sistem jual beli “*cash and carry*”, dibayar langsung dibawa pulang.

Industri tepung ikan di Muncar ini telah beberapa langkah lebih maju dibandingkan langkah-langkah yang direkomendasikan Dr. Ato Suprpto, Kepala Badan Agribisnis Deptan, dalam upaya untuk meningkatkan produksi tepung ikan, seperti diuraikannya pada PI 217 April 1998. Industri tepung ikan di Muncar tidak dilakukan oleh nelayan. Nelayan hanya berkonsentrasi pada kegiatan penangkapan ikan. Seperti halnya bisnis-bisnis yang lain di Indonesia, industri pengolahan tepung ikan di Muncar dikuasai oleh pengusaha WNI keturunan Tionghoa. Hal ini karena mereka memiliki modal yang kuat, mampu membeli teknologi, dan memiliki jaringan pemasaran yang luas. Dalam upaya meningkatkan produksi tepung ikan di Tanah air, penulis menyarankan kepada instansi berwenang untuk memberikan pinjaman modal kepada nelayan bagi keperluan membeli kapal dan peralatan penangkapan ikan, sehingga tingkat produksi penangkapan ikan laut yang selama ini hanya 45% dari total potensi lestari yang dapat dieksploitasi (Maximum Sustainable Yield, MSY) dapat lebih ditingkatkan. ***

(Poultry Indonesia No. 222 Oktober 1998)

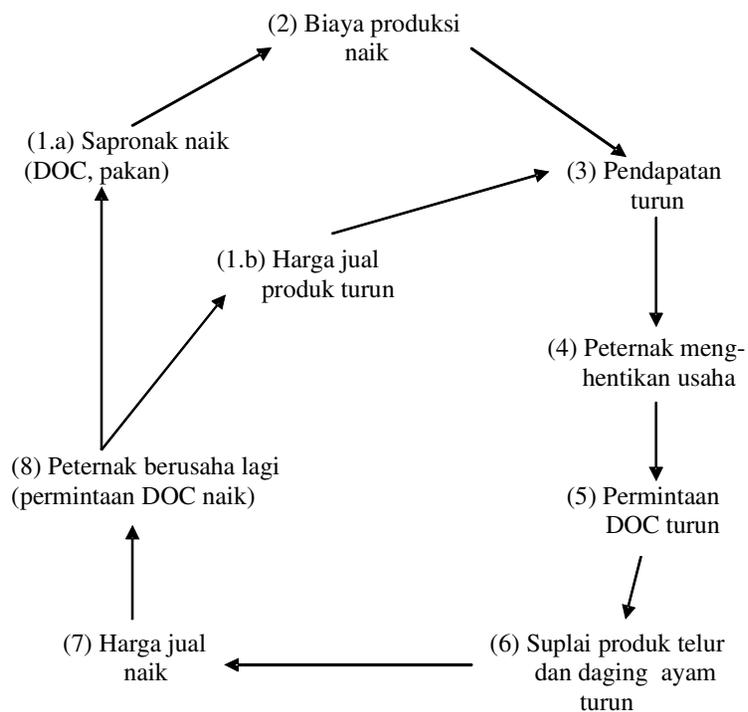
2.5

SIKLUS GEJOLAK AGRIBISNIS AYAM RAS

Agribisnis perunggasan khususnya ayam ras merupakan yang paling maju di bidang peternakan. Agribisnis ayam ras merupakan usaha komersial yang dapat dilakukan secara massal, intensif, dan hemat lahan sehingga peningkatan produksinya dapat dilakukan dalam waktu yang relatif cepat dan murah dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Pesatnya produksi ayam ras selama ini dipacu oleh teknologi pemeliharaan relatif mudah, masa pemeliharaan yang singkat, konversi pakan yang efisien, dan pemasaran yang mudah. Namun demikian, agribisnis ayam ras juga merupakan bisnis yang penuh masalah. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pada hampir setiap tahun dijumpai gejolak harga dengan intensitas yang berbeda dan selalu menempatkan peternak pada posisi yang rawan. DR. Soehadji (mantan Dirjen Peternakan) menggambarkan siklus gejolak pada agribisnis ayam ras seperti Gambar 2.5.1.

Siklus gejolak biasanya diawali dengan naiknya harga sarana produksi (siklus 1.a) dan sering diikuti dengan turunnya harga jual produk (siklus 1.b). Naiknya harga sarana produksi menyebabkan peningkatan biaya produksi (siklus 2), dan pendapatan peternak menurun sampai di bawah ambang batas titik impas (siklus 3). Turunnya pendapatan peternak yang berkepanjangan menyebabkan peternak menghentikan usahanya (siklus 4). Hal ini mengakibatkan permintaan DOC berkurang (siklus 5). Berkurangnya permintaan DOC menyebabkan supply (penawaran) produk (telur dan daging ayam) menurun sehingga penawaran lebih rendah daripada permintaan (siklus 6). Terganggunya supply-demand meningkatkan harga jual produk (siklus 7), sehingga menarik minat peternak untuk berusaha kembali dan akibatnya permintaan DOC naik. Meningkatnya permintaan DOC menyebabkan harga DOC naik (siklus 8). Demikian siklus

tersebut akan dapat selalu terulang kembali yang menyebabkan ketidakstabilan agribisnis ayam ras.



Gambar 2.5.1.
Siklus gejolak ayam ras

Siklus Gejolak Tahun 1987-1989

Gejolak ini diawali dengan naiknya harga jagung pada September 1987 dari Rp 180,- menjadi Rp 300,-, sehingga harga ransum naik Rp 50,- dari Rp 280,- menjadi Rp 330,-/kg). Bersamaan dengan kejadian tersebut harga telur turun dari Rp 1.200,- menjadi Rp 1000,-/kg, dan daging ayam broiler turun dari Rp 1.400,- menjadi Rp 1.000,-/kg. Ketimpangan yang berkepanjangan antara biaya produksi dan harga jual telur dan daging ayam

menyebabkan peternak menjadi kurang bergairah dan mengurangi kegiatan produksi dan menghentikan usahanya (diperkirakan mencapai sekitar 50% dari peternakan ayam ras). Dampak kerawanan tersebut disusul dengan turunnya harga jual bibit ayam pada bulan Desember 1987. Harga DOC turun dari Rp 550,- menjadi sekitar Rp 75,-/ekor akibat lemahnya permintaan. Situasi tersebut mengakibatkan banyak perusahaan ayam pembibit yang menghentikan usahanya.

Perusahaan pembibit yang mampu bertahan melakukan upaya penyesuaian suplai melalui pengurangan jumlah telur yang ditetaskan untuk menjadi telur konsumsi dan melakukan upaya ekspor (berupa DOC maupun telur tetas). Berkat upaya tersebut pada bulan Pebruari 1988 harga DOC dapat naik kembali menjadi Rp 200,-/ekor, pada pertengahan 1988 naik menjadi Rp 300,-/ekor, dan pada triwulan pertama tahun 1989 harga DOC mencapai Rp 600,-/ekor. Setelah itu keadaan tidak mengalami perubahan (ransum Rp 588,-/kg, telur Rp 1.500,-/kg, ayam broiler Rp 2.400,-/kg) menyebabkan peternak kembali berproduksi.

Melihat situasi tersebut beberapa pembibit ingin memanfaatkan momentum sebesar-besarnya dalam menghadapi Lebaran 1989 dengan menaikkan produksi. Akibatnya, setelah Lebaran terjadi over suplai DOC dan harga DOC turun dari Rp 675,-/ekor menjadi Rp 300,-/ekor. Untuk mengurangi over suplai DOC para pembibit berusaha mengurangi produksi secara drastis dengan melakukan pembakaran DOC.

Siklus Gejolak Tahun 1997-1999

Gejolak terbesar sepanjang sejarah agribisnis ayam ras terjadi sejak Juli 1997 berupa krisis moneter yang diikuti krisis ekonomi dan krisis politik. Sebagai akibat kenaikan kurs dolar Amerika dari Rp 2500,-/ 1 US\$ (Juli 1997) menjadi Rp 8.000,- - Rp 11.000,- (Januari-Maret 1998), maka harga jagung di pasar dalam negeri juga mengalami kenaikan meskipun harga impornya masih tetap US\$ 140-148 per ton. Demikian juga harga bahan pakan dan sapronak lainnya seperti bungkil kedelai, pollard dan tepung ikan, serta obat-obatan. Harga jagung naik dari Rp 390,-/kg menjadi Rp 700,-/kg, bungkil kedelai dari Rp 880,- menjadi

Rp 1205,-/kg, tepung ikan dari Rp 1750,- menjadi Rp 2750,-/kg, bekatul dari Rp 210,- menjadi Rp 500,-/kg. Akibat selanjutnya adalah kenaikan harga pakan. Pakan konsentrat naik dari Rp 39.500,-/zak menjadi Rp 89.500,-/zak (50 kg), pakan pedaging komplit menjadi Rp 75.000,-/zak dan pakan petelur komplit menjadi Rp 65.000,-/zak. Beban kenaikan harga pakan tersebut diperberat dengan turunnya Keppres No. 37/1998 (9 Maret 1998) tentang PPN atas ransum, konsentrat serta bahan makanan ternak sebesar 10%, sehingga harga pakan naik antara 150-190 rupiah/kg.

Kenaikan harga pakan di atas tentu saja menyebabkan kenaikan biaya produksi yang harus ditanggung oleh peternak ayam ras, karena biaya pakan menyumbang 70% dari total biaya produksi ayam ras. Jika pada Agustus 1997 biaya pokok produksi untuk ayam pedaging Rp 2.764,-/kg hidup dan ayam petelur Rp 2.326,-/kg telur, maka pada Januari 1998 masing-masing mencapai Rp 4.000,-/kg hidup dan 3.700,-/kg telur. Peningkatan biaya produksi ayam ras ini justru diperburuk dengan menurunnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga sembilan bahan pokok, sehingga harga jual hasil peternakan pun turun tajam. Harga ayam pedaging di pasaran hanya Rp 2.500/kg hidup, sedangkan harga telur Rp 2.200,-/kg.

Dapat dihitung berapa kerugian yang diderita peternak ayam ras di Indonesia saat itu. Dengan jumlah panen ayam sekitar 63 juta ekor per bulan dan rata-rata berat jual 1,5 kg maka kerugian peternak ayam pedaging di Indonesia pada bulan Januari mencapai Rp 141,750,- milyar. Sementara dengan populasi 78,25 juta ekor dan rata-rata produksi 70% kerugian peternak ayam petelur mencapai Rp 5,135 milyar/hari. Jika dihitung berdasar omzet pada industri perunggasan yang mencapai 24 trilyun setiap hari, pendapatan masyarakat yang hilang mencapai 11,76 trilyun per hari, dan hutang peternak yang berpotensi macet mencapai 650-750 milyar rupiah. Kerugian besar juga dialami oleh perusahaan-perusahaan publik bidang perunggasan. PT Japfa Comfeed mencatat kerugian sebesar 3,76 trilyun, Anwar Sierad Rp 3,10 trilyun, CP Prima Rp 1,73 trilyun, Sierad Produce Rp 2,79 trilyun, dan perusahaan-perusahaan lainnya mengalami kerugian antara 60 sampai 900 milyar rupiah.

Satu per satu peternak memutuskan diri untuk gulung tikar.

Di Jawa Timur misalnya, peternak ayam petelur dari Pacitan sampai Banyuwangi terpaksa mengafkir dan mengobrol ayamnya dengan harga Rp 10.000,-/3 ekor. Beberapa pabrik pakan juga telah mengurangi bahkan menghentikan produksi lantaran tidak ada pembeli. Dan yang paling celaka adalah breeding farm (perusahaan pembibitan ayam), karena memberi DOC gratis pun tidak ada peternak yang mau. Selain merumahkan karyawannya, mereka juga terpaksa membakar DOC dan mengosongkan kandangnya dengan mengobrol bibit parent stock (ayam induk) yang dimilikinya. Ayam induk dengan berat 5 kg pun terpaksa dilepas dengan harga hanya Rp 2.000,-/ekor. Akibat krisis tersebut 70% peternak ayam ras telah bangkrut, pasokan hasil unggas tinggal 30%, produsen pakan yang masih hidup tinggal 50%, produksi pakan tinggal 20-30%, dan 80% industri pembibitan telah berhenti berproduksi.

Gejolak ini berlanjut dengan penurunan penawaran produk ayam ras (telur dan daging ayam) sehingga penawaran lebih rendah daripada permintaan, sehingga menyebabkan meningkatnya harga jual produk. Sepanjang 1998 pasokan ayam dan telur diperkirakan tinggal 20%. Dalam upaya mengantisipasi peningkatan permintaan daging menjelang Natal 1998, Imlek, Tahun Baru dan Lebaran 1999, Dirjen Peternakan melalui Surat No. TN.120/247A/1095 (7 Oktober 1998) mengizinkan perusahaan breeding farm melakukan budidaya ayam ras. Selain itu, pemerintah juga mengizinkan importir untuk mengimpor telur dan daging ayam. Meski pada mulanya dianggap mustahil, kenyataan pahit itu harus dihadapi pula. Tidak hanya itu, pemerintah pun sempat merencanakan impor daging kerbau India, meski akhirnya dibatalkan.

Perkembangan gejala agribisnis ayam ras selama krisis moneter dirangkum pada Tabel 2.5.1.

Tabel 2.5.1.
Situasi pasar broiler dan telur Indonesia (1996-1998)

| Uraian | 1996 | 1997 | 1998 |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 1. Permintaan pasar broiler (ekor/hari) | 1.811.000 | 953.000 | 750.000 |
| Posisi permintaan tinggal (%) | | 53 | 41 |
| 2. Permintaan pasar telur (kg/hari) | 2.762.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| Posisi permintaan tinggal (%) | | 54 | 36 |
| 3. Harga pasar broiler (Rp/kg) | 2.825 | 2.700 | 7.500 |
| Perubahan harga pasar (%) | | 5 | 278 |
| 4. Harga pasar telur (Rp/kg) | 2.200 | 2.400 | 5.500 |
| Perubahan harga pasar (%) | | 109 | 229 |
| 5. Harga pakan broiler (Rp/kg) | 800 | 2.800 | 3.100 |
| Perubahan harga (%) | | 350 | 111 |
| 6. Harga pakan petelur (Rp/kg) | 550 | 1.800 | 2.100 |
| Perubahan harga (%) | | 327 | 117 |
| 7. Impor GPS broiler (ekor) | 245.531 | 279.698 | 126.894 |
| 8. Pendapatan perkapita (US\$) | 1.050 | 1.100 | 430 |

Sumber : Pinsar Unggas Nasional (1998)

Penurunan suplai daging dan telur ini memacu peningkatan harga ayam dan telur. Harga ayam di tingkat peternak mencapai 8.000-9.000 rupiah/kg, harga Parent Stock afkir mencapai 10.000/kg, ayam jantan 9.500/kg, sementara harga telur 7.000-8.000 rupiah/kg. Kenaikan harga produk ini menarik minat peternak untuk berusaha kembali dan akibatnya permintaan DOC naik lagi. Meningkatnya permintaan DOC menyebabkan harga DOC naik. Harga DOC broiler meningkat mencapai Rp 2.500/ekor, dan DOC petelur Rp 3.500,-/ekor, itupun barangnya tidak tersedia.

Tiga Usulan

Gejolak pada agribisnis ayam seperti diuraikan di atas terjadi hampir setiap tahun. Mengatasi gejolak tersebut sama rumitnya dengan mengurai benang kusut, meski sudah jelas ujung pangkalnya tetap saja tidak dapat diluruskan. Serangkaian diskusi telah digelar, sekumpulan kebijakan telah dilaksanakan,

berbagai rekomendasi juga telah ditawarkan, namun gejolak tetap saja tak terelak. Swasembada pakan telah diprogramkan, gerakan mandiri dan operasi khusus dilakukan, bea masuk pakan dibebaskan, subsidi harga diberikan, integrasi hulu sampai hilir dicobakan, koperasi peternakan didirikan, kemitraan dikembangkan, kredit dijanjikan, pasar telah diperluas, namun masalah tidak pernah berubah. Lantas, apa lagi yang dapat dilakukan ? Pertama, mengikuti "Perjalanan" Ebiat G. Ade, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang Kedua, belajar pada Perum Pegadaian bagaimana mengatasi masalah tanpa masalah. Ketiga, meminta nasihat Marissa Haque, agar semua masalah bisa tuntas, ... tas ... taas !

(Poultry Indonesia No. 229 Mei 1999)

2.6

REVITALISASI PETERNAKAN RAKYAT

Ada dua target utama pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu menurunkan tingkat pengangguran dari 9,7% menjadi 5,1%, dan mengurangi angka kemiskinan dari 16,6% menjadi 8,2% pada 2009. Untuk mencapai dua target tersebut, KIB menetapkan program pembangunannya melalui strategi tiga jalur (*triple track strategy*) yang berazas *pro-growth*, *pro-employment*, dan *pro-poor*. Strategi tiga jalur dirancang melalui: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 6,5% per tahun melalui percepatan investasi dan ekspor, (2) membenahan sektor riil untuk mampu menyerap tambahan angkatan kerja dan menciptakan lapangan kerja baru, dan (3) revitalisasi sektor pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Operasionalisasi strategi tiga jalur dilaksanakan dengan program revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan (RPPK), dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kedua langkah tersebut ditempuh berdasar kenyataan bahwa perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas rendah, seperti sektor pertanian, perdagangan, dan industri rumah tangga. Pada sektor dengan produktivitas rendah inilah jumlah usaha mikro dan kecil terkonsentrasi (84,7%) yang memperebutkan porsi PDB sebesar 30,4%.

Menurut Depkop dan UKM, usaha mikro adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 100 juta, usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta dan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1 milyar, sedangkan usaha menengah memiliki kekayaan antara Rp 200 juta sampai Rp 10 milyar. Berdasarkan batasan tersebut, diperkirakan 90% lebih usaha peternakan tergolong usaha mikro dan kecil yang lebih dikenal sebagai usaha peternakan rakyat (UPR).

UPR dicirikan dengan pemilikan modal dan manajemen usaha yang terbatas, sehingga sangat sulit berkembang jika tidak ada dukungan kredit usaha dalam rangka meningkatkan usaha menuju skala usaha yang lebih ekonomis.

Ketersediaan modal dalam pembiayaan UMKM dan UPR memiliki peranan sangat penting. Survei BPS (1999) menyebutkan kesulitan utama UMKM adalah kesulitan modal 39%, disusul pemasaran 33%, pengadaan bahan baku 16%, dan kesulitan lainnya 12%. Masalah utama dalam aspek permodalan adalah mobilisasi modal awal (*start up capital*), akses ke modal kerja, dan investasi jangka panjang. Bagi lembaga keuangan formal/bank, UMKM dinilai tidak layak bank (*not bankable*) karena tidak memiliki agunan, serta diasumsikan kemampuan pinjaman dan kebiasaan menabung yang rendah, dan mahal biaya transaksi. Akibat asumsi tersebut, aksesibilitas UMKM terhadap sumber keuangan formal/bank rendah.

Survei BPS (1998) menunjukkan bahwa sekitar 80% UMKM mengandalkan modal sendiri. Bila mereka meminjam dana untuk modal usaha, lebih dari 70% berasal dari bukan lembaga keuangan formal/bank dengan bunga sangat tinggi, sehingga mayoritas UMKM terjebak pada *money lender* (rentenir). Melihat kenyataan demikian, adanya sumber pembiayaan yang mudah diakses UPR dengan persyaratan ringan dan bunga rendah, baik skim kredit perbankan maupun non-perbankan, akan mampu mempercepat gerak agribisnis peternakan.

Kemudahan kredit saja ternyata bukan segalanya bagi revitalisasi UMKM dan UPR. Menurut Tim Lipsus Kompas Jawa Timur (29 April 2005), yang paling mendesak adalah pendampingan total bagi UMKM. Bagi UMKM, pendampingan berperan dalam membantu membuat proposal permohonan kredit dan studi kelayakan usaha, mempermudah administrasi ijin usaha dan pengurusan sertifikasi jaminan, pembinaan manajemen usaha, inovasi produk hingga mengakses pasar. Bagi lembaga keuangan, pendampingan membantu mengenali UMKM yang *feasible* dan *bankable*, sehingga penyaluran dan pengembalian kredit ke/dari UMKM berjalan lebih lancar.

Selama ini UPR banyak dibiayai oleh kredit program yang disalurkan oleh bank pelaksana. Namun, berdasarkan UU 23/1999 tentang BI dan LoI antara pemerintah RI dengan IMF, keberadaan

kredit program dengan bunga rendah menjadi terbatas, sedangkan kredit komersial perbankan bunganya tinggi dan sulit diakses UPR. Alternatif sumber modal bagi revitalisasi UPR adalah memanfaatkan skim kredit non-perbankan, misalnya melalui program kemitraan, dana laba BUMN, atau lembaga donor lainnya.

Revitalisasi UMKM dan UPR dengan memanfaatkan dana non-perbankan dengan pendampingan telah dirintis oleh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) melalui Program Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sekitar Kampus (Program Pemaseka UMM). Dana berasal dari Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (Damandiri) Jakarta yang disalurkan lewat Bank Jatim melalui skim kredit Pundi Kencana. Plafon kredit sampai Rp 50 juta per UMKM dengan tingkat bunga 8%/tahun, lebih murah dibandingkan bunga kredit umum ketika itu 13,5%/tahun. Sejak Nopember 2002 program Pemaseka UMM telah menyalurkan kredit Pundi Kencana sebanyak Rp 4,68 milyar kepada 233 UMKM yang tersebar di 21 desa/kelurahan di wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Sekitar 10% dari 233 UMKM penerima kredit adalah UPR seperti peternak ayam, kambing, sapi perah, sapi potong, dan kelinci. Melalui pendampingan intensif UMKM dapat berkembang dan tingkat pengembalian kredit sangat lancar.

Saat ini Program Pemaseka UMM juga sedang menyalurkan KKB (Kredit Kemitraan BUMN) dengan dana berasal dari keuntungan BUMN yang disalurkan melalui Bank BNI. Plafond KKB sampai Rp 100 juta dengan bunga efektif 8%/tahun. KKB disalurkan kepada UMKM dengan melibatkan lembaga pendamping. Peluang menjadi lembaga pendamping dalam penyaluran KKB terbuka bagi perguruan tinggi, LSM, KUD, dinas, perusahaan, atau lembaga formal lain. Semakin banyak lembaga yang mau dan mampu mencari dan menyalurkan kredit yang murah dan mudah, serta melakukan pendampingan terhadap UPR, maka target revitalisasi UPR dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan peternak dapat lebih cepat tercapai. Jika lembaga Anda berminat dapat menghubungi bank penyalur KKB, atau belajar dahulu ke UMM. ***

(Poultry Indonesia Januari 2006)

2.7

TUJUH PENYAKIT PETERNAK KECIL

Dalam kaitan dengan teknis produksi peternakan, istilah penyakit selalu dikaitkan dengan adanya gangguan fisiologis atau morfologis pada tubuh ternak, baik disebabkan oleh parasit, kekurangan pakan, maupun faktor lingkungan. Berbagai penyakit yang sering menyerang ternak, ada yang bisa dicegah, atau bisa diobati, tetapi ada juga yang menyebabkan kebangkrutan usaha peternakan, seperti penyakit flu burung yang baru saja melanda wilayah Asia termasuk Indonesia.

Dalam dunia bisnis, para pengusaha juga sering dilanda berbagai jenis “penyakit” mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, sehingga dapat mengganggu atau mematikan usahanya. Menurut Yanto S. Pratiknyo (1997) terdapat tujuh macam penyakit yang sering dialami pengusaha kecil yaitu tuli, mencret, muntah, kurap, batuk, kutil, dan campak. Berdasarkan fungsi-fungsi manajemen ketujuh penyakit tersebut dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu masalah pemasaran (tuli, mencret, muntah), masalah produksi (kurap, batuk), masalah organisasi (kutil), dan masalah keuangan (campak). Ketujuh penyakit pengusaha kecil tersebut juga dialami oleh peternak kecil, yang bila tidak dicegah atau diobati dapat menghambat kemajuan, bahkan mengakibatkan kebangkrutan usaha peternakannya.

Penyakit Pemasaran

Penyakit “tuli” (satu pembeli), yang dalam istilah ekonomi disebut “monopoli”, sering dialami oleh peternak ayam kemitraan, peternak sapi perah, dan pemasok tunggal produk peternakan ke restoran, hotel atau pabrik. Di satu sisi, menjalin kemitraan, baik dengan inti (bagi peternak ayam), dengan KUD/IPS (bagi peternak sapi perah), maupun dengan restoran, hotel atau pabrik

pengolahan (bagi pemasok daging, susu, atau telur) adalah upaya untuk menjamin pemasaran. Di sisi lain, penyakit tuli juga mengandung kelemahan, yaitu harga ditentukan oleh pembeli. Harga kontrak kemitraan ayam dan harga beli susu di KUD bukanlah harga kesepakatan, melainkan harga yang ditentukan sepihak oleh pembeli. Kelemahan lain, jika pembeli tunggal tersebut mengurangi atau menghentikan pembelian, maka peternak akan kesulitan menjual. Kasus demikian saat ini dialami oleh peternak sapi perah di Batu (Jawa Timur), dimana IPS mengurangi kuota pembelian susu dari 22 ribu menjadi 16,8 ribu liter per hari. Padahal, produksi susu di Batu tidak kurang dari 25 ribu liter per hari.

Penyakit “mencret” (menjual ceroboh dan teledor) terjadi jika peternak kurang perhatian terhadap keinginan pembelinya baik menyangkut kuantitas produksi, kualitas, kontinuitas, maupun harganya. Dalam kasus persusuan di Malang Raya, IPS menetapkan kebijakan baru berupa penurunan kadar bakteri susu dari lima juta menjadi tiga juta bakteri yang terkandung dalam setiap liter susu. Secara bertahap, IPS juga akan terus menurunkan kadar bakteri susu sampai tidak lebih dari satu juta. Jika kebijakan baru itu diberlakukan, maka tidak tertutup kemungkinan semua koperasi susu dan peternak sapi perah di Malang Raya akan gulung tikar. Sebab, dari seluruh peternak di Malang Raya tidak satu pun yang bisa menurunkan kadar bakteri susunya di bawah 3 juta, apalagi di bawah satu juta.

Hampir semua peternak kecil baik unggas, ternak potong, maupun perah, juga menderita penyakit “muntah” (menjual mentah), karena mereka hanya bergerak di bidang budidaya saja. Kelemahan penyakit ini adalah tingkat keuntungan peternak sangat kecil, karena peternak tidak melakukan kegiatan tambahan, seperti pengolahan maupun pemasaran yang lebih luas. Kelemahan lain adalah harga yang cenderung tidak stabil, karena produk bersifat umum yang dapat ditiru dan dilakukan oleh peternak lain secara massal.

Penyakit Produksi

Banyak peternak kecil yang hanya memiliki satu pemasok bahan baku, seperti bibit, pakan, peralatan, vaksin dan obat-obatan.

Penyakit demikian disebut “kurap” atau “kurang pemasok”, yang dalam istilah ekonomi disebut “monopsoni”. Bahkan, dalam kasus kemitraan ayam dan sapi bakalan, satu pemasok bahan baku tersebut sekaligus menjadi satu-satunya pembeli produknya. Masalah yang dihadapi peternak adalah harga beli dikuasai oleh pemasok, demikian pula dengan kualitas barang. Dalam kasus kemitraan ayam dan sapi bakalan, peternak seringkali memperoleh bibit atau pakan dengan kualitas di bawah standar tetapi dengan harga di atas harga pasar.

Masalah lain yang lebih kompleks adalah jika pemasok berhenti, maka usaha peternak juga terhenti. Kasus ini menimpa peternak ayam kemitraan dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia Terbuka (PT. JCI Tbk). Jika rencana relokasi PT. JCI Tbk ke Vietnam dan Myanmar dilaksanakan, maka ribuan usaha peternakan ayam kemitraan akan terhenti. Demikian juga dengan peternak sapi bakalan impor di Jawa Timur yang terpaksa berhenti, karena program penggemukan sapi impor di Jawa Timur dihentikan.

Penyakit “batuk” atau “barang tunggal dan ketinggalan”, mulai diderita oleh peternak ayam kampung maupun sapi potong lokal. Daging ayam kampung maupun sapi lokal memang belum dapat dikatakan ketinggalan jaman, karena konsumsi daging masih kurang dari kebutuhan. Tetapi, dalam era perdagangan bebas, ayam kampung dan sapi lokal tidak mampu bersaing di pasar internasional karena produktivitas dan kualitasnya dinilai rendah. Di pasar lokal, pemasaran ayam kampung sudah semakin sempit karena tergeser oleh ayam pedaging. Ayam kampung tidak lagi ditemui di warung-warung tegal, tetapi sudah beralih ke restoran-restoran mewah dengan harga spesial. Demikian juga dengan sapi potong lokal yang mulai tergeser oleh daging sapi potong impor. Jika peternak tidak mampu melakukan diversifikasi atau beralih ke usaha lain, maka peternak akan semakin kesulitan pemasaran dan selalu menuai kerugian.

Penyakit Organisasi

Banyak peternak kecil yang memasuki bisnis peternakan tanpa ketrampilan, atau dengan ketrampilan terbatas, yang terus dipertahankan selama menjalankan usahanya. Penyakit produksi

demikian disebut “kutil” atau “kurang trampil”. Penyakit ini sering dialami oleh peternak kecil yang menganggap usahanya sebagai usaha sampingan, dengan ciri-ciri pemilikan ternak sedikit, cara budidaya sederhana dan tanpa memperhitungkan untung rugi. Mereka tidak mau dan mampu meningkatkan ketrampilan untuk mengembangkan usahanya. Tentu saja usaha demikian tidak akan mengalami kemajuan, bahkan lebih cepat mengalami kebangkrutan.

Penyakit Keuangan

Penyakit yang paling parah dan banyak dijumpai pada peternak kecil adalah penyakit “campak” atau “campuran usaha dan keluarga”. Tidak ada pemisahan antara urusan usaha dengan urusan keluarga, baik menyangkut keuangan, tenaga kerja, maupun pengambilan keputusan. Dalam masalah keuangan, peternak membeli keperluan keluarga dengan memakai uang usaha. Dalam pengambilan keputusan, istri, anak, atau saudara yang tidak memiliki keahlian turut serta dalam mengambil keputusan usaha. Dampak penyakit ini adalah sulit mengontrol keuangan, karena peternak memang tidak mau mengontrol keuangannya. Selain itu, pengeluaran untuk keluarga seringkali lebih besar daripada pengeluaran untuk usahanya. Peternak yang menderita penyakit demikian juga tidak mampu menjadi teladan yang baik pada karyawan, karenanya karyawan dapat ikut-ikutan merusak perusahaan. ***

(Poultry Indonesia Juli 2004)

2.8

KAMBING, TERNAK KECIL UNTUNG BESAR

Kamis 24 Maret 2005 Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan (DPKP) Kabupaten Malang bekerja sama dengan ATM ROC (*Agricultural Technical Mission of Republic of China to Indonesia*) Singosari menyelenggarakan seminar dengan tema “Pengembangan Sentra Agribisnis Ternak Kambing Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Peternak”. Seminar yang dibuka oleh Sekda Kabupaten Malang itu menampilkan pembicara dari DPKP, ATM ROC, Disnak Propinsi Jatim, BPTP (Balai Pengkajian Teknologi Pertanian) Karangploso, dan Perguruan Tinggi (PT).

Pihak Pemda memaparkan profil, potensi, peluang, prospek, kebijakan pengembangan usaha peternakan kambing di daerahnya. ATM ROC bekerja sama teknis dengan Dinas Peternakan Jawa Timur melalui UPT BPT dan HMT bertugas mengembangkan komoditas ternak kambing di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Malang. Kegiatan-kegiatan pengembangan yang dilakukan antara lain pemberdayaan peternak kambing dan domba dalam usaha kelompok, pengamanan ternak, dan pengembangan usaha. ATM ROC telah memberikan bantuan pendanaan berupa gaduhan kambing sebanyak 300 ekor kepada peternak kepada peternak di wilayah kecamatan Singosari. Selain itu, ATM ROC juga melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan kepada peternak, penyuluh, dan mahasiswa.

Pada tahun 1994-2000 Fakultas Peternakan-Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang (FPP UMM) bekerja sama dengan Perum Jasa Tirta Malang pernah melakukan program gaduhan kambing di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan. Pihak Perum Jasa Tirta menyediakan 1.000 ekor kambing sebagai pelaksanaan perintah Presiden (ketika itu) Soeharto agar setiap perusahaan menyisihkan 2% keuntungannya untuk membina usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di sekitarnya. Pihak

FPP UMM melaksanakan pembinaan kepada peternak binaan penerima kambing gaduhan di wilayah Malang Selatan dari kecamatan Poncokusumo, Wajak, Sumbermanjing Wetan, Kalipare, sampai Kromengan.

Tahap pertama (1994) sebanyak 1.000 ekor kambing digaduhkan kepada sekitar 480 peternak, masing-masing peternak memperoleh 2-3 ekor kambing siap kawin. Dalam jangka waktu 2 tahun petani-peternak penggaduh diwajibkan mengembalikan 2-3 ekor seperti yang diterima sebelumnya. Pengembalian kambing tersebut selanjutnya akan digulirkan kepada peternak di desa-desa lainnya, dengan harapan program gaduhan merata. Dua tahun kemudian kambing gaduhan yang kembali hanya 500 ekor (menyusut 50%). Pada tahap kedua (1996) 500 ekor kambing tersebut digulirkan kepada sekitar 235 peternak. Untuk mengurangi penyusutan ternak, peternak penggaduh wajib mengembalikan ternak ditambah satu, artinya penggaduh yang menerima 2 ekor wajib mengembalikan 3 ekor, dan yang menerima 3 ekor mengembalikan 4 ekor. Pada periode ketiga (1998) sebanyak 300 ekor berhasil digulirkan (menyusut 40%), dan pada periode keempat (2000) kegiatan penggaduhan kambing akhirnya berhenti.

Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa dalam program pembinaan peternak kecil, masalahnya bukan terletak pada teknis produksi, melainkan pada sikap mental penggaduh. Secara teknis, penggaduh yang serius berhasil mengembangkan ternaknya menjadi 15-20 ekor selama dua tahun. Sayangnya, jumlah mereka hanya sedikit, hanya sekitar 10%. Survei bulan pertama penggaduhan, diketahui beberapa kambing ternyata sudah dijual, dipotong, ditukar dengan domba atau sapi, bahkan ada yang diminta aparat desa. Sebagian dilaporkan mati, tetapi ketika diminta menunjukkan bangkainya ternyata tidak ada. Ada juga yang ditukar dengan kambing kecil atau sakit ketika saatnya mengembalikan. Kejadian demikian berulang setiap kali pengguliran. Karena itu, akhirnya pengguliran kambing terhenti.

Ir. Ruly Hardianto dari BPTP Karangploso memaparkan bahwa usaha ternak kambing memiliki prospek yang cerah jika dikelola secara intensif. Dalam perhitungannya, dengan pemeliharaan 100 ekor kambing peternak akan memperoleh keuntungan 3,2 juta per bulan (Tabel 2.8.1). Dari perhitungan

tersebut, Ir Ruly Hardianto menegaskan, “Kambing, Ternak Kecil Untung Besar”. Ir Ruly Hardianto juga optimis bahwa Indonesia akan mampu memenuhi permintaan kambing yang semakin meningkat di masa datang, termasuk kebutuhan jamaah haji Indonesia. Untuk mendukung keberhasilan peternak, BPTP menawarkan beberapa paket teknologi tetap guna yang dapat diadopsi oleh peternak, seperti formula pakan lengkap (complete feed), mesin pencampur pakan, dan sebagainya.

Tabel 2.8.1.
Analisis biaya-penerimaan-pendapatan dari usaha penggemukan kambing PE pada sistem In-Out skala usaha 100 ekor.

| No | Uraian | Volume | Jumlah (Rp) |
|--|-----------------------|------------------------------|-------------|
| 1 | INVESTASI | | |
| | Kandang | 35 m2 x Rp 200.000 | 7.000.000 |
| | Bibit | 100 ekor x Rp 250.000 | 25.000.000 |
| | Pakan komplete | 100 ekr x 1kg x 150 x Rp 700 | 10.500.000 |
| | Suplemen | 100 ekr x 150 x Rp 100 | 1.500.000 |
| | Obat cacing | 100 ekr x Rp 1.500. | 150.000 |
| | Upah pekerja | 1 org x 5 bln x Rp 250.000 | 1.250.000 |
| 2 | PENERIMAAN | | |
| | Penjualan kambing | 25 ekr x 35 kg x Rp 14.000 | 12.250.000 |
| 3 | BIAYA PRODUKSI | | |
| | Pembibitan baru | 25 ekr x Rp 250.000 | 6.250.000 |
| | Pakan 1 bulan | 100 ekr x 30 hr x Rp 700 | 2.100.000 |
| | Suplemen 1 bulan | 100 ekr x 30 hr x Rp 100 | 300.000 |
| | Upah pekerja 1 bulan | 1 orang x Rp 250.000 | 250.000 |
| | Penyusutan kandang | | 150.000 |
| 4 | KEUNTUNGAN | | 3.200.000 |
| Keterangan : | | | |
| - Volume penjualan 25 ekor/bulan, penghasilan bulan ke-6 dst Rp 3,2 juta/bulan | | | |
| - Penyusutan kandang Rp 7 juta/46 bulan = Rp 150.000/bulan | | | |
| - Kenaikan berat badan 4-5 kg/bulan, harga jual Rp 14.000/berat hidup | | | |
| - Berat awal bibit 18-20 kg | | | |

Pernyataan Ir. Ruly Hardianto dibantah oleh Pak O'on, seorang peternak kambing intensif di Karangploso. Menurut Pak O'on, beternak kambing intensif memang menguntungkan, tetapi keuntungannya kecil. Masalahnya, pada biaya pakan yang cukup mahal, apalagi setelah harga BBM naik. Harga pakan lengkap yang dibuat Pak O'on saat ini mencapai 700 rupiah per kg. Sementara

itu, pasar kambing ternyata tidak pasti, ramai pada saat tertentu saja. Pada saat sepi, harga kambing tidak menentu.

Beternak kambing prospeknya memang baik dan peluang pasar di dalam maupun ekspor masih terbuka. Tetapi, prospek dan peluang itu tidak mudah dimanfaatkan. Dengan pemeliharaan skala kecil tidak akan menghasilkan kambing yang kualitasnya baik, sedangkan pemeliharaan intensif tidak mampu menghasilkan kambing dengan harga murah. Karena itu, peluang pasar ekspor, misalnya untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban bagi 200 ribu jamaah haji Indonesia setiap tahun, tidak dapat dipenuhi. Sebenarnya pemerintah Arab Saudi lebih senang jika kebutuhan hewan kurban untuk 1 juta jamaah haji di Mekkah bisa dipenuhi oleh sesama negara muslim, termasuk Indonesia. Tetapi peluang itu tidak bisa dipenuhi oleh negara-negara muslim, sehingga Arab Saudi terpaksa mengimpor hewan kurban (domba) dari Australia atau Selandia Baru.

Di Selandia Baru, sebuah negara seluas dua kali pulau Jawa dengan penduduk hanya 3,6 juta jiwa, terdapat sekitar 50 juta ekor domba (14 domba setiap orang). Di negara ini, domba, juga sapi potong dan sapi perah, dipelihara secara ekstensif massal di padang penggembalaan (ranch) yang sangat luas. Seorang peternak dengan menunggang seekor kuda dibantu beberapa ekor anjing mampu menggembalakan ribuan ekor domba di ranch yang luasnya ratusan hektar. Dengan sistem demikian mereka mampu menghasilkan domba dengan kualitas baik dan harga murah, sehingga mampu memenuhi berapa pun permintaan domba setiap tahun.

Di Indonesia yang lohjinawi ini memelihara kambing, domba, dan sapi potong secara ekstensif massal seharusnya tidak sulit, seperti di Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Peternak bisa memanfaatkan lahan-lahan perkebunan, misalnya lahan kelapa sawit, atau padang savana untuk pemeliharaan ternak potong secara ekstensif massal. Jika pemeliharaan ternak potong, dalam hal ini kambing, baik ekstensif maupun intensif tetap terkonsentrasi di Jawa, maka peternak hanya dapat berkata, "Kambing, ternak kecil, skala kecil, untung kecil". ***

(Trobos Mei 2005)

2.9

SWASEMBADA DAGING SAPI TAHUN 2005

Presiden Soekarno pernah mengatakan, "*Gantungkan cita-citamu setinggi langit, niscaya akan tercapai setinggi bukit!*". Kata-kata bijak tersebut menegaskan bahwa setiap orang hendaknya memiliki cita-cita tinggi meskipun pada akhirnya hanya sebagian yang tercapai. Banyak pejabat tinggi di Indonesia yang memiliki cita-cita besar dan hanya tercapai sebagian sampai habis masa jabatannya. Bahkan, ada sebagian cita-cita yang tercapai itu justru kebalikan dari cita-cita yang semula. Ibarat mendaki gunung, bukan puncak yang tercapai tetapi malah tergelincir ke dalam jurang. Orde Baru misalnya, pernah bercita-cita mewujudkan masyarakat adil makmur, namun yang tercapai justru masyarakat *ajur mumur* (hancur lebur). Para pejabat peternakan pada periode-periode yang lampau pernah bercita-cita mewujudkan peternakan yang maju, efisien, dan tangguh. Namun, yang terjadi justru peternakan yang mundur, inefisien, dan rapuh. Banyak program-program ideal yang belum terealisasi meski sudah silih berganti pejabat. Tanpa cita-cita memang tidak akan ada pembangunan. Tetapi, tidak ada salahnya "*mengukur baju di badan sendiri*", artinya menyesuaikan cita-cita itu dengan kemampuan diri sendiri. Jangan sampai nafsu tinggi tetapi tenaga kurang.

Dirjen Peternakan **DR. Sofjan Sudardjat** pada masa jabatannya saat ini memiliki cita-cita luhur yaitu *mencapai swasembada daging sapi tahun 2005*. Dengan perkiraan tingkat pertumbuhan penduduk 1,5%/tahun, elastisitas permintaan daging 1,3, dan pertumbuhan ekonomi 6%, pada tahun 2005 diproyeksikan total kebutuhan daging sapi mencapai 499 ribu ton, dan tingkat konsumsi 2,21 kg/kapita. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, pihak Ditjen Peternakan telah menetapkan empat program terobosan yang meliputi (1) peningkatan produktivitas dengan cara pengadaan 110 pejantan unggul pada tahun 2000 untuk

meningkatkan produksi semen beku menjadi 6-7 juta dosis untuk menginseminasi 2 juta ekor betina produktif, (2) meningkatkan populasi ternak dengan pengendalian betina produktif di RPH, karena 40% dari total ternak yang dipotong adalah betina dimana 70% diantaranya masih produktif, (3) substitusi dan diversifikasi penyediaan daging melalui Upsus Gema Proteina 2001 di berbagai daerah, dan (4) pengembangan kelembagaan. Dengan proyeksi target seperti pada Tabel 2.9.1, produksi daging sapi tahun 2005 akan mencapai 499 ribu ton yang memenuhi 93% konsumsi daging sapi. Dengan demikian tercapaian swasembada daging sapi dengan pengertian paling tidak 90% ketersediaan daging sapi dipenuhi dari suplai dalam negeri.

Tabel 2.9.1
Proyeksi teknis program terobosan swasembada
daging sapi 2000-2005

Efektif di Jawa

Kapasitas produksi ternak pada dasarnya meningkat melalui peningkatan populasi sapi dan produktivitasnya. Kegiatan operasional terobosan yang diprogramkan Ditjen Peternakan berupa kegiatan inseminasi buatan (IB) dan pencegahan pemotongan betina, tampak hanya efektif dilakukan di Jawa. Selain karena pemeliharaan sapi yang semi intensif, Jawa juga merupakan konsentrasi 42% populasi sapi dan 70% konsumsi daging. Masalah utama yang dihadapi dalam peningkatan produktivitas dan populasi sapi di Jawa adalah ketersediaan lahan yang semakin berkurang yang diakibatkan oleh persaingan dengan penggunaan lahan untuk pemukiman, industri, dan usaha pertanian lainnya.

Seperti diketahui sekitar 60% dari 210 juta penduduk Indonesia bermukim di Jawa. Dengan penyusutan lahan yang mencapai 40.000 ha per tahun di Jawa berdampak berkurangnya lahan untuk padang penggembalaan, penyediaan pakan hijauan, maupun ketersediaan limbah hasil pertanian. Apalagi petani yang umumnya pemelihara ternak, sebagian besar hanya menguasai lahan usahatani kurang dari 0,5 ha.

Identifikasi terhadap faktor-faktor yang diperkirakan mempunyai pengaruh terhadap pengembangan sapi potong di daerah padat penduduk seperti Jawa dilaporkan oleh Azis (1993) seperti tercantum pada Tabel 2.9.2. Keterbatasan ketersediaan lahan mengakibatkan adanya keterbatasan dalam pola pengembangan peternakan sapi potong di Jawa. Strategi yang mungkin dikembangkan adalah pengembangan agribisnis sapi potong dengan lokasi tersebar dan pengelolaan dilakukan secara intensif dengan memanfaatkan limbah pertanian yang diolah sebagai pakan.

Tabel 2.9.2.
Analisis tantangan dan peluang pengembangan industri sapi
potong di daerah padat penduduk

| Aspek teknis | | 2000 | 2005 | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Populasi sapi (000 ekor) | Uraian | 11.550 | 12.511 | Peluang |
| Pertumbuhan populasi (%) | Sumberdaya manusia | 0,66 | 1,05 | Besar |
| Suplai daging dalam negeri (%) | Lahan | 82,0 | 93,0 | Kecil |
| Suplai daging impor (%) | Pakan hijauan | 13,0 | 4,0 | Kecil |
| Impor daging sapi (%) | Konsentrat | 5,0 | 3,0 | Besar |
| Impor sapi bakalan (%) | Hasil pertanian lain | 181.000 | 74.000 | Kecil |
| Produksi daging sapi (000 ton) | Pesaing komoditas sapi | 307.000 | 464.000 | Besar |
| | Keragaman jenis sapi | | | Besar |
| 8. | Teknologi pembibitan | | Kecil | Besar |
| 9. | Bakalan | | Besar | Kecil |
| 10. | RPH | | Besar | Besar |
| 11. | Unit pengolahan daging | | Besar | Besar |
| 12. | Lembaga penelitian | | Besar | Besar |
| 13. | Kebijakan pemerintah | | Kecil | Kecil |
| 14. | Sarana/prasarana angkutan | | Kecil | Besar |
| 15. | Sarana/prasarana komunikasi | | Kecil | Besar |
| 16. | Konsumen daging biasa | | Kecil | Besar |
| 17. | Konsumen daging eksklusif | | Kecil | Besar |
| 18. | Pesaing daging putih | | Besar | Besar |
| 19. | Tingkat konsumsi daging | | Kecil | Besar |
| 20. | Kelembagaan kemitraan | | Kecil | Besar |

IB dan Pemotongan Betina

Melihat pengalaman ekspor ternak ke Hong Kong pada dekade 1960-1970, kualitas sapi lokal di berbagai daerah sebenarnya sudah cukup baik. Namun, karena seleksi negatif yang tidak disadari dari populasi daerah-daerah pada masa itu, telah mengakibatkan sisa ternak yang ada sudah tidak sebaik kualitas sapi yang sudah laku. Proses biologi yang terkait perbaikan mutu genetik sapi lokal seperti IB dan ET (*embryo transfer*) memakan waktu lama dan investasi yang besar, sehingga tidak menarik bagi swasta untuk melakukan investasi di bidang ini. Program IB, yang hanya dilakukan pemerintah, untuk menunjang program penyediaan sapi bakalan selama dua dasa warsa terakhir belum memberikan hasil yang memuaskan (**Mudikjo, 1996**). Selain kualitas bibit induk lokal yang telah mengalami degradasi, masalah yang dihadapi di lapangan adalah kurangnya tenaga teknis IB (inseminator), kesadaran dan pengetahuan peternak yang masih rendah, dan biaya IB yang masih cukup mahal bagi peternak.

Peningkatan populasi dilakukan dengan pengendalian pemotongan betina produktif dengan pengawasan ketat di RPH. Agar program ini berjalan baik, maka pemerintah (Disnak daerah) bisa melakukan lelang di RPH terhadap sapi betina yang akan dipotong. Jika berminat, pengusaha swasta bisa membeli betina produktif untuk keperluan pembibitan. Kendala dalam mendorong tumbuhnya industri bibit sapi potong swasta adalah tidak adanya jaminan harga yang lebih baik bagi sapi bibit Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus menyediakan dana khusus untuk membeli betina produktif.

Menurut Dirjen, investasi yang dibutuhkan untuk keberhasilan program swasembada daging adalah 5,4 triliun rupiah dalam kurun waktu 5 tahun dimana 10% (540 milyar) disediakan pemerintah, dan yang 90% (4,5 triliun) bagian swasta. Bila dibagi 5 tahun, maka tiap tahun dana yang harus disediakan pemerintah adalah 110 milyar. Jika dibagi antara pusat dan daerah, maka pusat harus menyediakan 11 milyar (10%), dan 99 milyar sisanya disediakan 26 propinsi (**Infovet, April 2000**).

Masalah besar yang sulit dipecahkan adalah pendanaan. Dalam situasi krisis yang penuh ketidakpastian seperti ini

menggalang dana swasta sebesar 4,5 triliun untuk investasi di bidang peternakan sapi bukan perkara mudah. Penundaan pinjaman IMF, ancaman investor yang akan mengalihkan investasinya ke luar Indonesia, rekapitalisasi perbankan tidak kunjung selesai, dan nilai rupiah tidak pernah stabil, serta tuntutan kenaikan gaji pegawai dan buruh, merupakan masalah awal yang dihadapi pemerintah dan swasta dalam pengadaan dana investasi pada agribisnis sapi potong.

Kemampuan dan Kerja Keras

Rencana yang baik adalah setengah dari keberhasilan, sedangkan setengahnya lagi adalah paduan antara kemauan, kemampuan, dan kerja keras. Ada kemauan kuat dari Ditjen Peternakan untuk mewujudkan swasembada daging sapi tahun 2005 yang didukung oleh kemampuan sumberdaya manusia peternakan yang cukup baik. Seberapa tinggi "bukit" yang akan berhasil didaki oleh Dirjen Peternakan sangat bergantung pada kerja keras aparatnya menerobos medan lapangan yang penuh tantangan, rintangan, dan ancaman. Dalam upaya menggerakkan partisipasi masyarakat peternak, ada baiknya meniru Program Bimas atau Gema Palagung 2001, yang telah berhasil meningkatkan produksi tanaman pangan, dengan menerjunkan sarjana pendamping di daerah-daerah, dan memberikan kredit murah kepada peternak. Tanpa berbekal dana yang cukup, bisa jadi cita-cita mulia mewujudkan swasembada daging sapi 2005 hanya akan menjadi sebuah utopia. ***

(Infovet Edisi 071 Juni 2000)

2.10

NASIB PETERNAKAN SAPI PERAH

Dari data statistik usaha peternakan sapi perah masih menjanjikan masa depan yang sangat cerah. Pertama, sampai tahun 1995 konsumsi susu penduduk Indonesia mencapai 1.353.400 ton atau 6,99 kg/kapita/tahun, yang berarti telah melebihi sasaran konsumsi nasional sebesar 5,35 kg/kapita/tahun. Namun, bukan berarti Indonesia telah mencapai swasembada susu. Dari konsumsi sebanyak itu, 378.800 ton (27,99%) dipenuhi dari produksi dalam negeri dan 974.600 ton (72,01%) merupakan susu impor. Dari data tersebut tampak bahwa usaha sapi perah mempunyai prospek yang baik sebagai produk substitusi impor. Kedua, Indonesia merupakan segmen pasar global yang potensial bagi produk persusuan jika ditinjau jumlah penduduk yang telah mencapai 200 juta dengan pertumbuhan 1,8%, pertumbuhan ekonomi yang tinggi (7%), pendapatan per kapita penduduk yang semakin meningkat (US\$ 1.023), dan angka elastisitas permintaan susu yang masih elastis yaitu 1,2. Angka elastisitas ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan sebesar 10% akan menyebabkan permintaan susu meningkat 12%. Dari data-data ini tampak bahwa pasar susu dalam negeri masih terbuka lebar.

Namun, peluang tersebut tampaknya tidak dengan mudah dinikmati oleh peternak sapi perah di Indonesia karena berdasarkan kesepakatan GATT/WTO maka pada awal abad 21 (2003 AFTA dan 2020 APEC) mendatang Indonesia harus mengurangi proteksi impor dan membuka lebar-lebar pasar bagi produk pertanian termasuk susu dari luar negeri di dalam negeri. Ini berarti peternak sapi perah Indonesia harus bersiap diri untuk menghadapi persaingan yang ketat dengan industri persusuan luar negeri yang lebih maju, lebih efisien, lebih berkualitas dan lebih murah.

Perdagangan Bebas

Pemberlakuan perdagangan bebas dunia merupakan kesepakatan 117 negara yang telah menandatangani kesepakatan GATT/WTO pada 15 April 1994 di Marakesh, Maroko. Secara umum tujuan GATT/WTO di bidang pertanian adalah melakukan liberalisasi perdagangan dan mengurangi distorsi dengan cara mengubah kebijakan non-tariff menjadi tariff, menurunkan tariff, mempertahankan akses impor minimum, mengurangi subsidi domestik maupun subsidi ekspor. Sesuai teori perdagangan klasik, dengan dibebaskannya perdagangan internasional dari segala proteksi akan meningkatkan produktivitas para produsen, dan dengan demikian dapat menciptakan kemakmuran bagi para produsen maupun konsumen. Selain itu, dengan berlakunya kesepakatan GATT/WTO maka peluang pengembangan produk pertanian untuk dipasarkan dalam pasar global semakin terbuka. Pertanyaannya yang timbul adalah, apakah peternak sapi perah Indonesia mampu bersaing dan memanfaatkan peluang pasar yang semakin terbuka luas baik di dalam maupun di luar negeri ini ?

Empat Konsep dan Kendalanya

Para ahli ekonomi dan pertanian, menawarkan empat konsep agar peternakan sapi perah Indonesia bisa memiliki daya saing pada era perdagangan bebas yaitu peningkatan produktivitas, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu, dan penurunan harga. Mungkinkah keempat konsep ideal ini direalisasikan oleh peternak sapi perah Indonesia ?

Di Tanah Air tercinta ini, 91% usaha peternakan sapi perah merupakan usaha peternakan rakyat yang bercirikan antara lain (1) skala usahanya kecil (2-5 ekor), (2) motif produksinya sebagai usaha rumah tangga (bukan perusahaan) dan bersifat padat karya, (3) dilakukan sebagai usaha sampingan tanpa memperhitungkan rugi laba, dan masih jauh dari sentuhan teknologi modern, serta didukung oleh manajemen usaha dan permodalan yang lemah, (4) kualitas produk masih rendah dan bervariasi. Di KPBS (Koperasi Peternak Bandung Selatan) misalnya, dari 7.800 peternak baru 11% yang telah mencapai skala ekonomis usaha (memelihara

minimal 7 ekor sapi), sedangkan sisanya masih memelihara di bawah 7 ekor (WP 169/170).

Untuk meningkatkan produktivitas, paling tidak jumlah sapi perah induk yang dipelihara sekitar 8-9 ekor sepanjang tahun. Sampai tahun 1995 populasi sapi perah di Indonesia 337.937 ekor yang dimiliki oleh 98.000 rumah tangga peternak (RTP). Ini berarti setiap RTP rata-rata memiliki 3-4 ekor sapi. Untuk menambah satu ekor induk sapi perah dan peralatannya diperlukan dana 2 juta rupiah. Sehingga, jika setiap peternak menambah 4 ekor induk sapi saja diperlukan dana 784 milyar rupiah. Siapakah yang bersedia menyediakan dana sebanyak itu? Apalagi saat ini kredit bermasalah yang ditanggung oleh peternak sapi perah telah mencapai 40 milyar rupiah. Kendala kedua dalam peningkatan produktivitas sapi perah Indonesia adalah faktor iklim. Indonesia yang beriklim tropis kurang cocok bagi perkembangan ternak sapi perah yang berasal dari iklim dingin. Sapi perah hanya diusahakan di daerah "jalur susu" yang agak dingin seperti Bandung - Sukabumi - Bogor (Jabar), Salatiga - Boyolali - Yogyakarta (Jateng) dan Pasuruan - Malang (Jatim). Sapi perah yang dipelihara pun sapi persilangan antara FH dengan sapi lokal yang kemudian dikenal dengan sapi PFH yang tentu saja produksi susunya (10-15 liter/hari) tidak sebanyak produksi susu sapi FH di tempat asalnya (20-25 liter/hari).

Untuk meningkatkan efisiensi baik teknik maupun ekonomis, selain faktor bibit, harus didukung oleh pakan/ransum yang kandungan zat gizinya tinggi dan dengan harga yang cukup murah. Di tingkat peternakan rakyat, pemberian pakan kepada sapi perah belum memadai baik dari kuantitas maupun kualitasnya bukan saja untuk hijauan, tetapi juga konsentrat. Dari segi harga, peternak membeli konsentrat dengan harga yang cukup mahal karena sebagian bahan bakunya harus diimpor. Memang ironis, di negara yang katanya gemah ripah loh jinawi ini, bahan baku konsentrat seperti jagung kuning, tepung ikan, bungkil kedelai, wheat pollard, masih harus diimpor. Jadi, konsep peningkatan efisiensi melalui penggunaan pakan bergizi tinggi dan berharga murah jelas tidak dapat dilaksanakan oleh peternak sapi perah.

Perhatian terhadap kualitas susu belum cukup serius. Pemerahan secara manual, kurangnya kebersihan kandang,

pemakaian wadah yang tidak standar, dan penanganan susu di tingkat koperasi yang terkesan seadanya, mengakibatkan rendahnya kualitas susu khususnya angka kuman atau kerusakan susu yang akhirnya berpengaruh terhadap harga jual susu. Hal ini diperparah lagi oleh masih tingginya kasus mastitis dan lamanya calving interval (selang beranak) merupakan bukti bahwa pelayanan dan penyuluhan teknis peternakan belum merupakan sarana menciptakan peternak yang tangguh baik dari segi teknis maupun ekonomisnya.

Jika produktivitas dan efisiensi tidak dapat dilaksanakan peternak, jelas usaha peternakan rakyat sangat sulit untuk menghasilkan susu yang berkualitas baik dengan harga yang murah, sehingga mampu bersaing dengan susu impor baik dari Amerika, Australia maupun Selandia Baru.

Sapi Perah Selandia Baru

Sebagai perbandingan dapat disimak kondisi peternakan sapi perah di Selandia Baru berikut ini. Di Selandia Baru, negara yang luasnya hanya 266.000 km² (dua kali luas P. Jawa), terdapat 14.500 farm (RTP) yang memiliki 2,8 juta ekor sapi perah, yang berarti setiap farm memiliki 193 ekor sapi perah. Sapi perah di sini dipelihara di ranch (padang penggembalaan) yang luasnya puluhan hektar dengan sistem rotational grazing yaitu membagi padang itu menjadi beberapa bagian untuk tempat merumput ternak. Dengan sistem pemeliharaan seperti itu, dan ditunjang iklim yang sejuk (suhu 10-15 oC), sudah barang tentu sapi selalu sehat dan produksi susu yang dihasilkan sangat banyak dan berkualitas baik.

Pada masa produksi sampai Mei 1995 lebih dari 9 milyar liter susu diolah di 15 perusahaan koperasi susu. Pengolahan susu sebanyak ini menghasilkan 197.369 ton keju, 341.995 ton bubuk susu penuh (wholemilk powder), 150.647 ton bubuk susu skim (skim milk powder) dan 301.342 ton bubuk krim (creamy butter). Sebanyak 346,4 juta liter susu diproses untuk dikonsumsi dalam bentuk cairan.

Lebih dari 90% dari produksi susu Selandia Baru diekspor dalam berbagai bentuk produk susu. Badan Persusuan (Dairy Board) Selandia Baru memasarkan produksi susu ke lebih dari 100

negara. Lebih dari separuh volume ekspor susu Selandia Baru dijual di kawasan Asia-Pasifik (termasuk Indonesia), sisanya diekspor ke Eropa, Timur Tengah, Rusia, India dan Amerika Latin.

Strategi Pemerintah

Untuk tetap melindungi peternak sapi perah dalam era perdagangan bebas mendatang, pemerintah telah melakukan langkah-langkah strategis. Pertama, melalui persetujuan Voluntary Export Restraints (VER). VER atau hambatan dagang "sukarela" merupakan kesepakatan antar pemerintah dimana kalangan bisnis di negara pengeksport diminta "kerelaannya" untuk tidak mengeksport barang melebihi jumlah tertentu ke negara pengimpor. Atau dengan kata lain, kuota dagang secara sukarela. Kalau dalam kuota dagang pemerintah negara pengimpor bisa melarang kelebihan kuota ekspor suatu negara, namun yang "melarang" impor dalam VER adalah diri pengeksport sendiri atas persetujuan pemerintah. Karena sifatnya dan mekanisme yang demikian maka VER dapat dikatakan sebagai mekanisme pengenaan kuota yang terbebas dari kesepakatan GATT/WTO. Langkah ini telah ditempuh oleh pemerintah yang pada bulan Januari 1994 telah melakukan perundingan bilateral dengan Selandia Baru sebagai eksportir susu terbesar ke Indonesia untuk mencari alternatif agar produksi susu dalam negeri tetap terus mengalir. Langkah kedua adalah perundingan dengan pemerintah Australia untuk membahas kemungkinan kerjasama pengembangan industri persusuan Indonesia. Ketiga, melalui Surat Edaran Menaker yang ditujukan kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan dengan pekerjaan fisik berat untuk memberikan makanan tambahan berupa susu segar (WP 169/170).

Jika langkah-langkah strategis ini gagal, maka dunia peternakan sapi perah Indonesia akan ditinggalkan oleh ribuan peternak sapi perah karena sudah tidak mampu lagi memberikan sumber penghidupan yang layak, dan tentu saja akan menambah angka penduduk miskin di Tanah Air. ***

Warta Pertanian No. 172/September 1997)

DAFTAR PUSTAKA

- 2.1. Sutawi. 1996. Teori Produksi Peternakan Ayam Pedaging. Poultry Indonesia No. 198 Agustus 1996.
- 2.2. Sutawi. 1995. Efisiensi Pakan, Konsepsi dan Pengukurannya. Poultry Indonesia No. 190 Desember 1995.
- 2.3. Sutawi. 2000. Jagung, Menggarap Potensi Mengejar Prestasi. Trobos No. 9 Th. I Juli 2000.
- 2.4. Sutawi. 1998. Dari Muncar, Menuju Swasembada Tepung Ikan. Poultry Indonesia No. 222 Oktober 1998.
- 2.5. Sutawi. 1999. Siklus Gejolak Agribisnis Ayam Ras. Poultry Indonesia. No. 229 Mei 1999.
- 2.6. Sutawi. 2006. Revitalisasi Peternakan Rakyat. Poultry Indonesia Januari 2006.
- 2.7. Sutawi. 2004. Tujuh Penyakit Peternak Kecil. Poultry Indonesia Juli 2004.
- 2.8. Sutawi. 2005. Kambing, Ternak Kecil Untung Besar. Trobos April 2005.
- 2.9. Sutawi. 2000. Swasembada Daging Sapi 2005. Infovet Edisi 071 Juni 2000.
- 2.10. Sutawi. 1997. Nasib Peternakan Sapi Perah. Warta Pertanian No. 12 September 1997.



Bab III

**KOPERASI DAN
KEMITRAAN PETERNAKAN**

3.1

PENGEMBANGAN KOPERASI PERUNGGSAN

Dalam Keputusan Mentan No. 472/Kpts/TN.330/6/96 tanggal 17 Juni 1996 tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras pasal 13 (1) dinyatakan bahwa pembinaan peternakan rakyat ayam ras dilakukan dengan membentuk kelompok, mengembangkan kerjasama dalam kelompok maupun kerjasama antar kelompok yang selanjutnya ditingkatkan menjadi koperasi. Pasal ini tampaknya dilatarbelakangi oleh kekurangan-kekurangan yang ada pada usaha peternakan rakyat, seperti kurangnya modal, manajemennya tradisional, organisasinya tidak profesional, lemahnya posisi tawar, produksinya tidak efisien, dan sederet kekurangan-kekurangan lainnya. Padahal, jika dilihat dari sisi pelakunya, 82,4% usaha perunggsan masih didominasi oleh peternakan rakyat (Soehadji, 1991). Dengan bersatunya peternak rakyat dalam wadah kelompok atau koperasi diharapkan kekurangan-kekurangan yang ada pada peternakan rakyat dapat diatasi sehingga tingkat kelangsungan usahanya terjamin dan tingkat kesejahteraannya semakin meningkat.

Koperasi Perunggsan

Kebijakan agar peternak rakyat bergabung dalam wadah koperasi disambut hangat oleh masyarakat perunggsan baik pengamat maupun pelakunya. Tidak hanya diskusi yang digelar, tetapi kebijakan mulia tersebut sudah mulai diwujudkan. Tampil sebagai pelopor adalah peternak-peternak di Bogor yang pada 28 Agustus 1996 lalu meresmikan berdirinya Koperasi Peternak Unggas "Kujang Lestari". Pada waktu usaha perunggsan di Indonesia masih dalam tahap pertumbuhan pada tahun 1974-1978 pernah berdiri Koperasi Produksi Peternakan Unggas Jakarta (KPPUJ) yang dikomandani oleh Marsekal (Purn) Sri Mulyono

Herlambang. Tugas utama koperasi ini adalah ikut menciptakan iklim agar peternak dapat meraih keuntungan yang layak sehingga mereka dapat meneruskan usahanya, dan di sisi lain menjamin produk hasil peternak yaitu telur dan daging ayam dapat diperoleh konsumen dengan murah dan mudah sehingga tingkat konsumsinya dapat terus meningkat. KPPUJ merupakan koperasi produksi perunggsan yang tidak hanya bergerak di sektor budidaya, tetapi juga pengadaan sapronak, pemotongan ayam dan pemasarannya.

Pada tahun awal-awal perjalanannya, KPPUJ cukup memiliki wibawa dalam menetapkan harga jual komoditas telur. Prestasi ini menjadikan KPPUJ dirasakan diperlukan oleh para peternak, sehingga ikatan antara koperasi dengan anggotanya bertambah erat. Tetapi, masa keemasan KPPUJ tersebut secara bertahap mengalami masa surut menyusul semakin banyaknya pengusaha bermodal kuat yang terjun di sektor budidaya, tidak ketinggalan sektor industri sapronak (bibit dan pakan) banyak pula yang ikut terjun mengembangkan peternakan budidaya. Dalam suasana persaingan itu, ternyata KPPUJ kalah bersaing dengan pengusaha besar swasta dalam hal harga, karena pada waktu itu pengusaha besar swasta berani banting harga dalam rangka merebut pasar yang lebih luas. Kondisi ini diperburuk lagi oleh ketidaksetiaan dan ketidakdisiplinan anggota dalam mentaati peraturan yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Peternak anggota koperasi mudah tergoda untuk menjual telur dan ayam pedagingnya di luar koperasi jika ada pihak yang menawarkan harga lebih tinggi. Pengalaman demikian juga dialami oleh koperasi perunggsan Putra Bhakti di Sawangan Bogor yang pada akhirnya juga ambruk. Bertolak dari pengalaman-pengalaman demikian, tentu timbul pertanyaan, "Dalam situasi dan kondisi perekonomian yang semakin menjurus kapitalis, mungkinkah koperasi perunggsan di Tanah Air berkembang?"

Strategi dan Kendala

Dalam UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian disebutkan, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pada pasal 16, dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, koperasi pada dasarnya adalah satu organisasi ekonomi. Sebagai organisasi ekonomi, maka yang pertama-tama harus ada dan kemudian menjadi tali pengikat para anggota pendukungnya adalah tujuan ekonomi koperasi. Berbeda dengan UU Perkoperasian sebelumnya (UU 12/1967), pada UU Perkoperasian yang baru ini koperasi tidak lagi dikatakan sebagai organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Koperasi sebagai organisasi ekonomi, seharusnya tidak berbeda dengan organisasi ekonomi lainnya baik swasta maupun BUMN. Di negara-negara kapitalis, koperasi dapat maju pesat sejajar dengan swasta dan perusahaan negara yang besar karena koperasi dipandang sebagai salah satu bangun usaha dari berbagai macam bangun usaha yang lain. Agar tetap survive dan berkembang koperasi harus menguntungkan, dan ini dapat dicapai apabila koperasi dianggap sebagai salah satu bangun usaha ekonomi.

Sedikitnya ada lima faktor strategis dan penting yang berakumulasi dan menentukan keberhasilan suatu organisasi ekonomi yaitu (1) sumber daya manusia yang berkualitas, (2) manajemen profesional, (3) ketersediaan dana yang cukup, (4) jaringan yang luas dan (5) dukungan pemerintah yang kuat. Apakah kelima faktor strategis ini dimiliki oleh koperasi perunggasan ?

Sebagai lembaga bisnis pertama-tama koperasi perunggasan harus dikelola secara profesional. Sehubungan dengan profesionalisme ini maka koperasi harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu menghimpun dan memobilisasikan berbagai sumber daya yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang usaha. Pengurus koperasi selain harus memahami manajemen perkoperasian, juga harus dapat menyusun mekanisme kerja yang mampu mengembangkan jiwa bisnis dalam koperasi, dan mampu menjalin hubungan yang erat dengan pemerintah, dengan pelaku ekonomi yang lain (swasta dan BUMN), dan dengan masyarakat. Pengurus koperasi harus orang yang berjiwa entrepreneur (wiraswastawan) yaitu orang-orang yang mampu menemukan dan menciptakan hal-hal yang baru. Mereka harus mampu menjalankan dan mengelola

manajemen faktor produksi dan berani mengambil risiko, selain mampu memanfaatkan peluang-peluang usaha yang ada. Mereka pun harus memahami tujuan berusaha, mampu mengorganisasikan suatu kegiatan usaha, mampu memupuk modal, merekrut tenaga kerja, melakukan hubungan kerja pihak lain serta dapat mewujudkan semua ini dalam organisasi fungsional. Dalam kehidupan ekonomi Indonesia, manusia-manusia seperti itu telah dimiliki atau timbul di kalangan swasta. Secara jujur harus diakui manusia-manusia seperti itu tidak banyak dimiliki oleh dunia koperasi, sehingga kecil kemungkinan pengurus koperasi perunggasan dapat mengelola koperasi sebagai lembaga bisnis secara profesional.

Kedua, dalam bisnis perunggasan yang untung besar adalah di sektor hulu (industri sapronak) dan sektor hilir (industri pengolahan dan pemasaran). Sehingga, apabila koperasi perunggasan ingin meningkatkan keuntungannya, tidak cukup hanya bergerak di sektor budidaya, tetapi juga harus mengelola usaha pembibitan sendiri, pabrik pakan dan juga rumah pemotongan ayam serta jalur-jalur distribusi untuk memperlancar aspek pemasarannya. Artinya, koperasi harus menangani seluruh kegiatan sektor perunggasan dari hulu hingga hilir. Apa ini mungkin? Untuk meningkatkan skala produksi saja memerlukan dana jutaan rupiah. Nah, kalau koperasi ingin menangani kegiatan dari hulu sampai hilir, berapa trilyun dana yang diperlukan dan darimana koperasi memperoleh dana sebanyak itu. Sementara koperasi masih dinyatakan sebagai kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal. Jika koperasi ingin berhasil sebagaimana swasta, seharusnya koperasi tidak cukup hanya dinyatakan sebagai kumpulan orang-orang, tetapi kumpulan orang-orang yang bermodal.

Memang dalam UU Perkoperasian yang baru (Bab VII), koperasi diberi kesempatan untuk memperkuat permodalan baik dari anggota, modal pinjaman maupun modal penyertaan. Tetapi, dalam prakteknya anggota koperasi pada umumnya adalah orang yang berekonomi lemah sehingga modal dari anggota jelas tidak banyak. Sementara itu, untuk memperoleh modal pinjaman bukan perkara yang mudah, karena lembaga pemberi pinjaman tetap harus memperhatikan kelayakan usaha si peminjam. Tidak mengherankan jika pada akhirnya pemerintah menyerukan

agar pihak swasta dan BUMN harus terlibat dalam upaya pengembangan koperasi dengan cara menyisihkan 2% keuntungannya untuk membantu pengusaha ekonomi lemah termasuk koperasi. Dengan dana yang terbatas, jelas tidak mungkin koperasi perunggasan dapat menangani kegiatan hulu sampai hilir, apalagi kegiatan ini sudah sangat dikuasai oleh swasta.

Ketiga, dalam era globalisasi saat ini jaringan pemasaran sangat dominan dalam menentukan perkembangan usaha. Dalam subsektor peternakan telah banyak perusahaan asing yang sukses karena go internasional seperti pabrik susu Nestle, perusahaan perunggasan Charoen Pokphand, pabrik obat Bayer, Kentucky Fried Chicken dan sebagainya. Sementara peternakan rakyat, walaupun tergabung dalam wadah PPU (Perhimpunan Peternak Unggas Indonesia) tidak pernah berhubungan bisnis satu sama lainnya. Mereka saling berusaha secara independen dan tidak ada kerjasama dalam bentuk apapun. Bidang usahanya pun pada sektor budidaya bukan sektor pemasaran. Padahal, sektor produksi dapat langgeng apabila jaringan pemasarannya luas dan lancar.

Keempat, peranan pemerintah harus semakin ditingkatkan. Dalam Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras (Bab IV) dinyatakan bahwa pemerintah melakukan pembinaan dalam pembentukan koperasi, penyuluhan dan bimbingan, serta mengusahakan kemudahan-kemudahan bagi anggota koperasi dalam hal memperoleh permodalan dan/atau kemitraan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara tiga kekuatan ekonomi yang ada, yang paling menonjol adalah swasta. Dibandingkan dengan kedua pelaku ekonomi lainnya yaitu sektor swasta dan BUMN, koperasi masih jauh ketinggalan terutama dalam hal pertumbuhan dan peranannya dalam perekonomian Indonesia. Walaupun secara kuantitas perkembangan koperasi cukup pesat, namun sumbangannya dalam perekonomian nasional masih kecil bila dibandingkan dengan sektor swasta dan BUMN. Koperasi baru menyumbang sekitar 5%, BUMN sekitar 25%, sementara swasta sudah mampu memberikan kontribusinya sebesar 70% terhadap pendapatan kotor nasional. Ketimpangan ini tampaknya memang merupakan strategi pemerintah karena pertimbangan praktis, daripada mengimpor biarlah pihak swasta yang melakukan usaha terlebih dahulu. Selain itu juga adanya sasaran pemerintah untuk

menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kunci utama bagi pertumbuhan adalah akumulasi modal atau kapitalisasi, yang memperlancar peningkatan produksi dengan mempercepat pola-pola investasi. Dengan maksud itulah, dalam tahap-tahap awal pertumbuhan dan pembangunan nasional, pemerintah memberikan andil yang besar pada sektor swasta.

Harus diakui bahwa pertumbuhan dan perkembangan perusahaan swasta dewasa ini tidak terlepas dari campur tangan pemerintah terutama menyangkut kebijakan seperti kemudahan ekspor, debirokratisasi, deregulasi dan serangkaian paket kebijakan yang lain. Koperasi belum banyak memperoleh fasilitas seperti halnya perusahaan swasta. Situasi ini disebabkan koperasi sendiri masih terlalu lemah atau kurang dipercaya, atau sektor lain telah berkembang terlebih dahulu sehingga secara ekonomis-rasional memang harus "diserahkan" kepada sektor lain di luar koperasi, utamanya sektor swasta. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah sendiri memang lebih percaya kepada sektor swasta daripada sektor koperasi yang dinilai belum siap. Pandangan demikian tidak dapat disalahkan mengingat adanya kenyataan dalam masyarakat dewasa ini dan faktor-faktor historis, disamping masih berlakunya anggapan diantara sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa koperasi sebagai suatu badan sosial.

Jika koperasi perunggasan ingin dikembangkan, maka keterlibatan pemerintah memang sangat diperlukan, mengingat masih banyak koperasi yang belum mampu mandiri mengembangkan usahanya, baik karena miskinnya dana maupun rendahnya kemampuan manajerial.

Penutup

Dengan melihat fakta-fakta di atas, tampaknya koperasi perunggasan hanyalah suatu utopia (harapan yang besar), dan sangat sulit mewujudkannya sebagai suatu realita. ***

(Warta Pertanian No. 169-170/Juni-Juli 1997)

3.2

PERBEDAAN KOPERASI TRADISIONAL DAN KOPERASI GENERASI BARU

Kerjasama usaha dalam wadah koperasi merupakan satu cara untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan produsen pertanian (petani dan peternak). Dengan berkoperasi produsen dapat mengembangkan usaha dalam bidang pengolahan dan pemasaran hasil, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Jika hanya bergerak di bidang produksi usahatani saja produsen pertanian hanya memperoleh nilai tambah rata-rata 9%, sedangkan nilai tambah pengolahan mencapai 19%, lembaga pemasaran besar 22%, dan pengecer 23%.

Salah satu model koperasi yang dapat diterapkan oleh produsen pertanian Indonesia adalah Koperasi Generasi Baru (KGB) atau New Generation Cooperative (NGC). KGB bukan sebuah bentuk badan usaha baru, melainkan cara baru mengelola sebuah koperasi. Bidang usaha KGB terintegrasi vertikal dan terjalin langsung dengan pasar. KGB mengembangkan usaha ke bidang pengolahan produk dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemasaran. KGB memungkinkan produsen bekerjasama dalam bidang pengolahan dan pemasaran, disamping tetap mengelola usahatannya secara mandiri. Dengan cara ini, KGB mampu memberi pendapatan lebih besar kepada produsen dengan menjual produk olahan maupun bahan mentah. Organisasi KGB diterapkan pertama kali di Amerika Serikat awal dekade 1970-an, menjadi populer pada dekade 1990-an, dan sekarang diterapkan oleh ratusan koperasi baru di Amerika.

Koperasi bertujuan meningkatkan pendapatan anggota melalui pembagian keuntungan dari kegiatan usaha bersama yang dilakukan. Anggota koperasi bertanggung jawab dalam menyediakan modal dan mengelola usaha. Baik koperasi tradisional (KT) maupun KGB dapat memiliki usaha dan tujuan yang sama,

namun berbeda terutama dalam bidang usaha, keanggotaan, dan permodalan. KGB menjurus pada produk bernilai tambah selain bahan mentah, sementara KT umumnya hanya fokus pada satu bidang usaha. KGB mengolah produk anggota pada pabrik pengolahan milik koperasi. Keuntungan hasil pengolahan didistribusikan kembali kepada anggota secara proporsional sesuai saham mereka di KGB. Keanggotaan KGB terbatas atau tertutup (closed cooperative) sesuai kapasitas produksi yang diolah dan dipasarkan, sedangkan KT keanggotaan terbuka (open cooperative). Dalam hal permodalan, KGB memerlukan modal yang besar yang berasal dari hak pemasokan (delivery right) yang dijual kepada anggota, sedangkan KT memerlukan modal yang relatif sedikit dari simpanan anggota.

KT dan KGB secara lebih rinci dapat dibedakan berdasar fungsi bisnis koperasi dan peran atau hubungan produsen dengan koperasi. Semua jenis usaha, termasuk koperasi, menjalankan empat fungsi bisnis yaitu pemasaran, pembagian keuntungan, penanaman modal, dan pengendalian atau pengelolaan. Setiap fungsi bisnis berhubungan dengan peran pelaku usaha (stakeholder) atau pengguna koperasi (cooperative user). Pengguna koperasi dapat berperan sebagai (1) pelanggan, (2) pemodal, (3) pemilik, dan (4) anggota. Pelanggan adalah pelaku usaha yang membeli bahan baku atau menjual produk ke koperasi. Pemodal adalah mereka yang meminjamkan modal dan menerima bagian keuntungan. Pemilik adalah mereka yang menanam modal atau memiliki kekayaan di koperasi. Anggota adalah mereka yang memiliki hak suara untuk mengelola atau mengendalikan koperasi, memilih direktur, merumuskan AD dan ART, dan mengambil keputusan dalam pengembangan usaha, atau pembubaran koperasi.

Pengguna KT atau koperasi terbuka (open cooperative) umumnya terlibat dalam berbagai peran. Pengguna KT yang berperan pelanggan, tetapi bukan pemodal, pemilik atau anggota disebut pelanggan bukan pemodal (non-patronage customers). Pengguna yang berperan sebagai pelanggan, pemodal, dan pemilik, tetapi bukan anggota, disebut pelanggan atau pemodal bukan anggota (non-member customers or patrons). KGB atau koperasi tertutup (closed cooperative) membutuhkan pengguna yang berperan dalam keempat peran, sehingga cukup disebut anggota.

Berdasar fungsi bisnis dan peran produsen dengan koperasi, perbedaan KT dan KGB dikelompokkan menjadi empat kelompok, yaitu: 1) transaksi pemasaran pelanggan, (2) distribusi keuntungan pemodal, (3) kewajiban investasi pemilik, dan (4) hak suara anggota (Tabel 3.2.1).

Tabel 3.2.1.
Perbedaan Koperasi Tradisional dan Koperasi Generasi Baru

| FUNGSI BISNIS DAN PERAN PRODUSEN | KOPERASI TRADISIONAL | KOPERASI GENERASI BARU |
|---|---|---|
| 1. Transaksi Pemasaran Pelanggan: Hak Pengiriman Kewajiban Pengiriman Kualitas Diterima Identitas Produk Pembayaran Awal | Tidak terbatas Tidak wajib Bebas Tidak terjamin Harga pasar | Pembelian terbatas Wajib Tertentu Terjamin Harga kontrak |
| 2. Distribusi Keuntungan Pemodal: Tingkat Hasil Usaha Investasi Kembali Penundaan Pembayaran | Rendah Tinggi Jarang | Tinggi Rendah Biasa |
| 3. Kewajiban Investasi Pemilik: Investasi Awal Proporsi Investasi Pengalihan Saham Nilai Jual Pengembalian Kekayaan Investasi Pengembangan Usaha | Sangat sedikit Rendah – tinggi Sangat Sulit Tetap Tergantung kemampuan Sebagian keuntungan | Sangat banyak Sangat tinggi Bebas Tergantung prospek Dialihkan/Dijual Menjual hak pengiriman |
| 4. Hak Suara Anggota Persyaratan Keanggotaan Hak Suara | Longgar Biasanya satu suara | Ketat Jumlah bervariasi |

Keterangan:

1. Transaksi Pemasaran Pelanggan

- Pada KT hak pengiriman komoditas umumnya tidak terbatas. Kebanyakan KT menerima dan memasarkan semua komoditas yang dikirim produsen, baik anggota maupun bukan anggota. Jumlah komoditas yang dapat dikirim oleh anggota KGB terbatas berdasar hak pengiriman yang dibeli anggota.
- KT umumnya tidak memiliki perjanjian kewajiban pengiriman (delivery obligation) dengan anggota. Anggota dapat menjual produknya kemana saja karena harga yang lebih mahal atau pertimbangan lain. Kewajiban pengiriman merupakan kewajiban bagi anggota KGB. Kewajiban

pengiriman berkaitan dengan jumlah produk harus diolah dan dipasarkan KGB.

- KT menerima komoditas anggota berbagai kualitas dan memasarkan semua produk yang dikirim anggota. KGB menetapkan persyaratan kualitas bagi produk anggota, karena harus mengolah dan memasarkan produk dengan karakteristik dan perlakuan tertentu.
 - Dengan kualitas bervariasi, KT tidak menangani produk beridentitas, sedangkan KGB umumnya mengolah dan memasarkan produk beridentitas sebagai cara untuk menjamin kualitas produk.
 - Pembayaran komoditas yang dibeli KT berdasarkan harga pasar, sedangkan KGB berdasar harga kontrak. Anggota KGB menyadari bahwa mereka tidak sekedar menjual bahan baku, tetapi juga mengolah, dan memperoleh bagian keuntungan dari produk yang diolah dan dipasarkan KGB.
2. Distribusi Keuntungan Pemodal
- Besarnya tingkat hasil usaha dalam KT relatif rendah, umumnya 20-35%. Sebagian hasil usaha ini dibayarkan kontan kepada anggota, dan sebagian yang lain digunakan untuk menambah investasi anggota. Hasil usaha yang dibayarkan kepada anggota KGB dapat mencapai 65-85% per tahun. Pembayaran hasil usaha didasarkan pada besarnya investasi sesuai hak pengiriman yang dimiliki anggota.
 - Modal baru yang diperlukan KT umumnya berasal dari hasil usaha. Karena itu, sebagian besar hasil usaha KT ditanam kembali untuk mengembangkan usaha atau mengganti aset koperasi. KGB memerlukan modal besar pada saat didirikan, karena itu hanya sebagian kecil hasil usaha yang ditanam kembali pada KGB.
 - KGB menggunakan mekanisme pembayaran ditunda (delayed payment mechanism) berdasarkan jumlah produk yang dipasarkan dan setelah besarnya keuntungan diperhitungkan. Mekanisme pembayaran ini jarang terjadi di KT.
3. Kewajiban Investasi Pemilik
- Investasi awal KT di Amerika umumnya rendah, kurang dari \$100 (sekitar Rp 950.000,-), sedangkan investasi awal setiap anggota KGB mencapai \$10.000 - \$12.000 (sekitar Rp

95 juta – 114 juta) sesuai hak pengiriman yang dibeli anggota. KGB menetapkan jumlah minimum dan maksimum hak pengiriman yang dapat dibeli anggota.

- Proporsi investasi anggota KT umumnya rendah karena sebagian besar investasi berasal dari hasil usaha yang ditanam kembali. Semakin banyak hasil usaha yang ditanam kembali, semakin bertambah proporsi investasi anggota. Anggota dapat mengurangi proporsi investasi dengan menarik kembali modal yang ditanam di KT. KGB membutuhkan investasi dari penjualan hak pengiriman. Proporsi investasi anggota KGB tergantung hak pengiriman yang dibeli.
- Anggota KGB lebih fleksibel dalam menambah atau mengurangi saham (kekayaan) yang dimiliki di KGB. Anggota KGB dapat mengalihkan (menjual) saham berupa hak pengiriman yang dimiliki kepada anggota lain melalui persetujuan dewan direktur KGB. KGB juga lebih bebas mengalokasikan investasi anggota, karena saham anggota tidak bisa ditarik kembali. Anggota KT sangat sulit mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, tetapi dapat menambah dan mengurangi investasinya sesuai peraturan KT.
- Nilai jual kekayaan anggota KT relatif tetap, sedangkan nilai jual kekayaan anggota KGB dapat naik atau turun dari nilai awal tergantung prospek keuntungan yang dapat dihasilkan KGB.
- Kekayaan anggota KT dapat dikembalikan sesuai kemampuan dan kebijakan KT. Kekayaan anggota KGB tidak dikembalikan, tetapi dapat dialihkan (dijual) sesuai peraturan KGB.
- Untuk pengembangan usaha, KT umumnya tidak mewajibkan anggota untuk menambah investasinya, tetapi menanamkan kembali hasil usaha yang diperoleh. Untuk keperluan yang sama, KGB menerbitkan dan menjual hak pengiriman baru kepada anggota.

4. Hak Suara

- KT memiliki persyaratan keanggotaan yang lebih sederhana. KT umumnya beranggota produsen pertanian, dan tidak menetapkan perjanjian pemasaran dengan

anggota. KGB menetapkan persyaratan yang lebih ketat menyangkut komoditas yang diproduksi anggota, dan mewajibkan anggota membeli hak pengiriman yang memerlukan modal besar.

- Hak suara digunakan dalam pengambilan keputusan koperasi, misalnya menetapkan AD dan ART, memilih direktur, dan mengembangkan usaha. Hak suara pada KT umumnya satu suara setiap anggota tanpa mempertimbangkan volume usaha atau modal yang ditanam di koperasi. Hak suara KGB umumnya bergantung pada jumlah kekayaan (hak pengiriman) yang dimiliki, semakin banyak hak pengiriman semakin banyak hak suara anggota, dan sebaliknya. ***

(Poultry Indonesia Oktober 2006)

3.3

AGRIBISNIS PETERNAKAN DENGAN POLA KEMITRAAN

Pada perekonomian di negara berkembang (*developing country*) pertanian berperan penting dalam perekonomian. Di Indonesia, 19% pendapatan nasional merupakan hasil pertanian, 50% tenaga kerja bekerja di sektor pertanian, 62% pendapatan masyarakat pedesaan berasal dari pertanian, dan 55% pendapatan rumah tangga dibelanjakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Perkembangan ekonomi akan mengubah struktur perekonomian suatu negara. Di negara maju (*developed country*), pertanian memegang peranan sangat kecil dalam pendapatan nasional, sebagian kecil tenaga kerja melakukan kegiatan di bidang pertanian, dan hanya sebagian kecil pendapatan rumah tangga yang digunakan untuk membeli hasil-hasil pertanian. Menurut **Sukirno (1994)** kemunduran peranan sektor pertanian dalam perekonomian disebabkan oleh dua faktor yaitu perkembangan permintaan yang lambat, dan kemajuan teknologi di sektor pertanian yang memungkinkan pertambahan produktivitas yang tinggi.

Pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa mengalami perubahan yang nyata dalam perekonomian yang mengalami pertumbuhan. Kenaikan pendapatan akan menaikkan konsumsi berbagai macam barang industri maupun barang pertanian, tetapi kenaikan itu tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan. Peningkatan konsumsi barang bukan pertanian mengalami pertambahan yang lebih cepat daripada peningkatan pendapatan, yang berarti memiliki elastisitas pendapatan yang *elastis*. Sebaliknya, permintaan hasil-hasil pertanian bertambah lebih lambat daripada kenaikan pendapatan, yang berarti memiliki elastisitas pendapatan yang *inelastis*. Sebagai akibat perbedaan elastisitas ini, maka dalam jangka panjang perbedaan harga barang industri dan barang pertanian cenderung menjadi semakin besar.

Perkembangan perekonomian dapat menyebabkan

penurunan peran sektor pertanian. Ini dimungkinkan oleh perkembangan teknologi yang pesat di sektor pertanian, yang memungkinkan kenaikan produktivitas yang tinggi. Jika pada tahun 1965 produktivitas padi hanya 17 ku/ha, maka tahun 1990 sudah dapat mencapai 4 ton/ha. Pada bidang peternakan, seekor ayam dapat menghasilkan telur 250 butir/tahun dibandingkan hanya 100 butir/tahun pada tiga puluh tahun yang lalu. Sebagai akibat dari kenaikan produktivitas ini, yang terjadi di seluruh belahan dunia, produksi pertanian dapat ditingkatkan dengan cepat melebihi kebutuhan manusia. Sehingga, apa yang dikawatirkan Thomas Robert Malthus bahwa dunia akan kekurangan pangan menjadi tidak terbukti. Kemampuan untuk meningkatkan produksi pertanian ini jauh melebihi kenaikan permintaannya. Keadaan ini menimbulkan dua implikasi penting bagi sektor pertanian, Pertama, terjadinya perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang terkonsentrasi di perkotaan. Keterbatasan kemampuan sektor industri menampung pindahan tenaga kerja ini telah membawa dampak lanjutan seperti urbanisasi dan pengangguran di perkotaan. Kedua, kemajuan teknologi yang cepat menimbulkan masalah kelebihan produksi pertanian. Keadaan ini menyebabkan harga hasil-hasil pertanian cenderung tetap berada di tingkat yang rendah.

Produksi pertanian yang melimpah dengan harga yang stabil telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (konsumen) yang dapat membeli pangan dengan mudah dan murah. Namun, tidak demikian dengan produsen pertanian. Kenaikan produksi ternyata telah menurunkan kesejahteraan sebagai akibat harga jual produk mereka yang semakin murah. Tidak mengherankan jika pada awal tahun 2000 ini jutaan petani padi, tebu, bawang, mengalami keresahan mendalam sebagai akibat panen raya (peningkatan produksi) yang diperparah dengan dibukanya kran impor produk serupa oleh pemerintah yang mengakibatkan hasil harga pertanian anjlok. Di beberapa daerah harga gabah hanya Rp 700,-/kg, dan bawang merah Rp 300,-/kg. Sebelumnya, kejadian yang sama juga dialami para peternak yang kebanjiran daging dan telur impor yang tentu saja harganya lebih murah daripada harga daging dan telur lokal.

Peningkatan produksi dan masuknya produk pertanian

impor baik oleh kebijakan pemerintah maupun tekanan internasional telah menyadarkan para produsen pertanian bahwa mereka telah memasuki rimba perdagangan global yang sarat dengan persaingan. Perubahan ekonomi dunia ke arah globalisasi merupakan suatu perubahan yang terencana dan terukur yang menjadi target negara-negara maju untuk mengekspansi pasar produk-produk unggulannya (Hafsah, 1999). Hanya mereka yang produktif, efisien dan bermutu yang mampu memenangkan persaingan dan berhak melangsungkan kehidupan usahanya. Untuk itu perlu dilakukan strategi tertentu agar produsen pertanian Indonesia dapat mengatasi persaingan yang tidak hanya terjadi antara produsen di dalam negeri tetapi juga dengan produsen luar negeri.

Persaingan Global

Komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar persaingan sempurna (*perfect competition*), yang antara lain berciri : (1) terdapat banyak produsen (petani) dan kosumen (penduduk), (2) sumberdaya (tenaga kerja, modal, lahan, dan teknologi) dengan mudah beralih pada usaha yang lebih menguntungkan, (3) komoditas pertanian memiliki kesamaan bentuk dan kualitas, (4) produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi, dan (5) produsen mudah keluar masuk dalam industri. Dengan berlakunya perdagangan global yang dipercepat, maka tingkat persaingan industri persaingan antar negara akan semakin ketat, karena komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani suatu negara, secara alami mudah disubstitusi oleh komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani negara lain. Karena itu, tingkat keuntungan yang diperoleh petani pun akan semakin mengecil.

Pada masa lalu strategi industrialisasi pertanian untuk meningkatkan keuntungan petani adalah dengan menurunkan biaya produksi melalui penerapan teknologi baru, memperbesar skala usaha untuk mencapai skala ekonomi (*economies of scale*), dan dengan memberi nilai tambah (*value added*) pada produk yang dihasilkan. Tetapi, penerapan teknologi baru hanya memberikan manfaat dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Jika petani-petani yang lain juga menggunakan teknologi yang sama dalam

berproduksi, maka manfaat teknologi baru tersebut bagi petani menjadi semakin kecil. Seperti telah dijelaskan pada bagian awal tulisan ini, peningkatan produksi akan menurunkan harga jualnya, sehingga pendapatan petani juga akan semakin menurun. Demikian pula dengan peningkatan skala usaha, dan pemberian nilai tambah, tidak akan mengurangi persaingan dengan petani lain yang dapat menghasilkan produk serupa. Karena itu, strategi industrialisasi pertanian pada era globalisasi perekonomian adalah bagaimana menghindari persaingan sempurna menuju ke arah persaingan yang tidak sempurna (*imperfect competition*). Menurut Saxowsky and Duncan (1998), professor ekonomi pertanian Universitas North Dakota USA, industrialisasi adalah "*adopting business strategies to shift the farm business away from perfect competition*" (penerapan strategi bisnis untuk menghindarkan usaha pertanian dari persaingan sempurna). Strategi ini dapat ditempuh dengan cara menyatukan petani melalui berbagai kesepakatan bisnis seperti kontrak usaha (*contract farming*), kemitraan (*partnership*), aliansi strategis (*strategic alliances*), integrasi vertikal (*vertically integration*), maupun koperasi (*cooperative*).

Di Amerika Serikat, misalnya, yang merupakan negara pertanian maju, pola kemitraan yang lebih dikenal dengan sistem "*contract farming*" diterapkan sebagai strategi pengembangan pertaniannya sejak tahun 1950-an. Dalam pengembangan pertanian Amerika ini dikenal dua macam kontrak yaitu pemasaran dan produksi (*marketing and production contract*). Kontrak pemasaran adalah kesepakatan tertulis maupun lisan antara kontraktor dan produsen menyangkut harga dan tempat penjualan suatu komoditas sebelum panen atau sebelum komoditas itu siap dipasarkan. Kontrak produksi merinci suplai input oleh kontraktor, kualitas dan kuantitas komoditas tertentu, dan jenis kompensasi yang diberikan kepada produsen peran yang dikerjakannya. Menurut survei USDA (1996), pada tahun 1993 sebanyak 83% total nilai produksi pertanian tanaman dan peternakan diperoleh dengan sistem kontrak. Dari sekitar 2 juta farm yang ada, sebanyak 229.000 farm dijalankan dengan sistem kontrak dimana 185.000 farm dalam bentuk kontrak pemasaran dan 44.000 farm dalam bentuk kontrak produksi.

Kemitraan Usaha Pertanian

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian melalui penguatan daya saing (*competition power*), pemerintah Indonesia telah mengarahkan para produsen pertanian untuk saling menjalin kerjasama kemitraan. Menurut PP No. 44/1997 tentang Kemitraan disebutkan bahwa kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Dalam bidang pertanian, seperti diatur dalam Kepmentan No. 940/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Bertindak sebagai kelompok mitra antara lain petani-nelayan, kelompok tani-nelayan, gabungan kelompok tani-nelayan, koperasi, dan usaha kecil, sedangkan perusahaan mitra terdiri perusahaan menengah dan besar pertanian, dan perusahaan menengah dan besar di bidang pertanian. Kemitraan usaha pertanian ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri.

Kemitraan usaha pertanian dapat dilakukan dengan 5 pola yaitu pola inti-plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, dan kerjasama operasional agribisnis (KOA). Pola inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Pada pola sub kontrak, kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Pada pola dagang umum, perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Pada pola keagenan, kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Dan pada pola KOA, kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan

mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian.

Berbagai pola kemitraan usaha pertanian telah banyak diterapkan pada kegiatan agribisnis di Indonesia. Pola inti-plasma telah banyak dilakukan pada kegiatan agribisnis usaha perkebunan antara lain PIR Perkebunan, PIR Transmigrasi, PIR Bun-KKPA, dan PIR perunggasan. Beberapa komoditas yang diusahakan dan cocok dalam kemitraan tersebut antara lain kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan ayam ras. Pola dagang umum diterapkan pada kegiatan agribisnis hortikultura di kawasan Puncak dan Sukabumi, dimana beberapa kelompok tani yang tergabung dalam bentuk koperasi maupun badan lainnya bermitra dengan toko swalayan atau mitra usaha lainnya untuk memenuhi atau mensuplai kebutuhannya sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan mitra. Pola dagang umum juga dilakukan oleh koperasi persusuan yang memasok kebutuhan susu industri pengolah susu (IPS). Pola waralaba dimana perusahaan mitra memberi hak lisensi merk dagang dan saluran distribusi kepada kelompok mitra yang disertai bimbingan manajemen, merupakan pola kemitraan lain yang banyak diterapkan pada usaha makanan seperti McDonald, Kentucky, dan Coca Cola.

Dengan menjalin kemitraan, produsen memperoleh manfaat antara lain : (1) stabilitas pendapatan (*income stability*), karena berkurangnya risiko produksi dan pemasaran, (2) peningkatan efisiensi (*improved efficiency*) melalui bimbingan teknis, manajemen, pengetahuan pasar, dan akses teknologi, (3) keamanan pasar (*market security*) berkaitan dengan grade dan standar produk yang dihasilkan, dan (4) akses terhadap kapital (*access to capital*) lebih mudah karena sebagian sarana produksi dipenuhi oleh kontraktor sehingga produsen dapat memperbesar skala usahanya. Bagi perusahaan, manfaat yang diperoleh antara lain : (1) terjadinya stabilitas produksi yang menjamin kontonuitas suplai (*controlling input supply*), (2) meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, baik tenaga kerja maupun permodalan, (3) menciptakan perluasan pasar dan memperkuat posisi persaingan pasar, dan (4) memperluas kesempatan melakukan ekspansi dan diversifikasi operasional perusahaan.

Analisis Usaha Kemitraan

Pada agribisnis ayam pedaging, pola kemitraan telah terbukti merupakan jalan keluar dari prahara krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun 1997. Jika pada tahun 1997 struktur pelaku agribisnis perunggasan 30% kemitraan dan 70% usaha mandiri, maka tahun 1999 struktur ini berubah menjadi 80% kemitraan dan 20% usaha mandiri (Shane, 2000). Pada kemitraan ayam pedaging ini perusahaan mitra menyediakan sarana produksi berupa bibit ayam, pakan, dan obat-obatan, memberi bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah dan/atau memasarkan hasil produksi peternakan, mengusahakan permodalan, sedangkan peternak plasma menyediakan tenaga kerja, kandang dan peralatan untuk melaksanakan budidaya. Berikut adalah analisis usaha seorang peternak plasma ayam pedaging yang melakukan kegiatan kemitraan usaha pada April - Juni 1998 (Tabel 3.3.1).

Pada Tabel 3.3.1 tampak bahwa keuntungan finansial yang diterima peternak plasma sangat besar dibandingkan dengan biaya sendiri yang dikeluarkan plasma. Dari total biaya sebesar Rp 72.943.844,- untuk memelihara ayam 12.000 ekor, peternak plasma hanya mengeluarkan Rp1.860.000,- (2,55%) untuk keperluan biaya tenaga kerja, gas dan listrik, sewa kandang dan peralatan, dan sekam, sedangkan perusahaan inti mengeluarkan biaya sebesar Rp 71.083.844,- (97,45%) untuk keperluan biaya DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan. Dari pemeliharaan 12000 ekor, peternak plasma memperoleh keuntungan bersih Rp 6.646.866,- (Rp 554,-/ekor) selama satu siklus produksi (39 hari). Dengan membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dan modal pribadi yang dikeluarkan plasma, diperoleh rasio tingkat hasil (rentabilitas) modal pribadi sebesar Rp 6.646.866,-/Rp 1.860.000,- atau 357,36%.

Tabel 3.3.1.
Perhitungan rugi laba peternak plasma dalam satu siklus produksi

| No. | Uraian | Satuan |
|--|--|---|
| I. Parameter Teknis | | |
| 1. | Jumlah pemasukan DOC | : 12.000 ekor |
| 2. | Jumlah pakan | : 32.600 kg |
| 3. | Konversi pakan | : 1,773 (standar inti 1,837) |
| 4. | Jumlah ayam yang keluar | : 11.079 ekor (92,330%) |
| 5. | % kematian | : 7,670% (standar inti 5,25%) |
| 6. | Rerata berat badan/ekor | : 1,66 kg |
| 7. | Umur penjualan | : 39 hari |
| 8. | Harga kesepakatan | : Rp 4260 - 4370,- (rata-rata Rp 4.257,21, tgt. berat ayam) |
| II. Perhitungan biaya | | |
| A. Biaya yang dikeluarkan peternak plasma : | | |
| 1. | Tenaga kerja | : Rp 300.000,- |
| 2. | Gas dan listrik | : Rp 700.000,- |
| 3. | Sewa kandang dan alat | : Rp 720.000,- |
| 4. | Sekam | : Rp 140.000,- |
| | | ----- + |
| | Subtotal | Rp 1.860.000,- |
| B. Biaya yang dikeluarkan perusahaan inti : | | |
| 1. | DOC 12.000 ekor | : Rp 18.000.000,- |
| 2. | Pakan 32.600 kg | : Rp 51.541.820,- |
| 3. | Vaksin dan obat 57 unit | : Rp 1.542.024,- |
| | | ----- + |
| | Subtotal | : Rp 71.083.844,- |
| | Total biaya (A + B) | : Rp 72.943.844,- |
| III. Penerimaan | | |
| 1. | Penjualan ayam 11.079 ekor (18.383,20 kg) | : Rp 78.261.230,- |
| 2. | Bonus (insentif) | : Rp 1.329.480,- |
| | | ----- + |
| | Total | : Rp 79.590.710,- |
| | IV. Keuntungan | : Rp 6.646.866,- |
| | V. Rentabilitas | : 357,36%. |

Sumber : Sutawi (1998)

Kesimpulan

Peningkatan produksi melebihi peningkatan daya beli, dan persaingan yang semakin ketat antar produsen pertanian di dalam negeri dan di dunia, telah berdampak negatif pada kesejahteraan produsen pertanian akibat harga jual produk mereka yang semakin rendah. Salah satu strategi untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian melalui penguatan daya saing adalah dengan menerapkan manajemen usaha dengan pola kemitraan. Dengan pola kemitraan, paling tidak mitra plasma akan memperoleh manfaat berupa stabilitas pendapatan dan kemudahan akses terhadap modal, sedangkan perusahaan mitra akan memperoleh jaminan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk yang diolah dan dipasarkan. ***

(Need Vol. 2 No. 6 Juni 2001)

3.4

KEMITRAAN AGRIBISNIS AYAM PEDAGING DI AMERIKA SERIKAT

Industri ayam pedaging (broiler) Amerika Serikat merupakan industri perunggasan yang terakhir dikembangkan setelah kalkun dan ayam petelur, tetapi saat ini merupakan penghasil daging terbesar melampaui daging sapi. Setelah Perang Dunia II, industri ayam pedaging berkembang menjadi industri pertanian yang paling terintegrasi. Saat ini, para integrator menguasai hampir semua produksi daging ayam dibawah kontrak produksi (kemitraan) dengan peternak. Konsumsi daging broiler per kapita di Amerika Serikat meningkat lebih dari 100 kali, dari 0,7 pound (sekitar 0,32 kg) tahun 1935 menjadi 72 pound (sekitar 32,66 kg) tahun 1997, melampaui konsumsi daging sapi sejak tahun 1973. Amerika Serikat merupakan produsen daging ayam terbesar di dunia dengan total produksi tahun 1997 mencapai 14,531 juta ton (39,25% dari produksi daging ayam dunia), dan total ekspor 2,130 juta ton (39,73% total ekspor daging ayam dunia).

Pada periode tahun 1930-an, usaha peternakan ayam diusahakan oleh peternak mandiri berskala kecil dengan tujuan utama untuk produksi telur, sedangkan daging ayam merupakan hasil sampingannya. Selama Perang Dunia II harga daging ayam mencapai puncaknya, dan mendorong peningkatan produksi sampai tiga kali lipat antara tahun 1940-1945. Keadaan ini mendorong dilakukannya alokasi kapital untuk pengembangan industri ayam pedaging selama sepuluh tahun pasca perang. Sampai tahun 1954 tidak ada peternak berskala 100.000 ekor, tetapi sampai tahun 1964 sebanyak 12,5% peternak telah memiliki skala usaha lebih dari 100.000 ekor ayam pedaging. Dengan dikembangkannya bibit ayam untuk produksi daging, industri ayam pedaging berkembang secara mandiri bukan lagi hasil sampingan industri perunggasan yang lain.

Perkembangan Sistem Kontrak

Meskipun industri ayam pedaging berkembang pesat, pada saat itu sebagian besar peternak masih menjalankan usahanya secara mandiri. Peternak membeli pakan dari agen pakan, bibit ayam dari pembibit ayam (breeder), dan kebutuhan lain dari toko yang lain. Jika saatnya dipanen, peternak menjual ayamnya kepada prosesor yang menawarkan harga tertinggi. Kebutuhan kapital semakin meningkat seiring dengan upaya peternak melakukan ekspansi produksi dengan mendirikan kandang besar dan mengadopsi teknologi baru. Sejalan dengan peningkatan produksi dan konsumsi yang pesat pada tahun 1950-an, tingkat penawaran dan harga menjadi tidak stabil, sehingga menjadikan usaha ayam pedaging sebagai bisnis yang sangat berisiko.

Pabrik pakan besar menyadari bahwa industri ayam pedaging sangat potensial untuk berkembang dan semakin memperbesar pasar bagi pakan yang dihasilkannya. Konsekuensinya, mereka mengadakan kontrak produksi (kemitraan) dengan peternak. Dengan sistem kontrak dapat menjamin pasar bagi pabrik pakan, mengurangi risiko keuangan dan pendapatan peternak, dan menciptakan insentif bagi peternak untuk memproduksi secara efisien. Tanggungjawab atas risiko dan manajemen secara sebagian besar ditransfer kepada pabrik pakan yang juga berperan sebagai integrator.

Sejak tahun 1930, hubungan antar lini vertikal (vertical stages) pada industri ayam pedaging, mulai pembibitan, penetasan, pabrik pakan, peternak, prosesor, sampai pedagang eceran, menjadi semakin dekat. Koordinasi lini vertikal melalui kontrak produksi dan pengintegrasian produksi mempercepat laju adopsi teknologi baru guna mencapai efisiensi produksi dan pemasaran. Seiring perkembangan industri ayam pedaging, sistem kontrak menjadi suatu kebutuhan baik bagi pabrik pakan maupun peternak. Integrasi vertikal antara kegiatan produksi dan prosesing juga berkembang seiring dengan peningkatan produksi dan permintaan daging ayam.

Penerapan kontrak produksi berkembang dengan cepat. Menurut catatan, kontrak produksi ayam pedaging pertama ditandatangani tahun 1933, menyangkut tanggungjawab bersama

atas risiko dan keuntungan antara agen pakan dan peternak. Pada tahun 1950, 95% peternak ayam pedaging masih beternak secara mandiri. Tetapi, setelah pabrik pakan besar nasional memasuki bidang produksi ayam pedaging di wilayah Selatan tahun 1955, peternak mandiri hanya menguasai 10% dari total produksi ayam pedaging, sedangkan 88% diproduksi dengan sistem kontrak dan 2% diproduksi oleh perusahaan terintegrasi. Saat ini 90% usaha ayam pedaging dijalankan dengan sistem kontrak produksi, sedangkan sisanya dilakukan oleh perusahaan integrator yang memiliki semua fasilitas produksi.

Enam Macam Kontrak

Ada enam macam sistem kontrak produksi (kemitraan) yang terjadi pada industri ayam pedaging, yaitu (1) laporan keuangan terbuka (open account), (2) harga garansi (guaranteed price), (3) imbalan-tetap (flat-fee), (4) kontrak bagian (share contract), (5) konversi pakan (feed conversion), dan (6) kombinasi (combination).

Kontrak pertama antara integrator (biasanya pabrik pakan) dan peternak adalah kontrak laporan keuangan terbuka (open account). Dengan kesepakatan ini, kredit diperbesar sehingga mempermudah peternak memperoleh kapital. Peternak menyediakan kandang, peralatan, tenaga kerja, bahan bakar, dan saponak yang lain. Setelah ayam dijual, peternak membayar hutangnya. Keuntungan pabrik pakan berasal dari menaikkan (mark-up) harga saponak atau dari imbalan jasa pelayanan. Seluruh keuntungan dan kerugian ditanggung oleh peternak. Selama peternak hanya berusaha pada bidang produksi ayam pedaging dan menjadikan usaha ini sumber pendapatan, risiko harga dan produksi menjadi semakin kritis.

Kontrak harga garansi (guaranteed price) memperkecil risiko harga dan output, dan mengurangi kendala keuangan peternak. Dengan kontrak ini, pabrik pakan menyediakan sarana produksi dengan sebuah imbalan. Oleh karena peternak dijamin dengan harga tertentu pada saat menjual ayam, risiko harga ditanggung oleh integrator. Jika harga kontrak melampaui biaya sarana produksi, peternak memperoleh kelebihannya. Jika harga garansi

tidak menutupi biaya sapronak, kerugian dibatalkan. Karena itu, risiko produksi banyak ditanggung oleh integrator. Peternak tetap menanggung risiko harga dan kebutuhan kapital yang besar. Selain itu, harga garansi mendorong peternak melalaikan kewajibannya (tidak serius bekerja), sehingga menghasilkan ayam berkualitas jelek.

Kontrak imbalan tetap (flat-fee) umum digunakan tahun 1950-1960-an. Integrator menyediakan pakan, obat-obatan, dan ayam, serta menguasai kepemilikan ayam pedaging. Integrator mengirim petugas untuk membimbing cara berproduksi yang baik. Peternak tidak lagi berhutang sapronak kepada integrator. Jika ayam dijual, peternak memperoleh imbalan tetap setiap ekor ayam, setiap pound, atau setiap minggu sebagai kompensasi tenaga kerja dan sapronak yang lain. Karena peternak tidak lagi berhutang sapronak pada integrator, kebutuhan kapital dan risiko output menjadi berkurang. Selain itu, risiko harga input dan output ditanggung oleh integrator. Karena pembayaran kepada peternak tidak berdasar efisiensi pakan, dan kerja peternak tidak terawasi, sistem kontrak ini mendorong peternak melalaikan kewajibannya.

Untuk mencegah ketidakseriusan peternak, integrator mengembangkan variasi kontrak imbalan tetap. Dengan kontrak bagian (share contracts), integrator menyediakan bibit ayam, pakan, obat-obatan, dan bahan bakar, sedangkan peternak menyediakan kandang, peralatan, dan tenaga kerja. Biaya bibit ditanggung bersama oleh integrator dan peternak, dengan cara demikian masing-masing punya kepentingan yang sama. Kerugian ditanggung oleh integrator. Tetapi, integrator terdorong melakukan kenaikan (mark-up) harga sapronak, sehingga keuntungan yang dibagi menjadi semakin sedikit. Selain itu, peternak tetap menanggung kebutuhan kapital yang cukup banyak dan risiko harga output, dan tetap terdorong untuk melalaikan kewajibannya.

Kontrak konversi pakan (feed-conversion contract) diciptakan untuk memberikan insentif bagi produksi yang baik. Bonus konversi pakan diberikan kepada peternak, bersamaan dengan pembayaran imbalan tetap, berdasar pound pakan per pound ayam. Peternak kurang terdorong untuk melalaikan

kewajibannya sebab pendapatan terkait langsung dengan tingkat kinerja. Tetapi, peternak tetap menanggung risiko produksi dan keterbatasan kapital.

Kontrak kombinasi (combination contracts) menggabungkan hal-hal positif dari berbagai kontrak di atas. Kontrak ini biasanya meliputi imbalan tetap kepada peternak disertai dengan pembayaran bonus untuk mencegah ketidakseriusan kerja peternak. Bonus ditambahkan pada imbalan tetap, tergantung pembagian keuntungan, konversi pakan, efisiensi pakan, kematian, dan lainnya. Selain itu, integrator umumnya mendasarkan pembayaran bonus kepada kinerja peternak relatif terhadap peternak yang lain daripada dengan standar absolut. Misalnya, peternak bisa menerima pembayaran berdasar rata-rata biaya produksi, yang kemudian disesuaikan naik atau turun tergantung biaya individual peternak dibandingkan rata-rata.

Hikmah

Perjalanan agribisnis ayam pedaging di Indonesia selama ini, ternyata serupa dengan sejarah perjalanan agribisnis ayam pedaging Amerika Serikat sejak lebih dari setengah abad yang lalu, seperti yang diuraikan di atas.. Dimulai dari peternak mandiri berskala kecil pada tahun 1960-an, diikuti menjamurnya peternakan rakyat, perusahaan peternakan besar, dan berdirinya pabrik-pabrik pakan dan pembibitan ayam tahun pada tahun 1970-an. Terjadinya persaingan tidak sehat antara peternak rakyat dan perusahaan peternakan menyebabkan pemerintah melakukan pengaturan dengan berbagai rangkaian kebijakan seperti Keppres 50/1981 untuk mengatur skala kepemilikan ternak, Keppres 22/1990 dan Kepmentan 472/1996 untuk mengatur kerjasama yang saling menguntungkan antara peternakan rakyat dan perusahaan peternakan melalui kontrak produksi yang lebih dikenal dengan sistem kemitraan. Sayangnya, niat baik tersebut saat ini masih diperdebatkan kelangsungannya.

Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dengan belajar dari pengalaman industri ayam pedaging Amerika Serikat diperoleh pelajaran bahwa sistem kontrak (kemitraan) merupakan alternatif terbaik dalam pengembangan usaha peternakan ayam pedaging.

Yang perlu didiskusikan bersama sekarang adalah merumuskan sistem kontrak terbaik yang menjamin keuntungan yang memuaskan bagi pihak-pihak yang bermitra yaitu antara peternak selaku plasma dan perusahaan peternakan selaku intinya. ***

(Poultry Indonesia No. 232 Agustus 1999)

3.5

SERBA-SERBI KEMITRAAN USAHA AYAM RAS

Program kemitraan usaha ayam ras kembali dicanangkan oleh pemerintah melalui SK Mentan No. 472/SK.TN 330/6/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Usaha Peternakan Ayam Ras. Kemitraan adalah kerjasama di bidang usaha budidaya ayam ras antara peternakan rakyat dengan perusahaan peternakan atau perusahaan di bidang peternakan. Dalam melakukan kegiatan kemitraan usaha mengikuti norma-norma pendekatan agribisnis yaitu ditanganinya secara menyeluruh segmen agribisnis sejak pengadaan dan penyaluran sapronak, kegiatan budidaya, pengolahan hasil sampai pemasaran. Prinsip kerjasamanya adalah kemitraan yaitu masing-masing pelaksana sebagai “Mitra Usaha” yang mempunyai peranan sama, saling ketergantungan dan menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan dilakukannya pola kemitraan antara lain adalah untuk memperkecil risiko usaha terutama peternak rakyat sebagai mitra usaha plasma karena dijaminnya sarana produksi (kuantitas, kualitas, dan harga), pemasaran hasil, dan jaminan pendapatan oleh perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan selaku mitra usaha inti.

Kemitraan ayam ras di berbagai daerah telah mampu memberikan kesempatan berusaha dan kesempatan bekerja bagi peternak kecil, dan produktivitas peternak pun mengalami peningkatan. Menurut laporan Ditjennak hingga Desember 1996, kegiatan kemitraan ayam pedaging sudah mencapai jumlah 365 perusahaan dengan 12,7 ribu orang plasma serta populasi ayam mencapai 27,7 juta ekor per siklus. Bertindak sebagai inti dalam kemitraan tersebut terdiri empat perusahaan besar melalui 361 Poultry Shop. Adapun perusahaan budidaya tersebut adalah PT Nusantara Unggas Jaya, PT Wabin Jaya Tama, PT Sumber Subur Mas, dan PT Sierad Produce. Sementara kemitraan agribisnis ayam ras petelur, terdiri 43 perusahaan sebagai inti, yang masing-

masing bekerjasama dengan 835 peternak plasma dengan jumlah populasi ayam sekitar 2,85 juta ekor per siklus (WP 172/September 1997).

Petunjuk Teknis

Diantara berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh program kemitraan, masyarakat perunggasan tampaknya masih belum menemukan pola kemitraan yang ideal bagi pengembangan usaha peternakan ayam ras di Tanah Air. Terbukti masih banyak komentar, diskusi, seminar, wawancara, dan penelitian dilakukan untuk merencanakan, mengevaluasi dan membuat konsep pola kemitraan yang ideal bagi pengembangan usaha peternakan ayam ras di Tanah Air.

BPAT edisi 4/1997 telah merangkum hasil seminar nasional perunggasan di Pangandaran 30 Juni 1997. Dalam seminar tersebut ditetapkan rumusan perlunya Petunjuk Teknis mengenai tatacara pelaksanaan kemitraan yang antara lain memuat filosofi, azas, pola, dan langkah-langkah pelaksanaan kemitraan. Filosofi kemitraan mencakup tiga hal, yaitu (1) keadilan yang memuat kedudukan yang setara antara perusahaan dengan peternak rakyat serta menghasilkan mufakat, (2) keuntungan, keselamatan, ketahanan dan kesejahteraan yang menuntut adanya keahlian dan penguasaan teknologi, dan (3) etika (disiplin) sebagai sikap dan niat baik dari kedua belah pihak. Dari filosofi tersebut harus menumbuhkan azas saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana filosofi dan azas kemitraan tersebut peternak dibina untuk memiliki skala ekonomi melalui kelompok usaha bersama dan koperasi. Pola kemitraan dilakukan sesuai ketentuan yaitu pola PIR, pola pengelola, dan pola penghela, seperti tercantun dalam UU No. 5/1995 tentang Usaha Kecil. Agar mencapai hasil optimal, pelaksanaan kemitraan ditempuh melalui 7 langkah, yaitu (1) menghitung permintaan penawaran DOC untuk keperluan budidaya peternak, (2) menetapkan daerah-daerah sentra produksi ayam ras, (3) produsen saponak tidak akan mengadakan penyaluran saponak kepada perusahaan perdagangan saponak yang tidak melakukan kemitraan, (4) perusahaan peternakan dan

perusahaan di bidang peternakan akan menyiapkan sarana pengolahan sesuai pasal 9 ayat 1 dan 2 SK Mentan 472/1996, (5) pelaksanaan pengawasan kemitraan menggunakan dana pemerintah dan dana lain dari industri peternakan, (6) sanksi bagi pelanggaran ketentuan SK Mentan No. 472/1996 dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

Konsep Pakar

Dr. Yusmichad Yusdja dalam tulisannya berjudul "Membangun Kemitraan yang Optimal" dalam PI No. 200/1996 menawarkan konsep kemitraan tanpa kesepakatan harga. Menurutnya, pola kemitraan yang optimal adalah yang memenuhi dua azas dan tiga langkah strategis. Dua azas pokok tersebut adalah (1) memanfaatkan keunggulan komparatif seluas-luasnya terutama dalam memanfaatkan tanah yang murah, kemudahan tenaga kerja manusia dan keuntungan sumberdaya lainnya, (2) menciptakan produksi dengan memanfaatkan keunggulan kompetitif dan mutu barang yang dihasilkan memenuhi mutu dan selera konsumen. Untuk menegakkan kedua azas tersebut diperlukan tiga langkah yaitu (1) inaran (industri ayam ras nasional) harus dibangun dalam satu unit industri yang terintegrasi secara vertikal dari hulu sampai hilir, dan menghindarkan kolusi dan kartel, (2) menetapkan batas minimum usaha rakyat, disamping batas maksimum, (3) swasembada bahan baku pakan dan memanfaatkan produk pertanian yang ada di dalam negeri dan berusaha sebesar-besarnya mengurangi ketergantungan pada bahan baku khusus impor.

Atas dasar dua azas dan tiga langkah strategis tersebut, Dr. Yusmichad Yusdja menawarkan konsep kemitraan tanpa kesepakatan harga input output. Dimisalkan ada lima perusahaan yang berhubungan vertikal melakukan kemitraan, yaitu Pabrik Pakan (P1), Perusahaan Pembibitan (P2), Peternak (P3), dan Pengolahan (P4). Dalam kemitraan ini harus ada organisasi pemasaran (P5). Pendapatan total sebesar-besarnya merupakan pokok perjuangan seluruh mitra, sementara setiap mitra secara individu memperjuangkan biaya yang mereka hadapi serendah mungkin, sehingga diharapkan mendapatkan keuntungan yang

maksimal. Pembagian pendapatan sangat tergantung pada pangsa masing-masing mitra. Salah satu cara menghitung pangsa mitra adalah melalui penetapan biaya masing-masing mitra dan dibandingkan terhadap total biaya, sehingga diperoleh pangsa setiap mitra. Misalkan total biaya adalah b dan biaya yang dikeluarkan mitra P1 adalah b_1 , maka pangsa P1 adalah b_1/b , dengan demikian bagian pendapatan total yang diperoleh P1 adalah $(b_1/b) \times p$, dimana p adalah total pendapatan. (Lebih lanjut silakan baca kembali PI No 200/1996 hal 51-55). Sejauh ini penulis belum membaca publikasi lebih lanjut apakah konsep kemitraan tersebut telah dilaksanakan, dan bagaimana hasil pelaksanaan konsep kemitraan dari Dr. Yusmichad Yusdja ini jika telah dilaksanakan.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh kerjasama PSP-IPB dengan Ditjen Peternakan menyimpulkan bahwa Pola Kemitraan yang ada belum menunjukkan keberhasilan yang diharapkan. Prof. Bungaran Saragih, sebagaimana hasil wawancara berjudul "Tingkatkan Daya Saing Perunggasan Nasional dengan Kembangkan Kemitraan Melalui Integrasi Vertikal" pada PI No 208/1997, menyatakan bahwa pola kemitraan ayam ras selama ini yang menempatkan peternak rakyat hanya pada usaha budidaya (on-farm) ayam ras, tidak akan mungkin dapat meningkatkan pendapatan riil peternak apalagi mengembangkan usahanya agar lebih modern. Dalam jangka pendek mungkin saja (misalnya karena kebaikan inti), tapi dalam jangka panjang sangat sulit diharapkan. Sebabnya adalah karena dalam sistem agribisnis ayam ras, nilai tambah (added value) yang terkecil berada pada subsistem budidaya ayam ras, sehingga keuntungan/pendapatan yang diperoleh rendah pula. Itu sebabnya mengapa peternak rakyat kehidupan dan pendapatannya tetap rendah selama ini, sehingga menciptakan gejala peternakan rakyat.

Menurut Prof. Bungaran Saragih, langkah terbaik untuk mengelola agribisnis ayam ras adalah pengelolaan integrasi vertikal (PI 195/1996 dan PI 208/1997). Artinya, mulai dari hulu sampai hilir berada dalam satu keputusan manajemen. Lebih lanjut beliau menawarkan tiga bentuk integrasi vertikal agribisnis ayam ras. Pertama, integrasi vertikal dengan pemilikan tunggal/grup. Bentuk ini mulai dari hulu sampai hilir dimiliki oleh satu perusahaan/grup perusahaan. Kedua, integrasi vertikal agribisnis

ayam ras dengan pemilikan saham bersama/usaha patungan. Pada bentuk ini industri pembibit, industri pakan, industri obat-obatan, usaha budidaya ayam ras, pengusaha rumah potong, dan lain-lain yang terpisah selama ini membentuk perusahaan vertikal milik bersama dan dikelola secara profesional. Pembagian keuntungan didasarkan pada share cost masing-masing unsur agribisnis vertikal tersebut. Ketiga, bentuk integrasi vertikal agribisnis ayam ras dengan koperasi agribisnis ayam ras. Dalam bentuk ini para peternak rakyat yang melakukan budidaya ayam ras membentuk koperasi agribisnis. Selanjutnya koperasi agribisnis akan mengembangkan perusahaan pakan, pembibitan, obat-obatan, pemotongan, pemotongan ayam maupun pemasaran ayam.

Dari ketiga bentuk integrasi vertikal tersebut, yang paling ideal menurut Prof. Bungaran Saragih adalah bentuk integrasi vertikal dalam wujud koperasi agribisnis ayam ras. Sayangnya, diantara 38.000 rumah tangga peternak ayam ras yang tersebar di Indonesia (Statistik Peternakan 1996), sepengetahuan penulis baru terdapat satu koperasi yaitu KPU Kujang Lestari (yang beranggotakan 34 peternak dan baru berusia 11 bulan) yang saat ini sedang memulai menerapkan konsep ideal Prof. Bungaran Saragih tersebut. Sementara koperasi/KUD lainnya masih berperan sebagai penyalur dalam jual beli saponak, ayam dan telur.

Sementara itu Prof. Soeharto Prawirokusumo mengungkapkan bahwa kemitraan itu fleksibel. Menurut beliau kemitraan yang terbaik adalah dimana plasma menerima risiko terkecil. Karena plasma hanya mendapat keuntungan dari selisih harga budidayanya, sedangkan inti selain mendapat dari selisih harga juga telah mendapat selisih dari harga saponak seperti DOC, pakan dan obat-obatan. Kesepakatan yang dijalankan adalah yang berdasarkan musyawarah bersama. Harus ada garansi harga, penjualan jelas, ada bonus bila kinerjanya melebihi target yang telah ditetapkan dan syukur jika tidak ada negatif penalty. Konsep kemitraan adalah "Win Win Solution", dimana semua harus diperhitungkan untung ruginya. Kerjasama harus tertulis dan disepakati bersama, dan dalam kurun waktu tertentu dievaluasi kembali karena komoditas perunggasan masih fluktuatif (Infovet 048/1997).

Kiprah Inti

Dengan atau tanpa memperhatikan konsep-konsep ideal dari para pakar, sebenarnya telah cukup banyak perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternakan yang mempunyai kepedulian sosial membantu meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat. Dengan kerjasama magang dalam bentuk Teaching Farm, Subur Grup mengawali proyek kemitraan Kinak di Parakan Salak. Di kawasan seluas 10 ha, sebanyak 15 peternak dengan dibantu 60 orang karyawan peternakan menangani usaha perunggasan yang akan menjadi milik mereka sendiri. Selain fasilitas kredit senilai 200 juta dari BCA, peternak juga memperoleh berbagai fasilitas mulai dari kandang, sampai dengan rumah tinggal, kantor, dan lain-lain. Setelah enam tahun fasilitas tersebut akan menjadi miliknya karena direncanakan kredit sudah bisa mereka lunasi (PI 208/1997). Langsung atau tidak keterkaitan dengan kepedulian ini, pada 22 Agustus 1997 Presdir PT Sumber Subur Mas terpilih sebagai salah satu "Best Executive Awards 1997-1998" atas perannya dalam menyukseskan pembangunan di sektor industri dan perdagangan serta sektor yang mendukungnya di Indonesia (PI 210/1997).

PT Cipendawa membantah pernyataan bahwa kemitraan hanya menguntungkan perusahaan besar. Dengan kemitraan, peternak dipastikan akan memperoleh keuntungan tanpa menanggung risiko yang cukup besar. Dengan hanya berkonsentrasi pada kegiatan memelihara ayam, peternak yang menjalin kemitraan dengan Grup Cipendawa dijamin memperoleh keuntungan 5,5% yang berasal dari keseluruhan biaya produksi yang telah dikeluarkan (PI 210/1997).

Di Bali PT Nusantara Unggas Jaya (NUJ) menguasai empat kabupaten yaitu Badung 5 orang dengan populasi 32.000 ekor, Gianyar 17 orang 75.000 ekor, Bangli 48 orang 227.000 ekor, Tabanan 26 orang 125.000 ekor. Apa yang diperoleh peternak yang menjalin kemitraan dengan NUI ? Misalnya peternak memelihara 2500 ekor dipelihara selama 35 hari mencapai berat 1,55 kg dengan persentase kematian 5%, FCR 1,725 dan konsumsi pakan 2,67 kg/ekor, maka keuntungan yang diperoleh peternak Rp 295,-/kg. Kalau dipelihara lebih besar lagi mencapai 40 hari,

berat 1,9 kg, kematian 7%, FCR 1,856, harga DOC Rp 900,-/ekor, harga pakan starter Rp 820,-/kg, finisher Rp 800,-/kg dan obat Rp 100,-/kg berat badan, maka peternak mendapat untung Rp 284,-/kg (Infovet 048/1997).

Data-data di atas adalah sebagian dari perusahaan-perusahaan peternakan yang menjalankan program kemitraan. Tentu saja masih banyak lagi perusahaan peternakan yang dengan polanya masing-masing menjalin kemitraan dengan peternak rakyat. Karena keterbatasan media, penulis tidak dapat menguraikan satu per satu.

Evaluasi Lapangan

Di Jawa Barat pelaksanaan baru 30%. Hingga tahun 1996, jumlah perusahaan ayam ras pedaging yang telah bermitra ada 8 buah. Mereka telah melaksanakan kemitraan dengan 125 plasma dengan populasi 1.069.500 ekor/siklus. Plasmanya tersebar di 6 kabupaten yaitu Serang, Tangerang, Bekasi, Indramayu, Bogor dan Sukabumi. Untuk ayam ras petelur, baru 2 buah perusahaan yang melakukan kemitraan yaitu dengan peternak Bogor dan Purwakarta. Di Bogor ada 6 peternak dengan populasi 60.000 ekor dan di Purwakarta ada 8 peternak dengan populasi 17.480 ekor. Beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain masih banyak sapronak yang diproduksi dan diedarkan belum memenuhi mutu yang ditetapkan. Masih seringnya terjadi fluktuasi harga dan belum seimbang antara permintaan dan penawaran anak ayam (BPAT 5/1997).

Pola kerjasama yang sedang dikembangkan di Jawa Barat kini adalah pola "Bagi Hasil" dengan 7 kesepakatan. Pertama, bila hasil panen sesuai standar dan harga ayam sesuai kesepakatan, perhitungan modal masing-masing kembali. Kedua, bila hasil sesuai standar dan harga ayam lebih tinggi daripada harga kesepakatan, kelebihan dari harga kesepakatan diperhitungkan pembagian 40% peternak dan 60% inti. Ketiga, bila hasil panen sesuai standar, tetapi harga ayam lebih rendah daripada harga kesepakatan, peternak menerima kembali modalnya dan inti menanggung kerugian. Keempat, bila hasil panen dan harga ayam tidak sesuai dengan kesepakatan, maka diperiksa

faktor penyebabnya. Seperti, apakah budidaya tidak dilaksanakan dengan baik oleh peternak, atau apakah sapronak tidak dicukupi oleh inti. Bila kesalahan pada peternak, maka diberikan pinalti, seluruh hasil daging dari standar dikalikan break even point (BEP) akhir. Dan bila kesalahan pada inti, peternak mendapatkan modal kembali. Kelima, bila hasil panen melebihi standar dan harga ayam sesuai kesepakatan, maka kelebihan hasil merupakan insentif bagi peternak dengan perhitungan : selisih hasil dari dikalikan 60% dari harga kesepakatan. Keenam, bila ayam terkena penyakit dan keadaan tidak membaik, maka inti mengangkat ayam dan diperhitungkan BEP atas keadaan akhir dengan memperhitungkan hasil daging dengan berat dan kematian yang baru. Ketujuh, bila ada kelebihan pakan di atas standar konversi pakan karena kesalahan peternak, maka kelebihan pakan tersebut dibayar oleh peternak di luar perhitungan kemitraan. Ketentuan ini tidak baku mutlak dan bisa juga satu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lain.

Pelaksanaan kemitraan perunggasan di Sumatera Utara, ternyata belum menunjukkan perkembangan yang menggembarakan. Ini terlihat dari masih kecilnya jumlah plasma yang terlibat. Dari sekitar 400 peternak ayam petelur dan 460 peternak ayam pedaging skala rakyat dan usaha kecil, baru 159 peternak yang terangkut dalam kemitraan (BPAT 5/1997). Kendala pertama yang dihadapi dalam pengembangan kemitraan ini adalah kesadaran perusahaan perunggasan terhadap pentingnya kerjasama kemitraan masih rendah, sehingga pelaksanaan pemitran yang ada baru "sekedarnya" saja. Kedua, situasi perunggasan yang kurang mantap, dimana fluktuasi harga sapronak dan harga jual produk masih merupakan iklim usaha yang kurang mendorong pelaksanaan kemitraan. Ketiga, belum adanya perencanaan produksi yang berorientasi supply - demand. Keempat, masih banyaknya ditemui mutu bibit yang rendah sehingga memicu kasus ayam kerdil yang merugikan peternak.

Dari Jawa Timur, Agrobis No. 235/1997 menulis bahwa kemitraan yang digelindingkan masih manis di bibir, tetapi pahit ditelan. Ini dirasakan hampir semua peternak, sehingga soal main di layar lebar belantara peternakan aktornya masih itu-itu saja. Dan itu pula yang makin tambun di tengah sengsaranya peternak

gurem yang tengah megap-megap. Program kemitraan malah sering dijadikan komoditi oleh banyak pengusaha yang tujuannya untuk mengeruk kredit dari bank. Sementara peternak masih saja gigit jari. Meningkatnya harga komoditas sapronak, yang jatuh bangun tentu saja masih tetap peetrnak gurem. Apalagi dengan naik turunnya harga komoditi ayam broiler yang masih sangat labil yang menjadikan peternak tidak bisa tidur nyenyak. Pada pertengahan September lalu misalnya, peternak mengalami kerugian Rp 150,-/kg ayam pedaging.

Soal kerugian dan kandang-kandang yang dikosongkan, malah menjadikan lahan gemuk bagi juragan ayam, terutama pabrikan yang mempunyai produksi pakan dan DOC untuk mengambil keuntungan dari kesengsaraan peternak. Kini banyak perusahaan besar yang beraksi dengan cepat dengan menggandeng peternak yang kandangnya kosong untuk disewa. Modusnya gampang. Untuk mengelabui petugas, para pemilik kandang tersebut harus teken kontrak dengan juragan baru, yang juga orang-orang pabrik. Teken kontrak ini maksudnya agar peternak yang kandangnya disewa oleh pabrik ini agar mengaku bahwa ayam tersebut miliknya yang disupport oleh pabrik pakan dan sepenuhnya dibina oleh pabrik.

Penutup

Tampaknya tulisan Samsul Arifin berjudul "Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Tradisional Masih Bersifat Utopis ?" dalam PI 209/1997, dalam realitanya mengandung banyak kebenaran. Masalah peningkatan pendapatan peternak masih saja jauh dari harapan dan masih tertinggal di landasan. Dengan banyaknya kasus kemitraan yang masih timpang, memang sudah saatnya pengusaha agar lebih sadar, lebih terbuka dan bersama-sama membangun peternakan rakyat di pedesaan yang sangat memerlukan lokomotif pembangunan. ***

(Poultry Indonesia No. 213 Oktober 1997)

3.6

POLITIK KEMITRAAN PETERNAKAN

Paling tidak terdapat tiga pendekatan dasar dalam memahami pelaku perekonomian. Pendekatan pertama menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertujuan mencapai kepuasan atau keuntungan maksimum. Dalam perjalanannya, keuntungan mempunyai saingan dekat yang disebut kerugian. Ibarat dua sisi mata uang, keduanya berjalan seiring, berpacu, dan berlomba saling mengalahkan. Pendekatan kedua menyatakan bahwa pelaku ekonomi selalu mementingkan diri sendiri (self interested). Berhubung orang pada umumnya berperilaku mengutamakan kepentingan sendiri, maka mereka akan mencari kesempatan untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan ekonominya, dengan tanpa mepedulikan kepentingan pihak lain. Pendekatan ketiga menyatakan bahwa pelaku ekonomi bertindak rasional (atas dasar akal), bukan emosional (atas dasar perasaan) atau moral. Dengan memahami ketiga pendekatan tersebut dapat dimaklumi salah satu sifat negatif manusia yang seringkali menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuannya. Dalam usaha mencapai keuntungan misalnya, seringkali harus ditempuh dengan cara merugikan manusia lainnya. Thomas Hobbes, seorang ahli filsafat, menganggap manusia ibarat serigala yang saling mencakar (homo homini lupus atau bellum omnium contra omnes). Sementara itu budayawan Emha Ainun Najib, dalam "Cermin" di Indosiar pernah menyatakan bahwa dalam mencapai kekuasaan, manusia seringkali menyingkirkan manusia lainnya; dalam mencapai keberhasilan (pembangunan), manusia seringkali mengorbankan manusia lainnya; dan dalam mempertahankan kehidupan, manusia seringkali menempuhnya dengan mematikan manusia lainnya.

Perdebatan pro dan kontra kemitraan agribisnis peternakan, khususnya ayam ras, juga berkaitan dengan ketiga pendekatan ekonomi di atas. Kemitraan (partnership), yang juga dikenal

dengan sistem "contract farming", merupakan organisasi ekonomi yang mengaitkan unit peternakan rakyat (plasma) dengan perusahaan peternakan berkapital besar (inti), dimana produksi primer (budidaya) tidak dipusatkan pada unit-unit produksi kapitalis besar, tetapi tetap di tangan peternak plasma, yang secara kelembagaan dikaitkan atau diikat dengan perusahaan inti melalui suatu kesepakatan kontrak. Perusahaan peternakan besar inilah yang menangani satu atau beberapa kegiatan hulu dan hilir, seperti penyediaan saponak, pengolahan dan pemasaran hasil. Idealnya, kemitraan adalah suatu hasil tawar menawar yang dilakukan secara bebas oleh dua pihak yang setara, dengan tetap memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Sayangnya, idealitas itu lebih sering berbenturan dengan realitas kehidupan yang sebaliknya. Yang lebih menggambarkan realitas adalah pengertian kemitraan sebagai suatu hubungan ekonomi dominasi (an economic relations of domination) dan suatu cara untuk mengesahkan hubungan ekonomi yang timpang dan menunjukkan bahwa ketimpangan itu sebagai sesuatu yang adil dan wajar. Ini membawa pada argumen bahwa apapun bentuk pola yang dipakai dalam kemitraan, penerapannya selalu berlangsung dalam dan dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi dan politik yang konkrit dan spesifik. Seperti halnya dengan peternak mandiri, peternak plasma kontrak mudah menjadi korban "predator" (pemangsa) yang memiliki kekuatan ekonomi-politik, dalam lingkungan lokal maupun nasional, di dalam maupun di luar perusahaan inti. Dengan demikian, diantara tiga unsur dalam skema kemitraan, yaitu perusahaan inti, peternak plasma pengontrak, dan "predator", peternak plasmalah yang menanggung semua beban dan kesengsaraan.

Kemitraan dibedakan dalam berbagai pola berdasar derajat keterlibatan pihak perusahaan inti dalam keputusan produksi. Dalam Kepmentan 940/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan pola inti-plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, atau Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA). Dalam agribisnis ayam ras, menurut Kepmentan 472/1996 tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, kemitraan dapat dilaksanakan

dengan pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat), pola pengelola, atau pola penghela. Apapun polanya, ciri pertama yang paling penting dari hubungan kemitraan adalah bahwa kemitraan merupakan kontrak antara peternak dengan pemasok saponak dan/atau pengolah atau pemasar hasil yang tidak berlangsung pada pasar persaingan bebas (perfect competition). Dengan menjalin kemitraan, peternak plasma menghadapi pasar monopoli (satu penjual) pada pasar saponak, dan pasar monopsoni (satu pembeli) pada pasar hasil, yaitu perusahaan inti. Faktor insulasi peternak plasma dari pasar persaingan bebas inilah yang menentukan peluang peternak untuk memperoleh keuntungan atau kerugian. Ciri kedua kemitraan adalah bahwa peternak plasma pengontrak tetap mengendalikan kegiatan produksi (budidaya) langsung, sedangkan perusahaan inti yang mengontrakkan menangani bagian hulu (penyediaan saponak), dan hilir (pengolahan dan/atau pemasaran hasil produksi). Dengan membiarkan peternak plasma tetap menguasai kegiatan budidaya langsung, perusahaan inti dapat membebaskan diri dari beban harus menanggung risiko yang ada dalam kegiatan budidaya, dan berbagai masalah lainnya dengan cara membiarkannya ditanggung oleh peternak plasma. Ciri ketiga kemitraan adalah bahwa berdasarkan aturan main kemitraan para peternak plasma pengontrak itu bersetuju untuk menjual hasil produksinya, bukan tenaga kerjanya. Dalam hal ini, perusahaan inti dibebaskan dari manajemen mencari, mengelola, dan mengawasi tenaga kerja, serta terhindar dari risiko permasalahan tenaga kerja. Dengan membeli hasil produksi dari “peternak keluarga” dan bukan membeli tenaga kerja dari tenaga kerja upahan, perusahaan inti secara tidak langsung memperoleh subsidi tenaga kerja cuma-cuma dari keluarga peternak plasma, termasuk tenaga kerja orang tua, wanita, dan anak-anak. Dalam skema kemitraan, para peternak plasma secara de facto berfungsi sebagai buruh yang demi meningkatkan produksi seringkali harus bekerja lebih intensif (dengan jam kerja lebih panjang) dan ekstensif (dengan menggunakan tenaga keluarga yang tidak dibayar). Kemampuan rumah tangga peternak untuk “mengeksplotasi diri sendiri” telah secara tidak langsung menguntungkan perusahaan inti yang mengontrakkan itu.

Pihak-pihak pendukung kemitraan berusaha membuktikan bahwa format kerjasama kemitraan dapat menciptakan keuntungan akibat penciptaan ekonomi skala-besar (economies of scale) yang dapat dinikmati baik oleh pelaku sendiri maupun oleh masyarakat. Bagi masyarakat, peningkatan produksi dengan pola kemitraan membawa dampak positif berupa meningkatnya penawaran dengan harga yang cenderung menurun. Bagi peternak, keuntungan pertama adalah bahwa mereka dapat memperkirakan penghasilan dengan lebih pasti, asalkan perusahaan inti memberi jaminan harga jual dan mematuhi kontrak. Kedua, melalui kemitraan peternak plasma secara tidak langsung dapat menikmati ekonomi skala-besar melalui akses ke saponak dan faktor produksi lainnya, asalkan peternak plasma memperoleh harga saponak yang lebih rendah dan harga hasil produksi yang lebih tinggi daripada harga yang ditawarkan di pasar bebas. Ketiga, peternak plasma dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih luas bagi hasil produksi mereka. Di Amerika Serikat misalnya, 90% peternak ayam dapat berperan serta dalam menguasai 30% pasar ekspor daging ayam dunia melalui contract farming dengan perusahaan-perusahaan peternakan.

Pihak-pihak yang tidak setuju dengan kemitraan mengajukan argumen sebaliknya, yaitu bahwa kepentingan para pemilik kapital besar terhadap produksi dapat menempatkan para peternak dalam cengkeraman para pemilik kapital besar. Surplus yang muncul dalam proses modernisasi produksi, tidak dapat dinikmati sebagai keuntungan oleh peternak plasma, tetapi sebagai keuntungan bagi perusahaan inti. Proses produksi juga dapat mengubah posisi peternak yang semula merdeka menjadi pekerja yang selama menjalin kemitraan memberi berbagai subsidi kepada perusahaan inti. Salah satu penolak kemitraan bahkan menunjukkan bahwa dalam konsep kemitraan terkandung unsur “proletariat” terselubung, yaitu sekumpulan orang yang bekerja sebagai alat produksi orang lain.

Masalah lain yang dihadapi peternak plasma dalam kemitraan, dimana akses peternak ke pasar bebas terhalangi, adalah ketimpangan pembagian nilai-tambah (value added) antara peternak plasma dengan perusahaan inti. Penetapan harga, mulai tahap produksi, pengolahan, sampai pemasaran, tidak

berlangsung berdasar nilai-tambah yang proporsional, atau atas dasar interaksi seperti halnya dalam pasar bebas, melainkan ditentukan oleh kekuatan tawar menawar (bargaining power) ekonomi-politik dari kedua belah pihak yang realitasnya lebih didominasi oleh perusahaan inti. Ketimpangan kekuatan tawar menawar memungkinkan pihak perusahaan inti mengakumulasi kapital dari nilai-tambah yang dihasilkan oleh peternak plasma sebagai akibat manipulasi harga di pasar tertutup (monopoli dan/atau monopsoni). Yusdja dan Pasandaran (1995) memperlihatkan bahwa 100% keuntungan industri broiler, sebesar 75% menjadi milik pabrik pakan dan agen-agen distribusinya, 22% diraup oleh perusahaan pembibit, dan hanya 3% yang diraup oleh peternak.

Kesimpulan pertama yang diperoleh tentang organisasi kemitraan adalah bahwa kemitraan merupakan suatu cara mengintegrasikan peternak plasma pengontrak ke dalam jaringan ekonomi yang lebih luas, dimana dalam pengintegrasian itu peternak plasma sangat tergantung pada perusahaan inti dalam hal saponak, penjualan, harga, dan semua keputusan produksi lain, kecuali mengenai tenaga kerja. Kedua, bahwa peternak menghadapi pasar yang tidak dikendalikannya, yaitu pasar monopoli pada pasar input (tempat memperoleh saponak), pasar monopsoni pada pasar output (tempat menjual hasil produksi), dan pasar bebas pada pasar barang konsumsi (tempat memperoleh barang kebutuhan hidup). Posisi peternak cenderung sangat lemah menghadapi ketiga pasar tersebut. Peternak tidak mampu mempengaruhi harga saponak, peternak tidak mampu menentukan harga hasil produksinya, dan peternak juga cenderung takluk pada pasar barang konsumsi. Karenanya, setiap upaya pemberdayaan peternak, harus memperhatikan persoalan hubungan peternak dengan ketiga pasar tersebut. Dan jika Indonesia Baru yang dicita-citakan oleh kaum reformis dikonsepsikan sebagai masyarakat yang berdaya, maka sudah saatnya berbagai kebijakan juga harus diarahkan untuk memperhatikan kehidupan para peternak yang selama ini kurang diberdayakan oleh sistem dan struktur ekonomi-politik yang bias kepentingan kelompok tertentu. ***

(Poultry Indonesia No. 233 September 1999)

Mau tidak mau, suka tidak suka, dan siap tidak siap, Indonesia harus memasuki era globalisasi pada awal millenium ketiga yang sudah di ambang pintu. Makna terdalam dalam era globalisasi dalam struktur perekonomian adalah perdagangan bebas. Dalam perdagangan bebas berarti ada persaingan, dimana persaingan ini tidak hanya terjadi antar komoditas dalam satu negara, tetapi juga persaingan antar negara.

Komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar persaingan sempurna (perfect competition), yang antara lain bercirikan : (1) terdapat banyak produsen (petani) dan konsumen (penduduk), (2) sumberdaya (tenaga kerja, modal, dan lahan) dengan mudah beralih pada usaha lain yang lebih menguntungkan, (3) komoditas pertanian memiliki kesamaan bentuk dan kualitas, (4) produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi, dan (5) produsen mudah keluar masuk dalam industri. Dengan berlakunya perdagangan bebas, maka tingkat persaingan industri pertanian antar negara akan semakin ketat, karena komoditas pertanian yang dihasilkan oleh petani (termasuk peternak, pekebun, nelayan, dan petambak) suatu negara, secara alami mudah disubstitusi oleh komoditas pertanian serupa yang dihasilkan oleh petani negara lain. Karena itu, tingkat keuntungan yang diperoleh petani pun akan semakin kecil.

Pada masa lalu, strategi industrialisasi pertanian untuk meningkatkan keuntungan petani adalah dengan menurunkan biaya produksi melalui penerapan teknologi produksi baru, memperbesar skala usaha untuk mencapai skala ekonomi (economies of scale), dan dengan memberi nilai tambah (value added) pada produk yang dihasilkan. Tetapi, penerapan teknologi memberikan manfaat hanya sampai petani yang lain

mengadopsinya. Artinya, jika petani-petani lain juga menggunakan teknologi yang sama dalam berproduksi, maka manfaat teknologi baru tersebut menjadi semakin kecil. Demikian pula dengan peningkatan skala usaha, dan pemberian nilai tambah, tidak akan mengurangi persaingan dengan petani lain yang dapat menghasilkan produk serupa. Karena itu, strategi industrialisasi pertanian pada era globalisasi perekonomian abad 21 mendatang adalah bagaimana menghindari persaingan sempurna (perfect competition) menuju ke arah persaingan yang tidak sempurna (imperfect competition). Dalam pandangan Duncan dan Saxowsky (1998), profesor ekonomi pertanian Universitas North Dakota USA, industrialisasi didefinisikan sebagai “adopting business strategies to shift the farm business away from perfect competition” (adopsi strategi bisnis untuk menghindari agribisnis jauh dari persaingan sempurna). Strategi ini dapat ditempuh melalui berbagai kesepakatan bisnis seperti kontrak usaha (contract farming), kemitraan (partnership), aliansi strategis (strategic alliances), integrasi vertikal (vertically integrated), maupun koperasi (cooperative).

Kemitraan Agribisnis

Era globalisasi membawa konsekuensi perlunya perubahan struktur ekonomi, industri, dan perdagangan. Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi masalah-masalah yang akan dihadapi sektor pertanian pada era perdagangan bebas dengan mengubah orientasi produksi menjadi orientasi agribisnis yang diharapkan dapat mengintegrasikan sektor pertanian dalam sistem perdagangan internasional. Menurut Amang (1994) pengertian agribisnis itu sendiri meliputi semua aktivitas sebagai suatu rangkaian sistem yang terdiri dari (1) subsistem pengadaan dan penyaluran sarana produksi, teknologi dan pengembangan sumberdaya pertanian, (2) subsistem produksi dan usahatani, (3) subsistem pengolahan hasil-hasil pertanian atau agroindustri, dan (4) subsistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian. Oleh karena itu sistem ini merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan mulai dari hulu sampai hilir, dimana keberhasilan pengembangan agribisnis sangat bergantung pada

kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai pada setiap simpul yang menjadi subsistemnya.

Sejak tahun 1970-an, pemerintah telah menggalakkan pengorganisasian usaha tani berujud Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yang juga dikenal dengan sistem “contract farming”. Pola ini dikembangkan pada berbagai usaha pertanian baik tanaman pangan, perkebunan, perikanan, maupun peternakan, yang lebih lanjut disebut dengan istilah kemitraan (partnership). Menurut PP No. 44/1997 tentang Kemitraan, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau dengan usaha besar disertai pembinaan oleh usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan dibedakan dalam berbagai pola berdasar derajat keterlibatan pihak usaha menengah/besar dalam keputusan produksi. Dalam Kepmentan 940/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan pola inti-plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, atau Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA).

Dalam agribisnis ayam ras, pada tahun 1990 pemerintah mencoba melakukan restrukturisasi dengan menerbitkan Keppres 22/1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, yang pada intinya membebaskan usaha ayam ras tidak saja untuk usaha peternakan rakyat, tetapi juga mengizinkan untuk skala perusahaan dengan catatan mereka harus melakukan kemitraan dengan peternak rakyat. Lebih lanjut, menurut Kepmentan 472/1996 tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, kemitraan dapat dilaksanakan dengan pola PIR (Perusahaan Inti Rakyat), pola pengelola, atau pola penghela. Dalam perjalanannya, kemitraan ayam ras ini mengalami berbagai tantangan dan tantangan. Tahun 1996, setahun sebelum krisis ekonomi, kemitraan di berbagai daerah hanya dilaksanakan oleh 30% peternak, sedangkan 70% sisanya lebih suka berusaha secara mandiri. Krisis ekonomi tahun 1997 yang telah menghancurkan 80% usaha budidaya ayam ras, dan 20% yang bertahan adalah peternakan rakyat yang menjalin kemitraan. Upaya penyelamatan usaha perunggasan dilakukan pemerintah dengan menawarkan KKPA ayam ras kepada peternak yang

menjalin kemitraan. Meski bertahan menghadapi krisis perekonomian yang berkepanjangan, kemitraan ayam ras belum juga diterima oleh seluruh peternakan rakyat. Bahkan organisasi peternak ayam (PPUI) melalui Ketua Umumnya Pak Alie Abukakar, dalam berbagai kesempatan selalu mengusulkan agar kemitraan ayam ras dihentikan atau setidaknya ditangguhkan, karena dinilai tidak berpihak dan tidak mampu memberdayakan peternakan rakyat. Sementara Pak Karyoto, Ketua Pinsargasnas, menyatakan bahwa peternak plasma adalah kuli.

Analisis Ekonomi

Analisis ekonomi usaha ayam ras yang dilakukan beberapa pakar menunjukkan bahwa dengan pola kemitraan keuntungan peternak rakyat sudah cukup besar, dan jika dibandingkan dengan peternak mandiri perbedaannya sangat signifikan. Menurut Yusdja (1996) tingkat B/C rasio usaha budidaya ayam pedaging mandiri dan yang bermitra dagang dengan Poultry Shop sekitar 1,01, sedangkan usaha skala usaha peternakan terintegrasi adalah 1,36. Dari sisi biaya produksi, peternak mandiri dan mitra PS mengeluarkan 60% untuk pakan dan 29% untuk bibit, sedangkan usaha peternakan terintegrasi hanya 48% untuk pakan dan 12% untuk bibit. Informasi tersebut membuktikan bahwa jika agribisnis ayam ras (pedaging) mengalami disintegrasi, maka kedudukan sektor budidaya akan sangat lemah karena mereka akan menghadapi kondisi harga atau biaya yang tidak menguntungkan, dan sektor budidaya dalam industri berada pada baris depan penanggung risiko. Dalam industri yang mengalami disintegrasi, maka penentuan harga input tidak sejalan dengan harga output, oleh karena itu terjadi pembagian keuntungan yang tidak adil. Berdasar kajian tersebut, Dr. Yusmichad Yusdja menyimpulkan bahwa usaha peternakan harus mengintegrasikan seluruh proses produksi, dan melibatkan peternakan rakyat pada salah satu kegiatan produksi sebagai mitra usaha, serta diperlakukan sebagai bagian utuh dalam integrasi tersebut.

Analisis lain dilakukan oleh Sutawi (1999) mengenai rentabilitas usaha peternak plasma ayam pedaging di Kabupaten Malang. Dari sisi biaya, peternak plasma hanya mengeluarkan

4,87% biaya untuk keperluan tenaga kerja, BBM dan listrik, sewa kandang dan peralatan, dan sekam, sedangkan perusahaan inti mengeluarkan 95,13% biaya untuk DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan. Dari perbandingan keuntungan dan modal sendiri yang dikeluarkan, nilai rentabilitas peternak plasma mencapai 184% per periode produksi selama 2 bulan (sebagian data pernah dimuat PI 226/1999). Lebih lanjut Sutawi mencoba melakukan perbandingan keuntungan peternak plasma dan peternak mandiri selama tahun 1998 dengan menggunakan data-data harga kontrak untuk peternak plasma dan harga pasar untuk peternak mandiri (Tabel 3.7.1).

Tabel 3.7.1
Perbandingan tingkat harga dan hasil usaha peternak plasma dan mandiri tahun 1998.

| Bulan | Harga DOC (Rp/ekor) | | Harga Pakan (Rp/kg) | | Harga Ayam (Rp/kg) | | Untung/Rugi (Rp) | |
|-------|------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------------|--------|---------------------|---------|
| | Mandiri | Plasma | Mandiri | Plasma | Mandiri | Plasma | Mandiri | Plasma |
| Jan | 510 | 800 | 1800 | 805 | 2900 | 2430 | -1071000 | 818650 |
| Peb | 700 | 500 | 1580 | 1080 | 3500 | 2670 | 382400 | 697900 |
| Mar | 1800 | 500 | 2100 | 1580 | 5700 | 3485 | 1368000 | 557650 |
| Apr | 1800 | 1500 | 1510 | 1580 | 4500 | 4120 | 1140300 | 605400 |
| Mei | 1000 | 1500 | 1510 | 1580 | 4500 | 4260 | 1940300 | 836400 |
| Jun | 800 | 1200 | 1780 | 1580 | 4400 | 4265 | 1173400 | 1144650 |
| Jul | 750 | 1000 | 2760 | 2170 | 5400 | 5085 | -37200 | 945350 |
| Agt | 2000 | 1000 | 2600 | 2170 | 7200 | 5100 | 2158000 | 970100 |
| Sep | 1700 | 1200 | 2905 | 2370 | 7750 | 6360 | 2459650 | 2255100 |
| Okt | 1250 | 1200 | 3050 | 2410 | 6250 | 6460 | 4000 | 2301300 |
| Nop | 1200 | 1200 | 3300 | 2870 | 6100 | 6475 | -936000 | 959850 |
| Des | 1050 | 1200 | 2965 | 2870 | 7750 | 6510 | 3109300 | 1017000 |
| Erata | 1213 | 1067 | 2342 | 2342 | 5440 | 4748 | 1094000 | 924000 |

Ket : DOC = 1000 ekor, FCR = 1,8, dan bobot ayam = 1,65 kg/ekor

Pada Tabel 3.7.1 di atas, terlihat bahwa peternak plasma memperoleh sapihak dengan harga yang lebih murah daripada

peternak mandiri. Harga DOC untuk peternak plasma Rp 146,-/ekor lebih murah daripada peternak mandiri. Harga pakan untuk peternak plasma Rp 395,-/kg lebih murah daripada peternak mandiri. Harga jual ayam hidup di pasar (pedagang) sangat berfluktuasi tetapi rata-rata lebih mahal daripada harga kontrak. Peternak mandiri menjual ayam dengan harga Rp 728,-/kg lebih mahal daripada harga kontrak peternak plasma. Keuntungan peternak dihitung dengan hanya menggunakan DOC dan pakan sebagai komponen biaya. Fluktuasi harga saponak dan ayam menyebabkan hasil usaha peternak mandiri juga berfluktuasi (untung dan rugi), sedangkan peternak plasma tampak selalu mengalami keuntungan karena adanya kepastian harga. Rata-rata tingkat keuntungan peternak plasma masih lebih tinggi daripada peternak mandiri. Untuk skala 1000 ekor, keuntungan peternak mandiri Rp 118.203,- lebih tinggi daripada peternak mandiri.

Akhirnya, dari kajian di atas dapat disimpulkan bahwa pengintegrasian usaha ayam ras dengan pola kemitraan antara peternakan rakyat dengan perusahaan peternakan merupakan jalan terbaik dalam menyelamatkan, menyembuhkan, dan mengembangkan agribisnis ayam ras pada masa kini dan mendatang.***

(Poultry Indonesia No. 234 Oktober 1999)

Kesadaran gizi masyarakat Indonesia ternyata sudah cukup baik. Meski daya beli semakin menurun akibat krisis ekonomi yang tidak segera berlalu, permintaan produk peternakan ternyata tetap stabil. Terbukti dengan dilakukannya impor telur, daging ayam, dan rencana impor daging kerbau dari India untuk mengisi kekurangan penawaran akibat penurunan produksi peternakan di dalam negeri. Kebijakan impor produk peternakan menunjukkan bahwa pemerintah lebih berpihak pada kepentingan konsumen agar dapat memperoleh barang dengan harga murah, sementara kepentingan peternak selaku produsen yang semestinya menikmati insentif kenaikan harga menjadi terkalahkan. Padahal, dalam proses peningkatan produksi tidak hanya peternak yang terlibat. Ada jutaan orang yang terlibat dalam proses peningkatan produksi peternakan, mulai dari produsen saponak, petani tanaman pakan, produsen saponak, pedagang, pengusaha angkutan, peternak, pengolah, pemasar, dan seterusnya. Jika kepentingan mereka diutamakan, secara ekonomi akan terjadi multiplier effect (pengaruh berganda) yang tidak saja dinikmati mereka yang terlibat dalam proses peningkatan produksi peternakan, tetapi pada akhirnya juga dinikmati oleh masyarakat luas. Dengan mengimpor produk peternakan sebagai jalan pintas, maka insentif yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat dalam negeri menjadi dinikmati oleh masyarakat luar negeri.

Krisis Kepercayaan

Peningkatan produksi peternakan memang tidak bisa dilepaskan dari jasa perbankan sebagai sumber modal usaha. Sebagaimana sejak setahun diberitakan, untuk membantu membangkitkan kembali usaha peternakan rakyat khususnya

perunggasan yang terpuruk akibat krisis ekonomi, pemerintah mengusahakan dana kredit KKPA (Kredit Koperasi Pada Anggota) sebesar 37,5 milyar. Tetapi, dana tersebut tidak berhasil dicairkan karena hambatan dari pihak perbankan. Menurut Dirjen Peternakan Ir. Erwin Sutirto, ada empat macam hambatan yang menyebabkan hingga sekarang kucuran kredit tersebut tidak juga menetes, yaitu (1) Bank Indonesia belum mengeluarkan Surat Edaran untuk mengucurkan KKPA Ayam ras, (2) Bank Pelaksana tidak bersedia memikul risiko kredit meskipun hanya 1%, (3) Perum PKK (Penjamin Kredit Koperasi) yang harus memikul kredit sebesar 50% belum menerima surat persetujuan dari Menteri Keuangan, dan (4) Para Inti (Koperasi/Swasta) yang harus menjamin 40% risiko kredit tidak mampu menyediakan jaminan tunai (PI, 226/1999).

Dengan empat macam hambatan di atas, pertama menunjukkan adanya krisis kepercayaan pihak perbankan dan otoritas moneter terhadap usaha peternakan rakyat, sehingga KKPA peternakan rakyat secara halus sebenarnya telah ditolak. Padahal, sesuai pasal 8 UU Perbankan 1992, jaminan KKPA sebenarnya hanyalah kelayakan usaha. Artinya, jika suatu usaha secara ekonomi dinyatakan layak, maka semestinya berhak untuk mendapat pinjaman kredit bank. Hampir semua jenis usaha peternakan rakyat saat ini secara ekonomi layak diusahakan. Ayam pedaging misalnya, dari berbagai analisis hasil usaha peternak menunjukkan angka rentabilitas modal sendiri di atas 100% per periode (2 bulan), sedangkan perhitungan BEP (titik impas) ayam petelur hanya sekitar 50-60% dari harga jualnya. Hal ini menegaskan bahwa usaha ayam ras baik petelur maupun pedaging layak untuk mendapatkan kredit modal usaha dari perbankan.

Kedua, perhatian pemerintah terhadap usaha peternakan rakyat masih kurang, meski mengakui besar peranan usaha peternakan ini dalam upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui penyediaan protein hewani. Berbeda dengan perhatian pemerintah terhadap tanaman pangan yang begitu besar. Lihat saja usaha pemerintah dalam upaya meningkatkan produksi pangan nabati, misalnya melalui Gema Palagung 2001. Dana KUT dilipatgandakan dari 171 milyar menjadi 8 trilyun (naik 5000%), plafon kredit untuk petani diperbesar, bunga

pinjaman sangat rendah (10,5%), prosedur dipermudah, ribuan tenaga pendamping diterjunkan, penyalur kredit diperbanyak, pemasaran ditampung, harga dasar ditetapkan, dan sebagainya. Sementara itu usaha peternakan rakyat dibebaskan bersaing dengan produk impor di arena pasar bebas. Karena itu, sekali lagi, dalam struktur pemerintahan mendatang perlu diperjuangkan adanya seorang menteri yang khusus mengurus bidang peternakan ini.

Tiga Serangkai

Dialog nasional perunggasan terakhir yang diselenggarakan Fakultas Peternakan UGM pada 17 Desember 1998 menyimpulkan bahwa kemitraan adalah solusi terbaik dan merupakan jembatan menuju kemandirian (PI, 225/1999). Pola kemitraan ini dapat dikembangkan tidak hanya kerjasama dua pihak antara Mitra Inti dan Mitra Plasma, tetapi dapat diperluas menjadi tiga pihak (Tiga Serangkai) yaitu ditambah Mitra Dana. Mitra Dana baik Bank Umum, Bank Syariah, BUMN, ataupun BUMS, berkewajiban menyediakan permodalan, Mitra Inti baik Pengusaha Saponak, Koperasi/KUD, Poultry Shop, ataupun usaha swasta lain berkewajiban menyediakan saponak, bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil, sedangkan Mitra Plasma berkewajiban menyediakan kandang dan peralatan, dan melaksanakan budidaya (Tabel 3.8.1).

Tabel 3.8.1
Jenis kegiatan pada Pola Kemitraan Tiga Serangkai

| No. | Uraian kegiatan | Mitra Dana | Mitra Inti | Mitra Plasma |
|-----|---|------------|------------|--------------|
| 1. | Permodalan | + | - | - |
| 2. | Sarana produksi | - | + | - |
| 3. | Bimbingan teknis dan manajemen | - | + | - |
| 4. | Menampung, mengolah dan memasarkan produksi | - | + | - |
| 5. | Kandang dan peralatan | - | - | + |
| 6. | Budidaya | - | - | + |

Pada pola kemitraan ini kredit modal dari Mitra Dana diberikan kepada Mitra Plasma melalui Mitra Inti. Dalam penyaluran kredit ini Mitra Inti dapat berperan sebagai Executing Agent (pelaksana) atau Chaneling Agent (penyalur). Apabila Mitra Inti bertindak sebagai pelaksana pemberian kredit modal, maka Mitra Inti yang menandatangani akad kredit dan bertanggung jawab atas risiko pengembalian kredit secara penuh. Dalam hal Mitra Inti bertindak sebagai penyalur kredit, maka penandatanganan akad kredit dapat dilakukan langsung oleh Mitra Plasma, atau oleh Mitra Inti atas dasar kuasa yang dibuat oleh Mitra Plasma, sehingga yang bertanggung jawab penuh atas risiko pengembalian kredit adalah Mitra Plasma. Dalam pola kemitraan ini Dinas Peternakan perlu dilibatkan sebagai pengawas.

Pemberian kredit dari Mitra Dana diharapkan berbunga rendah seperti halnya kredit program yang lain yaitu antara 14-16%. Menurut Menkop PKM Adi Sasono, bunga rendah bukanlah sekadar subsidi, tetapi investasi untuk menciptakan lapangan kerja. Apabila lapangan kerja terbuka, maka pendapatan naik, dan daya beli masyarakat pun akan naik. Jika daya beli masyarakat meningkat, akan menciptakan investasi lanjutan untuk menciptakan barang dan jasa secara besar-besaran, sehingga terjadilah multiplier effect (pengaruh berganda) pada perekonomian.

Jika kredit modal berasal dari Bank Umum, BUMN, atau BUMS, maka Mitra Plasma dibebani jasa berupa bunga kredit. Jika kredit modal berasal dari Bank Syariah, maka jasa kredit diperhitungkan dengan cara bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh peternak. Pembagian fee dari bunga kepada Mitra Dana, Mitra Inti, dan Dinas Peternakan disesuaikan dengan peran masing-masing. Jika Mitra Inti bertindak sebagai Executing Agent, maka Mitra Inti memperoleh bagian bunga yang lebih besar. Jika Mitra Inti bertindak sebagai Chaneling Agent, maka Mitra Dana memperoleh bagian bunga yang lebih besar (Tabel 3.8.2).

Tabel 3.8.2
Contoh pembagian bunga kredit antara Mitra Dana, Mitra Inti dan Dinas Peternakan.

| No. | Uraian | Mitra Inti sbg. Executing Agent | Mitra Inti sbg. Chaneling Agent |
|--------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Mitra Dana | 6,0% | 7,0% |
| 2. | Mitra Inti | 7,0% | 6,0% |
| 3. | Dinas Peternakan | 1,0% | 1,0% |
| Jumlah | | 14,0% | 14,0% |

Sedikitnya ada tiga manfaat yang diperoleh dengan menerapkan pola Kemitraan Tiga Serangkai ini. Pertama, dengan adanya Mitra Dana sebagai penyandang dana, kemitraan dapat diperluas pada Mitra Plasma yang lebih banyak. Jika permodalan dibebankan pada Mitra Inti saja seperti selama ini, jumlah Mitra Plasma akan terbatas karena keterbatasan modal yang dimiliki Mitra Inti. Untuk memelihara 5000 ekor ayam pedaging saat ini diperlukan modal antara 45-50 juta, sedangkan untuk 1000 ekor ayam petelur diperlukan modal antara 35-40 juta rupiah. Kedua, Mitra Plasma memiliki bargaining power (posisi tawar) yang lebih kuat. Dengan permodalan yang berasal dari Mitra Inti seperti selama ini, butir-butir kesepakatan usaha lebih didominasi oleh Mitra Inti, sedangkan Mitra Plasma tidak diberi kesempatan

3.9

ANALISIS KEUNTUNGAN PETERNAK PLASMA

untuk bernegosiasi. Ketiga, diharapkan Mitra Inti lebih transparan utamanya menyangkut kualitas sapronak baik pakan maupun bibit ayam, dan kesepakatan harga jual produk, apakah dengan harga garansi atau harga pasar. Begitu juga dengan pemberian jasa kredit, apakah dengan bunga atau bagi hasil.

Seperti dilaporkan PI 225/1999 pola Kemitraan Tiga Serangkai ini telah dilaksanakan dengan baik oleh PLN Bojonegoro sebagai Mitra Dana, PT NUJ sebagai Mitra Inti, dan peternak ayam pedaging di Kabupaten Lamongan sebagai Mitra Plasma. Hingga saat ini terdapat 45 peternak dengan populasi 250.000 ekor. PLN Bojonegoro menyediakan kredit senilai 18 juta dengan bunga 4%/tahun yang berwujud kandang berkapasitas 4000 ekor. PT NUJ menyediakan sapronak, memberikan bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil, sedangkan peternak plasma melaksanakan budidaya. Pemasaran dilakukan oleh PT NUJ dengan harga garansi. Pembayaran angsuran kredit dicicil dari separo hasil yang diperoleh peternak, sehingga tidak disalahgunakan oleh peternak untuk kepentingan yang lain.

Dengan belajar dari pola Kemitraan Tiga Serangkai di Lamongan ini, sebenarnya tidak beralasan jika perbankan maupun pemerintah menunda pencairan kredit program bagi usaha peternakan rakyat khususnya ayam ras. Jika pihak pemerintah segera mengucurkan dananya untuk pengembangan pola ini, Insya Allah, empat tahap pembangunan peternakan (tahap penyelamatan, tahap penyembuhan, tahap stabilisasi, dan tahap pembangunan sebenarnya) seperti yang diprogramkan Dirjen Peternakan dapat segera tercapai dalam waktu yang lebih cepat. Semoga!

(Poultry Indonesia No 227 Maret 1999)

Sedikitnya pemerintah telah mengeluarkan 5 peraturan perundangan yang menyangkut kerjasama kemitraan peternakan ayam ras, yaitu (1) Keppres 22/1990 tentang Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras (pasal 4), (2) SK Mentan No. 472/96 tentang Juklak Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras, (3) PP No. 44/97 tentang Kemitraan, (4) SK Mentan No. 940/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha pertanian, dan (5) SK Mentan No. 944/97 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian. Oleh beberapa pihak, kelima peraturan tersebut dinilai bukan semakin memperbaiki kinerja kemitraan, namun semakin tumpang tindih dan membingungkan. Karena, kelima peraturan tersebut memiliki ketentuan yang berbeda-beda utamanya menyangkut materi, definisi, jenis pola kemitraan, pelaku kemitraan, fasilitas yang diberikikan pemerintah, koordinasi, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, serta tingkat kemitraan usaha. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait, juga semakin banyak pihak yang ingin berjasa dalam mengembangkan dan membina kemitraan. Akibatnya, pelaksana kemitraan di lapangan semakin kebingungan dalam menentukan peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan.

Jika ditinjau lebih lanjut, sedikitnya ada dua dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan-peraturan yang menyangkut kemitraan usaha peternakan ayam ras, yaitu (1) untuk meningkatkan kesempatan berusaha, dan kesejahteraan peternak, (2) untuk menciptakan iklim usaha yang mendorong pengembangan peternakan ayam ras dan pemerataan berusaha. Dengan dua dasar ini, sebenarnya pemerintah tidak perlu memaksakan kehendak dengan mengeluarkan berbagai peraturan tentang kemitraan. Kemitraan akan berhasil jika dilaksanakan atas

dasar sukarela, dan bukan karena dipaksakan. Biarkan saja perusahaan inti dan peternak plasma menentukan pola kemitraan sesuai dengan kesepakatannya. Jika masing-masing perusahaan inti dapat menawarkan spesifikasi bentuk pola kemitraannya, maka peternak plasma akan dapat memilih pola kemitraan yang mana, dan dengan siapa mereka akan menjalin kemitraan yang dirasa menguntungkan.

Keuntungan Peternak Plasma

Salah satu kendala pengembangan pola kemitraan adalah ketidakpuasan atas keuntungan yang diperoleh peternak. Peternak sebagai plasma merasa keuntungannya terlalu sedikit, sehingga ada peternak plasma yang memaksa diri untuk menjual jatah pakan atau ayamnya pada pihak ketiga dalam upaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Benarkah keuntungan peternak plasma sangat kecil? Untuk menjawab pertanyaan ini, penulis mencoba menganalisis laporan hasil usaha bulan Juni 1998 milik seorang peternak plasma di Malang yang telah menjalin kemitraan dengan inti anak perusahaan saponak terbesar di Indonesia sejak tahun 1994. Kemitraan ini dilaksanakan dengan pola penghela, dimana perusahaan inti menyediakan saponak, bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi, serta mengusahakan permodalan, sedangkan peternak plasma menyediakan kandang dan melakukan kegiatan budidaya. Kemitraan dengan pola kesepakatan harga ini telah berjalan dengan baik sejak 1993/1994. Saat ini terdapat 160 peternak plasma, populasi 400.000 ekor ayam dengan siklus pemasukan DOC 30.000 ekor/minggu. Dalam situasi krisis moneter ini, sejak Juli 1998 ini pemasukan DOC justru semakin ditingkatkan menjadi 60.000 ekor/minggu.

Berikut adalah Daftar Perhitungan Untuk Peternak (DPUP) seorang peternak plasma yang melakukan kegiatan budidaya pada bulan April - Juni 1998 (Tabel 3.9.1). Pada Tabel 3.9.1 tersebut, tampak bahwa keuntungan finansial yang diterima peternak plasma sangat besar dibandingkan dengan biaya sendiri yang dikeluarkan plasma. Dari total biaya sebesar Rp 72.943.844,- peternak plasma hanya mengeluarkan Rp 1.860.000,- (2,55%)

untuk keperluan biaya tenaga kerja, gas dan listrik, sewa kandang dan peralatan, dan sekam, sedangkan perusahaan inti mengeluarkan biaya sebesar Rp 71.083.844,- (97,45%) untuk keperluan biaya DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan. Dari pemeliharaan 12000 ekor, peternak plasma memperoleh keuntungan bersih Rp 6.646.866,- (Rp 554,-/ekor) selama satu siklus produksi (39 hari). Dengan membandingkan antara keuntungan yang diperoleh dan modal pribadi yang dikeluarkan plasma, diperoleh rasio tingkat hasil (rentabilitas) modal pribadi sebesar Rp 6.646.866,-/Rp 1.860.000,- atau 357,36%.

Tabel 3.9.1.
Perhitungan rugi laba peternak plasma dalam satu siklus
produksi April - Juni 1998.

| No. | Uraian | Satuan |
|--|--|--|
| I. Parameter Teknis | | |
| 1. | Jumah pemasukan DOC | : 12.000 ekor |
| 2. | Jumlah pakan | : 32.600 kg |
| 3. | Konversi pakan | : 1,773 (standar inti 1,837) |
| 4. | Jumlah ayam yang keluar | : 11.079 ekor (92,330%) |
| 5. | % kematian | : 7,670% (standar inti 5,25%) |
| 6. | Rerata berat badan/ekor | : 1,66 kg |
| 7. | Umur penjualan | : 39 hari |
| 8. | Harga kesepakatan | : Rp 4260 - 4370,- (rata-rata Rp 4.257,21, tgt. berat ayam) |
| II. Perhitungan biaya | | |
| A. Biaya yang dikeluarkan peternak plasma : | | |
| 1. | Tenaga kerja | : Rp 300.000,- |
| 2. | Gas dan listrik | : Rp 700.000,- |
| 3. | Sewa kandang dan alat | : Rp 720.000,- |
| 4. | Sekam | : Rp 140.000,- |
| | | ----- + |
| | Subtotal | Rp 1.860.000,- |
| B. Biaya yang dikeluarkan perusahaan inti : | | |
| 1. | DOC 12.000 ekor | : Rp 18.000.000,- |
| 2. | Pakan 32.600 kg | : Rp 51.541.820,- |
| 3. | Vaksin dan obat 57 unit | : Rp 1.542.024,- |
| | | ----- + |
| | Subtotal | Rp 71.083.844,- |
| | Total biaya (A + B) | Rp 72.943.844,- |
| III. Penerimaan | | |
| 1. | Penjualan ayam 11.079 ekor (18.383,20 kg) | : Rp 78.261.230,- |
| 2. | Bonus (insentif) | : Rp 1.329.480,- |
| | | ----- + |
| | Total | Rp 79.590.710,- |
| IV. Keuntungan | | Rp 6.646.866,- |

Perbandingan dengan Peternak Mandiri

Keengganan peternak mandiri untuk beralih mengikuti kemitraan adalah adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak dibandingkan peternak plasma. Dengan modal sedikit, mereka berusaha dengan skala pemeliharaan sedikit (kurang dari 5000 ekor), dan pada saat-saat tertentu jika diharapkan harga akan naik, seperti menjelang hari raya, natal, tahun baru, dan sebagainya. Dengan adanya krisis moneter yang mengakibatkan kenaikan harga pakan mencapai Rp 150.000,-/zak dan penurunan daya beli masyarakat, menyebabkan hampir semua peternak mandiri gulung tikar. Tidak ada pilihan lain bagi mantan peternak mandiri ini, jika masih ingin menekuni usaha budidaya ayam pedaging, kecuali dengan mengikuti kemitraan. Jika merasa keuntungan yang diperoleh terlalu sedikit, Tabel 3.9.1 di atas dapat kembali dijadikan sebagai acuan perhitungan.

Sampai Maret 1998, hutang peternak kepada pabrik pakan yang berpotensi macet telah mencapai 650 - 750 milyar (PI 216/1998). Karena itu, saat ini pembelian saponak baik bibit, pakan maupun obat-obatan, dilakukan dengan sistem "cash and carry", bayar kontan barang dibawa pulang. Dengan demikian, jika peternak mandiri ingin memelihara ayam pedaging sebanyak 12.000 ekor, paling tidak harus menyediakan dana sebesar Rp 72.943.844,-, dengan asumsi peternak mandiri dapat memperoleh saponak seharga yang diterima peternak plasma. Keuntungan atau kerugian peternak mandiri diperhitungkan dengan tiga pendekatan. Pertama, dengan asumsi keuntungan peternak mandiri sama dengan yang diperoleh peternak plasma, maka rentabilitas modal pribadi peternak mandiri hanya sebesar Rp 6.646.866,-/Rp 72.943.844,- atau 9,11%. Kedua, dengan asumsi harga jual ayam hidup di pasaran umum Rp 4.750,-/kg hidup (Rp 500,- lebih tinggi daripada harga kesepakatan peternak plasma), maka penerimaan (hasil penjualan ayam) yang diterima peternak mandiri sebesar Rp 87.320.200,-, atau memperoleh keuntungan sebesar Rp 14.376.356,- (Rp 1.198,-/ekor). Secara kuantitatif keuntungan peternak mandiri ini memang lebih besar daripada keuntungan peternak plasma, tetapi secara kualitatif rasio

keuntungan dengan modal pribadi (rentabilitas) lebih besar yang diterima peternak plasma. Rentabilitas modal pribadi yang diperoleh peternak mandiri sebesar Rp 14.376.356,-/Rp 72.943.844,- atau 19,71%, lebih rendah dibandingkan peternak plasma yang mencapai 357,36%. Ketiga, kenyataan menunjukkan bahwa bersamaan dengan masa panen peternak plasma pada bulan Juni 1998 yang lalu, harga jual ayam di pasaran yang diterima peternak mandiri hanya Rp 3.800,-/kg hidup (Rp 400,- lebih rendah daripada harga kesepakatan peternak plasma). Artinya, dengan tingkat produktivitas yang sama dengan peternak plasma, peternak mandiri hanya memperoleh penerimaan sebesar Rp 69.856.160, atau menderita kerugian sebesar Rp 3.087.684,-.

Kesimpulan

Dari kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha peternakan ayam pedaging yang dilakukan oleh peternak plasma dengan pola kemitraan, lebih menguntungkan dibandingkan dengan peternak mandiri. Dengan skala pemeliharaan yang sama, peternak plasma memerlukan modal pribadi yang lebih sedikit daripada peternak mandiri. Peternak plasma hanya mempersiapkan modal untuk biaya tenaga kerja, gas dan listrik, sekam, sewa kandang dan alat, sedangkan biaya DOC, pakan, vaksin dan obat-obatan disediakan oleh perusahaan inti. Secara kualitatif, rentabilitas modal pribadi yang diperoleh peternak plasma lebih besar daripada peternak mandiri. Peternak plasma tidak menghadapi risiko kerugian yang akibat penurunan harga jual, karena sudah ada kesepakatan harga jual dengan pihak inti. Asalkan peternak plasma dapat mencapai konversi pakan sama dengan atau di bawah standar ketetapan perusahaan inti, dapat dijamin peternak plasma akan memperoleh keuntungan.

Pembaca PI mungkin ada yang meragukan ketepatan kajian ini, karena keterbatasan sampel yang digunakan. Tetapi, dengan melihat daya tahan peternak plasma dan semakin meningkatnya skala usaha mereka dalam situasi krisis moneter ini, penulis percaya bahwa pola kemitraan merupakan model yang terbaik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan peternak, memberikan kesempatan berusaha, dan menciptakan iklim usaha yang lebih

baik dalam upaya mendorong pengembangan usaha peternakan ayam pedaging di Tanah Air. ***

(Poultry Indonesia No. 221 September 1998)

3.10

PENILAIAN PLASMA TERHADAP INTI PADA KEMITRAAN AYAM PEDAGING

Keresahan kembali melanda sektor pertanian di mana jutaan petani padi, tebu, dan bawang menerima harga murah atas hasil produksinya sebagai akibat panen raya (peningkatan produksi) yang diperparah dengan dibukanya kran impor produk serupa. Sebelumnya, kejadian yang sama juga melanda sub sektor peternakan yang diserbu oleh daging dan telur impor. Masuknya produk pertanian im-por baik oleh kebijakan pemerintah maupun tekanan internasional telah membuka mata para produsen pertanian bahwa mereka te-lah diseret memasuki rimba perdagangan global yang sarat dengan persaingan. Hanya mereka yang produktif, efisien dan bermutu yang mampu memenangkan persaingan itu dan berhak melangsungkan kehidupan usahanya.

Membanjirnya produk pangan impor dari berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa secara umum dunia telah berhasil meningkatkan produksi pangan mencukupi kebutuhan manusia (meskipun distribusinya tidak merata), sehingga apa yang pernah dikhawatirkan oleh Thomas Robert Malthus bahwa dunia akan kekurangan pangan menjadi tidak terbukti. Peningkatan produksi pangan ini memang telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat (konsumen) yang dapat membeli pangan dengan mudah dan murah. Tetapi, bagi produsen peningkatan produksi tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan, bahkan justru dapat menurunkan kesejahteraannya sebagai akibat harga jual produknya yang semakin murah. Pada produk pertanian yang elastisitas permintaannya inelastis, peningkatan produksi (penawaran) berpengaruh besar terhadap penurunan harga, yang lebih lanjut berdampak terhadap penuaian kesejahteraan produsennya.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan produsen pertanian, pemerintah Indonesia telah

mengarahkan para produsen pertanian untuk saling menjalin kerjasama kemitraan seperti yang tertuang dalam Kepmentan 940/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Pola kemitraan ini merupakan adopsi dari sistem “*contract farming*” yang diterapkan Amerika Serikat dalam pengembangan pertaniannya sejak tahun 1950-an. Dalam pengembangan pertanian Amerika, dikenal dua macam kontrak yaitu pemasaran dan produksi (*market-ing and production contract*). Kontrak pema-saran adalah kesepakatan tertulis maupun lisan antara kontraktor dan produsen menyangkut harga dan tempat penjualan suatu komoditas sebelum panen atau sebelum komoditas itu siap dipasarkan. Kontrak produksi merinci *suplai input* oleh kontraktor, kualitas dan kuantitas komoditas tertentu, dan jenis kompensasi yang diberikan kepada pro-dusen peran yang dikerjakannya. Menurut survei USDA (1996), pada tahun 1993 sebanyak 83% total nilai produksi pertanian tanaman dan peternakan diperoleh dengan sistem kontrak, sebanyak 185.000 farm menjalin kontrak pemasaran dan 44.000 farm menjalin kontrak produksi.

Dengan menjalin kemitraan, produsen memperoleh manfaat antara lain: (1) stabilitas pendapatan (*income stability*), karena berkurangnya risiko pro-duksi dan pemasaran, (2) peningkatan efisiensi (*improved ef-ficiency*) melalui bimbingan teknis, manajemen, pengetahuan pasar, dan akses teknologi, (3) keamanan pasar (*market se-curity*) berkaitan dengan *grade* dan standar produk yang dihasilkan, dan (4) akses terhadap kapital (*access to capital*) lebih mudah karena sebagian sarana produksi dipenuhi oleh kontraktor sehingga produsen dapat memperbesar skala usahanya. Bagi perusahaan, manfaat yang diperoleh antara lain: (1) terjadinya stabilitas produksi yang menjamu kontinuitas *suplai (controlling input supply)*, (2) meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, baik tenaga kerja maupun permodalan, (3) menciptakan perluasan pasar dan memperkuat posisi persaingan pasar, dan (4) memperluas kesempatan melakukan ekspansi dan diversiflkasi operasional perusahaan.

Penilaian Plasma

Pada agribisnis ayam pedaging, pola kemitraan telah terbukti

merupakan jalan keluar dari prahara krisis ekonomi yang tak kunjung reda sejak pertengahan tahun 1997. Jika pada tahun 1997 struktur pelaku agribisnis perunggasan 30% kemitraan dan 70% usaha mandiri, maka tahun 1999 struktur ini berubah menjadi 80% kemitraan dan 20% usaha mandiri (Shane, 2000). Namun demikian, pola kemitraan dinilai banyak pihak masih belum sesuai dengan harapan, artinya masih ada beberapa masalah yang perlu dilakukan perbaikan. Salah satu masalah yang perlu dikaji ulang adalah menyangkut kontrak perjanjian antara peternak plasma dengan perusahaan inti.

Tabel 3.10. 1.

Penilaian Plasma Terhadap Isu Pokok Kemitraan Ayam Pedaging di Jawa Timur

| Isu pokok | Penilaian Plasma | | | | | |
|--------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|
| | Tidak Puas | | Kurang Puas | | Puas | |
| | Σ | % | Σ | % | Σ | % |
| Pasokan sapronak | 1 | 2,5 | 4 | 5 | 37 | 92,5 |
| Fluktuasi harga sapronak | 4 | 10 | 22 | 55 | 12 | 35 |
| Ketepatan panen | 3 | 7,5 | 25 | 62,5 | 14 | 30 |
| Penempatan harga output | 25 | 62,5 | 2 | 5 | 13 | 32,5 |
| Skala pemeliharaan | 20 | 50 | 9 | 22,5 | 11 | 27,5 |

Sumber: Winarto (1999)

Hasil penelitian Winarto (1999) menyimpulkan bahwa pasokan sapronak dari inti kepada plasma, ketepatan saat panen, fluktuasi harga sapronak dan harga output oleh inti serta skala usaha pemeliharaan ayam pedaging merupakan sumber ketegangan dalam kemitraan agribisnis ayam pedaging. Penelitian tersebut juga merangkum penilaian 40 peternak plasma terhadap isu pokok kemitraan sistem tertutup agribisnis ayam pedaging di Jawa Timur (Tabel 3.10.1)

Pada Tabel 3.10.1 ditunjukkan bahwa dari 40 plasma, satu orang menyatakan tidak puas, dua orang kurang puas, dan 37 menyatakan puas atas pasokan sapronak dari inti. Pada beberapa kasus, ketidakpuasan plasma mengenai pasokan sapronak menyangkut kualitas sapronak yang diduga lebih rendah, dan pengiriman yang tidak sesuai jadwal. Mengenai harga sapronak,

sebanyak 3 plasma menyatakan tidak puas, 25 orang kurang puas, dan 12 orang puas. Ketidak-puasan plasma berumber dari harga sapronak yang seringkali lebih mahal daripada harga sapronak yang dijual di pasar bebas. Harga sapronak ini juga mempengaruhi harga kontrak ayam, karena dalam perjanjian kontrak disebutkan bahwa harga kontrak ayam dapat berubah apabila terjadi perubahan harga pakan dan DOC, yang pada kenyataannya lebih banyak merugikan pe-ternak. Pada saat harga pakan turun, misalnya, tidak selalu diikuti dengan penurunan perhitungan biaya pakan, sebaliknya, jika harga pakan naik, maka secara otomatis perhitungan biaya pakan akan naik.

Mengenai ketepatan panen, sebanyak 3 plasma menyatakan tidak puas, 25 orang kurang puas, dan 12 orang puas. Ketidakpuasan plasma mengenai ketepatan panen berkaitan dengan kesewenangan inti yang memaksa memanen ayam sebelum waktunya (35 hari) pada saat harga jual ayam naik, dan mengulur waktu panen pada saat harga jual ayam turun. Percepatan panen merugikan peternak karena ayam belum mencapai bobot optimal, sedangkan penundaan panen dapat mengurangi keuntungan peternak akibat bertambahnya biaya pakan yang harus ditanggung peternak. Penetapan harga output paling tidak memuaskan peternak plasma. Sebanyak 25 plasma menyatakan tidak puas, 2 orang kurang puas, dan 13 orang puas. Penetapan harga output ditetapkan secara sepihak oleh inti disesuaikan dengan berat badan ayam pada saat panen. Untuk mengurangi kecemburuan plasma pada saat harga jual ayam lebih mahal daripada harga kontrak, beberapa inti memberikan bonus pasar yang disesuaikan dengan konversi pakan (FCR) yang dihasilkan plasma. Bonus pasar yang besarnya sampai 45% hanya diberikan bila FCR plasma masuk kriteria yang ditetapkan oleh inti.

Sebanyak 20 plasma menyatakan tidak puas terhadap skala budidaya ayam pedaging yang direkomendasikan oleh inti, 9 orang kurang puas, dan 11 orang puas. Keputusan mengenai jumlah ayam yang dimitrakan disesuaikan dengan pengaiaman, kemampuan, dan prestasi peternak, serta kepadatan ayam di suatu wilayah. Peternak yang berprestasi baik dalam beberapa periode dimungkinkan untuk meningkatkan skala pemeliharaannya, sedangkan peternak yang gagal dalam tiga periode berturut-turut

akan dihentikan jalinan kemitraannya dengan inti.

Kelompok Plasma

Kekuatan posisi tawar peternak plasma terhadap inti masih sangat lemah karena tidak adanya lembaga yang menghimpun peternak plasma. Pada umumnya plasma secara individual terpisah satu dengan lainnya berhadapan dengan inti, meskipun dalam inti yang sama. Menyadari hal ini, beberapa orang plasma di Kabupaten Malang telah mendirikan organisasi untuk menghimpun dan memperjuangkan kepentingan peternak plasma dengan nama "Asosiasi Perunggasan (Asper)", Asosiasi yang didirikan akhir tahun 1999 tersebut telah berhasil menyusun kepengurusan dan melakukan pertemuan rutin bulanan, meskipun belum berhasil mendata keanggotaannya secara resmi karena masih ada peternak plasma yang takut terhadap inti jika menjadi anggota asosiasi ini.

keluarnya, dan membuat potret kelebihan dan kekurangan masing-masing inti yang diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi peternak plasma dalam menjalankan usahanya (Tabel 3.10.2). ***

(Poultry Indonesia Juni 2000)

Tabel 3.10. 2.
Potret Pola Kemitraan di Malang sampai Januari 2000

| No | INTI | MUTU DOC | SISTEM PELAYANAN | | | | | |
|----|--------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|---------------|------------|
| | | | Bimbingan | Suplai saponak | Waktu panen | Bonus Pasar | Bonus Pretasi | Kompensasi |
| 1 | NUJ | - tidak standar - tidak ada toleransi kematian | Cukup | Baik | Baik dan variabel | Tidak ada | 00-160/e | 100-150/e |
| 2 | PKP | - standar namun variabel - tidak ada toleransi kematian | Cukup | - Sering terlambat - Volume besar | Sering tidak tepat waktu | 0-45% | 50/kg | 150/e |
| 3 | Ciomas Adisatwa | - Standar, namun variabel - Tidak ada toleransi kematian | Cukup | - Volume besar | Baik | 0-45% | 50/kg | 150/e |
| 4 | Koperasi Agromakmur (Wonokoyo) | - Standar - Tidak ada toleransi kematian | Cukup | Baik | Tidak tepat waktu | 0-30% | Tidak ada | Tidak ada |
| 5 | Anwar Sierad | - Standar - Ada toleransi kematian s/d umur 7 hari | Cukup | - Volume besar | Tidak tepat waktu | 0-30% | Tidak ada | Tidak ada |

Catatan : Harga kontrak saponak dan output pada semua inti relatif sama
Sumber : Asper (2000)

Dari pertemuan-pertemuan awal Asper ini telah melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi peternak dan mencari jalan

DAFTAR PUSTAKA

- 3.1. Sutawi. 1997 Koperasi Perunggasan, Mungkinkah Berkembang. Warta Pertanian No. 170 Juni-Juli 1997.
- 3.2. Sutawi. 2006. Perbedaan Koperasi Tradisional dan Koperasi Generasi Baru. Poultry Indonesia Oktober 2006.
- 3.3. Sutawi. 2001. Manajemen Usaha Pertanian dengan Pola Kemitraan. Need: Lingkungan, Manajemen, Ilmiah Vol. 2 No. 6 Juni 2001.
- 3.4. Sutawi. 1999. Kemitraan Agribisnis Ayam Pedaging di Amerika Serikat. Poultry Indonesia No. 231 Agustus 1999.
- 3.5. Sutawi. 1997. Serba-Serbi Kemitraan Usaha Ayam Ras. Poultry Indonesia No. 213 Oktober 1997.
- 3.6. Sutawi. 1999. Politik Kemitraan Peternakan. Poultry Indonesia No. 233 September 1999.
- 3.7. Sutawi. 1999. Ekonomi Kemitraan Ayam Ras. Poultry Indonesia No. 234 Oktober 1999.
- 3.8. Sutawi. 1999. Kemitraan Tiga Serangkai. Poultry Indonesia No. 227 Maret 1999.
- 3.9. Sutawi. 2000. Analisis Keuntungan Peternak Plasma. Poultry Indonesia No. 221 September 1998.
- 3.10. Sutawi. 2000. Penilaian Plasma terhadap Inti Kemitraan. Poultry Indonesia Juni 2000.

Bab IV

EKONOMI PEMASARAN PETERNAKAN

4.1.

POLA KONSUMSI PRODUK PETERNAKAN

Industri perunggasan tampak mulai bangkit setelah 3 tahun dihajar krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 yang lalu. Tanda awal kebangkitan ini tampak dari produksi DOC yang hanya 5,4 juta per minggu tahun 1998 telah meningkat menjadi 8,4 juta ekor/minggu pada Desember 1999, dan selanjutnya mencapai 9,7-12 juta ekor/minggu pada Pebruari 2000. Pada bulan Mei diperkirakan produksi DOC ayam pedaging dapat mencapai 15 juta ekor, dan berkembang lagi menjadi 17 juta ekor/minggu pada September 2000. Jika perekonomian nasional terus membaik dengan didukung stabilitas sosial politik yang terjamin, maka industri pembibitan akan pulih seperti kondisi sebelum krisis pada tahun 2001 dengan produksi DOC ayam pedaging sekitar 20 juta ekor/minggu.

Ringkasan Laporan Utama PI Maret 2000 tersebut diatas menunjukkan sikap optimisme praktisi pembibitan ayam akan masa depan industri perunggasan yang semakin baik. Membahas masa depan industri perunggasan Indonesia tidaklah cukup dari produksi saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah sisi konsumsi yang merupakan faktor penarik (*pullfactor*) bagi perkembangan industri perunggasan. Pengalaman menunjukkan bahwa produksi ayam yang melebihi kebutuhan konsumsi, yang bermula dari produksi bibit yang berlebihan, dapat mengakibatkan penurunan harga jual ayam serta pembakaran bibit ayam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai pengaruh tingkat pendapatan terhadap konsumsi ini juga merupakan faktor penting dalam memperkirakan masa depan industri perunggasan Indonesia.

Selama krisis ekonomi berlangsung, pendapatan per kapita penduduk Indonesia mengalami penurunan dari US\$ 1023 (1997) menjadi US\$ 471 (1998), dan telah menempatkan Indonesia kembali dalam kategori negara miskin. Diperkirakan angka kemiskinan meningkat dari 11% (1996) menjadi 22% (1998) dari jumlah

penduduk 210 juta jiwa, sedangkan angka pengangguran diperkirakan mencapai 60 juta orang. Beberapa ekonom juga mencatat sebanyak 36 juta penduduk pedesaan mengalami dampak serius penurunan daya beli. Penurunan pendapatan telah mengakibatkan konsumsi daging ayam menurun dari 3,5 kg/kapita (1997) menjadi 2,3 kg (1998), sedangkan konsumsi telur menurun dari 48 butir (1997) menjadi 31 butir (1998). Penurunan konsumsi ini disebabkan menurunnya pendapatan riil masyarakat akibat inflasi yang meningkat dari 11,1 % (1997) menjadi 77,6% (1998).

Restrukturisasi pinjaman dalam dan luar negeri yang didukung kondisi sosial politik yang semakin terjamin membuat perekonomian Indonesia semakin baik. Sampai akhir tahun 1999 pendapatan per kapita telah sedikit meningkat menjadi US\$ 657, ekonomi mengalami pertumbuhan 2%, inflasi dapat ditekan menjadi 10%, dan nilai tukar rupiah “stabil” pada angka sekitar 8.000 rupiah/US\$. Pemulihan ekonomi yang masih berlangsung ini telah memberi perubahan positif pada sektor perunggasan. Konsumsi ayam ras tahun 1999 dan mencapai 2,9 kg ayam pedaging dan 40 butir telur, dan diperkirakan akan mencapai 3,6 kg dan 49 butir pada 2000, serta 4,4 kg dan 59 butir (Tabel 4.10.1). Pangsa pengeluaran pangan pada 2001. Diperkirakan tingkat pertumbuhan konsumsi mencapai 10-15% per tahun pada tahun-tahun mendatang (Shane, 2000).

Pola Konsumsi

Tingkat pendapatan merupakan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Semakin besar tingkat pendapatan menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin baik, dan sebaliknya. Tingkat pendapatan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa. Menurut hukum Engel, semakin meningkat pendapatan, maka semakin berkurang persentase pengeluaran untuk makanan, dan semakin meningkat persentase pengeluaran untuk bukan makanan (Norton dan Awang, 1993). Pada rumah tangga yang berpendapatan rendah (miskin), sebagian besar pendapatan akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Di negara maju, persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran biasanya berada di bawah 50%.

Tabel 4.10. 1.
Pangsa Pengeluaran Pangan

| No | Uraian | Tahun | |
|----|-----------------------------------|--------|--------|
| | | 1990 | 1996 |
| 1 | Pengeluaran total (Rp/kap/bulan) | 30271 | 70062 |
| 2 | Pengeluaran pangan (Rp/kap/bulan) | 18272 | 38725 |
| 3 | Pangsa Pengeluaran Pangan (%) | 60,36 | 55,27 |
| 4 | Pengeluaran Pangan Marjinal | - | 0,5140 |
| 5 | Elastistas Pengeluaran Pangan | 0,9025 | 0,8516 |

Sumber: BPS, diolah

Secara empiris, hukum Engel dapat dilihat dari tiga fenomena apabila pendapatan meningkat yaitu pangsa pengeluaran pangan menurun, pengeluaran pangan marjinal menurun, dan elastisitas pengeluaran pangan terhadap pendapatan inelastis (kurang dari satu) dan menurun jika pendapatan meningkat (Simatupang dan Ariani, 1997). Data pada Tabel 1 membuktikan bahwa fenomena hukum Engel berlaku untuk kasus Indonesia. Pada tingkat pendapatan yang meningkat dari Rp. 30.271 (1990) menjadi Rp.70.062 (1996), pangsa pengeluaran pangan menurun dari 60,36% menjadi 55,27%. Elastisitas pengeluaran pangan 0,8516% (1996) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan 10% hanya diikuti peningkatan pengeluaran pangan 8,5%, sedangkan pengeluaran pangan marjinal menunjukkan bahwa perbandingan antara kuantitas perubahan pengeluaran pangan dengan perubahan pendapatan hanya 0,5140.

Selain terhadap nilai pengeluaran pangan, peningkatan pendapatan juga berpengaruh nyata terhadap komposisi pengeluaran pangan. Pada rumah tangga yang berpendapatan rendah, sebagian besar (sekitar 50%) pengeluaran pangan digunakan untuk sumber karbohidrat, sedangkan pada rumah tangga berpendapatan tinggi pengeluaran terbesar (sekitar 30%) adalah untuk sumber protein. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga miskin lebih mendahulukan pemenuhan kebutuhan energi dan rasa kenyang dengan mengkonsumsi lebih banyak makanan sumber karbohidrat yang harganya relatif lebih murah daripada sumber protein. Jika pendapatan meningkat maka komposisi

makanan keluarga akan berubah dengan meningkatnya porsi sumber protein dan sumber gizi lainnya seperti vitamin dan mineral. Pada Tabel 4.10.2 tampak bahwa pangsa pengeluaran protein meningkat dari 8,3% pada golongan pendapatan terendah menjadi 30,9% pada golongan pendapatan tertinggi.

Tabel 4.10.2.
Pangsa Pengeluaran Protein, Sumber Protein, dan Harga Protein pada Berbagai Kelompok Pengeluaran Tahun 1996

| Kelompok pengeluaran (Rp. 000/kap/bln) | Pengeluaran Protein (%) | Pangsa Pengeluaran (%) | | | Harga Protein (Rp/g) | | |
|--|-------------------------|------------------------|--------|----------------|----------------------|--------|----------------|
| | | Ikan | Daging | Telur dan Susu | Ikan | Daging | Telur dan Susu |
| I. < 15 | 8.3 | 55.4 | 7.2 | 8.4 | 231 | 800 | 680 |
| II.15 – 19.99 | 11.3 | 54.9 | 6.2 | 13.3 | 235 | 910 | 715 |
| III.20 – 29.99 | 13.6 | 48.6 | 9.7 | 16.0 | 294 | 648 | 840 |
| IV.30 – 39.99 | 17.1 | 46.2 | 12.9 | 18.1 | 348 | 753 | 851 |
| V.40 – 59.99 | 20.4 | 42.6 | 18.1 | 20.6 | 413 | 791 | 901 |
| VI.60 – 79.99 | 23.5 | 39.1 | 23.0 | 22.6 | 485 | 847 | 971 |
| VII.80 – 99.99 | 25.4 | 35.8 | 26.8 | 23.6 | 529 | 886 | 1017 |
| VIII.100 – 149.99 | 28.0 | 32.1 | 31.1 | 25.0 | 587 | 945 | 1065 |
| IX.150 – 199.99 | 29.6 | 28.7 | 34.8 | 26.4 | 626 | 995 | 1129 |
| X.200 – 299.99 | 30.4 | 28.6 | 36.2 | 27.0 | 676 | 1035 | 1129 |
| XI.> 300 | 30.9 | 26.9 | 38.5 | 26.5 | 775 | 1087 | 1219 |
| Rata-rata | 21.7 | 39.9 | 22.2 | 20.7 | 473 | 882 | 956 |

Sumber: BPS, diolah

Komposisi bahan makanan sumber protein juga berbeda nyata menurut golongan pendapatan. Ikan merupakan sumber utama protein bagi golongan pendapatan rendah. Peranan ikan akan diambil alih oleh daging, susu dan telur, dengan semakin meningkatnya pendapatan. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan akan mengubah preferensi (tingkat kesukaan) sumber protein hewani dari ikan ke daging, telur dan susu (Tabel 4.10. 2). Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Indonesia masih menganggap daging, telur dan susu sebagai bahan pangan yang lebih superior dibandingkan ikan. Pada Tabel 4.10.2 juga ditunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan, harga protein yang dikonsumsi selalu lebih mahal untuk setiap jenis bahan makanan sumber protein. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan akan mendorong perubahan preferensi konsumen ke arah makanan yang berkualitas lebih baik, misalnya makanan olahan.

Elastisitas Permintaan

Selain pendapatan, tingkat konsumsi juga dipengaruhi oleh harga. Pengaruh perubahan pendapatan dan perubahan harga terhadap tingkat konsumsi suatu barang seperti halnya daging dan telur ayam dinyatakan dengan besaran angka elastisitas. Untuk kebanyakan barang, terdapat hubungan yang positif antara perubahan pendapatan dengan perubahan permintaan. Barang-barang yang memiliki elastisitas pendapatan terhadap permintaan (*income elasticity of demand*) positif dinamakan barang normal, sedangkan yang negatif disebut barang inferior. Elastisitas harga terhadap permintaan (*price elasticity of demand*), sejalan dengan teori permintaan pada umumnya memiliki tanda negatif, yang berarti peningkatan harga akan menyebabkan penurunan permintaan. Pemahaman terhadap elastisitas harga bermanfaat dalam perencanaan produksi dan strategi pemasaran. Pada produk yang memiliki nilai elastisitas harga yang elastis (lebih dari satu), penurunan sedikit harga akan berpengaruh besar terhadap peningkatan permintaan (konsumsi), sedangkan pada produk yang memiliki nilai elastisitas harga yang inelastis (kurang dari satu), penambahan sedikit penawaran (produksi) akan berpengaruh besar terhadap penurunan harga.

Studi analisis permintaan produk perunggasan (daging dan telur ayam) yang dilaporkan Hermanto dkk. (1995) menjumpai adanya fenomena bahwa elastisitas harga terhadap permintaan daging ayam pedaging adalah elastis sebesar -1,48, sedangkan ayam buras dan telur adalah inelastis masing-masing sebesar -0,93, dan telur -0,62 (tabel 3). Permintaan daging ayam pedaging pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi baik di perkotaan (-0,76) maupun di pedesaan (-0,66) bersifat kurang elastik terhadap perubahan harga, sebaliknya terjadi pada kelompok berpendapatan sedang dipedesaan (-1,13) dan diperkotaan (-1,73) serta kelompok berpendapatan rendah di pedesaan (-1,80) dan di perkotaan (-2,87), Angka-angka elastisitas harga tersebut menjelaskan bahwa kenaikan setiap 1% kenaikan harga daging ayam pedaging, ayam buras, dan telur akan diikuti penurunan persentase permintaan produk sebesar angka-angka elastisitas masing-masing produk tersebut. Angka elastisitas pendapatan untuk daging ayam

pedaging, ayam buras, dan telur masing-masing 1,51, 1,92, dan 0,88. Angka ini menunjukkan bahwa kenaikan 1% pendapatan akan diikuti peningkatan persentase permintaan daging ayam pedaging, ayam buras, dan telur masing-masing sebesar 1,51%, 1,92% dan 0,88%. Memperhatikan elastisitas pendapatan pada Tabel 4.10.3 yang bertanda positif menunjukkan bahwa ketiga produk ternak ayam tersebut termasuk barang normal. Angka-angka tersebut juga menunjukkan bahwa seluruh produk memiliki nilai yang tinggi pada kelompok pendapatan rendah, dibanding kelompok pendapatan sedang dan tinggi, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa kelompok masyarakat berpendapatan rendah sangat responsif terhadap konsumsi daging dan telur ayam ketika pendapatan meningkat.

Tabel 4.10.3.
Elastisitas Harga dan Pendapatan Produk Perunggasan

| Daerah/kelp Pendapatan | Elastisitas harga | | | Elastisitas pendapatan | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|--------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | Daging Broiler | Daging Buras | Telur | Daging Broiler | Daging Buras | Telur |
| Perdesaan | | | | | | |
| Rendah | -1.80 | -1.31 | -0.61 | 3.58 | 3.39 | 1.00 |
| Sedang | -1.13 | -0.77 | -0.78 | 0.94 | 1.29 | 0.59 |
| Tinggi | -0.76 | -0.48 | -0.46 | 0.49 | 0.57 | 0.37 |
| Perkotaan | | | | | | |
| Rendah | -2.87 | -0.87 | -1.11 | 2.51 | 3.04 | 2.09 |
| Sedang | -1.73 | -1.40 | -0.39 | 1.19 | 2.51 | 0.92 |
| Tinggi | -0.66 | -0.76 | -0.37 | 0.57 | 0.73 | 0.30 |
| Rata-rata | -1.48 | -0.93 | -0.62 | 1.51 | 1.92 | 0.88 |

Sumber: Hermanto, dkk (1995)

Soedjana dkk. (1994) melaporkan pengkajian serupa pada seluruh propinsi di Jawa dan mendapatkan bahwa elastisitas pendapatan konsumen terhadap permintaan daging ayam berkisar antara 0,93 di Jawa Timur sampai 1,04 di Jawa Tengah, sedangkan untuk telur besarnya lebih dari satu di seluruh propinsi yaitu antara 1,06 di Jawa Timur sampai 1,08 di Jawa Barat, kecuali di DKI Jakarta yang hanya 0,94. Seluruh angka elastisitas pendapatan tersebut bertanda positif yang menunjukkan bahwa komoditas

daging dan telur ayam merupakan barang normal bagi konsumen di Jawa. Dari kajian tersebut juga dilaporkan bahwa permintaan daging dan telur di Jawa kurang elastis (inelastis) terhadap harga komoditas tersebut, kecuali daging ayam di DKI Jakarta yang mencapai -2,16.

Untuk kawasan timur Indonesia, dalam laporan Soedjanadkk. (1994) yang lain, ditemukan bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan daging dan telur ayam masing-masing 1,08 dan 1,25 (Bali), 0,85 dan 0,63 (NTB), 0,82 dan 1,38 (NTT), 0,71 dan 0,48 (Sulut), serta 0,75 dan 1,06 (Sulsel). Elastisitas harga terhadap permintaan untuk komoditas tersebut hanya terlihat elastis pada telur ayam di Sulut (-1,34) dan Sulsel (-1,33), sedangkan di propinsi lainnya menunjukkan angka kurang elastis.

Kajian serupa untuk beberapa propinsi di Sumatera dan Kalimantan dilaporkan oleh Sudaryanto dkk (1995). Dari kajian mereka diperoleh informasi bahwa elastisitas pendapatan terhadap permintaan daging inelastis Aceh (0,44), Kalsel (0,74), dan Kaltim (0,83), bahkan di Sumbar daging ayam merupakan barang inferior (-0,68), sedangkan di propinsi lainnya pada kajian ini menunjukkan angka antara 1,00 (Kalbar) sampai 1,99 (Sumut). Elastisitas pendapatan untuk telur ayam menunjukkan angka di atas satu, yaitu mulai 1,04 (Sumut) sampai 1,39 (Kaltim), kecuali Aceh (0,91). Elastisitas harga daging ayam yang kurang elastis terdapat di tiga propinsi yaitu Aceh (-0,24), Sumut (-0,54), dan Kalsel (-0,70), sedangkan di wilayah lainnya menunjukkan angka yang elastis (lebih dari satu). Sementara untuk telur, angka elastisitas harganya kurang elastis, kecuali di Sumbar (-1,32).

Kesimpulan

Keterkaitan antara tingkat pendapatan dan harga dengan preferensi pangan memang sangat kompleks. Peningkatan pendapatan akan menggeser preferensi pangan dan pemenuhan hanya untuk kebutuhan biologis yang bersifat kuantitatif (energi dan rasa kenyang) ke pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, dan sosiologis yang bersifat kualitatif (cita rasa, kesehatan, dan kehormatan), sedangkan perubahan harga akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas permintaan suatu produk. Pemahaman

tentang hubungan pendapatan, harga, dan preferensi konsumen ini penting baik bagi pemerintah untuk mengatasi perubahan permintaan pangan dan perumusan kebijakan, maupun bagi praktisi untuk menentukan strategi produksi, pemasaran, dan pengembangan produknya. Khusus untuk industri perunggasan, variasi pola konsumsi dan respon konsumen terhadap perubahan harga daging dan telur ayam memiliki konsekuensi bahwa proyeksi konsumsi, produksi dan populasi ternak unggas harus didasarkan pada karakteristik agro-ekosistem, ekonomi, dan sosial budaya wilayah setempat.***

(Poultry Indonesia Juli 2000)

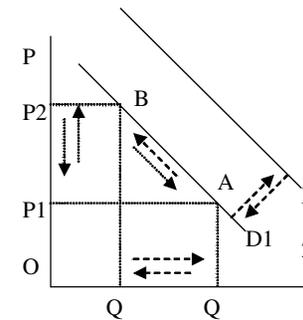
4.2. TEORI PERMINTAAN DAN PENAWARAN PADA USAHA PETERNAKAN

Hampir setiap tahun, terutama pasca lebaran dan hari-hari besar lainnya, peternak ayam dihadapkan pada keadaan “over supply” yang berarti bahwa kualitas penawaran (produk dan telur) melebihi kuantitas permintaan produk tersebut oleh konsumen. Keadaan ini menyebabkan harga produk menurun yang pada gilirannya akan menurun permintaan (*revenue*) dan keuntungan (*prevail*) yang diterima oleh peternak, bahkan dapat pula menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar. Oleh karena itu perlu kiranya peternak memahami konsep-konsep dasar tentang permintaan dan penawaran yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merencanakan operasional usaha peternakan ayam guna mengantisipasi risiko dan ketidakpastian pada masa yang akan datang.

Teori Permintaan

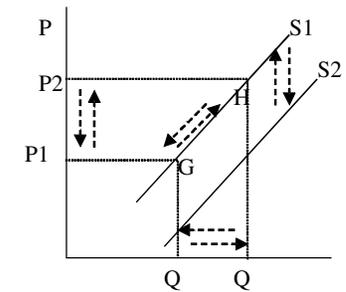
Permintaan (*demand=D*) adalah kuantitas produk (barang atau jasa) yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen pada periode dan kondisi ekonomi tertentu. Keseluruhan permintaan individu dan konsumen dinamakan permintaan pasar (market demand). Permintaan produk dipengaruhi oleh harga produk tersebut, harga barang lain yang berhubungan, pendapatan konsumen, jumlah konsumen, selera, pengaruh iklan, adanya harapan perubahan harga dan sebagainya. Antara kuantitas permintaan produk (*quantity= Q*) dan harga produk (*price= P*) mempunyai hubungan yang terbalik (negatif), artinya bila harga naik maka kuantitas permintaan turun dan bila harga produk turun maka permintaan naik (Gambar 1). Hubungan antara kuantitas (*Q*) dan harga (*P*) digambarkan sebagai kurva permintaan seperti D1 (dari titik A dan B atau sebaliknya) disebabkan oleh perubahan harga, sedangkan perubahan selain harga (misalnya pendapatan

konsumen, selera, harga produk lain) akan menggeser kurva permintaan ke kanan atau ke kiri (dari D1 ke D2 atau sebaliknya).



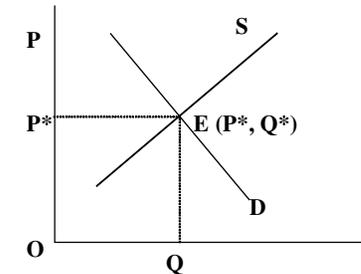
P = harga
Q = kuantitas
D = kurva permintaan

Gambar 4.2.1. Kurva permintaan



P = harga
Q = kuantitas
S = kurva penawaran

Gambar 4.2.2. Kurva penawaran



P = harga
Q = kuantitas
D = kurva permintaan
S = kurva penawaran
P = harga keseimbangan

Gambar 4.2.3. Keseimbangan pasar

Teori penawaran

Penawaran (*supply* = S) adalah kuantitas produk yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada periode dan kondisi ekonomi tertentu. Keseluruhan penawaran semua produsen pada pasar disebut penawaran pasar (*market supply*). Penawaran produk dipengaruhi oleh harga produk tersebut, harga input (bahan baku) teknologi yang digunakan, jumlah produsen, harga barang lain, pajak, subsidi dan sebagainya. Antara kuantitas penawaran produk dengan harga jual mempunyai hubungan lurus (positif), artinya jika harga naik dan bila harga turun maka kuantitas penawaran akan turun. Hubungan antara kuantitas penawaran (Q) dan harga (P) digambarkan sebagai kurva penawaran (Gambar 2). Naik atau turunnya kuantitas penawaran sepanjang kurva penawaran S1 (dari titik G ke H dan sebaiknya) disebabkan oleh perubahan selain harga, sedangkan perubahan selain harga (misalnya harga input, penambahan populasi, perubahan teknologi) akan menggeser kurva penawaran ke kanan atau ke kiri (dari S1 ke S2 atau sebaliknya).

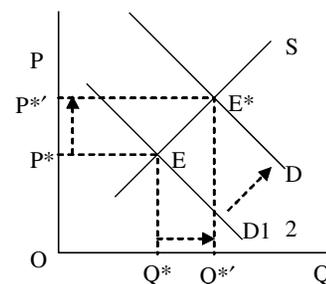
Harga keseimbangan

Harga merupakan faktor dan alat yang paling penting bagi pemasaran produk perdagangan termasuk produk peternakan. Harga dapat merupakan alat pengawasan utama terhadap produksi dan permintaan. Inti dari analisis teori permintaan dan penawaran adalah tercapainya harga keseimbangan antara harga beli produk yang diminta konsumen dengan harga jual produk yang ditawarkan oleh produsen. Keseimbangan pasar tercapai pada perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran (gambar3).

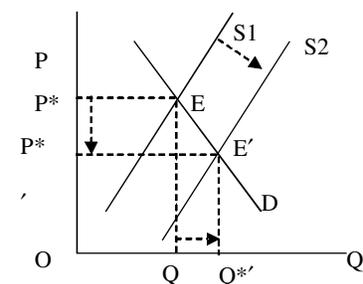
Secara teoritis harga keseimbangan produk di pasar adalah sebesar Op^* yang menyatakan harga kesepakatan antara produsen sebagai penjual dan konsumen sebagai pembeli sedangkan kuantitas keseimbangan adalah sebesar (OQ^*) yang menyatakan kesepakatan kuantitas yang bersedia dijual oleh produsen dan yang dibeli oleh konsumen pada tingkat harga keseimbangan ini ditentukan pula oleh struktur pasar. Pada usaha peternakan ayam, peternak berada

pada struktur pasar yang disebut “pasar persaingan” yang ditandai dengan terdapatnya banyak produsen (ratusan ribu peternak) dan banyak konsumen (jutaan rumah tangga). Dalam pasar demikian baik produsen maupun konsumen tidak menentukan harga (price taker), artinya harga keseimbangan terjadi secara otomatis sebagai hasil tawar menawar antara penjual dan pembeli. Bila harga naik maka produsen (penjual) akan berusaha menambah jumlah yang ditawarkan (penawaran) tetapi konsumen akan mengurangi jumlah yang diminta (permintaan), dan bila harga turun konsumen akan menambah jumlah yang diminta tetapi produsen akan mengurangi jumlah yang ditawarkan.

Atas dasar keseimbangan pasar ini dapat terjadi berbagai perubahan yang kompleks. Bila permintaan produk bertambah (kurva permintaan bergeser ke kanan) dan penawaran tetap maka dapat terjadi “excess demand” (kelebihan permintaan) yang mendorong kenaikan harga sehingga produsen (peternak) dapat meningkatkan kuantitas penawaran (Gambar 4.2.4). Bila penawaran meningkat (kurva penawaran bergeser ke kanan) permintaan tetap maka dapat terjadi excess demand” (kelebihan penawaran) yang mendorong penurunan harga sehingga produsen harus mengurangi kuantitas penawaran (Gambar 4.2.5).



Gambar 4.2.4. Kenaikan permintaan



Gambar 4.2.5. Kenaikan penawaran

Kenyataan di lapangan

Berdasarkan pengalaman, pada waktu-waktu tertentu seperti pada bulan puasa, lebaran, Tahun baru, Bulan Besar bagi orang

Jawa), permintaan produk peternakan ayam meningkat. Peningkatan ini bukan disebabkan oleh penurunan harga tetapi oleh faktor bukan harga misalnya tradisi, banyaknya orang punya hajat atau peningkatan selera. Peningkatan ini akan mendorong kenaikan harga (Gambar 4.2.4). Pada waktu harga naik penawaran produk mengalami kenaikan. Kenaikan penawaran ini terjadi karena peternak memperbesar skala usaha atau terdapatnya peternak-peternak baru atau musiman. Bila kenaikan permintaan ini lebih banyak daripada kenaikan penawaran maka harga dapat tetap naik (Gambar 4.2.6). Bila kenaikan penawaran sama dengan kenaikan permintaan maka harga akan tetap stabil dan bila ikan penawaran ini melebihi kenaikan permintaan maka harga turun.

Masalah yang terjadi adalah bahwa peternak sebagai produsen kurang menyadari bahwa kondisi produsen kurang menyadari bahwa kondisi kenaikan permintaan ini hanya terjadi pada periode waktu yang relatif singkat, hanya sekitar satu atau dua bulan dan setelah itu permintaan akan turun kembali (dari D2 ke D1 pada Gambar 4.2.7) sementara permintaan turun, mestinya penawaran juga harus dikurangi agar harga stabil. Namun pada kenyataannya penawaran tetap tinggi (Q^*) walaupun permintaan telah turun ($Q^{*''}$) sehingga terjadi "over supply" dan harga turun (dari P^* ke $P^{*''}$). Penurunan harga ini mengakibatkan pendapatan peternak menurun, bahkan banyak peternak terpaksa "gulung tikar" karena kerugian yang diderita cukup besar dan hanya peternak berskala besar yang mampu bertahan karena efisiensi produksi, adanya

penurunan harga masih bisa memperoleh keuntungan.

Secara teoritis, untuk menjaga agar harga tetap stabil maka penurunan permintaan harus dibarengi dengan penurunan penawaran. Kondisi semacam ini sulit dilakukan oleh peternak, pertama, karena ayam merupakan makhluk hidup yang penjualan produknya tergantung waktu (umur), dan kedua, karena tidak akan pernah ada kolusi antar peternak agar cara ini dapat dilakukan. Kenyataan yang terjadi adalah penurunan penawaran terjadi karena banyak peternak kecil terpaksa tidak dapat dilanjutkan usahanya.

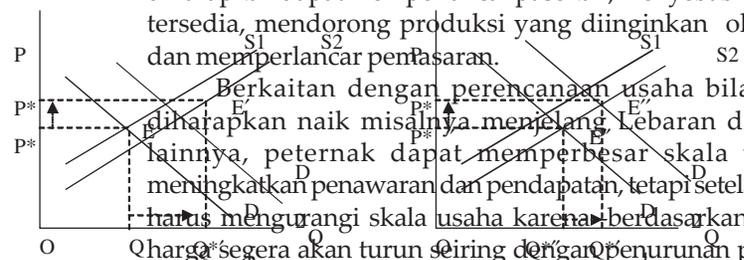
Penutup

Bagi seorang peternak sebagai produsen produk peternakan harga adalah pembimbing dalam menentukan apa, berapa dan kapan usaha peternakan dilakukan, ditambah atau dikurangi. Dengan cara demikian produksi dan konsumsi atau penawaran dan permintaan - secara teoritis - tetap berada pada keadaan harga yang seimbang (stabil). Selain itu harga diharapkan dapat diharapkan dapat memperlancar pasokan, menyebabkan penawaran tersedia, mendorong produksi yang diinginkan oleh konsumen dan memperlancar pasar.

Berkaitan dengan perencanaan usaha bila harga yang diharapkan naik misalnya menjelang Lebaran dan hari besar lainnya, peternak dapat memperbesar skala usaha untuk meningkatkan penawaran dan pendapatan, tetapi setelah itu peternak harus mengurangi skala usaha karena berdasarkan pengalaman harga segera akan turun seiring dengan penurunan permintaan.

Data konkrit tentang kuantitas penawaran, permintaan dan harga memang tidak tersedia, tetapi berdasarkan pengalaman peternak dapat diperkirakan kapan atau bulan apa permintaan akan meningkat, kapan harga naik sehingga penawaran harus ditingkatkan dengan menambah skala usaha dan kapan permintaan turun, harga turun sehingga penawaran harus diturunkan dengan mengurangi skala usaha. Dengan demikian keuntungan dapat ditingkatkan dan kerugian dapat dicegah. ***

(Poultry Indonesia No. 177 Nopember 1994)



Gambar 4.2.6 Kenaikan permintaan dan penawaran, penurunan permintaan, penawaran tetap

4.3.

STRUKTUR PASAR DALAM AGRIBISNIS PETERNAKAN

Menurut konsep ilmu ekonomi, setiap pengusaha menjalankan perusahaannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Demikian pula dengan pengusaha peternakan baik pabrik pakan ternak, pembibitan, pengusaha obat, peralatan dan juga peternak itu sendiri. Keuntungan maksimum ini selain ditentukan oleh biaya produksi, volume produksi dan harga jual, juga dipengaruhi oleh struktur pasar yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Struktur pasar menggambarkan tingkat persaingan di suatu pasar barang dan jasa tertentu. Suatu pasar terdiri dari seluruh perusahaan dan individu yang ingin dan mampu untuk membeli serta menjual suatu produk tertentu. Karakteristik pasar yang paling penting adalah jumlah dan ukuran distribusi para pembeli dan penjual serta tingkat diferensiasi produk yang diperjualbelikan tersebut.

Ada perbedaan menyolok antara struktur pasar yang dihadapi oleh peternak dengan yang dihadapi oleh perusahaan (produsen) saponak khususnya pakan dan bibit ternak. Peternak ayam baik pedaging maupun petelur menghadapi pasar persaingan (competition market) sedangkan pabrik pakan dan pembibitan menghadapi pasar oligopoli (oligopoly market). Kedua struktur pasar ini sangat berpengaruh terhadap kemungkinan keuntungan yang dapat dicapai oleh peternak dan pengusaha saponak.

Pasar Persaingan

Pasar persaingan dapat didefinisikan sebagai struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar tersebut. Dalam pasar persaingan ini terjadi persaingan diantara banyak produsen. Dalam agribisnis ternak ayam struktur

pasar ini dihadapi oleh peternak ayam petelur maupun ayam pedaging. Ciri-ciri selengkapnya pasar persaingan adalah seperti uraian berikut ini.

Pertama, produsen (peternak) adalah pengambil harga. Pengambil harga atau price taker berarti sesuatu perusahaan yang ada dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga. Apapun tindakan perusahaan di dalam pasar, ia tidak akan perubahan atas harga pasar yang berlaku. Harga daging ayam dan telur di pasar ditentukan oleh interaksi antara keseluruhan produsen (peternak) dan keseluruhan konsumen. Seorang produsen adalah terlalu kecil perannya di dalam pasar sehingga tidak dapat mempengaruhi penentuan harga dan tingkat produksi di pasar. Perannya yang sangat kecil tersebut disebabkan jumlah produksi yang dihasilkan seorang produsen (peternak) merupakan bagian kecil saja dari keseluruhan jumlah barang yang dihasilkan dan diperjualbelikan di pasar.

Kedua, setiap produsen mudah keluar masuk dalam pasar. Sekiranya peternak selaku produsen mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya apabila ada peternak baru yang ingin masuk dalam agribisnis ini dapat dengan mudah pula melakukannya. Tidak terdapat hambatan-hambatan, baik secara legal atau dalam bentuk lain - misalnya, secara keuangan atau kemampuan teknologi - bagi peternak-peternak lain untuk memasuki atau meninggalkan bidang usaha peternakan ini.

Ketiga, produsen menghasilkan barang yang serupa. Macam dan jenis produk yang dihasilkan oleh setiap peternak dapat dipandang sama atau serupa oleh konsumen. Tidak ada perbedaan antara telur yang dihasilkan oleh peternak A, B maupun C. Bentuk, ukuran dan warnanya sama serta dijual dengan harga yang sama tiap kilogram. Juga tidak ada perbedaan antara daging ayam yang dihasilkan oleh peternak X, Y maupun Z, karena bibitnya relatif sama. Barang seperti itu dinamakan dengan istilah barang identical atau homogenous. Karena barang-barang tersebut adalah sangat serupa maka pembeli tidak dapat membedakan yang mana telur atau daging ayam yang dihasilkan oleh peternak yang satu dengan peternak lainnya. Barang yang dihasilkan oleh seorang peternak merupakan pengganti sempurna atas barang yang

dihasilkan oleh peternak lain. Sebagai akibat dari sifat-sifat ini, tidak ada gunanya bagi peternak untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga (non price competition) yaitu persaingan dengan melakukan promosi penjualan. Cara ini tidak efektif untuk meningkatkan penjualan karena para pembeli mengetahui bahwa barang-barang yang dihasilkan peternak-peternak dalam bidang usaha tersebut tidak ada bedanya sama sekali.

Keempat, terdapat banyak produsen di pasar. Dalam agribisnis ternak ayam terdapat jutaan peternak yang menghasilkan telur dan daging ayam. Kondisi inilah yang menyebabkan peternak tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Kondisi ini meliputi dua aspek yaitu jumlah peternak yang sangat banyak dan masing-masing peternak adalah relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah peternak di dalam pasar. Sebagai akibatnya produksi setiap peternak adalah sangat sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah produksi dalam bidang usaha (industri) tersebut. Kondisi ini menyebabkan apapun yang dilakukan peternak, seperti meningkatkan atau menurunkan harga atau menurunkan produksi, sedikitpun ia tidak mempengaruhi harga yang berlaku di dalam pasar tersebut. Kenaikan harga ayam dan telur yang terjadi selama ini dapat dikatakan disebabkan oleh faktor tradisi bukan oleh faktor peternak. Dapat dilihat bahwa kenaikan harga hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu seperti hari raya, hari Natal, Tahun Baru. Kalau pada hari-hari biasa peternak menaikkan harga maka konsumen akan cenderung beralih ke produk substitusi seperti produk perikanan.

Kelima, pembeli (konsumen) mengetahui informasi kondisi yang terjadi di pasar yaitu mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan atas harga baik melalui radio, surat kabar, pusat informasi maupun hubungan antar konsumen. Akibatnya para produsen (peternak) tidak dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari yang berlaku di pasar.

Dalam kondisi demikian, apa yang mesti dilakukan oleh para peternak? Oleh karena dalam pasar persaingan ini peternak sebagai produsen bertindak sebagai penerima harga (price taker) maka peternak harus menitikberatkan pada sisi lain yang mempengaruhi keuntungan yaitu minimisasi biaya produksi. Peternak harus menyadari bahwa

biaya produksi adalah "way of life"-nya usaha peternakan.

Metode untuk minimisasi biaya adalah menerapkan perencanaan dan manajemen usaha yang baik. Misalnya, sebelum membeli pakan, bibit, obat harus diperhitungkan apakah biaya yang dikeluarkan dapat diturunkan. Demikian pula dalam penggunaan peralatan dan tenaga kerja apakah sudah efisien. Jika peternak lebih efisien dalam penggunaan sumberdaya yang digunakan maka biaya per unit produksi dapat diturunkan.

Metode lain untuk menurunkan biaya per unit produksi adalah adopsi teknologi baru. Teknologi ini dapat berupa berbagai bentuk. Dalam peternakan, adopsi teknologi tidak harus berbentuk peralatan atau mesin-mesin yang canggih tetapi dapat berupa tipe atau jenis bibit ayam baru yang dapat berproduksi dengan efisiensi pakan yang rendah. Teknologi baru dapat membantu peternak menurunkan biaya produksi melalui dua cara. Pertama, meningkatkan produksi dengan tingkat penggunaan sumberdaya yang sama dan dengan demikian menurunkan biaya per unit produksi. Kedua, memproduksi output yang sama tetapi dengan sumberdaya yang lebih sedikit dan dengan demikian menurunkan biaya per unit produksi.

Peternak harus menyadari bahwa teknologi baru, dalam bentuk apapun, dalam banyak kasus akan meningkatkan total biaya produksi, misalnya pembelian peralatan baru. Yang paling penting adalah pengaruh perubahan teknologi terhadap biaya per unit produksi. Pada kasus ini peternak harus berhati-hati menjawab pertanyaan tentang adopsi teknologi baru, "apakah peningkatan produksi atau penurunan biaya per unit seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli teknologi baru?". Dalam hal ini peternak dikatakan berada dalam "cost-price squeeze", yang berarti terjepit diantara biaya dan harga. Ungkapan ini menunjukkan persaingan alamiah usaha peternakan. Pertama, karakteristik pasar peternakan adalah price taker dimana peternak tidak dapat mempengaruhi harga produk. Kedua, usaha peternakan ayam yang dibahas di sini adalah usaha yang padat biaya dan padat teknologi. Apa yang terjadi jika satu atau lebih harga input naik secara dramatis? Pada pasar non-kompetitif, pengusaha dapat menghindari dari cost-price squeeze dengan cara meningkatkan harga jual produk ke konsumen. Pada

pasar persaingan jika cara ini dilakukan peternak maka peternak akan kesulitan bahkan tidak dapat menjual produknya. Oleh karena itu peternak harus selalu berusaha untuk menurunkan biaya per unit produksi dengan cara efisiensi sumberdaya yang digunakan dalam upaya mencapai keuntungan maksimum yang diharapkan.

Pasar Oligopoli

Oligopoli dapat diartikan persaingan diantara beberapa saingan. Pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan. Biasanya struktur industri dari pasar pasar oligopoli adalah terdapat beberapa perusahaan besar yang mendominasi industri dan disamping itu terdapat beberapa perusahaan kecil. Beberapa perusahaan golongan pertama (yang menguasai pasar) saling mempengaruhi satu sama lain, karena keputusan dan tindakan oleh salah satu darinya sangat mempengaruhi perusahaan-perusahaan lainnya. Sifat ini menyebabkan setiap perusahaan harus mengambil keputusan yang berhati-hati dalam mengubah harga, membuat desain, mengubah teknik produksi dan sebagainya. Sifat saling mempengaruhi (mutual interdependence) ini merupakan sifat khusus dari perusahaan dalam pasar oligopol. Dalam agribisnis perunggasan pasar oligopoli ini dihadapi oleh perusahaan pakan ternak dan bibit ayam. Saat ini terdapat 60 perusahaan pakan ternak dan 105 perusahaan bibit ayam parent stock penghasil DOC final stock. Selain sifat saling mempengaruhi, pasar oligopoli mempunyai ciri khas lain yang diterangkan dalam uraian berikut.

Pertama, menghasilkan barang standar atau barang berbeda corak. Industri dalam pasar oligopoli yang menghasilkan barang standar (standardized product) banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah dan bahan baku, sedangkan yang menghasilkan barang berbeda corak (differentiated product) pada umumnya adalah barang akhir. Dilihat dari bentuk fisik dan kegunaannya pakan ternak dan bibit ayam termasuk barang yang berbeda corak, namun keduanya diproduksi dengan standar tertentu. Pakan ternak dibuat dengan standar gizi tertentu yang disesuaikan dengan umur dan tipe ayam, sedangkan bibit ayam mempunyai standar produksi daging atau telur dan konsumsi pakan tertentu.

Kedua, kekuasaan menentukan harga ada kalanya lemah dan ada kalanya sangat kuat. Dari dua kemungkinan ini, yang mana yang akan terwujud tergantung pada bentuk kerjasama diantara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli. Tanpa kerjasama, kekuasaan menentukan harga menjadi lebih terbatas. Apabila suatu perusahaan menurunkan harga, dalam waktu singkat ia akan menarik banyak pembeli. Perusahaan yang kehilangan pembeli akan melakukan tindakan balasan dengan mengurangi harga yang lebih besar lagi sehingga akhirnya perusahaan yang mula-mula menurunkan harga akan kehilangan langganan. Tetapi jika perusahaan dalam pasar oligopoli bekerja sama dalam menentukan harga, maka harga akan dapat distabilkan pada tingkat yang mereka kehendaki. Dalam hal ini kekuasaan mereka untuk menentukan harga adalah sangat kuat, yaitu sama seperti dalam pasar monopoli.

Ketiga, pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan promosi. Kegiatan promosi ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik pembeli baru dan mempertahankan pembeli lama. Promosi demikian banyak dilakukan oleh perusahaan pakan dan bibit ayam baik melalui technical service, sales representative maupun melalui media-media yang lain.

Analisis terhadap Kolusi

Sebagai akibat dari perkaitan dan hubungan saling mempengaruhi yang sangat erat, perusahaan oligopolis harus membuat perhitungan yang cermat mengenai reaksi dari perusahaan lain apabila ia menurunkan atau menaikkan harga barangnya. Setiap perusahaan oligopolis menyadari bahwa apabila ia mengubah harga penjualannya, langkah ini akan sangat mempengaruhi penjualan dari perusahaan-perusahaan lain. Apabila suatu perusahaan pakan atau bibit (DOC) menurunkan harga, maka perusahaan-perusahaan lain akan kehilangan langganan karena sebagian dari langganan mereka akan membeli barang yang harganya lebih murah. Keadaan ini akan mendorong perusahaan lain menurunkan harga, untuk menjaga agar langganan mereka tidak berpindah membeli pakan atau DOC dari perusahaan yang memulai melakukan penurunan harga.

Dengan demikian, di dalam pasar oligopoli, penurunan harga dari sesuatu perusahaan berkecenderungan akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain akan melakukan penurunan harga juga agar mereka tidak kehilangan langganan.

Bagaimana reaksi perusahaan-perusahaan lain apabila sesuatu perusahaan menaikkan harga? Sekiranya sesuatu perusahaan menaikkan harga, produksi perusahaan lain menjadi realtif lebih murah. Sebagai akibatnya perusahaan yang menaikkan harga akan kehilangan langganan, sedangkan perusahaan lain yang tidak menaikkan harga bertambah banyak langganannya. Dengan demikian tidak ada alasan bagi perusahaan lain tersebut untuk mengubah tingkat harganya. Mereka akan memperoleh keuntungan yang lebih banyak apabila tidak mengubah harga karena penjualannya akan meningkat.

Oleh karena reaksi perusahaan lain adalah seperti dijelaskan di atas, maka kurva permintaan yang dihadapi oleh suatu perusahaan oligopolis adalah kurva permintaan bengkok (kinked demand curve) seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4.3.1.

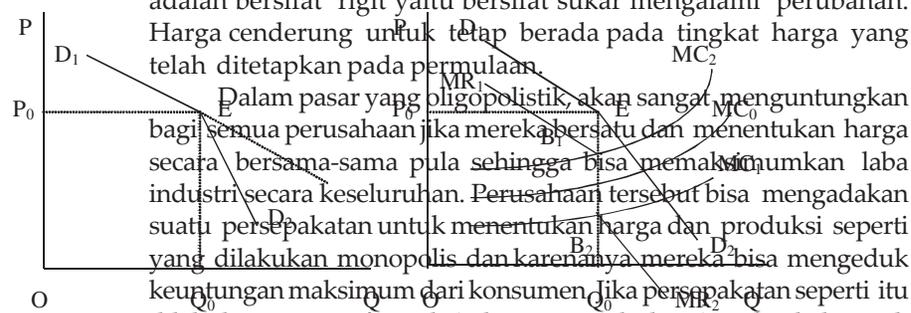
Dalam keadaan di mana kurva permintaan yang dihadapi perusahaan adalah kurva bengkok maka kurva pendapatan marginal (marginal revenue, MR) adalah terputus (MR1 dan MR2) seperti dalam Gambar 4.3.2. Dalam kondisi demikian, bagaimanakah keuntungan maksimum diperoleh oleh perusahaan oligopolis? Jawaban dari persoalan ini dapat dijelaskan dengan Gambar 4.3.2. Menurut teori produksi, keuntungan maksimum dicapai pada saat MR (pendapatan marginal) = MC (biaya mar-

ginal) = P (harga produk). Misalnya pada mulanya biaya marginal adalah MC_0 . Untuk memaksimumkan keuntungan MC_0 harus sama dengan MR , maka berdasarkan keadaan dalam Gambar 4.3.2 keuntungan maksimum dicapai apabila harga produk adalah P_0 dan jumlah produksi Q_0 . Misalnya biaya mengalami kenaikan sehingga menyebabkan biaya marginal menjadi MC_2 , keuntungan maksimum masih akan tetap dicapai oleh perusahaan pada tingkat harga P_0 dan produksi Q_0 . Hanya setelah kurva biaya marginal berada di atas MC_2 keseimbangan untuk memaksimumkan keuntungan akan mengalami perubahan. Dari Gambar 2 juga dapat disimpulkan bahwa selama penurunan biaya produksi tidak menyebabkan kurva biaya marginal berada di bawah MC_1 , keseimbangan pemaksimuman keuntungan yang dinyatakan di atas tidak akan mengalami perubahan. Dengan demikian selama kurva biaya marginal memotong MR antara titik B_1 dan B_2 , harga dan jumlah produksi perusahaan oligopolis tidak akan mengalami perubahan.

Berdasarkan pada analisis di atas dapatlah disimpulkan bahwa dalam pasar oligopoli dimana perusahaan-perusahaan tidak melakukan persepakatan diantara mereka, tingkat harga adalah bersifat rigid yaitu bersifat sukar mengalami perubahan. Harga cenderung untuk tetap berada pada tingkat harga yang telah ditetapkan pada permulaan.

Dalam pasar yang oligopolistik akan sangat menguntungkan bagi semua perusahaan jika mereka bersatu dan menentukan harga secara bersama-sama pula sehingga bisa memaksimumkan laba industri secara keseluruhan. Perusahaan tersebut bisa mengadakan suatu persepakatan untuk menentukan harga dan produksi seperti yang dilakukan monopolis dan karenanya mereka bisa mengeduk keuntungan maksimum dari konsumen. Jika persepakatan seperti itu dilakukan secara formal (sah menurut hukum) maka kelompok tersebut dinamakan kartel, misalnya OPEC dan jika persepakatan dilakukan secara diam-diam (informal) maka disebut kolusi (collusions). Apakah kolusi semacam ini dilakukan atau tidak oleh perusahaan oligopolis dalam agribisnis perunggasan, dapat diduga dari frekuensi kenaikan harga pakan atau DOC yang kadangkala memaksa peternak "menggulung tikar" usahanya. ***

(Poultry Indonesia No. 179 Januari 1995)



Gib. 4.3.1. Kurva permintaan bengkok Gib. 4.3.2. Keuntungan maksimum

4.4.

MANFAAT TARIF BAGI PENGEMBANGAN PETERNAKAN DI INDONESIA

Tiga tahun yang lalu, tepatnya 15 Desember 1993 kesepakatan GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dapat dicapai dalam pertemuan di Geneva. Selanjutnya pada tanggal 15 April 1994 di Marakesh (Maroko), seratus tujuh belas negara, termasuk Indonesia, telah menandatangani kesepakatan GATT yaitu sebuah dokumen yang berisi kesepakatan untuk menciptakan suatu sistem perdagangan internasional yang lebih liberal dalam arti membebaskan perdagangan dunia dari segala bentuk proteksi. Selain itu di Marakesh disepakati juga pembentukan suatu badan internasional yang dinamakan WTO (World Trade Organization) yang berfungsi sebagai badan internasional yang akan melaksanakan dan memonitor semua kesepakatan dan peraturan-peraturan yang mengatur perdagangan dunia sesuai kesepakatan GATT.

Tujuan yang ingin dicapai melalui GATT adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia. Hal ini dapat tercapai karena kesepakatan GATT diharapkan akan mampu mendorong meningkatnya volume perdagangan internasional yang lebih efisien. Peningkatan volume perdagangan tersebut akan mendorong peningkatan produksi dan investasi yang selanjutnya memperluas lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Adalah suatu kenyataan bahwa proteksi perdagangan dunia selama ini dicirikan oleh berbagai hal yang dapat mengganggu perdagangan (trade distortion). Dalam GATT keadaan tersebut diharapkan dapat dihilangkan atau ditekan seminimal mungkin. Kesepakatan GATT pada dasarnya merupakan upaya untuk mengatur perdagangan barang dan jasa melalui penurunan tarif, penghapusan hambatan non tarif, peningkatan akses pasar dan prinsip non diskriminasi dalam perdagangan internasional.

Apabila dilihat sepintas maka kesepakatan GATT tersebut akan mampu mendorong terjadinya akses pasar bagi seluruh produsen di dunia termasuk produsen produk peternakan Indonesia. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah peternak di negara sedang berkembang seperti Indonesia dapat memperoleh manfaat dari kesepakatan GATT itu ?

Masalah persaingan

Salah satu ketentuan dalam kesepakatan GATT adalah menyangkut masalah tarif. Berdasarkan kesepakatan GATT maka setiap negara yang menandatangani perjanjian itu harus menurunkan tarif dalam jangka waktu tertentu. Karena Indonesia telah ikut menandatangani kesepakatan GATT dan menjadi anggota WTO, maka sebagai konsekuensi pemerintah Indonesia harus mengurangi tarif atas produk-produk impor termasuk produk peternakan.

Memang peternak Indonesia, berdasarkan kesepakatan GATT, masih diberi waktu sepuluh tahun (1993 - 2003) untuk menyiapkan diri untuk menyesuaikan dengan kenyataan baru itu. Hal ini berarti dalam sisa waktu tujuh tahun mendatang peternak Indonesia harus mampu meningkatkan kemampuannya agar sejajar dengan peternak Eropa, Australia, New Zealand, Thailand dan Amerika. Kenyataan ini bukan hal yang mudah bagi peternak Indonesia yang pada umumnya merupakan peternakan rakyat dengan sedikit pemilikan ternak, teknologi budidaya sederhana dan sumberdaya manusia yang kurang berkualitas.

Selain masalah tarif, GATT juga membuat ketentuan yang menyangkut penciptaan pasar bebas bagi produk-produk peternakan. Ini berarti bahwa Indonesia harus membuka lebar-lebar pintu pasar dalam negerinya bagi produk peternakan negara lain. Apabila ketentuan GATT ini dilaksanakan maka sangat mungkin Indonesia akan kebanjiran susu dari New Zealand, telur ayam Thailand atau daging sapi Amerika. Mampukah peternak Indonesia mensejajarkan diri mereka dengan peternak New Zealand, Thailand atau Amerika ? Suatu hal yang sangat sulit terjadi.

Persaingan pasti terjadi antara produk peternakan luar negeri dengan produk peternakan dalam negeri. Dapat diduga

bahwa produk peternakan dalam negeri akan kalah dengan produk peternakan dari luar negeri dengan beberapa alasan. Pertama, menyangkut kualitas. Kualitas produk peternakan luar negeri jelas lebih baik daripada produk peternakan dalam negeri. Daging sapi Amerika misalnya, lebih empuk daripada daging sapi lokal. Akibatnya produk peternakan dalam negeri akan tergusur dari konsumen dalam negeri yang memiliki daya beli yang kuat, dan hanya tergantung pada kelompok yang memiliki daya beli yang rendah sehingga para peternak itu tidak akan mampu memperbaiki kehidupan sosial ekonomi mereka karena mereka harus menerima harga sesuai dengan daya beli konsumen mereka yang rendah. Kedua, produk peternakan Indonesia akan sulit menembus pasar ekspor di luar negeri. Hal ini terkait dengan faktor perubahan tingkah laku konsumen di negara-negara maju yang lebih menyukai produk yang berasal dari “natural agriculture” yakni produk peternakan yang bebas dari adanya residu bahan-bahan kimia. Sementara produk-produk peternakan negara berkembang seperti Indonesia sebagian masih menggunakan bahan-bahan kimia dalam proses produksinya baik dalam bentuk campuran pakan maupun obat-obatan.

Manfaat Tarif

Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Tarif merupakan jenis penghambat impor yang paling banyak digunakan. Hal ini dikarenakan tarif bukan saja merupakan alat yang lebih baik untuk memberi perlindungan (proteksi) kepada industri di dalam negeri, tetapi juga karena dapat digunakan sebagai alat untuk menambah pendapatan pemerintah dari perpajakan. Di negara-negara berkembang pajak impor adalah salah satu sumber terpenting dari pendapatan pemerintah.

Pada umumnya tarif yang digunakan oleh suatu negara adalah bersifat *ad volarem duty*, yaitu pajak impor yang nilainya ditentukan dalam persentase dari nilai barang yang diimpor. Tarif dapat pula dipungut dalam dengan menentukan sejumlah nilai tertentu sebagai pajak impor. Walaupun harga produk itu berubah-ubah, pajak impor yang harus dibayar adalah tetap seperti

yang ditentukan semula. Pajak impor yang bersifat seperti itu dinamakan *specific duty*.

Walaupun secara umum ahli-ahli ekonomi sependapat bahwa perdagangan luar negeri memberikan manfaat kepada perekonomian dan masyarakat, dalam prakteknya banyak negara yang menjalankan kebijakan menghambat impor. Dalam kaitannya dengan perkembangan industri suatu negara, ada dua alasan penting yang mendorong suatu negara memberlakukan kebijakan tarif.

Pertama, melindungi industri yang baru berkembang (*infant industry*). Industri-industri yang sedang tumbuh, seperti industri peternakan Indonesia, perlu mendapat perlindungan terhadap persaingan industri-industri peternakan luar negeri yang lebih besar dan lebih maju. Pada umumnya industri-industri yang sedang tumbuh ini efisiensinya masih rendah serta belum dapat menikmati adanya *economies of scale* (suatu kondisi dimana jika input atau output ditingkatkan, biaya produksinya akan menurun). Oleh karena itu, pembebanan tarif terhadap barang dari luar negeri dapat memberi perlindungan terhadap industri dalam negeri yang sedang tumbuh ini. Perlindungan seyogyanya hanya bersifat sementara saja, dan jika industri dalam negeri sudah kuat tarif dapat dihapuskan. Hal ini untuk menjaga industri ini jangan sampai bekerja kurang efisien di bawah perlindungan tarif. Dengan tarif diharapkan akan mempercepat proses industrialisasi suatu negara. Tanpa perlindungan tarif, usaha-usaha mengembangkan suatu industri baru akan menghadapi lebih banyak kesulitan.

Kedua, melindungi industri dalam negeri yang kedudukannya terancam. Tarif dapat digunakan untuk melindungi tingkat kemakmuran yang sudah dicapai oleh golongan masyarakat tertentu, misalnya masyarakat peternak. Apabila di pasaran luar negeri harga suatu barang adalah jauh lebih murah daripada harga barang yang sama yang diproduksi di dalam negeri, tanpa adanya hambatan impor maka persaingan dari luar negeri akan menurunkan harga barang tersebut di dalam negeri. Penurunan harga itu menyebabkan para produsen dalam kegiatan tersebut mengalami penurunan pendapatannya. Penurunan pendapatan tersebut dapat dihindari dengan

mengenakan tarif yang besarnya sedemikian rupa sehingga harga barang yang diimpor tidak berbeda atau lebih tinggi daripada harga barang yang sama yang dihasilkan di dalam negeri.

Apakah industri peternakan Indonesia masih perlu dilindungi dengan tarif? Tentu saja perlu ! Walaupun dalam periodisasi pembangunan peternakan telah mencapai tahap ketangguhan, sebenarnya industri peternakan Indonesia belum dapat dikatakan tangguh. Menurut Soehadji (1990) ada empat ciri peternakan tangguh yaitu (1) mampu memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal, (2) mampu mengatasi segala hambatan dan tantangan teknis berupa gejala teknis dan ekonomis, (3) mampu menyesuaikan diri dalam pola dan struktur produksinya terhadap perubahan yang terjadi baik perubahan permintaan masyarakat maupun teknologi, dan (4) mampu berperan dalam pengembangan regional dan nasional.

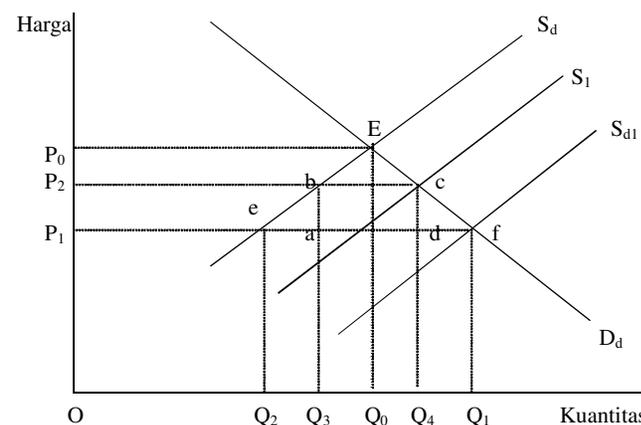
Peternakan Indonesia belum mampu memanfaatkan sumberdaya alam secara optimal. Sarana produksi peternakan baik bahan pakan, bibit ternak maupun peralatannya saat ini masih banyak diimpor. Peternakan Indonesia belum mampu menghadapi gejala teknis dan ekonomis. Wabah penyakit masih menjadi kendala peningkatan produksi, begitu juga dengan fluktuasi harga yang disebabkan oleh kelebihan produksi, masih senantiasa menjadi bahaya laten bagi peternak. Peternakan Indonesia juga belum mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan masyarakat maupun teknologi. Dengan semakin membaiknya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat, telah menyebabkan perubahan pola konsumsi akan produk berkualitas baik dari segi gizi maupun kesehatan. Dengan teknologi budidaya yang masih sederhana, sangat sulit bagi pengusaha peternakan selalu menyesuaikan diri dengan tuntutan konsumen tersebut. Dari keempat ciri ketangguhan sebagaimana dijelaskan di atas, peternakan Indonesia baru dapat berperan dalam pengembangan regional dan nasional.

Pengaruh Tarif

Pembebanan tarif terhadap sesuatu barang dapat mempunyai pengaruh terhadap perekonomian suatu negara,

khususnya terhadap pasar barang tersebut. Beberapa macam pengaruh tersebut adalah pengaruh terhadap harga (price effect), pengaruh terhadap konsumsi (consumption effect), pengaruh terhadap produk (protective or import substitution effect), pengaruh terhadap pendapatan pemerintah (revenue effect) dan pengaruh terhadap redistribusi pendapatan (redistribution effect).

Pengaruh tarif tersebut secara grafik dapat ditunjukkan dengan menggunakan analisis permintaan dan penawaran seperti pada Gambar 4.4.1 berikut.



Gambar 4.4.1. Pengaruh Tarif

Pada Gambar 4.4.1 diasumsikan kurva D_d dan S_d adalah permintaan dan penawaran daging di Indonesia apabila tidak terdapat perdagangan luar negeri. Dengan demikian tanpa adanya perdagangan, harga daging adalah OP_0 dan jumlah daging yang diproduksi dan dikonsumsi adalah sebesar OQ_0 . Sebagai akibat dari melakukan perdagangan luar negeri, impor daging ke Indonesia akan menambah penawarannya dari S_d menjadi S_{d1} . Pertambahan penawaran tersebut akan menurunkan harga daging dari OP_0 menjadi OP_1 . OP_1 merupakan harga konstan yang ditetapkan oleh produsen luar negeri, sehingga produsen dalam negeri pun harus menjual pada harga yang sama sebagai akibat persaingan dengan produsen luar negeri. Pada kondisi ini

produksi daging dalam negeri menurun dari OQ_0 menjadi OQ_2 , sedangkan konsumsinya meningkat dari OQ_0 menjadi OQ_1 , sehingga Indonesia harus mengimpor daging sebesar Q_2Q_1 . Apabila pemerintah mengenakan tarif (sebesar P_1P_2), penawaran daging akan berubah menjadi St dan ini menyebabkan kenaikan harga dari OP_1 menjadi OP_2 , sedangkan konsumsi akan turun dari OQ_1 menjadi OQ_4 .

Dari perubahan-perubahan di atas dapat ditunjukkan beberapa akibat yang ditimbulkan oleh tarif. Pertama, harga daging dalam negeri akan naik dari OP_1 menjadi OP_2 (price effect). Kedua, jumlah permintaan daging berkurang dari OQ_1 menjadi OQ_4 (consumption effect). Ketiga, produksi daging di dalam negeri mula-mula menurun sebagai akibat persaingan dengan daging yang diimpor. Sebelum ada daging impor, produksi daging di dalam negeri adalah sebesar OQ_0 , tetapi setelah melakukan impor dan tanpa adanya tarif, produsen hanya dapat menjual sebanyak OQ_2 . Dengan adanya tarif memungkinkan produksi daging dalam negeri naik dari OQ_2 menjadi OQ_3 (protective or import substitution effect). Keempat, adanya pendapatan yang diterima pemerintah dari tarif tersebut sebesar segi empat $abcd$ (revenue effect). Kelima, adanya ekstra pendapatan yang dibayarkan oleh konsumen di dalam negeri kepada produsen di dalam negeri sebesar P_1P_2be (redistribution effect).

Dengan adanya tarif menyebabkan impor daging berkurang dari Q_2Q_1 menjadi Q_3Q_4 dan meningkatkan produksi dalam negeri sebesar Q_2Q_3 . Bagi konsumen tarif ini merugikan karena harus membayar harga yang lebih tinggi. Kerugian ini sebagian diimbangi dengan adanya pendapatan pemerintah (segi empat $abcd$) dan ekstra pendapatan yang diterima produsen (producer surplus) dalam negeri (P_1P_2be), sehingga kerugian netto masyarakat konsumen (consumer loss) adalah sebesar segitiga abe dan cdf .

Penutup

Jika pemerintah Indonesia menurunkan tarif atas impor produk-produk peternakan sebagai konsekuensi kesepakatan GATT pada tahun 2003 mendatang, paling tidak ada dua

kemungkinan yang dapat terjadi. Pertama, jika pada tingkat harga P_1 (pada Gambar 4.4.1) produsen peternakan mampu mensubstitusi produk peternakan impor, maka produksi peternakan dalam negeri akan dapat meningkat sampai OQ_1 . Produksi bahkan dapat ditingkatkan lebih banyak lagi jika dapat melakukan promosi ekspor. Jika tidak, maka kemungkinan kedua adalah produk peternakan dalam negeri akan menurun lagi menjadi OQ_2 atau bahkan mungkin habis karena terlibas oleh produk-produk peternakan impor yang kualitasnya lebih baik dan harganya lebih murah. Dengan melihat kondisi peternakan Indonesia saat ini, tampaknya kemungkinan kedua inilah yang akan menimpa usaha peternakan di Indonesia.

Dengan demikian nasib peternakan dan pembangunannya pasca GATT di Indonesia nampaknya akan semakin gelap. Persaingan dengan produk-produk peternakan luar negeri akan memaksa peternak Indonesia meninggalkan usaha peternakan mereka karena usaha peternakan yang mereka usahakan tidak mampu lagi menghidupi mereka dan keluarganya. Para peternak akan berupaya memasuki sektor industri manufaktur sebagai buruh. Namun sektor industri manufaktur yang terbatas jumlahnya akan tidak mampu menampung mereka dengan akibat kebanyakan mereka akan menjadi penganggur dan menambah jumlah orang miskin di Tanah Air tercinta. ***

(Poultry Indonesia No 205 Maret 1997)

4.5.

PELUANG PASAR EKSPOR PRODUK PETERNAKAN

Krisis ekonomi yang terjadi di Tanah Air sejak Juli 1997 diawali dengan depresiasi nilai rupiah. Depresiasi (penyusutan) nilai rupiah dapat dikatakan sebagai devaluasi (penurunan nilai) rupiah yang tidak disengaja. Depresiasi disebabkan oleh spekulasi permintaan valuta asing, sementara devaluasi pada umumnya sengaja dilakukan oleh pemerintah dalam upaya memperbaiki neraca perdagangannya. Meskipun prosesnya berbeda, namun baik depresiasi maupun devaluasi berakibat sama terhadap mata uang sendiri yaitu berkurangnya nilai mata uang rupiah terhadap valuta asing utamanya dollar Amerika. Depresiasi rupiah ini dapat menyebabkan barang-barang negara itu menjadi relatif lebih murah di pasaran luar negeri dan sebaliknya, barang-barang negara lain menjadi relatif lebih mahal di dalam negeri. Bagi konsumen di luar negeri, adanya depresiasi rupiah menyebabkan mereka merasa lebih kaya karena dengan dollar yang sama dapat memperoleh barang yang lebih banyak, sehingga mendorong peningkatan permintaan mereka atas barang-barang dari Indonesia. Bagi produsen di Indonesia, depresiasi dapat mendorong ekspor produk yang dihasilkan karena dengan mengekspor barang ke luar negeri akan memperoleh dollar yang dapat ditukarkan dengan rupiah dalam jumlah yang lebih banyak daripada sebelum terjadi depresiasi. Sementara itu konsumen di dalam negeri akan mengurangi permintaan barang impor karena untuk membeli barang yang sama diperlukan rupiah yang lebih banyak. Dengan demikian, depresiasi memungkinkan suatu negara meningkatkan eksportnya, dan mengurangi impornya, meskipun dalam kenyataannya depresiasi maupun devaluasi dapat juga tidak menciptakan hasil seperti yang diharapkan tersebut.

Bagi industri pertanian, depresiasi nilai rupiah ternyata tidak sepenuhnya berdampak negatif. Ketika industri-industri lain

seperti manufaktur, properti maupun perbankan saling berguguran, industri pertanian justru menunjukkan kinerja yang cukup baik, dan bahkan diharapkan dapat mengurangi dampak krisis yang belum jelas kapan akan berlalu. Akibat depresiasi rupiah ekspor beberapa produk pertanian seperti perkebunan dan perikanan mengalami peningkatan. Harga di pasar ekspor yang semakin meningkat, menyebabkan petambak udang, pekebun kelapa sawit dan rempah-rempah kembali bergairah meningkatkan produksinya. Harga udang windu dan pala misalnya, yang mencapai di atas Rp 100.000/kg telah melipatgandakan pendapatan mereka. Beberapa oknum pejabat pemerintah dan pengusaha pun mencoba memanfaatkan peluang semacam ini dengan mengekspor kembali beras impor yang telah disubsidi demi memperoleh keuntungan pribadi. Nasib baik juga dialami oleh pekebun buah-buahan, karena kelangkaan buah akibat berkurangnya buah impor.

Nasib baik yang dialami oleh petani, pekebun dan petambak ternyata tidak dialami oleh peternak. Hal ini disebabkan produk peternakan selama ini terbuai oleh manisnya pasar lokal yang sedang berkembang pesat, sehingga pasar ekspor dianggap bukan usaha yang mendesak. Konon, sebuah kunjungan delegasi luar negeri dua tahun silam sempat menanyakan kepada pemimpin sebuah perusahaan perunggasan integrasi, mengapa tidak mengembangkan pasar ekspor. Dengan nada yang sedikit angkuh, pimpinan tersebut mengatakan, "Buat apa ekspor, penduduk Indonesia 200 juta lebih dan merupakan pasar yang sangat besar di masa mendatang" (Infovet 057/1998). Saat ini keadaannya lain, pasar dalam negeri makin mengecil karena permintaan yang semakin menurun akibat kenaikan harga dan melemahnya daya beli masyarakat. Seandainya sejak awal para pengusaha merintis pasar ekspor, tentu akibat yang ditanggung tidak seberat sekarang.

Salah satu kelemahan produk peternakan Indonesia di pasar internasional adalah tingginya harga sehingga tidak mampu bersaing dengan produk serupa dari luar negeri yang harganya lebih murah dengan kualitas yang lebih baik. Dengan terjadinya depresiasi rupiah saat ini menjadikan produk peternakan memiliki keunggulan kompetitif untuk bersaing di pasar internasional, sehingga membuka peluang bagi pengusaha peternakan Indo-

nesia untuk memasarkan produknya di pasar internasional. Peluang ini antara lain telah dimanfaatkan oleh Grup Sierad yang telah mampu mengekspor ayam beku ke Jepang sebanyak 250 ton/bulan mulai Agustus 1998 lalu, yang akan ditingkatkan menjadi 500 ton/bulan pada tahun 1999 (PI 221/1998). PT Univetama Dinamika juga telah mengekspor obat-obatan ternak, demikian pula PT Wonokoyo yang berhasil mengekspor bibit ayam dan daging ayam beku ke negara-negara tetangga.

Ekspor dan Impor

Menurut data statistik peternakan, neraca ekspor impor produk peternakan dari 1991 - 1995 selalu mengalami defisit. Defisit neraca ini mengalami peningkatan dari 151.039 ribu US\$ (1991) menjadi 645.386 ribu US\$ (1995). Defisit ini selalu terjadi karena tingginya nilai impor sapi bakalan, DOC bibit, daging dan hati sapi, serta produk susu. Khusus untuk produk perunggasan, nilai ekspor daging ayam tahun 1995 sebesar 3.443 ribu US\$ melebihi nilai impornya sebesar 2.635 ribu US\$. Sementara untuk telur konsumsi mengalami defisit yaitu 31,7 ribu US\$ nilai ekspor dibanding 560,9 ribu US\$ nilai impornya.

Di pasar internasional ekspor impor produk perunggasan menunjukkan angka peningkatan. Volume ekspor daging ayam tahun 1995 sebesar 4553 ribu ton menjadi 5351 ribu ton (senilai 7429 juta US\$) tahun pada 1996. Ekspor daging ayam terbesar berasal dari Eropa 2831 ribu ton, kemudian Amerika Utara 2129 ribu ton, Asia 1590 ribu ton, Amerika Selatan 867 ribu ton, Oceania 9 ribu ton, dan Afrika 3 ribu ton. Pada periode yang sama, volume impor daging ayam meningkat dari 4256 ribu ton (1995) menjadi 4442 ribu ton (senilai 6452 juta US\$) pada 1996. Impor daging ayam ini terbesar menuju ke Asia 3095 ribu ton, kemudian Eropa 2845 ribu ton, Amerika Utara 343 ribu ton, Afrika 129 ribu ton, Amerika Selatan 107 ribu ton, dan Oceania 54 ribu ton. Lima negara eksportir dan importir daging ayam terbesar di dunia terlihat pada Tabel 4.5.1.

Tabel 4.5.1.

Lima besar negara eksportir dan importir daging ayam di dunia

| Eksportir | | Importir | |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Negara | Volume (000 ton) | Negara | Volume (000 ton) |
| 1. Amerika Serikat | 2090 | 1. Jepang | 1230 |
| 2. Belanda | 871 | 2. Hong Kong | 727 |
| 3. Brasilia | 835 | 3. Jerman | 683 |
| 4. Perancis | 824 | 4. Rusia | 635 |
| 5. China | 644 | 5. Inggris | 493 |

Sumber : WPSY (1998)

Volume ekspor telur ayam di dunia tahun 1995 sebesar 792 ribu ton meningkat 849 ribu ton (senilai 1206 juta US\$) pada 1996. Ekspor telur ayam terbesar berasal dari Eropa 860 ribu ton, kemudian Asia 163 ribu ton, Amerika Utara 155 ribu ton, Amerika Selatan 11 ribu ton, dan Afrika 9 ribu ton. Pada periode yang sama, volume impor telur ayam meningkat dari 754 ribu ton (1995) menjadi 859 ribu ton (senilai 1216 juta US\$) pada 1996. Impor telur ayam ini terbesar menuju ke Eropa 751 ribu ton, Asia 302 ribu ton, Amerika Utara 101 ribu ton, Afrika 33 ribu ton, dan Amerika Selatan 21 ribu ton. Lima negara eksportir dan importir telur ayam terbesar di dunia terlihat pada Tabel 4.5.2.

Tabel 4.5.2.

Lima besar negara eksportir dan importir telur ayam di dunia

| Eksportir | | Importir | |
|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Negara | Volume (000 ton) | Negara | Volume (000 ton) |
| 1. Belanda | 440 | 1. Jerman | 358 |
| 2. Amerika Serikat | 121 | 2. Hong Kong | 118 |
| 3. Belgia | 94 | 3. Perancis | 71 |
| 4. Jerman | 82 | 4. Belanda | 71 |
| 5. Perancis | 79 | 5. Singapura | 55 |

Sumber : WPSY (1998)

Pada tahun 1998 dan tahun 1999 mendatang kondisi ekspor impor produk perunggasan maupun peternakan umumnya di dunia diperkirakan akan mengalami penurunan akibat krisis moneter yang melanda Asia dan Rusia saat ini. Menurut perkiraan IMF, pada tahun 1998 pertumbuhan ekonomi dunia hanya sebesar 2%, dan bahkan pada tahun 1999 diperkirakan akan terjadi resesi ekonomi global yang tentu saja berpengaruh negatif terhadap perdagangan produk peternakan di pasar internasional (Jawa Pos 2 Oktober 1998).

Keunggulan Komparatif dan Kompetitif

Daya saing suatu produk di pasar internasional pada umumnya dapat diukur dengan dua cara yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Keunggulan komparatif merupakan ukuran normatif, yaitu mengukur daya saing pada kondisi pasar persaingan bebas, tanpa distorsi. Salah satu indikator keunggulan komparatif standar adalah analisis biaya sumberdaya domestik (BSD) atau Domestic Resource Cost Analysis (DRC). Analisis BSD ini digunakan untuk mengukur berapa besarnya satu-satuan devisa yang dapat dihemat, bila produk tersebut diproduksi di dalam negeri. Nilai BSD lebih dari satu

menunjukkan bahwa suatu produk memiliki keunggulan komparatif, dan sebaliknya, jika BSD kurang dari satu berarti produk tersebut tidak memiliki keunggulan komparatif. Nilai BSD kurang dari satu berarti untuk menghemat (melalui substitusi impor) atau memperoleh satu unit devisa (misalnya 1 US\$) diperlukan pengorbanan biaya sumberdaya domestik kurang dari satu dollar AS.

Keunggulan kompetitif merupakan ukuran aktual, yaitu mengukur daya saing pada kondisi pasar yang berlaku tanpa memperlakukan ada tidaknya distorsi pasar. Salah satu indikator keunggulan kompetitif yang paling sederhana adalah rasio harga produk produksi dalam negeri dengan harga produk yang sama produksi luar negeri.

Suatu produk yang memiliki keunggulan komparatif bisa terjadi tidak memiliki keunggulan kompetitif apabila ada hambatan-hambatan yang bersifat disinsentif. Sebaliknya suatu produk yang tidak memiliki keunggulan komparatif bisa terjadi memiliki keunggulan kompetitif apabila pemerintah memberikan proteksi terhadap produk bersangkutan. Proteksi perdagangan mencakup semua insentif perdagangan baik itu kuota, tarif maupun subsidi. Semua bentuk proteksi perdagangan ini dapat menimbulkan distorsi pasar yaitu mencegah terjadinya pasar persaingan bebas.

Beberapa indikator untuk mengetahui adanya proteksi perdagangan adalah tingkat proteksi nominal untuk keluaran (Nominal Protection Rate, NPR), tingkat subsidi masukan (Implisit Tariff, IT), dan tingkat proteksi efektif (Effective Protection Rate, EPR), yang merupakan resultante dari dampak intervensi pemerintah terhadap harga keluaran dan masukan. NPR adalah rasio perbedaan antara harga keluaran finansial yang diterima produsen dan harga ekonomis (border price) dari produk yang dianalisis yang dinyatakan dalam persen. Nilai NPR positif menunjukkan bahwa harga domestik lebih tinggi daripada harga paritasnya di pasar internasional, yang menunjukkan adanya kebijakan bias terhadap produsen dengan maksud untuk mendorong pengembangan produksi. IT merupakan rasio perbedaan antara harga (nilai) masukan secara finansial dan secara ekonomis yang dinyatakan dalam persen. Nilai IT positif

menunjukkan adanya pembebanan pajak terhadap masukan yang merupakan faktor penghambat pengembangan produksi, sedangkan nilai IT negatif menunjukkan adanya subsidi harga masukan. EPR adalah rasio perbedaan nilai tambah secara finansial dan secara ekonomis yang dinyatakan dalam persen. Nilai tambah diukur sebagai selisih antara nilai produk akhir dengan nilai produk antara (sarana produksi selain kapital dan tenaga kerja). Dengan demikian, EPR mengukur proteksi yang berasal dari distorsi harga produk maupun distorsi harga sarana produksi. Nilai EPR positif menunjukkan adanya insentif dalam sistem produksi relatif terhadap nilai ekonomis, sedangkan nilai EPR negatif mencerminkan terjadinya disinsentif untuk mengembangkan produksi.

Tabel 4.5.3

Keunggulan komparatif dan struktur proteksi produksi ayam pedaging, sapi potong dan susu sapi di Indonesia

| Pola perdagangan | BSD | IT (%) | EPR (%) |
|-------------------------|-----------|-------------|-----------------|
| 1. Ayam pedaging | | | |
| - SI | 0,19-0,33 | 12,45-13,18 | (83,03)-(91,99) |
| - PE | 0,25-0,34 | 12,34-13,11 | (72,70)-(92,98) |
| 2. Sapi potong | | | |
| - SI | 0,28-0,59 | 19,81-67,92 | (46,17)-(79,44) |
| - PE | 0,27-0,55 | 18,69-67,52 | (51,11)-(79,44) |
| 3. Susu sapi | | | |
| - SI | 1,45-2,88 | 2,65-6,43 | 70,48 - 226,60 |
| - PE | 1,35-2,85 | 3,29-6,97 | 69,62 - 230,38 |

Sumber : Diolah dari Simatupang dan Rusastra (1990), Irawan dan Rusastra (1990) dalam Purwoto dan Suryana (1997)

Hasil penelitian Rusastra dan Simatupang (1990) serta Santoso (1995) menunjukkan bahwa produksi ayam pedaging dan sapi potong di Indonesia memiliki keunggulan komparatif cukup

tinggi untuk tujuan substitusi impor (SI) maupun promosi ekspor (PE). Kisaran nilai BSD produksi ayam pedaging untuk substitusi impor sebesar 0,19-0,33, dan untuk promosi ekspor sebesar 0,25-0,54. Angka ini menunjukkan bahwa produksi ayam pedaging memiliki keunggulan komparatif baik untuk tujuan substitusi impor maupun promosi ekspor. Untuk sapi potong, kisaran nilai BSD untuk substitusi impor sebesar 0,28-0,59, dan promosi ekspor 0,27-0,55. Angka ini juga menunjukkan bahwa produksi sapi potong memiliki keunggulan komparatif baik untuk promosi ekspor maupun substitusi impor. Hasil penelitian ini memberikan indikasi bahwa ayam pedaging dan daging sapi berpotensi sebagai salah satu produk andalan ekspor pertanian. Untuk produksi susu sapi, menurut penelitian Irawan dan Rusastra (1990) menunjukkan bahwa tidak memiliki keunggulan komparatif baik untuk tujuan substitusi impor maupun promosi ekspor. Nilai BSD produksi susu sapi berkisar antara 1,35-5,02. Indikator keunggulan komparatif dan struktur proteksi ketiga produk peternakan ini selengkapnya disajikan pada Tabel 4.5.3.

Prospek dan Kebijakan

Dari kajian di atas diketahui bahwa terbuka peluang ekspor untuk beberapa produk peternakan di masa krisis ini. Ayam pedaging dan sapi potong misalnya, memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif untuk tujuan promosi ekspor maupun substitusi impor. Khusus untuk tujuan promosi ekspor alternatif kebijakannya adalah melepas produk bersangkutan untuk bersaing khususnya dengan produk impor di pasar domestik, guna menghindari ancaman protektif terhadap produk-produk lainnya dari Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif untuk memasuki pasar internasional. Sementara untuk tujuan substitusi impor alternatif kebijakannya adalah secara bertahap menghapus proteksi dan subsidi yang selama ini masih mendominasi pengembangan produksi produk bersangkutan, karena dalam era perdagangan bebas setiap kegiatan agribisnis harus dapat hidup mandiri tanpa subsidi dan proteksi dari pemerintah (Purwoto dan Suryana, 1997).

Implementasi alternatif kebijakan di atas harus disertai

dengan upaya peningkatan efisiensi, produktivitas sekaligus upaya peningkatan kualitas produk sesuai dengan preferensi konsumen. Peningkatan efisiensi dan produktivitas dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas skala produksi, peningkatan kemampuan manajerial maupun penerapan teknologi yang lebih baik. Demikian pula peningkatan kualitas dinilai penting karena dengan kesadaran gizi yang semakin baik. Konsumen tidak sekedar membeli “komoditas” tetapi membeli “produk” yang tidak membawa dampak negatif bagi kesehatannya, sehingga produsen dituntut untuk dapat memberikan jaminan mutu (quality assurance) terhadap produk yang dipasarkannya. Upaya peningkatan kualitas ini dapat ditempuh misalnya dengan aplikasi standar mutu SNI (Standar Nasional Indonesia), GMP (Good Management Practice), ISO (International Standard Organization), SPS (Sanitary Phytosanitary), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) dan lain-lain.

Akhirnya, meskipun saat ini agribisnis peternakan mengalami kelumpuhan akibat krisis moneter, namun semakin terbuka peluang untuk mengeksport produk peternakan di pasar internasional. Tentu saja peluang tersebut tidak mudah, murah, dan cepat dimanfaatkan. Menurut Pak Bob Sadino, pengusaha agribisnis yang sukses mengeksport beberapa produk peternakan dan pertanian, untuk memanfaatkan peluang diperlukan kemauan, tekad dan keberanian. Sesuai dengan pepatah “setiap ada kemauan, pasti ada jalan !”. Dan kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi ? ***

(Poultry Indonesia No. 222 Nopember 1998)

4.6.

AGRIBISNIS PETERNAKAN DALAM PEREKONOMIAN GLOBAL

Proses industrialisasi perekonomian suatu negara pada mulanya diawali pada sektor pertanian. Penemuan dan perkembangan teknologi pertanian mulai rekayasa genetika bibit, mekanisasi produksi sampai teknologi pengolahannya telah mampu meningkatkan produksi dan kesejahteraan masyarakat petani. Peningkatan kesejahteraan petani ini membawa dampak positif lanjutan berupa peningkatan permintaan barang dan jasa, menstimulasi lapangan kerja dan pendapatan di sektor-sektor lain, sehingga berkembanglah sektor industri dan jasa. Di sisi lain, mekanisasi pertanian yang telah mampu menggantikan sebagian tugas tenaga kerja petani, telah menyebabkan urbanisasi tenaga kerja pertanian dari pedesaan ke sektor industri dan jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dengan segala permasalahannya.

Negara-negara industri maju, yang telah lebih dahulu melampaui tahapan industrialisasi pertaniannya, menggunakan sektor pertanian ini sebagai alat politik dan ekonomi dalam menjajah negara-negara berkembang melalui tiga tahap. *Pertama*, melalui pemasaran sarana produksi, teknologi, dan produksi pertanian ke negara-negara berkembang. Negara-negara berkembang yang sebagian besar penduduknya hidup bergantung pada sektor pertanian, pada umumnya masih menghadapi masalah pangan. Kenyataan ini tidak disia-siakan oleh negara maju dengan mengeksport sarana produksi, teknologi, dan produksi pertaniannya ke negara-negara berkembang. Akibatnya, perkembangan sektor pertanian di negara-negara berkembang sangat bergantung pada sarana produksi impor dari negara-negara industri maju dengan mengalahkan potensi sumberdaya alam lokal yang dimiliki sendiri. Perkembangan agribisnis peternakan Indonesia misalnya, juga banyak bergantung pada sarana produksi dan teknologi impor. Pada agribisnis ayam ras, impor telur dan DOC

GPS mencapai 100%, bahan baku pakan 70%, obat dan vaksin 95%, peralatan dan mesin pabriknya memiliki komponen impor hampir 90%. Dapat dipastikan perkembangan agribisnis ayam ras mendatang tidak dapat terlepas dari sarana produksi dan teknologi impor. Kondisi ini akan menjadikan pengusaha peternakan Indonesia sebagai “tukang jahit” atas komponen impor, bukan sebagai “desainer” atas sumberdaya atau kekayaan alam yang dimiliki negaranya sendiri.

Selain menjual produksi dan teknologi, negara-negara maju juga menyediakan berbagai pinjaman dan bantuan dalam upaya meningkatkan produksi pertanian dan pendapatan petani di negara berkembang. Bagi negara donor, pinjaman yang diberikan bukanlah bermotif sosial semata, tetapi memiliki muatan ekonomis yang diperhitungkan secara cermat. Menurut studi **Anderson dan Cohen** (1998) setiap peningkatan nilai produksi pertanian satu dolar di negara berkembang akan mendorong 73 sen dolar impor baru termasuk 24 sen dolar impor produk pertanian, dan setiap satu dolar pinjaman untuk investasi di sektor pertanian, berarti 29 sen dolar peningkatan impor negara berkembang termasuk 10 sen dolar impor produk pertanian.

Pengalaman Korea Selatan merupakan contoh nyata hubungan antara bantuan dengan impor pertanian. Sepanjang tahun 1950-an sampai 1980, negara ini merupakan resipien utama bantuan Amerika Serikat, termasuk bantuan pertanian. Sekarang, meskipun negara ini tidak menerima bantuan AS lagi, tetapi menjadi negara kelima terbesar pasar ekspor pertanian AS. Contoh lain, pada tahun 1970-an banyak petani AS menentang bantuan AS kepada Brasilia yang menjadikan negara ini sebagai kompetitor AS di pasar global. Tetapi, pada tahun 1997, Brasilia mengimpor produk pertanian AS senilai 500 juta US\$.

Seiring dengan peningkatan produksi pertanian, negara-negara berkembang berusaha memproteksi industri pertaniannya dengan cara memberlakukan kuota dan tarif atas produk pertanian impor. Melihat gejala ini, negara industri maju melancarkan strategi *kedua* yaitu pemaksaan pemberlakuan perdagangan bebas dunia (*global free trade*). Bermula pada tahun 1947, 23 negara yang merupakan *original members* berhasil merumuskan Havana Charter yang menyetujui artikel awal mengenai GATT (*General Agreement*

on Tariff and Trade) mengenai konsesi penurunan tarif (bea masuk). Setelah melalui proses panjang dan melelahkan, pada tanggal 15 April 1994 dalam pertemuan tingkat Menteri di Maroko sebanyak 117 negara terpaksa menandatangani kesepakatan GATT, yang kemudian menjelma menjadi WTO (World Trade Organization) yang bertugas mengatur lalu lintas perdagangan barang dan jasa di dunia. Mulai saat itu secara bertahap namun pasti, dimulailah era perdagangan global yang bebas hambatan.

Globalisasi ekonomi yang membuat wewenang WTO kian besar, seperti diungkapkan **Amaladoss** (1999), pada dasarnya merupakan upaya untuk menjadikan seluruh dunia sebagai kesatuan pasar yang dicirikan oleh bebasnya gerakan modal, barang, dan jasa melalui penurunan tarif, penghapusan hambatan non tarif, penghapusan subsidi, peningkatan akses pasar, dan prinsip non diskriminasi dalam perdagangan internasional. Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatnya taraf hidup masyarakat dunia. Hal ini dapat tercapai karena dengan perdagangan bebas diharapkan akan mampu mendorong meningkatnya volume perdagangan internasional yang lebih efisien. Peningkatan volume perdagangan tersebut akan mendorong peningkatan produksi dan investasi yang selanjutnya memperluas lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Namun pada kenyataannya, peran yang dilakukan oleh WTO tidak lain adalah praktek dominasi dari korporasi lintas negara (*multi national corporations*) yang didukung oleh Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) yang mengatur hubungan antara negara kaya dengan negara miskin seperti hubungan antara penguasa dengan bawahannya. Atas tekanan IMF pula, pemerintah Indonesia terpaksa mengeluarkan Keppres 4/1998 tanggal 2 Pebruari 1998 yang menghapuskan ketentuan tentang tataniaga susu, kewajiban serap susu lokal, pengendalian susu impor dan harga susu. Dengan kata lain, menyerahkan sepenuhnya agribisnis persusuan kepada mekanisme pasar. Selanjutnya disusul dengan Keppres 99/1998 tanggal 14 Juli 1998 yang diantaranya membuka semua usaha peternakan untuk penanam modal baik PMA maupun PMDN, kecuali ayam buras. Sejalan dengan tuntutan global, dengan dalih apapun - misalnya melindungi usaha peternakan lokal - pemerintah tidak bisa lagi

main larang terhadap pemilik modal baik PMA maupun PMDN untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pemberlakuan perdagangan bebas global dirasakan secara berbeda oleh masyarakat. Bagi konsumen, penurunan tarif dirasakan sangat menguntungkan karena mereka dapat membeli produk-produk pertanian impor dengan mudah, harga lebih murah, dan kualitas lebih baik. Sebaliknya, bagi produsen pertanian utamanya petani dan peternak, penurunan atau bahkan penghapusan tarif produk pertanian impor adalah sebuah malapetaka karena produk mereka kalah bersaing dengan produk pertanian impor. Tidak mengherankan jika petani Indonesia akhir-akhir ini semakin berani berunjuk rasa menentang masuknya beras impor, gula impor, daging impor, buah-buahan impor, dan produk pertanian impor lain yang dengan mudah memasuki dan membanjiri pasaran lokal.

Sebelum negara-negara berkembang sempat menyesuaikan diri dan menikmati perluasan pasar produk pertanian mereka di pasar internasional, negara-negara industri maju telah mempersiapkan jurus *ketiga* yaitu persyaratan kualitas (*quality instrument*) yang ketat bagi produk pertanian yang akan masuk ke negara mereka. Berbagai aturan kontrol kualitas seperti sertifikasi standar ISO, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Point*), SPS (*Sanitary and Phytosanitary*), *eco-labelling*, *intellectual property right* (HAKI), *human right* (HAM), dan sejenisnya merupakan tembok penghalang yang tidak mudah ditembus bagi produk pertanian negara berkembang untuk memasuki pasar di negara-negara industri maju.

Disadari atau tidak, sebuah bentuk kolonialisme ekonomi yang berkedok perdagangan bebas telah mengancam kehidupan petani dan peternak yang akan terhimpit dalam pemasaran produksi sekaligus tidak memiliki kebebasan dalam memanfaatkan potensi sumberdaya lokal yang dimilikinya. Bagi peternak Indonesia, perdagangan bebas bukan berarti pasar yang semakin luas, melainkan perjuangan hidup yang semakin keras. ***

(Infonet Edisi 172 Juli 2000)

4.7.

PENERAPAN UU No. 5/1999 PADA AGRIBISNIS PETERNAKAN

Lingkungan usaha yang kompetitif adalah syarat mutlak untuk mencapai efisiensi yang tinggi dalam kegiatan-kegiatan perekonomian suatu negara. Dalam pasar yang kompetitif perusahaan-perusahaan akan saling bersaing untuk menarik lebih banyak konsumen dengan menjual produk bermutu baik dengan harga yang serendah mungkin, dan pelayanan yang memuaskan. Lebih spesifik kompetisi akan menghasilkan alokasi sumberdaya yang efisien, inovasi teknologi, produktivitas yang tinggi, harga yang stabil, dan lain-lain.

Pengalaman Jepang dan negara-negara industri baru seperti Korea dan Taiwan, menunjukkan bahwa lingkungan kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk kebijakan persaingan domestik, adalah alat kebijakan yang sangat efektif untuk mendorong pengembangan industri yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengalaman negara-negara tersebut membuktikan bahwa persaingan domestik yang dicirikan oleh keluar dan masuknya perusahaan-perusahaan dengan bebas dari dan ke pasar tertentu tanpa rintangan apapun adalah suatu unsur pokok dalam kebijakan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan efisiensi dan daya saing industri.

Di Indonesia banyak dijumpai rintangan bagi pelaku dunia usaha untuk memasuki pasar, baik yang rintangan alamiah (*natural barriers*) maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah (*policy-generated barriers*). Pada jaman Orde Baru, berbagai rintangan terhadap persaingan domestik bersumber pada berbagai peraturan pemerintah seperti pengaturan tataniaga suatu komoditas, hak monopoli, pengendalian harga, perijinan yang rumit, birokrasi yang panjang, dominasi BUMN, perlakuan khusus kepada perusahaan tertentu, dan lain-lain. Dengan adanya persetujuan antara Pemerintah RI dan IMF (Dana Moneter Internasional) dalam

rangka reformasi struktural, berbagai rintangan tersebut sedang dan akan dihapus secara bertahap. Meskipun demikian tetap dibutuhkan suatu undang-undang untuk terciptanya suatu persaingan domestik yang sehat, menangani masalah-masalah monopoli secara tuntas, serta berbagai rintangan artifisial yang menghambat persaingan yang sehat di masa mendatang. Untuk itu sejak 5 Maret 2000 pemerintah telah memberlakukan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU LPM-PUTS).

Dasar pertimbangan kebijakan UU LPM-PUTS ini adalah bahwa (1) demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar, dan bahwa (2) setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara RI terhadap perjanjian-perjanjian internasional. Lebih lanjut UU ini bertujuan (1) untuk menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen, (2) menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, (3) mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha, (4) serta menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

UU LPM-PUTS mengandung 6 (enam) bagian pengaturan dimana 3 (tiga) diantaranya berkaitan erat dengan agribisnis peternakan yaitu (1) perjanjian yang dilarang, (2) kegiatan yang dilarang, dan (3) posisi dominan. Perjanjian yang dilarang (pasal 4 s/d 16) meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak

sehat. Oligopoli terjadi pada agribisnis perunggasan dimana penjualan bibit dan pakan ayam dikuasai oleh beberapa perusahaan, sedangkan oligopsoni terjadi pada industri persusuan dimana produksi susu dibeli oleh beberapa IPS. Dalam pola kemitraan ayam ras dan sapi potong terjadi perjanjian penetapan harga, perjanjian tertutup. Pengendalian harga ternak di Nusa Tenggara telah mengakibatkan perbedaan harga antara daerah peternakan dengan pasar-pasar domestik, dan cenderung menekan harga ke atas harga ternak di Jawa dan Kalimantan.

Integrasi vertikal terjadi pada usaha ternak potong, ternak unggas dan ternak sapi perah dimana mulai dari pengadaan bibit, pemeliharaan, pemotongan, pengolahan dan penjualan dilaksanakan oleh satu badan usaha atau bersama kelompok usahanya. Menurut penjelasan pasal 14, praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat.

Kegiatan yang dilarang (pasal 17 s/d 24) yaitu monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan antar pelaku usaha yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Monopsoni terjadi pada pola kemitraan ayam ras dimana pembelian hasil produksi dilakukan oleh satu badan usaha. Persekongkolan diduga terjadi pada berbagai aktivitas bisnis peternakan dimana pelaku usaha baru tidak diijinkan memasuki suatu usaha tanpa persetujuan asosiasi yang telah ada. Kegiatan monopoli terjadi antara lain pada kegiatan impor produk peternakan (susu, daging, dan bahan baku pakan) berupa lisensi eksklusif pada importir tertentu, dan juga penjualan sapronak pada pola kemitraan. Meskipun pengertian monopoli pada dasarnya mengacu pada produsen tunggal, menurut pasal 17 (2) suatu perusahaan dianggap atau diduga mempunyai kekuatan monopoli jika perusahaan itu menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu barang atau jasa tertentu.

Penggunaan posisi dominan yaitu jika satu pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar atau jika kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa (pasal 25), jabatan rangkap (pasal 26), pemilikan saham (pasal 27), serta penggabungan, peleburan dan pengambilalihan

badan usaha lain (pasal 28 dan 29). Penggunaan posisi dominan dalam bentuk penguasaan pasar terjadi pada penjualan saponak ayam dan produk susu, dan juga pada produk-produk peternakan impor yang hak impornya dikuasai oleh importir-importir tertentu. Masalah utama yang timbul dalam penerapan UU LPM-PUTS dalam agribisnis peternakan adalah tolok ukur yang digunakan untuk menilai apakah pelaku usaha telah melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, atau posisi dominan yang didasarkan pada penguasaan pangsa pasar. Kelemahan tolok ukur ini adalah bahwa dalam ketentuan-ketentuan ini fokusnya bukan pada perilaku atau transaksi bisnis yang anti persaingan, melainkan pada pangsa pasar yang dibatasi secara arbitrer. Padahal, penguasaan pangsa pasar yang dicirikan oleh tingkat konsentrasi industri (*industrial concentration*) atau konsentrasi penjual (*seller concentration*) yang tinggi, adalah gejala umum yang banyak terjadi di negara-negara berkembang, seperti Indonesia dimana proses industrialisasi masih berada pada tahap awal. Apalagi, jika dikaitkan dengan penjelasan pasal 9 bahwa wilayah pemasaran dapat berarti wilayah negara RI atau bagian wilayah negara RI misalnya kabupaten, propinsi, atau wilayah regional lainnya, maka akan banyak perusahaan peternakan besar yang terperangkap oleh UU ini. Oleh karena itu, penerapan UU No. 5/1999 pada agribisnis peternakan pada tahap awal harus dilakukan secara seksama yang secara teknis dapat dipertanggungjawabkan, serta dilakukan secara transparan. Jika tidak, maka akan bisa menyalahi tujuan yang akan dicapai UU ini yaitu mewujudkan iklim usaha kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. ***

(Infovet Edisi 070 Mei 2000)

4.8.

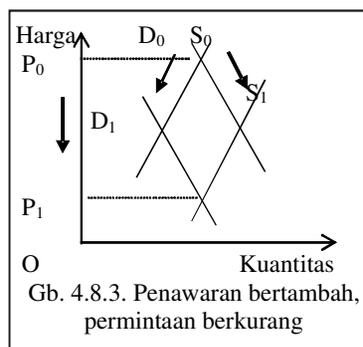
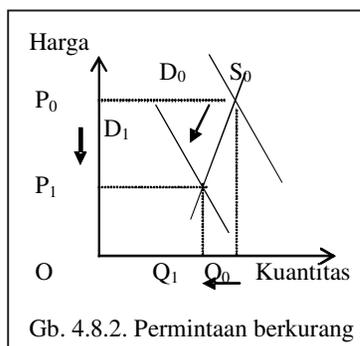
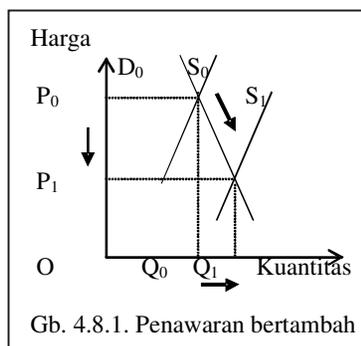
STABILISASI HARGA KOMODITAS PERUNGGSAN

Fluktuasi harga masih menjadi masalah yang belum terpecahkan dalam agribisnis perunggsan. Harga DOC, telur, pullet, ayam hidup, atau daging ayam melambung tinggi pada waktu tertentu, dan menurun tajam pada waktu yang lain. Ketidakstabilan harga tersebut dapat disebabkan oleh permintaan dan penawaran terhadap komoditas perunggsan yang cenderung tidak elastis (ditunjukkan oleh grafik elastisitas yang mendekati vertikal). Sifat ini menyebabkan perubahan yang sangat besar terhadap tingkat harga apabila permintaan atau penawaran mengalami perubahan.

Dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permintaan komoditas perunggsan bersifat tidak elastis (inelastis). Dalam jangka panjang hal ini disebabkan elastisitas pendapatan terhadap permintaan (*income elasticity of demand*) yang rendah, yaitu kenaikan pendapatan hanya menimbulkan kenaikan kecil saja terhadap permintaan. Dalam jangka pendek, ketidakelelastisan ini disebabkan komoditas perunggsan merupakan kebutuhan pokok. Walaupun harganya sangat meningkat namun jumlah yang dikonsumsi masih relatif sama. Sebaliknya, pada waktu harga sangat merosot konsumsi tidak akan banyak bertambah karena kebutuhan konsumsi relatif tetap. Oleh karena sifat permintaan atas komoditas perunggsan yang tidak elastis tersebut, maka harga akan mengalami penurunan yang tajam jika penawaran komoditas perunggsan mengalami peningkatan (Gb. 4.8.1).

Penawaran komoditas perunggsan bersifat tidak elastis disebabkan beberapa faktor. Pertama, kemajuan teknologi yang pesat menyebabkan produksi dan produktivitasnya terus meningkat, sehingga jumlah yang dapat diproduksi oleh pengusaha dapat melebihi yang dibutuhkan masyarakat. Kemajuan teknologi tersebut antara lain umur panen yang semakin cepat, konversi pakan semakin baik, bobot badan dan produksi telur semakin

meningkat, dan tingkat kematian semakin menurun. Keadaan ini menyebabkan harga komoditas perunggasan cenderung untuk tetap berada di tingkat yang rendah. Kedua, sebagai kegiatan biologis usaha perunggasan tidak dapat segera ditingkatkan pada waktu harga naik, dan tidak dapat segera dikurangi pada waktu harga turun. Ketiga, kapasitas memproduksi sektor perunggasan cenderung mencapai tingkat yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh perubahan permintaan. Penawaran yang tidak elastis ini dapat menyebabkan penurunan harga yang besar apabila permintaan mengalami penurunan (Gb. 4.8.2). Penurunan harga lebih tajam dapat terjadi jika peningkatan penawaran disertai dengan penurunan permintaan (Gb. 4.8.3).



Kemerosotan harga DOC dan ayam pedaging awal tahun ini misalnya, dapat disebabkan oleh tiga faktor yaitu (1) peningkatan

penawaran (Gb. 4.8.1), (2) penurunan permintaan (Gb. 4.8.2), atau (3) penawaran bertambah yang disertai penurunan permintaan (Gb. 4.8.3). Atas dasar pemahaman ketiga faktor tersebut, upaya stabilisasi harga komoditas perunggasan khususnya ayam pedaging, kemungkinan dapat dilakukan melalui pengaturan penawarannya.

Peningkatan penawaran pada umumnya berawal dari produksi DOC yang melimpah. Karena itu, upaya stabilisasi harga komoditas perunggasan dapat dilakukan dengan pengaturan jumlah produksi DOC. Seperti yang dilakukan oleh OPEC (Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak), dengan struktur pasar oligopoli (beberapa penjual, banyak pembeli), GPPU (Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas) dapat menyepakati dan menetapkan kuota produksi DOC untuk masing-masing anggotanya. Atas dasar data-data *time series* (runtun waktu) GPPU dapat memperhitungkan perkiraan produksi DOC yang sesuai dengan permintaan setiap periode waktu. Cara ini menjadi tidak efektif jika ada anggota GPPU yang melanggar kesepakatan, atau adanya komoditas impor yang lebih murah membanjiri pasar.

Analisis pasar (PI April 2003) menunjukkan "gelombang" trend produksi dan permintaan pasar DOC yang tidak seirama. Pada waktu permintaan tinggi, produksi rendah, sehingga terjadi *excess demand* (kelebihan permintaan) yang mengakibatkan harga DOC mahal, dan pada waktu produksi tinggi, permintaan rendah, sehingga terjadi *excess supply* (kelebihan penawaran) yang mengakibatkan harga DOC murah. Dari gelombang trend dapat diketahui bahwa permintaan DOC menunjukkan trend menurun pada semester pertama (Desember-Mei) atau pasca Hari Raya, Natal dan Tahun Baru, dan meningkat pada semester kedua (Juni-Nopember). Harga DOC menjadi lebih stabil jika GPPU dapat menyesuaikan gelombang produksi dengan dengan gelombang permintaan DOC.

Tuntutan organisasi peternak ayam (PPAN) agar pemerintah mengatur harga DOC tampaknya sulit dipenuhi. Jika pemerintah menetapkan harga DOC, maka sebagai konsekuensi pemerintah harus membeli DOC jika harga DOC jatuh karena terjadi kelebihan produksi (penawaran), dan harus menyediakan kekurangan (memenuhi permintaan) DOC jika harga DOC

melambung karena terjadi kelebihan permintaan. Mekanisme demikian saat ini hanya dilakukan untuk gabah, itupun tidak berjalan seperti harapan.

Penurunan harga komoditas perunggasan yang disebabkan oleh penurunan permintaan merupakan faktor yang berada di luar kendali (*uncontrollable*) pengusaha perunggasan. Penurunan permintaan biasanya terjadi karena penurunan pendapatan, kenaikan harga-harga, rumor ketidakhalalan, maupun tuntutan pemboikotan produk Amerika. Faktor-faktor demikian merupakan ketidakpastian bisnis (*business uncertainty*) yang tidak dapat diprediksi kapan datang, berapa lama berlangsung, dan kapan akan berakhir. ***

(Poultry Indonesia Agustus 2003)

4.9. **KEUNGGULAN KOMODITAS PETERNAKAN**

Terdapat beberapa faktor yang menjadi pendorong semua negara di dunia untuk melakukan perdagangan internasional. Empat faktor terpenting adalah (1) memperoleh produk yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri, (2) mengimpor teknologi yang lebih modern dari negara lain, (3) memperluas pasar produk-produk dalam negeri, dan (4) memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Dalam teori perdagangan internasional, faktor keempat (memperoleh keuntungan dari spesialisasi) dipandang sebagai faktor utama yang menggalakkan perdagangan internasional diantara berbagai negara. Berdasarkan alasan tersebut para ahli ekonomi Klasik menekankan pentingnya sistem perdagangan bebas diantara berbagai negara, suatu pemikiran yang sampai sekarang mendapat dukungan luas para ahli ekonomi dan pemerintah berbagai negara di dunia.

Namun demikian, dunia menghadapi kenyataan bahwa perdagangan internasional penuh dengan hambatan tarif, kuota, dan non-tarif lainnya yang dirancang untuk melindungi pasar suatu negara dari gangguan maupun penetrasi oleh perusahaan-perusahaan asing. Hambatan-hambatan perdagangan sering menimbulkan konflik dagang antar negara yang terlibat. Oleh sebab itu, seiring dengan berkembangnya pasar global banyak negara (terutama negara maju) yang memfokuskan perhatiannya pada upaya mengeliminasi tarif, kuota, dan hambatan perdagangan lainnya. Usaha-usaha untuk mengurangi hambatan perdagangan dan melakukan liberalisasi perdagangan dilakukan baik secara bilateral, regional, maupun internasional. Upaya mengurangi hambatan perdagangan di tingkat internasional dimulai dengan pembentukan GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) di Jenewa tahun 1948 sampai terbentuknya WTO (*World Trade Organization*) di Marakesh-Maroko tanggal 15 April 1994. Di tingkat bilateral dan

regional, terdapat lima bentuk utama integrasi ekonomi, yaitu *Regional Cooperations Groups* (kerjasama regional untuk pengembangan), *Free Trade Area* (kawasan perdagangan bebas), *Customs Union*, *Common Market* (pasar bersama), dan *Political Union*.

Kawasan perdagangan bebas merupakan kesepakatan di antara dua negara atau lebih untuk mengurangi atau mengeliminasi tarif impor (*customs duties*) dan hambatan non tarif di antara negara anggotanya, sementara setiap anggotanya tetap memberlakukan tarifnya masing-masing terhadap negara-negara bukan anggota. Contohnya adalah NAFTA (*North American Free Trade Area*), EFTA (*European Free Trade Area*), dan AFTA (*ASEAN Free Trade Area*). AFTA dibentuk pada KTT Asean ke-4 di Singapura pada Januari 1992 yang antara lain menyepakati perjanjian mengenai CEPT (*Common Effective Preferential Tariff*) yang dimulai Januari 2003. AFTA dibentuk bukan sebagai regionalisasi perdagangan tertutup, melainkan agar Asean dapat bersaing di pasar global. Hal ini akan membawa dampak positif berupa mengalirnya arus investasi asing, baik di intra Asean maupun dari luar Asean dan mendorong industri-industri di kawasan Asean untuk menempuh orientasi pasar yang lebih besar dan skala ekonomi yang lebih besar dalam kegiatan produksi dan pemasarannya.

Teori Keunggulan Perdagangan

Terdapat beberapa teori yang menerangkan keuntungan yang diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan internasional, tiga diantaranya adalah teori keunggulan mutlak, teori keunggulan komparatif, dan konsep keunggulan kompetitif negara. Menurut teori keunggulan mutlak (*absolute advantage*) seperti dikemukakan Adam Smith (abad 17) bahwa setiap negara mampu memproduksi suatu barang tertentu secara lebih efisien daripada negara lain (memiliki keunggulan absolut untuk barang tertentu), sehingga melalui spesialisasi dan perdagangan internasional, maka setiap negara yang berdagang akan mendapatkan keuntungan.

Dalam perkembangan selanjutnya disadari bahwa perdagangan yang saling menguntungkan tidak selalu menuntut setiap negara harus memiliki keunggulan absolut dibandingkan

mitra dagangnya. Kelemahan ini telah mendorong lahirnya teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) seperti dikemukakan David Ricardo (abad 19). David Ricardo berhasil mengungkapkan bahwa perdagangan yang saling menguntungkan dapat dicapai dalam kondisi dimana hanya ada keunggulan komparatif. David Ricardo juga menyatakan bahwa negara maju memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas yang tingkat superioritas negara tersebut secara relatif lebih tinggi daripada negara sedang berkembang, sedangkan kelemahan komparatif (*comparative disadvantage*) merupakan kondisi sebaliknya.

Konsep keunggulan kompetitif negara dikembangkan oleh Michael E. Porter (1990) dalam bukunya berjudul "*The Competitive Advantage of Nations*". Konsep ini menyatakan bahwa ada empat atribut yang menentukan kesuksesan dalam persaingan internasional, yaitu (1) kondisi faktor produksi (*factor conditions*), yaitu posisi suatu negara dalam faktor-faktor produksi (misalnya tenaga kerja terampil, infrastruktur, teknologi) yang dibutuhkan untuk bersaing dalam industri tertentu, (2) kondisi permintaan (*demand conditions*), yaitu sifat permintaan domestik atas produk atau jasa industri tertentu, (3) industri terkait dan industri pendukung (*related and supporting industries*), yaitu keberadaan atau ketiadaan industri pemasok dan industri terkait yang kompetitif secara internasional di negara tersebut, dan (4) strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, yaitu kondisi dalam negeri yang menentukan bagaimana perusahaan-perusahaan dibentuk, diorganisasikan, dikelola, serta sifat persaingan produk

Keunggulan Ayam Ras

Menurut Paul Aho (peneliti Amerika), keunggulan kompetitif suatu negara dalam memproduksi unggas ditentukan oleh empat faktor, yaitu biaya pakan yang rendah, iklim usaha yang kondusif, skala ekonomi, dan kemampuan menyerap teknologi informasi. Atas dasar keempat faktor tersebut, DR. Budi Tangenjaya, APU memaparkan keunggulan komparatif dan kompetitif ayam ras pedaging dan petelur Indonesia dibandingkan negara-negara Asean lainnya dalam menghadapi AFTA, terutama ditinjau dari sisi biaya produksi dan keunggulan yang dimilikinya (PI Pebruari 2003). Hasil

analisis DR. Budi Tangenjaya menyatakan bahwa Indonesia seharusnya mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif untuk memproduksi telur dibandingkan ayam pedaging. Masalahnya, fluktuasi harga telur memungkinkan telur Malaysia masuk ke Indonesia, sedangkan harga jagung Thailand yang murah memungkinkan telur dan daging ayam Thailand masuk ke Indonesia. Secara tersirat dari hasil analisis DR. Budi Tangenjaya dapat disimpulkan bahwa Indonesia kurang memiliki daya saing dalam produksi telur dan ayam pedaging dibandingkan Malaysia dan Thailand dalam memasuki AFTA.

Cara lain untuk melakukan analisis secara kuantitatif dalam rangka menentukan tingkat keunggulan suatu komoditas pertanian dikembangkan oleh Jamil Musanif tahun 1996 yang dikenal dengan Metode JM-96 (Tabel 4.9.1). Indikator, parameter, dan besaran-besaran/nilai-nilai yang digunakan dalam metode tersebut merupakan rumusan original berdasarkan pendekatan profesional judgement oleh Jamil Musanif. Dalam metode ini, keunggulan suatu komoditas ditentukan oleh nilai indikator JM-96 yang diperoleh dari penjumlahan dari jumlah hasil kali skala parameter (S) dengan bobot parameter (P), setelah dijumlah per indikator kemudian dikalikan dengan bobot indikator (I) yang bersangkutan. Metode, indikator, parameter dan besaran-besaran tersebut sangatlah terbuka untuk diuji, dikembangkan, dan disempurnakan.

Berdasarkan Metode JM-96 penulis mencoba menganalisis keunggulan ayam petelur dan pedaging Indonesia. Jumlah nilai indikator JM-96 terendah 101 dan tertinggi 352. Nilai tersebut kemudian dibagi menjadi lima kategori keunggulan, yaitu Tidak Unggul (nilai 101-151), Kurang Unggul (nilai 152-201), Cukup Unggul (nilai 202-251), Unggul (nilai 252-301), dan Sangat Unggul (302-352). Nilai parameter keunggulan ayam petelur dan pedaging ditulis dengan huruf miring dan ditandai dengan tanda “*”). Hasil penjumlah nilai parameter keunggulan untuk komoditas ayam ras sebanyak 228 dan termasuk dalam kategori “Cukup Unggul”. ***

(Poultry Indonesia Maret 2003)

Tabel 4.9.1. Indikator dan parameter keunggulan komoditas pertanian (Metode JM-96)

| No | Indikator | Parameter | Nilai parameter | Skala (S) | Bobot parameter (P) | Indikator (I) |
|--------------------|---------------|--|---|-----------|---------------------|---------------|
| 1 | Potensi pasar | a. Volume ekspor dibanding produksi | >60-100% produksi diekspor | 4 | 1 | 4 |
| | | | >40-60% produksi diekspor | 3 | | |
| | | | >20-40% produksi diekspor <20% produksi diekspor *) | 2 | | |
| | | b. Pemenuhan kebutuhan dalam negeri | <30% konsumsi terpenuhi | 4 | 2 | |
| | | | >30-50% konsumsi terpenuhi | 3 | | |
| | | | >50-70% konsumsi terpenuhi*) | 2 | | |
| | | | >70% konsumsi terpenuhi | 1 | | |
| | | c. Peranan ekspor komoditas ybs thd nilai devisa subsektor (NDS) | >60-100% NDS | 4 | 2 | |
| | | | >40-60% NDS | 3 | | |
| | | | >20-40% NDS | 2 | | |
| | | | <20% NDS *) | 1 | | |
| | | d. Pertumbuhan ekspor | Kenaikan >50% | 4 | 1 | |
| | | | Kenaikan 20-50% | 3 | | |
| | | | Kenaikan <20% *) Turun | 2 | | |
| | | e. Pertumbuhan impor | Kenaikan >50% | 4 | 2 | |
| Kenaikan 20-50% *) | 3 | | | | | |
| Kenaikan <20% *) | 2 | | | | | |
| Turun | 1 | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|---|-------------|---|---|
| 2 | Daya saing | a. Harga produksi dalam negeri dibanding harga impor | Nyata lebih rendah Kurang lebih sama <i>Nyata lebih tinggi*</i>) | 3 2 1 | 2 | 3 |
| | | b. Kualitas produksi dalam negeri dibanding produk impor | Lebih baik Sama <i>Lebih rendah*</i>) | 3 2 1 | 2 | |
| 3 | Kemampuan produksi | a. Ketersediaan teknologi | Dikuasai masyarakat <i>Tersedia tetapi belum dikuasai masyarakat*</i>) Belum tersedia | 3 2 1 | 1 | 3 |
| | | b. Tingkat teknologi yang diperlukan | Sederhana (mudah) <i>Sedang (madya)*</i>) Rumit (canggih) | 3 2 1 | 1 | |
| | | c. Ketersediaan sumberdaya alam | Tersedia sesuai kebutuhan <i>Tersedia terbatas / bersyarat ringan*</i>) Tersedia sangat terbatas/bersyarat berat | 3 2 1 | 1 | |

| | | | | | | |
|---|--------------------|--|---|------------------|---|---|
| 4 | Pasokan | a. Pertumbuhan populasi ternak per tahun selama 5 tahun terakhir | Kenaikan >30% Kenaikan 10-30% <i>Kenaikan <10%*</i>) Turun | 4 3 2 1 | 1 | 3 |
| | | b. Rata-rata peningkatan produktivitas per tahun selama 5 tahun | Kenaikan >5% Kenaikan 2-5% <i>Kenaikan <2%*</i>) Turun | 4 3 2 1 | 1 | |
| | | c. Rata-rata peningkatan produksi per tahun selama 5 tahun | Kenaikan >30% Kenaikan 10-30% <i>Kenaikan <10%*</i>) Turun | 4 3 2 1 | 1 | |
| 5 | Tolok ukur ekonomi | a. Nilai keuntungan per ha saat ini | >3 kali padi *) Sama dengan 3 kali padi < padi | 3 2 1 | 2 | 4 |
| | | b. B/C rasio | >1,5 <i>1-1,5*</i>) <1 | 3 2 1 | 2 | |

4.10.

PERBANDINGAN HARGA TELUR INTERNASIONAL

Geoff Fairhurst (Senior Vice-President of Shaver and Vice President of International Development for ISA) berhasil mengembangkan suatu metode yang disebut MACRO yang dapat membandingkan biaya produksi telur di dunia. Metode MACRO digunakan pertama kali pada Nopembet 1994 dengan melibatkan 16 negara. Empat tahun kemudian, pada Januari 1998, metode ini digunakan lagi dengan melibatkan 46 negara yang mewakili 80% dari total produksi telur dunia. Untuk mengetahui ranking kompetitif produksi telur suatu negara digunakan tiga kriteria yaitu biaya produksi, harga telur, dan margin harga. Pertama, biaya produksi dan harga telur yang semakin murah, dinilai semakin banyak, dan berarti semakin kompetitif. Kedua, margin harga yang semakin besar, dinilai semakin besar, dan berarti semakin kompetitif. Ketiga, jumlah nilai dari biaya produksi, harga telur, dan margin harga yang semakin besar berarti semakin kompetitif.

Hasil analisis MACRO pada Tabel 4.10.1, memang terdapat variabel yang tersembunyi yaitu besarnya nilai tukar mata uang (*exchange rate*). Tetapi, perankingan kembali (*re-ranking*) dengan memasukkan nilai tukar dasar (*original exchange rate*) pada semua komponen pada beberapa periode waktu hanya sedikit menggeser negara-negara di ranking 10 teratas (8-10 negara tetap kedudukannya) dan 10 terbawah (9-10 negara tetap kedudukannya). Namun demikian, perubahan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap dolar Amerika berpengaruh langsung terhadap kedudukan rankingnya. Sebagai contoh, menguatnya *poundsterling* menyebabkan penurunan posisi kompetitif Inggris sebanyak 8 tempat dibandingkan dengan Perancis pada saat nilai *franc* melemah. Pada kasus Afrika Selatan, posisi kompetitif negara ini dapat dipertahankan jika nilai mata uang *rand* menurun tajam. Jika nilai *rand* terhadap dolar Amerika tidak melemah, Afrika Selatan

akan kehilangan 12 tempat, dari posisi 11 menjadi 23. Dengan demikian, semakin melemah nilai mata uang suatu negara terhadap dolar Amerika, semakin meningkat status kompetitifnya, dan sebaliknya.

Seperti terlihat pada Tabel 4.10.1, rata-rata biaya produksi telur di dunia (yang diwakili 46 negara yang dianalisis) sebesar 65,04 sen US\$, harga telur 94,92 sen US\$, dan margin harga 29,86 sen US\$. Indonesia berada pada ranking posisi kompetitif lima besar teratas yaitu nomor empat, dengan jumlah nilai sama dengan Amerika Serikat. Biaya produksi dan harga telur di Indonesia ternyata paling murah di dunia yaitu masing-masing 38,68 sen US\$ dan 45,20 sen US\$, sedangkan margin harga berada pada nomor 8 terendah di dunia yaitu hanya 6,52 sen US\$. Jika dihitung dengan nilai tukar rupiah bulan Juni 2000 (8.500 rupiah/US\$), berarti biaya produksi telur dan harga telur di Indonesia masing-masing setara dengan 3.288 rupiah dan 3.842 rupiah, serta margin harga sebesar 554 rupiah. Dengan memperhatikan biaya produksi dan harga telur tersebut, Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk dapat bersaing di pasar internasional. Hal ini juga merupakan insentif positif bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya pada bidang ayam ras petelur di Indonesia, asalkan bisa mengekspor produk telur ke pasar internasional. Jika hanya mengandalkan pasar di dalam negeri, margin yang diperoleh sangat rendah.

Hasil kajian Geoff Fairhurst menyimpulkan bahwa (1) metode MACRO dapat digunakan untuk menaksir perbandingan harga telur internasional dengan kecenderungan yang konsisten untuk beberapa komponen, (2) terdapat kecenderungan konsisten pada status kompetitif, (3) biaya pakan memiliki pengaruh paling besar terhadap posisi kompetitif, dan (4) nilai tukar mata uang dapat memiliki pengaruh dramatis pada beberapa situasi. ***

Tabel 4.10.1.
Status kompetitif produksi telur dunia (Januari 1998)

| Negara | Biaya | Nilai | Harga | Nilai | Marjin | Nilai | Jml. Nilai | Ran king |
|--------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------------|----------|
| Kanada | 46.57 | 43 | 102.52 | 19 | 55.95 | 43 | 105 | 1 |
| Brazilia | 45.94 | 44 | 90.11 | 25 | 44.17 | 35 | 104 | 2 |
| Ukraina | 48.61 | 42 | 98.79 | 20 | 50.18 | 41 | 103 | 3 |
| Amr. Serikat | 43.56 | 45 | 58.35 | 43 | 14.79 | 12 | 100 | 4 |
| Indonesia | 38.68 | 46 | 45.20 | 46 | 6.52 | 8 | 100 | 4 |
| Hungaria | 49.73 | 41 | 87.86 | 26 | 38.13 | 26 | 93 | 6 |
| Czech | 56.54 | 37 | 103.32 | 18 | 46.78 | 36 | 91 | 7 |
| India | 52.95 | 40 | 53.97 | 44 | 1.02 | 5 | 89 | 8 |
| Mexico | 56.29 | 38 | 78.68 | 33 | 22.39 | 18 | 89 | 8 |
| Perancis | 55.83 | 39 | 77.19 | 34 | 21.36 | 16 | 89 | 8 |
| Afr. Selatan | 56.61 | 36 | 87.09 | 27 | 30.48 | 24 | 87 | 11 |
| Spanyol | 58.01 | 33 | 85.76 | 30 | 27.75 | 22 | 85 | 12 |
| Thailand | 57.22 | 35 | 67.60 | 39 | 10.38 | 11 | 85 | 12 |
| Belanda | 57.66 | 34 | 75.27 | 36 | 17.61 | 13 | 83 | 14 |
| Slovakia | 61.08 | 28 | 114.44 | 12 | 53.36 | 42 | 82 | 15 |
| Inggris | 59.54 | 31 | 67.29 | 40 | 7.75 | 9 | 80 | 16 |
| Russia | 59.02 | 32 | 150.82 | 1 | 91.80 | 46 | 79 | 17 |
| Bolivia | 60.32 | 30 | 64.59 | 42 | 4.27 | 7 | 79 | 17 |
| Uruguay | 60.96 | 29 | 86.74 | 29 | 25.78 | 21 | 79 | 17 |
| Argentina | 61.94 | 27 | 91.78 | 24 | 29.84 | 23 | 74 | 20 |
| Bangladesh | 65.78 | 22 | 114.69 | 11 | 48.91 | 39 | 72 | 21 |
| Ekuador | 62.63 | 26 | 80.74 | 32 | 18.11 | 14 | 72 | 21 |
| Estonia | 66.56 | 21 | 114.41 | 13 | 47.85 | 38 | 72 | 21 |
| Zimbabwe | 64.25 | 25 | 86.82 | 28 | 22.56 | 19 | 72 | 21 |
| Denmark | 65.06 | 24 | 104.34 | 17 | 39.28 | 28 | 69 | 25 |
| Mesir | 65.65 | 23 | 68.64 | 38 | 2.99 | 6 | 67 | 26 |
| Polandia | 68.25 | 18 | 112.99 | 14 | 43.94 | 34 | 66 | 27 |
| Malaysia | 67.52 | 19 | 75.57 | 35 | 8.05 | 10 | 64 | 28 |
| Swedia | 66.67 | 20 | 104.94 | 16 | 38.27 | 27 | 63 | 29 |
| Serbia | 70.26 | 15 | 120.39 | 8 | 50.13 | 40 | 63 | 29 |
| Nigeria | 70.50 | 14 | 117.67 | 10 | 47.17 | 37 | 61 | 31 |
| Lithuania | 69.03 | 17 | 93.75 | 23 | 24.72 | 20 | 60 | 32 |
| Selandia Br. | 70.00 | 16 | 109.74 | 15 | 39.74 | 29 | 60 | 32 |
| Kenya | 72.22 | 11 | 139.38 | 3 | 67.16 | 44 | 58 | 34 |
| Sri Lanka | 71.27 | 13 | 65.12 | 41 | -6.15 | 3 | 57 | 35 |
| Ghana | 72.85 | 10 | 145.11 | 2 | 72.26 | 45 | 57 | 35 |
| China | 74.91 | 9 | 53.20 | 45 | -21.71 | 1 | 55 | 37 |
| Taiwan | 72.17 | 12 | 94.27 | 21 | 22.10 | 17 | 50 | 38 |
| Tunisia | 78.95 | 7 | 121.73 | 7 | 42.78 | 32 | 46 | 39 |
| Philippina | 75.65 | 8 | 94.12 | 22 | 18.47 | 15 | 45 | 40 |
| Finlandia | 79.41 | 6 | 70.81 | 37 | -8.60 | 2 | 45 | 40 |
| Peru | 81.52 | 5 | 124.73 | 6 | 43.21 | 33 | 44 | 42 |
| Colombia | 84.21 | 4 | 117.92 | 9 | 33.71 | 25 | 38 | 43 |
| Maroko | 87.31 | 3 | 84.95 | 31 | -2.36 | 4 | 38 | 43 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------|---|--------|---|-------|----|----|----|
| Jepang | 90.69 | 2 | 130.90 | 5 | 40.21 | 30 | 37 | 45 |
| Norwegia | 91.48 | 1 | 131.98 | 4 | 40.50 | 31 | 36 | 46 |
| Rata-rata | 65.04 | | 94.92 | | 29.86 | | | |

Sumber : Poultry Internasional (Januari 1999)

(Poultry Indonesia September 2000)

DAFTAR PUSTAKA

- 4.1. Sutawi. 2000. Pola Konsumsi Produk Peternakan. Poultry Indonesia Juli 2000.
- 4.2. Sutawi. 1994. Teori Permintaan dan Penawaran pada Usaha Peternakan. Poultry Indonesia No. 177 Nopember 1994.
- 4.3. Sutawi. 1995. Struktur Pasar dalam Agribisnis Perunggasan. Poultry Indonesia No. 179 Januari 1995.
- 4.4. Sutawi. 1997. Manfaat Kebijakan Tarif Bagi Pengembangan Usaha Peternakan di Indonesia. Poultry Indonesia No. 205 Maret 1997.
- 4.5. Sutawi. 1998. Memanfaatkan Peluang Pasar Ekspor Produk Peternakan. Poultry Indonesia No. 222 Nopember 1998.
- 4.6. Sutawi. 2000. Peternakan dalam Jeratan Perekonomian Bebas. Infovet Edisi 072 Juli 2000.
- 4.7. Sutawi. 2000. Penerapan UU Anti Monopoli pada Agribisnis Peternakan. Infovet Edisi 070 Mei 2000.
- 4.8. Sutawi. 2003. Stabilisasi Harga Komoditas Perunggasan. Poultry Indonesia Agustus 2003.
- 4.9. Sutawi. 2003. Keunggulan Komoditas Perunggasan. Poultry Indonesia Maret 2003.
- 4.10. Sutawi. 2000. Perbandingan Harga Telur Internasional. Poultry Indonesia September 2000.

Bab V

ILMU DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN

5.1. MEMILIH DAN MEMBEDAKAN DAGING TERNAK

Daging merupakan bahan makanan yang hampir sempurna, karena kandungan zat-zat gizi yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh manusia tersedia di dalamnya. Begitu pula daging dan bahan makanan yang berasal dari daging merupakan sumber protein berkualitas tinggi, karena daging mengandung protein dan asam-asam amino esensial yang diperlukan untuk kesehatan fisik, perkembangan mental dan intelektual. Selain protein, daging juga merupakan sumber energi, vitamin dan mineral.

Ciri khas protein hewani, termasuk protein daging, adalah kelengkapan asam-asam amino yang terkandung di dalamnya dan tingginya nilai hayati dari protein tersebut. Nilai hayati mencerminkan berapa banyak zat nitrogen (N) dari suatu protein dalam pangan yang dimanfaatkan oleh tubuh untuk pembuatan protein dan bagian-bagiannya. Jadi makin tinggi nilai hayati protein suatu bahan pangan makin banyak pula zat nitrogen dari protein tersebut yang dimanfaatkan untuk pembentukan protein tubuh. Hampir semua pangan yang berasal dari ternak mempunyai nilai hayati di atas 80.

Susunan kimiawi daging sangat tergantung pada jenis ternak, umur ternak, genetik dan latar belakang pemberian pakan pada waktu ternak masih hidup, komposisi relatif kimia daging adalah protein 20%, air 70%, lemak 7% dan mineral 1%. Komposisi kimiawi daging dari beberapa jenis daging ternak disajikan pada Tabel 5.1.1.

Selain zat gizi di atas, daging juga kaya akan zat besi, phosphor, belerang, kalium dan natrium. Daging juga punya kelebihan dibandingkan dengan bahan makanan lain karena mengandung vitamin B kompleks yang tinggi. Nilai vitamin ini sering menurun atau berkurang akibat cara memasak yang salah, karena vitamin B pada umumnya tidak tahan terhadap pemanasan. Vitamin lain yang

terdapat dalam daging adalah A, D, E dan K. Akan tetapi daging mempunyai sifat mudah rusak (busuk) karena kandungan gizinya yang tinggi. Oleh karena itu daging ternak yang dipotong harus segera dimasak atau diawetkan.

Daging konsumsi di pasaran dapat berasal dari ternak sapi, kerbau, kambing, domba, kijang, kuda dan babi. Setiap ternak mempunyai ciri khas pada dagingnya, sehingga dapat digunakan untuk membedakan apakah daging tersebut berasal dari ternak sapi, kerbau, kuda, domba, kambing ataukah babi.

Daging yang berasal dari jenis ternak yang sama, mutunya dapat berbeda karena perbedaan umur saat ternak dipotong. Daging dari ternak yang berbeda jenisnya jelas berbeda mutunya. Begitu pula ternak yang dipotong dengan cara yang tidak benar, mutu dagingnya juga berbeda dengan ternak yang dipotong dengan cara yang benar. Daging dari ternak sakit atau mati sebelum dipotong juga berbeda dengan daging yang berasal dari ternak sehat.

Mutu daging dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis ternak, umur, kondisi saat hidup (kurus, gemuk, sakit, sehat) dan cara-cara penanganan ternak sebelum dan sesudah dipotong.

Tabel 5.1.1. Komposisi zat gizi beberapa jenis daging

| No. | Jenis Daging | Air (%) | Protein (%) | Lemak (%) | Kalori |
|-----|--------------|---------|-------------|-----------|--------|
| 1 | Ayam | 55,9 | 18,2 | 25,0 | 302 |
| 2 | Angsa | 51,1 | 16,4 | 31,5 | 354 |
| 3 | Anak sapi | 68,0 | 19,1 | 12,0 | 190 |
| 4 | Babi | 42,0 | 11,9 | 45,0 | 456 |
| 5 | Domba | 66,3 | 17,1 | 14,8 | 206 |
| 6 | Itik | 54,3 | 16,0 | 28,6 | 326 |
| 7 | Kambing | 70,3 | 16,6 | 9,2 | 154 |
| 8 | Kerbau | 84,0 | 18,7 | 0,5 | 84 |
| 9 | Kuda | 76,0 | 18,1 | 4,1 | 118 |
| 10 | Sapi | 66,0 | 18,8 | 14,0 | 207 |

Sumber : Direktorat Gizi, 1981

Memilih Daging yang Sehat

Kebanyakan konsumen daging beranggapan bahwa daging

yang segar adalah daging yang masih bergerak-gerak, yang kadangkala masih mengandung darah. Padahal kalau daging masih-bergerak-gerak itu dimasak, akan keras dan liat. Daging seperti itu juga tidak tahan disimpan karena mengandung darah sehingga makin cepat busuk.

Daging dapat bergerak-gerak karena pada hewan yang baru disembelih (dipotong) akan mengalami *rigormmortis*, yaitu proses kekakuan dan kekejangan. Proses ini tetap berlangsung dalam waktu lama sampai kemudian daging menjadi lemah dan lentur lagi.

Di rumah potong hewan (RPH), ternak yang akan dipotong sudah diperiksa kesehatannya. Setelah ternak dipotong, karkas dan bagian-bagian tubuh serta alat-alat dalam, seperti ginjal, hati, paru-paru dan jantung juga diperiksa. Namun demikian tidak mustahil jika di pasaran masih dijumpai daging yang berasal dari hewan ternak yang sebenarnya tidak lazim atau bahkan dilarang untuk dipotong, misalnya betina produktif, sedang bunting, ternak yang sakit atau mati. Karena itu pembeli harus waspada dan tahu bagaimana atau seperti apa daging yang sehat dan tidak sehat, supaya tidak tertipu atau dirugikan.

Daging sehat berasal dari hewan ternak yang sehat. Disembelih dengan cara yang benar dan halal di rumah pemotongan hewan. Diperiksa. Diangkut dengan kendaraan khusus dan dijual di tempat penjualan khusus oleh pedagang yang sehat. Daging sehat sesaat setelah dipotong tampak gelap, lembab dan hangat. Bila dicacah akan lekat dengan pisau atau tangan. Bila diiris, bekas irisan tidak teratur, karena daging masih mengalami kontraksi. Setelah satu jam sampai sehari, warna daging tampak lebih terang dan basah. Bila diiris, irisannya membentuk bidang lurus dan tidak lekat (lengket) lagi bila dicacah. Daging umur sehari cairannya mudah diperas. Perubahan-perubahan ini sangat dipengaruhi oleh suhu udara atau ruang penyimpanan yang rendah perubahan-perubahan tersebut terjadi sangat lambat.

Pada ternak yang kehabisan tenaga. Lelah atau mengalami stress sebelum dipotong, dagingnya akan berwarna gelap. Hal ini disebabkan darah tidak dapat keluar dengan sempurna. Demikian pula ternak yang mati sebelum dipotong, dagingnya berwarna merah gelap, mengandung banyak darah beku berair, cepat busuk dan bila diiris (irisannya) membentuk bidang datar. Daging yang

berasal dari ternak yang menderita sakit demam atau dipotong segera setelah ternak beranak mempunyai bau yang khas, yaitu manis tetapi memuakkan.

Jadi, secara keseluruhan, daging yang baik mempunyai ciri-ciri mengkilat, warnanya merah, tidak pucat, tidak ada bau asam apalagi bau busuk, masih elastis dan tidak kaku, apabila dipegang atau diiris tidak terasa lekat dan masih terasa kebasahannya. Untuk mendapatkan daging yang enak dan empuk, sebaiknya dipilih daging yang sudah mengalami proses pelayuan, biasanya berlangsung 10-24 jam. Proses demikian sudah banyak dilakukan oleh rumah potong hewan di kota-kota besar di Indonesia, namun prosesnya belum sempurna karena proses ini memerlukan biaya yang cukup besar.

Membedakan Daging Ternak

Tiap jenis karkas mempunyai ciri khusus dan berbeda-beda. Daging sapi dapat dibedakan dengan daging ternak-ternak lainnya misalnya kerbau, kambing, domba, kuda dan babi. Sebagai dasar untuk membedakan daging-daging tersebut ialah dengan melihat warna daging dan lemaknya, struktur (ukuran serat-serat daging), tekstur (kasar-halusnya penampakan daging) dan cairan daging. Di samping itu bau dapat juga digunakan untuk membedakan daging dari kambing, domba, babi jantan dengan betinanya.

Daging kambing, domba (jantan) mempunyai bau yang keras menusuk hidung (*prengus*). Hal ini disebabkan oleh hormon kelamin jantan, sedangkan pada sapi dan kerbau pengaruh hormon ini tidak begitu tampak. Di samping untuk membedakan daging asal ternak yang berbeda jenisnya, warna daging dan lemak, kandungan dan penyebaran lemak di dalam daging, ukuran serat daging, tekstur dan cairan daging dapat digunakan untuk membedakan daging asal ternak yang sama jenisnya, tetapi berbeda umumnya.

Daging Sapi

Warna daging sapi umumnya merah segar. Daging sapi jantan muda berwarna merah terang, semakin tua warna

dagingnya menjadi lebih gelap. Serat daging pada yang muda lembut (kecil) semakin tua serat dagingnya semakin kasar (besar) dan tampak teksturnya kasar. Daging sapi tua warnanya sangat gelap. Daging sapi jantan kastrasi berwarna merah terang sampai merah tua. Kandungan lemak di dalamnya cukup banyak, warnanya putih sampai kekuningan.

Lemak daging sapi betina berwarna putih, semakin tua menjadi kuning muda. Bila dibandingkan dengan sapi jantan tua, lemak sapi betina tua berwarna lebih tua. Akan tetapi pada sapi muda dijumpai pula lemak dagingnya berwarna kuning, hal ini menunjukkan lemak tersebut kaya pro vitamin A. Lemak pada daging berkaitan dengan cita rasa keempukannya.

Daging Anak Sapi

Daging anak sapi (pedhet), umur beberapa hari dagingnya tampak pucat dan berair, lemaknya mempunyai bentuk seperti sele (*jelly*). Pada pedhet yang mendapatkan air susu induknya, warna lemaknya menjadi putih dan tampak kompak. Sejalan dengan pertumbuhan pedhet menjadi lebih dan bila mengkonsumsi rumput warna lemaknya berubah menjadi kuning. Dengan meningkatnya umur pedhet, warna dagingnya menjadi berwarna merah jambu sampai merah terang.

Daging Kerbau

Daging kerbau strukturnya kasar, kompak serta kelihatan serat dagingnya. Daging kerbau lebih alot daripada daging sapi. Serat daging kerbau lebih besar dan tampak lebih kasar dibandingkan daging sapi. Hal ini disebabkan kandungan protein daging kerbau lebih banyak, tetapi airnya lebih sedikit, sehingga tampak kasar dan kering. Warna dagingnya merah terbakar dan lemaknya kuning jelas.

Daging Kambing

Struktur daging kambing sangat halus lembut, seratnya kompak dan kelihatan nyata. Dibandingkan dengan yang lain, daging

kambing punya bau yang khas, yaitu bau *prengus*. Warna dagingnya merah terang dan hanya sedikit berlemak berwarna kekuningan.

Daging Domba

Daging domba muda berwarna muda sampai merah terang, semakin tua semakin gelap. Daging domba mirip dengan daging kambing, hanya seratnya tidak kelihatan nyata karena tertutup banyak lemak. Dibandingkan dengan daging sapi, daging domba warnanya sedikit gelap, namun lemak dagingnya berwarna lebih putih. Daging domba tua berwarna merah terang sampai gelap, serat dagingnya halus namun tampak kompak. Lemak dagingnya sedikit, berwarna putih kompak dan tidak berbau. Akan tetapi pada domba yang pakannya baik dijumpai timbunan lemak di antara otot daging pahanya.

Daging Babi

Warna daging babi bervariasi menurut umur, pakan dan bagian tubuh. Daging babi muda berwarna abu-abu merah muda sampai abu-abu merah. Daging babi jantan atau betina warnanya merah pucat sampai merah gelap. Daging babi khas dengan timbunan lemak di bawah kulitnya. Lemak babi berwarna putih dan lembek serta mudah mencair pada suhu kamar. Strukturnya sangat halus, kompak dan seratnya tidak nyata berlapis-lapis antara daging dan lemak. Daging babi bila dimasak menjadi putih sedangkan daging ternak lainnya menjadi gelap.

Daging Kuda

Daging kuda strukturnya sangat kasar, tidak kompak serta serat-serat dagingnya mudah terpisah. Warnanya merah gelap bahkan sampai kebiru-biruan. Adanya darah beku di dalam daging kuda menyebabkan warnanya menjadi kehitam-hitaman. Lemak daging kuda berwarna kuning, lembek dan berminyak. Lemak di antara dagingnya sangat sedikit.

(Suara Muhammadiyah No. 24/76/1991)

5.2.

DAGING HALAL DAN TAYYIB

Sebanyak 90% dari 210 juta warga bangsa Indonesia mengaku beragama Islam. Secara umum pemahaman, penghayatan, dan pengamalan mereka terhadap agamanya masih lemah, sehingga mudah diadu domba dan diprovokasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kasus terakhir adalah unjuk rasa sebagian kecil yang mengaku umat Islam menentang impor daging ayam yang diduga tidak halal di DPR dan Deptan pada Desember 1999 yang lalu. Padahal, di balik semua itu sebenarnya adalah persaingan dagang untuk saling menjatuhkan dan mencari keuntungan sendiri.

Tidak ada penjelasan resmi dari pihak berwenang dimana letak ketidakhalalan daging ayam impor itu. Yang ada hanya pendapat orang-orang tertentu untuk mempertahankan kelangsungan bisnisnya atau yang merasa perlu membela kepentingan umat Islam. Pendapat pertama menyatakan bahwa ketidakhalalan daging ayam impor karena ada yang tidak utuh, hanya bagian paha (*leg quarter*) yang di negara asalnya tergolong "*dark meat*", produk samping atau malah limbah. Kedua, karena proses pemotongan menggunakan mesin potong pisau (*belt conveyor*), sehingga tidak sesuai syariat Islam yang menghendaki pemotongan oleh orang Islam dewasa, berakal dan mengetahui rukun dan sunnahnya menyembelih, serta membaca *bismillah* (dengan nama Allah). Ketiga, karena tidak dilengkapi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI atau lembaga sejenis di negara asalnya. Keempat, berasal dari negara bukan Islam (Amerika, Brasilia, China, dan Thailand), dan biasanya diekspor ke negara-negara bukan Islam, sehingga bisa dipastikan daging impor tersebut tidak halal.

Halal dan Tayyib

Banyak ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang membicarakan makanan. Dalam 27 kali pembicaraan tentang perintah makan, Al-Qur'an selalu menekankan dua sifat, yaitu *halal* (boleh) dan *tayyib* (baik). Ada empat ayat yang menggabungkan dua sifat tersebut, yaitu al-Baqarah (2) ayat 168, al-Maidah (5) ayat 88, al-Anfal (8) ayat 69, dan an-Nahl (16) ayat 114. Ini menunjukkan bahwa sifat *halal* dan *tayyib* tidak dapat dipisah dan menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam mengkonsumsi makanan.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa yang dihalalkan adalah makanan yang *tayyib* (QS al-Maidah : 4) dan yang diharamkan adalah yang *khabisah* (kotor) seperti dijelaskan dalam surat al-A'raaf : 157. Sifat halal dan haram terkait dengan hukum yang bersifat non-materi, sedangkan *tayyib* dan *khabisah* terkait dengan hukum yang bersifat materi. Makanan yang halal dapat ditinjau dari cara mendapatkan dan jenis makanan itu sendiri, sedangkan *tayyib* adalah makanan yang menurut *syarak* (hukum) atau secara zatnya suci dari yang *syubhat* (keraguan).

Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa tubuh yang dibesarkan dari makanan haram, baik cara mendapatkan (seperti merampok, mencuri, menjarah, korupsi, dan sejenisnya) maupun jenis makanan itu sendiri, maka neraka lebih baik untuknya (HR at-Tirmizi). Hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap muslim wajib memperhatikan makanannya dan menjauhkan diri dari makanan haram sekaligus menegaskan bahwa syarat halal dan *tayyib* merupakan dua serangkaian yang wajib dipenuhi dalam mengkonsumsi makanan.

Berkaitan dengan syarat halal dan *tayyib* dalam makanan ini, umat Islam Indonesia masih sering menggunakan standar ganda. Di satu sisi sangat mempermasalahkan kehalalan dan ketayyiban daging ayam impor. Di sisi lain, mereka tidak peduli dengan kehalalan dan ketayyiban daging ayam lokal. Padahal kalau mau jujur, sebagian daging ayam lokal juga belum 100% halal dan belum 100% *tayyib*. Pernyataan ini bisa dibuktikan mulai dari pemeliharaan ayam, pengangkutan, pemotongan, sampai penjualan. Dalam pemeliharaan ayam, masih ditemukan

residu dalam pakan dan obat-obatan. Tempat pemotongan ayam tradisional masih banyak yang belum memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, dalam pemotongan ayam masih ada pedagang nakal yang menjual ayam bangkai (sedikitnya 2% ayam mati selama pengangkutan) dengan alasan tidak mau rugi dan konsumen tidak dapat membedakan antara daging ayam hidup dan daging ayam bangkai. Karenanya, pengawasan terhadap kehalalan dan ketayyiban daging ayam seharusnya dilakukan baik pada daging ayam impor maupun daging ayam lokal.

Makanan tidak hanya berfungsi untuk menjaga kesehatan dan mempertahankan hidup, tetapi juga berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan karakter seseorang. Secara teologis diyakini bahwa makanan dan minuman yang haram tidak akan mendatangkan berkah dan tidak memberikan ketenangan dalam kehidupan. Orang yang suka memakan makanan *haram* dan *khabisah* biasanya bertabiat kasar, keras, dan sukar menerima kebenaran. Karenanya, jenis makanan yang haram erat kaitannya dengan dampak negatif mental orang yang memakannya. Hal ini merupakan tantangan bagi peneliti muslim untuk membuktikan secara empiris bagaimana bentuk-bentuk ketidakberkahan tersebut. Misalnya bisa diteliti, apakah perilaku sebagian warga bangsa Indonesia yang semakin brutal ini juga disebabkan oleh karena mengkonsumsi makanan haram baik langsung maupun tidak langsung.

Bismillah dan Ahli Kitab

Sebenarnya makanan yang haram sedikit sekali jumlahnya. Dalam surat al-An'am (6) ayat 145, yang turun pada akhir Periode Mekah (masa Nabi Muhammad SAW bermukim di Mekah, 601-622 M), Allah SWT hanya mengharamkan empat jenis makanan yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sembelihan yang menyebut selain nama Allah. Baru pada akhir misi kerasulan Muhammad SAW, Allah SWT mengulang kembali dan memperinci beberapa jenis makanan yang diharamkan sebelumnya. Selain empat jenis makanan tersebut, dalam surat al-Maidah (5) ayat 3 juga diharamkan hewan yang mati tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk, diterkam binatang buas, kecuali binatang tersebut masih

sempat disembelih sebelum mati, dan yang disembelih untuk berhala.

Dengan penjelasan al-Qur'an di atas jelaslah bahwa binatang yang halal, menjadi tidak halal dimakan melainkan jika disembelih menurut aturan yang telah disyariatkan oleh agama. Menurut Kepmentan 413/1992 tentang Pedoman Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya pada pasal 7 antara lain disebutkan bahwa menyembelih hewan potong dilakukan oleh juru sembelih Islam, dan dengan membaca *bismillah* (dengan nama Allah). Sementara itu, daging ayam impor pada umumnya disembelih dengan mesin yang tentu saja tidak dengan mengucapkan bismillah.

Surat al-Maidah (5) ayat 3 menimbulkan perbedaan pendapat mengenai wajib tidaknya membaca bismillah dalam penyembelihan hewan. Ulama Mazhab Hanbali, Maliki, dan Hanafi menyatakan bahwa penyebutan nama Allah (bismillah) adalah syarat mutlak bagi sahnya penyembelihan. Karenanya, memakan sembelihan yang dengan sengaja tidak menyebut nama Allah hukumnya haram. Menurut Mazhab Syafi'i, penyebutan bismillah hanya sunnah, dan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah, baik sengaja ataupun tidak, adalah halal. Alasannya, al-Maidah (5) ayat 3 tidak menunjukkan wajibnya membaca bismillah, tetapi hanya mengharamkan menyembelih dengan nama selain Allah dan menyembelih untuk berhala, yang berarti dengan diam tidak menyebut nama sesuatu pun tidak ada halangan. Keharaman sembelihan yang menyebut selain nama Allah bukan karena kotornya jenis sembelihan tersebut secara zatnya, melainkan secara maknawi. Larangan ini dimaksudkan untuk memelihara dan mempertahankan prinsip tauhid.

Selain juru sembelih Islam, surat al-Maidah (5) ayat 5 menegaskan bahwa makanan Ahli Kitab (orang yang menerima kitab suci dan mengakui wahyu Allah SWT) adalah halal dimakan dan makanan umat Islam adalah halal bagi mereka. Ayat ini memberi tuntunan kepada umat Islam dalam pergaulan sosial dengan Ahli Kitab. Sebagian ulama berpendapat bahwa Ahli Kitab adalah orang Yahudi yang menerima Kitab Taurat dan orang Kristen yang menerima Kitab Injil. Ada juga ulama, diantaranya Muhammad Abduh, yang berpendapat bahwa orang Hindu dan

Budha juga termasuk Ahli Kitab karena mereka memiliki Kitab Weda dan Tripitaka.

Dua pilihan

Apabila seseorang merasa ragu terhadap kehalalan suatu makanan, maka ia wajib menghindarinya, karena hal itu termasuk hal yang *syubhat* (keraguan atau kekurangjelasan). Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa yang halal dan yang haram sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang belum jelas kedudukannya (*syubhat*). Banyak yang tidak tahu apakah yang *syubhat* tersebut halal atau haram. Pada hadis lain Nabi Muhammad SAW memerintahkan supaya umatnya meninggalkan hal-hal yang meragukan (HR al-Bukhari, at-Tirmizi, dan Ahmad bin Hanbal). Ini mengisyaratkan supaya umat Islam bersikap hati-hati terhadap suatu hal yang hukumnya masih tidak jelas.

Di sisi lain, seorang muslin tidak diwajibkan untuk memperlakukan dan menanyakan sesuatu yang tidak dilihatnya secara nyata. Tidak ada kewajiban seorang muslim untuk mempertanyakan penyembelihan suatu makanan yang halal, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Kalau makanan tersebut diyakini kehalalannya, maka berarti halal makanan itu. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa apabila ada seseorang yang memberi kita daging, tetapi kita tidak tahu apakah sembelihannya menyebut Allah SWT atau tidak, maka ucapkanlah *bismillah* sebelum memakannya (HR al-Bukhari). ***

(Poultry Indonesia April 2000)

5.3.

PEMOTONGAN UNGGAS SECARA HALAL

Sesuai Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1988, kebutuhan protein penduduk Indonesia adalah 55 g/kapita/hari yang terdiri 44 g (80%) protein nabati dan 11 g (20%) protein hewani, dimana 6,5 g berasal dari ikan dan 4,5 g berasal dari ternak. Protein hewani asal ternak sebanyak 4,5 g tersebut setara dengan 7,6 kg daging, 3,5 kg telur dan 4,6 kg susu per kapita/tahun. Sampai tahun 1993 konsumsi protein hewani asal ternak baru mencapai 3,74 g (80%), berasal dari susu 4,88 kg, telur 2,48 kg dan daging 6,39 kg. Dari konsumsi daging 6,39 kg tersebut, daging unggas memberi sumbangan yang terbesar yaitu 3,73 kg. Hal ini dimungkinkan karena daging unggas relatif lebih murah dibandingkan harga daging lain, mudah diperoleh dan dapat diolah menjadi aneka masakan keluarga.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan dan kesadaran gizi masyarakat maka selain permintaan daging unggas (ayam) meningkat, tuntutan konsumen juga meningkat, tidak hanya sehat dan berkualitas tetapi juga halal sesuai syariat Islam. Hal ini dimungkinkan karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Pedoman Berproduksi

Dalam UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 21 ditegaskan kewajiban bagi para produsen makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika untuk mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Untuk melaksanakan UU itu, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, Majelis Ulama Indonesia (LP-POM MUI) telah mengeluarkan "Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikasi Halal". Dalam pedoman itu disyaratkan bahwa sebelum produsen mengajukan sertifikasi halal bagi produknya, yang bersangkutan diwajibkan dulu mempersiapkan

sistem mutu (quality system) termasuk pedoman mutu (quality mutual) dan prosedur pelaksanaan baku (standard operating procedure). Pedoman ini sifatnya umum dan berlaku bagi produsen yang melakukan usaha pengolahan makanan, minuman, usaha restoran atau jasa boga dan tempat atau rumah potong hewan (RPH). Pedoman ini hanya mencakup hal-hal yang berhubungan secara langsung dengan cara berproduksi yang halal dan tidak mencakup secara rinci tentang bagaimana cara berproduksi yang baik (Good Manufacturing Proctices, GMP). Dengan sistem mutu ini diharapkan ada jaminan dari produsen untuk selalu memproduksi produk-produk halal.

Pedoman umum cara berproduksi yang halal ini mencakup antara lain : (1) fasilitas fisik berupa gedung, termasuk tata ruangnya, (2) fasilitas peralatan berproduksi, penyimpanan, pengangkutan, distribusi, penjualan dan penyajian, (3) cara berproduksi dan (4) personalia.

Fasilitas fisik utamanya bangunan hendaknya terletak di tempat yang bebas kotoran dan najis serta cukup jauh dari kemungkinan terkontaminasi oleh bahan-bahan haram. Bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan produsen untuk membersihkannya dari kotoran dan najis. Bangunan juga harus dilengkapi fasilitas sanitasi dan fasilitas penyediaan air bersih dan suci yang cukup serta fasilitas pembuangan limbah. Tata-ruang dibuat sedemikian rupa sehingga mencegah pencemaran produk dari kotoran dan najis serta bahan tidak halal lainnya. Peralatan berproduksi meliputi peralatan penyimpanan, prosesing, transportasi dan pengelolaan hendaknya hanya digunakan untuk bahan dan jenis hewan yang halal. Peralatan berproduksi harus mudah dibersihkan dari kotoran dan najis sesuai dengan persyaratan kesehatan.

Pemotongan Unggas

Dengan pertimbangan menjaga kesehatan daging unggas untuk konsumsi masyarakat, maka pada tanggal 27 April 1994 Menteri Pertanian telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 306/Kpts/TN.330/4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging Unggas serta Hasil Ikutannya. Yang dimaksud dengan

pemotongan unggas dalam SK Mentan tersebut adalah kegiatan untuk menghasilkan daging unggas yang terdiri pemeriksaan ante mortem (sebelum mati), penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem (setelah mati). Adapun yang dimaksud unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, bebek, entok, burung dara, kalkuk, angsa, burung puyuh dan belibis, sedangkan hasil ikutan adalah hasil samping dari pemotongan unggas yang berupa darah, bulu, tulang dan kuku.

Dalam pasal 2 SK Mentan tersebut ditegaskan bahwa pemotongan unggas harus dilakukan di Rumah Potong Unggas (RPU) atau Tempat Pemotongan Unggas (TPU), kecuali untuk keperluan keluarga, upacara adat dan keagamaan. SK Mentan tersebut juga menetapkan bahwa setiap unggas yang akan dipotong di RPU atau TPU harus memenuhi syarat antara lain (1) berasal dari perusahaan peternakan dan atau daerah yang tidak ditutup karena berjangkit penyakit unggas menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Asal Unggas dari instansi yang berwenang, (2) dilakukan pemeriksaan ante mortem oleh petugas pemeriksa, (3) pemotongan unggas dilakukan di bawah pengawasan dan menurut petunjuk-petunjuk petugas pemeriksa dan (4) penyembelihan dilakukan menurut tatacara agama Islam.

Selanjutnya dalam Bab III peraturan tersebut yang berkaitan dengan tata cara penanganan daging unggas, ditekankan bahwa dalam penanganan daging unggas harus dicegah kontak antara daging unggas tersebut dengan lantai dan dijaga agar daging tidak terkontaminasi, sedangkan untuk daging unggas yang diedarkan tidak boleh ditambah bahan atau zat yang dapat mengubah warna aslinya.

Dalam Bab V diatur bahwa petugas pemotongan dan penanganan daging unggas diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan: (1) sehat, khususnya tidak mempunyai luka, tidak berpenyakit kulit dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Dokter yang diperbaharui setiap tahun, (2) memelihara kebersihan badan dan tidak merokok selama melakukan tugas dan (3) memelihara hygiene tempat bekerja dan mencegah adanya kontaminasi terhadap daging, karkas unggas dan atau bagian-bagian daging unggas lainnya yang bermanfaat.

Pemotongan Halal

Ada lima dasar yang menjadi pokok haramnya daging binatang yaitu nash dari Al-Qur'an dan Hadits, karena disuruh membunuhnya, karena dilarang membunuhnya, karena keji (kotor) dan karena memberi mudharat. QS Al-Maidah 3 menerangkan bahwa binatang yang halal menjadi tidak halal dimakan melainkan apabila disembelih menurut aturan yang telah disyariatkan oleh agama, kecuali ikan dan belalang yang keduanya halal dimakan dengan tanpa disembelih. Lebih lanjut dasar hukum pemotongan ternak menurut syariat Islam terdapat antara lain pada QS Al-Baqarah 173, QS Al-An'am 118, 121 dan 145.

Pemotongan (penyembelihan) binatang ternak, termasuk unggas, secara halal harus memenuhi syarat-syarat standar tertentu, misalnya penyembelihan harus dilakukan oleh orang Islam yang dewasa, berakal dan mengetahui rukun dan sunnahnya menyembelih. Binatang yang disembelih harus binatang yang halal dimakan menurut Islam dan masih hidup. Dengan didahului bacaan basmallah, penyembelihan dilakukan dengan cara memutuskan saluran makanan (mari'), saluran nafas (hulqum) dan memutus dua urat nadi (wadajain), dengan satu kali sembelih, mempergunakan alat yang tajam sehingga tidak terkesan menyiksa. Penyembelihan yang didahului dengan teknik pemingsanan (stunning) boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat yang islami dan halal. Dalam melaksanakan pemotongan ternak diusahakan menjaga kebersihan, sehingga hasil pemotongan bersih, sehat dan tetap halal. ***

(Suara Muhammadiyah No. 19/81/1996)

5.4.

PROTEIN HEWANI BAGI TUBUH MANUSIA

Pangan merupakan salah satu faktor yang mendasari kehidupan dan kesejahteraan umat manusia. Status gizi masyarakat mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Keadaan kurang gizi menyebabkan fisik dan mental anak-anak terganggu, kecerdasan menurun, produktivitas kerja rendah, pendapatan keluarga rendah dan tingkat kematian yang tinggi. Apabila diperhitungkan penurunan vitalitas hidup manusia, kerugian yang disebabkan kurang gizi akan lebih besar. Hal ini akan sangat merugikan kehidupan bangsa dan menghambat laju pembangunan. Kecukupan gizi seseorang biasanya diukur dengan tingkat konsumsi kalori dan zat gizi terutama protein untuk makanannya. Energi atau kalori dipenuhi sebagian besar oleh biji-bijian dan lemak hewan sedangkan protein menurut asalnya dapat bersifat nabati (biji-bijian) dan hewani (ikan dan hasil ternak).

Gizi yang baik bagi seseorang adalah gizi yang berimbang sesuai dengan kebutuhannya seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral dalam jumlah cukup. Ini berarti bahwa gizi seseorang tidak boleh ditekankan pada salah satu sumber gizi saja dan biasanya setelah kebutuhan kalori terpenuhi, konsumsi protein hewani mulai ditambah untuk meningkatkan kualitas pangan.

Gizi adalah salah satu faktor penting yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat. Gizi yang baik akan menjamin kesehatan dengan sempurna dan kebahagiaan hidup. Setiap orang perlu mengetahui dan melakukan kebiasaan-kebiasaan makan untuk memperoleh keadaan gizi yang baik. Pemecahan masalah gizi sama penting dan mendesaknya dengan pemecahan masalah peledakan pertumbuhan penduduk dan terbatasnya persediaan produksi bahan makanan. Sebab orang makan bukan sekedar mengejar kekenyangan, melainkan harus

mempertimbangkan manfaat makanan itu sendiri terhadap tubuh. Dalam kaitan ini perbedaan persepsi dalam memilih, mengolah dan menghidangkan makanan telah menimbulkan berbagai dampak pada status gizi masyarakat.

Masalah umum yang dihadapi negara-negara sedang berkembang adalah usaha untuk mengatasi masalah kurang gizi (under nutrition). Di Indonesia misalnya terdapat 33% diantara anak balita menderita gangguan gizi dalam berbagai tingkat dan 3% diantaranya menderita kelainan gizi berat (Thahir, 1989). Para balita yang berada ada status gizi di bawah normal ini merupakan golongan yang mempunyai resiko tinggi (high risk group) terhadap berbagai penyakit dan bila tidak mendapat perhatian yang sempurna akan menimbulkan kematian.

Dalam kaitannya dengan masalah pangan dan gizi di Indonesia, ditemukan 4 masalah utama yang perlu mendapat perhatian yaitu kurang kalori protein (KKP), kekurangan vitamin A, Anemia karena kekurangan zat besi dan Gondok Endemik karena kekurangan Yodium. Dalam kaitan ini, untuk meningkatkan dan memperbaiki gizi masyarakat Indonesia secara merata pemerintah telah melakukan usaha-usaha antara lain penyuluhan kesadaran gizi masyarakat, pelayanan gizi dan peningkatan pemanfaatan tanaman pekarangan dan peningkatan upaya penganeekaragaman pola konsumsi pangan guna mengurangi ketergantungan pada beras sekaligus meningkatkan mutu pangan dan gizi masyarakat.

Keunggulan Protein Hewani

Salah satu usaha untuk menanggulangi kekurangan gizi di Indonesia adalah mengkonsumsi secara cukup bahan pangan hewani yaitu ikan dan hasil ternak seperti daging, susu dan telur. Pangan asal hewani mengandung protein dengan kadar yang relatif tinggi dan disamping itu mempunyai kualitas protein yang prima. Protein tersusun atas asam amino yang merupakan satuan struktural dasar protein. Susunan asam amino dalam protein ada yang bersifat esensial misalnya methionin, lisin, isoleusin histidin, arginin dan non esensial seperti alanin, sistin, serin. Asam amino esensial bila manusia atau hewan tidak dapat menyusun sama sekali atau disusun dalam jumlah yang tidak

mencukupi di dalam saluran pencernaan, maka asam amino tersebut harus didatangkan dari luar. Oleh karena itu agar kebutuhan asam amino dalam pangan tercukupi secara berimbang, pangan sumber protein sebaiknya berasal dari tumbuhan maupun hewan.

Menurut Prawirokusumo (1986), ada beberapa hal yang perlu dicatat perihal keunggulan protein hewani atas protein nabati atau beberapa hal yang menunjukkan perlunya substitusi protein nabati dengan protein hewani agar terjadi keseimbangan nutrisi yaitu : (1) Bahwa susunan asam amino protein hewani sangat mirip dengan susunan asam amino protein tubuh manusia, (2) Kebanyakan protein hewani mengandung asam amino lisin dan methionine tinggi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan dan perawatan. Protein nabati pada umumnya kekurangan asam amino lisin, (3) Lebih mudah diserap (tinggi daya cernanya) sehingga sangat baik untuk anak-anak yang sedang tumbuh, (4) Terutama susu, kaya akan mineral Ca yang diperlukan untuk pertumbuhan tulang, (5) Kaya akan vitamin B kompleks terutama vitamin B-2 dan vitamin B-12, (6) Tidak mengandung senyawa anti biogenik seperti protein nabati yang dapat mengganggu penyerapan asam amino dan mineral. Sebagai contoh zat antitripsin dan anti fitat, (7) Tingginya kualitas protein sehingga bila diberikan kepada anak-anak menjelang umur 2-3 tahun akan dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasannya.

Ciri khas protein hewani ialah kelangkaan asam-asam amino yang terkandung di dalamnya dan tingginya nilai hayati dari protein tersebut. Nilai hayati mencerminkan berapa banyak zat nitrogen (N) dari suatu protein dalam pangan yang dimanfaatkan oleh tubuh untuk pembuatan protein tubuh dan bagian-bagian lainnya. Jadi makin tinggi nilai hayati protein dari suatu bahan pangan makin banyak pula zat nitrogen dari protein tersebut yang dapat dimanfaatkan untuk pembentukan protein tubuh. Dari semua bahan pangan, nilai hayati yang tertinggi dimiliki oleh telur (94-100). Hampir semua pangan yang berasal dari ternak mempunyai nilai hayati di atas 80.

Konsumsi Protein Hewani

Menurut Neraca Bahan Makanan Indonesia 1989,

ketersediaan kalori dan protein per kapita pada tahun 1980-1989 adalah sekitar 2500-2600 kalori dan 52-58 g protein. Sumber kalori dan protein sampai saat ini masih didominasi oleh beras. Sekitar 60-67% ketersediaan kalori dan protein berasal dari beras dan sekitar 90% kalori dan protein berasal dari bahan makanan nabati.

Dipandang dari sudut penyediaan tanah, biaya produksi, pendapatan petani dan dari sudut keseimbangan gizi, pola makanan yang bertumpu sebagian besar kepada beras tidak menguntungkan dan dalam jangka panjang akan mengurangi produktivitas dan kecerdasan bangsa. Dari sudut pemenuhan energi sebenarnya untuk rata-rata penduduk Indonesia sudah memadai, hanya sumber protein yang kurang beragam.

Di negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Singapura konsumsi protein pada tahun 1986 sudah di atas 65 g per kapita per hari dengan perincian 50-60 g protein berasal dari tumbuhan dan 15-20 g berasal dari hewan (Prawirokusumo, 1986). Ini berarti bahwa protein hewani sudah berjumlah di atas 30% total konsumsi protein. Protein tumbuhan yang berasal dari sayuran sekitar 3-5 g per kapita per hari. Selanjutnya disebutkan bahwa di negara Eropa Timur dan Rusia konsumsi total protein sudah mencapai 100 g per kapita per hari dengan perincian 60% berasal dari tumbuhan dan 40% dari hewan. Konsumsi protein di negara Amerika Utara dan Eropa Barat juga sudah sekitar 100 g per kapita per hari dengan perincian maksimum 25% berupa protein tumbuhan dan 75-80% berupa protein hewani.

Di negara-negara tersebut sudah dapat dihitung pula komponen-komponen masing-masing yang menyusun protein nabati dan hewani, misalnya protein hewani yang berasal dari air susu, ikan, telur dan daging, sedangkan protein nabati berasal dari padi-padian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sayur-sayuran termasuk buah-buahan. Dengan demikian baik permintaan pangan dalam negeri maupun kebutuhan import-eksport dapat direncanakan.

Di Indonesia konsumsi protein 89% masih berasal dari protein nabati, dimana beras sendiri berperan 69% dalam protein nabati dan 61% dalam protein keseluruhan. Protein hewani hanya berperan 11% (Prawirokusumo, 1991). Dipandang dari ilmu gizi, maka pola makan yang demikian kurang berimbang sehingga

masih diperlukan tambahan protein hewani menjadi paling tidak 30% dari konsumsi protein. Bila ditinjau dari rekomendasi Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1988, kebutuhan rata-rata orang Indonesia akan protein hewani adalah 55 g per kapita per hari dengan perincian 44 g protein nabati dan 11 g protein hewani yang terbagi 6,5 g protein asal ikan dan 4,5 g protein asal ternak (daging 7,6 kg, telur 3,5 kg dan susu 4,6 kg per kapita per tahun). Standar protein hewani ini merupakan perbaikan dari rekomendasi Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1983 bahwa kebutuhan protein hewani orang Indonesia 55 g per kapita per hari dengan perincian 45 g protein nabati dan 10 g protein hewani yang terbagi 6 g berasal dari ikan dan 4 g berasal dari ternak (daging 6 kg, telur 4 kg dan susu 4 kg per kapita per tahun).

Bila dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, konsumsi protein hewani di Indonesia dapat dikatakan masih jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Pada tahun 1987 konsumsi protein hewani di Malaysia sudah mencapai 13,39 g hari, Philipina 6,56 g, Thailand 8,04 g, Singapura 22,69 dan Brunei 23,67 g per kapita per hari (Statistik Peternakan, 1991).

Protein Dalam Tubuh

Protein dari berbagai sumber tidaklah sama. Persamaannya sebenarnya ada, sebab semua protein terdiri dan dapat dipecah ke dalam asam-asam amino. Perbedaannya adalah jumlah, macam dan cara tersusunnya asam amino ini. Protein manusia terdiri lebih dari 23 asam-asam amino. Kebanyakan asam amino ini dapat saling membentuk, akan tetapi delapan buah diantaranya, meskipun dapat digunakan untuk menyusun kelima belas asam-asam amino lainnya, tidak dapat dibuat dari asam-asam amino ini. Jadi, harus dalam bentuk asli terdapat di dalam bahan makanan.

Delapan asam amino ini dinamakan asam amino esensial, dan suatu protein yang mengandung semua delapan asam amino esensial ini dalam jumlah yang cukup disebut protein lengkap atau protein sempurna. Bila jumlah masing-masing mendekati kadar dalam protein manusia, maka disebut protein bernilai tinggi. Protein tidak lengkap adalah yang tidak mengandung satu atau lebih asam-amino esensial yaitu lysine, leucine, isoleucine, threonine,

methionine, valine, phenylalanine, dan tryptophane.

Hal ini menyebabkan bahwa manusia, agar dapat menyusun protein tubuhnya, harus memilih bahan-bahan makanan yang menyediakan kedelapan asam-asam amino esensial ini, juga dalam jumlah yang diperlukan oleh tubuh manusia. Protein hewani (susu, daging, telur, dan ikan) adalah lengkap dan berkualitas tinggi dan baik sekali sebagai sumber protein tubuh manusia. Protein nabati sering tidak lengkap dan bernilai tinggi, karena rendah dalam satu atau dua asam amino esensial, maka dengan suatu kombinasi yang saling melengkapi dapat juga dicapai maksud penyusunan protein dalam tubuh dari protein nabati.

Protein termasuk dalam golongan zat pembangun, zat pengatur, dan juga bahan bakar tubuh. Tubuh manusia tidak menimbun protein untuk cadangan, kelebihan protein akan dibakar menjadi energi dan bila keperluan energi telah tercukupi oleh karbohidrat dan lemak, maka protein ini diubah menjadi jaringan lemak.

Tubuh manusia memerlukan sejumlah minimum protein setiap hari tergantung usia, aktivitas dan kesehatan tubuh. Jumlah ini diperlukan guna menyusun jaringan baru guna menggantikan sejumlah jaringan yang telah usang dan mati serta untuk menyusun enzim dan hormon yang diperlukan sehari-hari. Karena tubuh manusia tidak dapat menimbun protein cadangan maka jumlah minimum protein ini harus selalu ada di dalam makanan sehari-hari. Bila tidak tersedia dalam makanan maka akan menggunakan jaringan tubuh sendiri yang biasanya dimulai dengan pemecahan jaringan otot.

Sumber Protein Hewani

Konsumsi masyarakat terhadap hasil ternak dari tahun ke tahun terus meningkat yang memberi indikasi bahwa kesadaran gizi dan pendapatan per kapita telah meningkat pula. Sumber protein hewani asal ternak yang terpenting yaitu daging, telur dan susu.

Daging

Daging dan bahan makanan yang berasal dari daging

merupakan sumber protein hewani berkualitas tinggi, karena daging mengandung protein dan asam-asam amino esensial yang diperlukan untuk kesehatan fisik, perkembangan mental dan intelektual. Komposisi kimiawi daging ternak berbeda tergantung pada spesies, bangsa dan bagian dari karkas serta cara pemberian pakan. Berdasarkan analisa daging dari beberapa spesies ternak dapat diketahui kandungan zat makanan yang terkandung di dalamnya seperti tercantum dalam Tabel 5.4.1.

Tabel 5.4.1.
Komposisi kadar air, protein, lemak dan kalori beberapa

| No. Jenis Daging | Air (%) | Protein (%) | Lemak (%) | Kalori |
|------------------|---------|-------------|-----------|--------|
| 1. Ikan bandeng | 74,0 | 20,0 | 4,8 | 129 |
| 2. Ikan mas | 80,0 | 16,0 | 2,0 | 86 |
| 3. Udang | 75,9 | 21,0 | 0,2 | 91 |
| 4. Ayam | 55,9 | 18,2 | 25,0 | 302 |
| 5. Bebek | 54,3 | 16,0 | 28,6 | 326 |
| 6. Kambing | 70,3 | 16,6 | 9,2 | 154 |
| 7. Kerbau | 84,0 | 18,7 | 0,5 | 84 |
| 8. Sapi | 66,0 | 18,8 | 14,0 | 207 |
| 9. Babi | 42,0 | 11,9 | 45,0 | 457 |
| 10. Bekicot | 71,5 | 17,5 | 1,2 | 97 |

Sumber : Muhammad Saleh, 1985

Daging selain mengandung lemak juga kaya akan zat besi, fosfor, belerang, kalium dan natrium. Daging miskin zat kapur karena kalsium hanya terdapat pada tulang yang tidak dikonsumsi oleh manusia. daging mempunyai kelebihan jika dibandingkan dengan bahan makanan lain karena mengandung vitamin B kompleks yang tinggi. Nilai vitamin ini sering menurun atau berkurang akibat cara memasak yang salah karena vitamin B umumnya tidak tahan terhadap pemanasan. Vitamin lain yang terdapat dalam daging adalah A, D, E dan K.

Telur

Telur mengandung protein sekitar 15%. Jumlah dan susunan asam-asam amino penyusun protein pada telur cukup baik sehingga protein telur hampir seluruhnya dapat digunakan untuk pertumbuhan maupun pengganti sel-sel tubuh yang rusak. Telur mengandung lemak yang berupa trigliserida, phospholipida dan kolesterol. Trigliserida dan phospholipida berfungsi menyediakan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas sehari-hari, sedangkan kolesterol digunakan untuk membentuk garam-garam empedu yang diperlukan bagi pencernaan lemak yang berasal dari makanan dan diperlukan juga sebagai keomponen pembentuk hormon seksual seperti testoteron dan hormon adrenalin. Selain itu telur juga mengandung vitamin dan mineral yang sangat penting untuk mengaktifkan proses-proses yang diperlukan sebagai motor kehidupan dalam tubuh, misalnya pembakaran zat-zat gizi untuk aktivitas tubuh.

Komposisi air, protein, lemak, abu dan kalori pada telur beberapa unggas disajikan pada Tabel 5.4.2

Tabel 5.4.2.

Komposisi air, protein, lemak, abu dan kalori rata-rata

| No. Jenis Unggas | Air (%) | Protein (%) | Lemak (%) | Abu (%) | Kalori/Lbs (kal) |
|-------------------|---------|-------------|-----------|---------|------------------|
| 1. Itik | | | | | |
| - Putih Telur | 87,00 | 11,10 | 0,03 | 0,80 | 203 |
| - Kuning Telur | 45,80 | 16,80 | 36,20 | 1,20 | 1.683 |
| - Total Edible *) | 70,50 | 13,30 | 14,50 | 1,00 | 835 |
| 2. Ayam | | | | | |
| - Putih Telur | 86,20 | 12,30 | 0,20 | 0,60 | 231 |
| - Kuning Telur | 49,50 | 15,70 | 33,30 | 1,10 | 1.643 |
| - Total Edible | 73,50 | 13,00 | 10,50 | 1,00 | 672 |
| 3. Angsa | | | | | |
| - Putih Telur | 86,30 | 11,60 | 0,02 | 0,80 | 211 |
| - Kuning Telur | 44,10 | 17,30 | 36,20 | 1,30 | 1.793 |
| - Total Edible | 69,50 | 13,80 | 14,40 | 1,00 | 829 |

Sumber : Grow, 1972

*) Edible = dapat dimakan

Telur dibutuhkan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Jumlah telur yang harus dimakan setiap hari tergantung kepada umur dan jenis kegiatan orang tersebut. Misalnya, anak berumur 2 sampai 10 tahun membutuhkan 1 butir telur dan jumlah itu naik menjadi 2 butir pada saat menjadi remaja. Orang pada umur yang sama dengan kegiatan yang berbeda akan membutuhkan telur dalam jumlah yang berbeda. Sebagai contoh, orang tanpa kegiatan membutuhkan 1 butir telur, sedangkan para pemikir dan pekerja berat baik otak maupun fisiknya dapat ditambah 1 butir telur lagi dari jumlah yang dibutuhkan.

Susu

Secara kimiawi yang dimaksud susu adalah hasil pemerahan sapi atau hewan menyusui lainnya yang dapat dimakan atau digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat serta tidak dikurangi komponen-komponennya atau ditambah bahan-bahan lain. Hewan ternak yang susunya dapat digunakan sebagai bahan makanan adalah sapi perah, kerbau perah, unta, kambing perah dan domba.

Tabel 5.4.3.

Komposisi air susu manusia dan beberapa spesies ternak.

| No. Jenis Susu (%) | Air (%) | Lemak (%) | Protein (%) | Laktose (%) | Abu (%) |
|--------------------|---------|-----------|-------------|-------------|---------|
| 1. Manusia | 87,60 | 3,80 | 1,20 | 7,00 | 0,21 |
| 2. Sapi | 87,10 | 3,90 | 3,40 | 4,80 | 0,72 |
| 3. Kambing | 87,81 | 4,09 | 3,71 | 4,20 | 0,79 |
| 4. Kerbau | 82,44 | 7,40 | 4,74 | 4,64 | 0,78 |
| 5. Domba | 80,60 | 8,28 | 5,44 | 4,78 | 0,90 |
| 6. Kelinci | 68,50 | 13,60 | 12,95 | 2,40 | 2,55 |
| 7. Kuda | 89,86 | 8,28 | 2,00 | 6,14 | 0,41 |

Sumber : Buckle, et. al., 1987

Susu merupakan bahan biologik. Susu yang baik adalah

apabila mengandung jumlah bakteri sedikit, tidak mengandung spora mikroba patogen, bersih dari debu dan kotoran lain, mempunyai cita rasa (flavor) yang baik dan tidak dipalsukan.

Komponen susu yang terpenting adalah protein dan lemak. Kandungan protein susu berkisar 3-5% sedangkan kandungan lemak berkisar 3-8%. Komposisi kandungan zat makanan berbagai susu disajikan pada Tabel 5.4.3.

Penutup

Di dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya peranan gizi yang cukup adalah sangat penting untuk kekuatan fisik dan kecerdasan berfikir didalam meningkatkan prestasi kerja dan ketangguhan bangsa. Setelah bangsa Indonesia dapat mencapai swasembada beras maka hal ini harus diikuti oleh ketentuan protein hewani terutama protein hewani asal ternak berupa daging, susu dan telur. Peranan pangan asal ternak ini sangat besar dalam perbaikan gizi masyarakat Indonesia karena kualitasnya yang sangat tinggi dengan kandungan protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh pertumbuhan badan terutama bagi anak-anak, ibu hamil dan untuk pemikir dan pekerja keras. Disamping itu protein hewani asal ternak bermutu tinggi karena susunan asam aminonya yang lengkap.

Oleh karena untuk lepas landas menuju masyarakat yang produktif diperlukan kerja keras, kecerdasan dan kreativitas, maka konsumsi pangan terutama protein hewani masyarakat Indonesia harus disesuaikan dengan persyaratan manusia yang diperlukan.***

(Ayam Telur No. 81 Nopember 1992)

5.5.

LEMAK IKAN MENCEGAH JANTUNG KORONER

Departemen Kesehatan dalam sebuah publikasinya menyatakan bahwa pada masa mendatang komoditi perikanan termasuk ikan akan menempati posisi yang penting. Hal ini didukung oleh kenyataan bahwa daging ikan kaya akan zat gizi yang sangat diperlukan tubuh sehingga dapat menunjang proses pembentukan manusia Indonesia yang berkualitas, cerdas, kreatif dan produktif sesuai sasaran PJP Kedua. Selain itu lemak yang terdapat dalam daging ikan, menurut penelitian, dapat mencegah dan mengurangi resiko akibat penyakit jantung. Ini karena lemak ikan dapat mempertahankan integritas pembuluh darah tubuh manusia sehingga dapat mencegah terjadinya penebalan pembuluh darah arteri.

Artherosklerosis

Seiring dengan kemajuan sosial ekonomi terjadi perubahan pola konsumsi pangan yang cenderung berlebihan yang justru merugikan kesehatan. Hal ini antara lain tampak dengan adanya kecenderungan prevalensi (jumlah penderita) penyakit jantung yang semakin meningkat. Penyakit jantung ini memang disebabkan oleh banyak hal seperti kenaikan kadar kolesterol darah, konsumsi lemak yang berlebihan, minuman alkohol, banyak merokok dan sebagainya. Namun dari beberapa faktor tersebut tampaknya yang banyak terjadi dan banyak ditakuti adalah oleh sebab kadar kolesterol darah yang tinggi. Dalam jumlah tertentu, sebenarnya kolesterol sangat diperlukan oleh tubuh. Untuk mengatur normal fungsi tubuh, manusia dewasa rata-rata membutuhkan 1.100 mg kolesterol per hari. Dari kebutuhan ini 700-800 mg dicukupi dari biosintesa (tubuh sendiri) dan sisanya 300-400 mg dicukupi dari kolesterol pangan.

Konsumsi makanan yang mengandung lemak dan kolesterol berlebihan dipandang sebagai salah satu penyebab meningkatnya kolesterol sampai melebihi kebutuhan dan dikaitkan dengan risiko terjadinya penyakit jantung. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dapat meningkatkan terjadinya penebalan dan pengerasan pembuluh darah arteri yang disebut arteriosklerosis.

Proses terjadinya arteriosklerosis dapat dipercepat karena seseorang memiliki faktor risiko baik faktor alami maupun faktor lingkungan (kebiasaan). Faktor risiko alami ini bersifat tidak dapat dipengaruhi seperti umur, jenis kelamin dan genetik, sedangkan faktor lingkungan bersifat dapat dipengaruhi seperti kebiasaan makan berlebihan, merokok dan minum alkohol.

Keunggulan Lemak Ikan

Meski sudah lebih dari 30 tahun, kaitan antara kolesterol pangan dan insiden arteriosklerosis masih menjadi debat kontroversial. Namun berdasarkan penelitian dinyatakan bahwa insiden tersebut dapat dikurangi dengan mengurangi konsumsi kolesterol dan menambah konsumsi asam lemak tak jenuh berikatan rangkap lebih dari satu.

Lemak atau minyak terdiri dari asam-asam lemak yang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu asam lemak jenuh (ALJ) atau saturated fatty acids dan asam lemak tak jenuh (ALTJ) atau unsaturated fatty acids. Lemak yang padat lebih banyak mengandung ALJ dengan rumus molekul $C_nH_{2n}O_2$ misalnya asam palmitat, stearat dan butirat, sedangkan lemak yang cair (minyak) banyak mengandung ALTJ yang banyak mengandung ikatan rangkap dengan rumus molekul $C_nH_{2n-2}O_2$, $C_nH_{2n-4}O_2$, $C_nH_{2n-6}O_2$ dan seterusnya. Diantara ALTJ terdapat jenis-jenis yang tidak dapat dibentuk di dalam tubuh manusia yang disebut asam lemak esensial, seperti asam lemak linoleat, linolenat, dan arakidonat. ALJ berantai panjang mendorong terjadinya proses arteriosklerosis dan sebaliknya, ALTJ berantai panjang (polyunsaturated fatty acids) mencegah terjadinya arteriosklerosis.

Dilihat dari komposisi lemaknya, lemak ikan ikan mempunyai keunggulan khusus yaitu banyak mengandung ALTJ ganda (mempunyai banyak ikatan rangkap), beberapa diantaranya

esensial bagi tubuh manusia. Sebab itu, mengkonsumsi ikan yang banyak mengandung ALTJ dapat menghambat proses terjadinya arteriosklerosis. Arteriosklerosis inilah yang diduga menjadi merupakan sebab utama terjadinya penyakit jantung koroner.

Hasil Penelitian

Secara konkrit, penelitian tentang pengaruh lemak ikan terhadap kesehatan jantung pernah dilakukan pada bangsa Eskimo yang terkenal banyak mengkonsumsi daging ikan (sampai 300 - 400 gram per hari). Hasilnya menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung koronernya sangat rendah karena adanya asam lemak yang disebut asam lemak Omega-3 dalam plasma mereka. Asam lemak tersebut kemudian disebut dengan asam eikosapentaenoat (EPA) dan asam dekosahenoat (DHA). Akhiran enoat pada nama-nama tersebut menunjukkan ALTJ. Di Indonesia ikan laut yang banyak mengandung EPA dan DHA pada kadar cukup tinggi terdapat pada ikan lemuru yang banyak terdapat di perairan Banyuwangi. Penelitian tentang pengaruh diet lemak ikan lemuru terhadap kadar lemak darah agregasi trombosit pada orang sehat pernah dilakukan di RS Jantung Harapan Kita di Jakarta. Lemak (minyak) ikan yang berasal dari ekstrak ikan segar diberikan sebanyak 25 ml per hari selama tiga minggu berturut-turut. Ternyata didapatkan penurunan kadar trigliserida (tiga asam lemak) dan LDL (low density lipoprotein) dan peningkatan HDL (high density lipoprotein) secara nyata. Kolesterol LDL yang tinggi sangat berperan terhadap munculnya arteriosklerosis, sedangkan LDL yang rendah dan HDL yang tinggi sangat baik bagi kesehatan jantung. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mengkonsumsi daging ikan yang banyak mengandung asam lemak Omega-3 (EPA dan DHA) dapat menghambat proses terjadinya arteriosklerosis yang pada akhirnya mencegah penyakit jantung koroner. Jenis ikan yang banyak mengandung asam lemak Omega-3 tersebut antara lain teri 1,4%, tongkol 1,5%, tengiri 2,6%, tawes 2,5% dan kembung 2,2%. ***

(Suara Muhammadiyah No. 01/81/1996)

5.6.

BENARKAH TELUR PENYEBAB PENYAKIT JANTUNG ?

Seiring dengan keberhasilan pembangunan, penyediaan bahan pangan hewani telah meningkat baik pada daging, susu maupun telur. Keadaan ini sangat menggembirakan baik ditinjau dari segi ekonomi maupun segi gizi. Dari segi ekonomi berarti terdapat peningkatan pendapatan dan taraf hidup masyarakat dan dari segi gizi berarti kesadaran akan pentingnya pangan bergizi bagi masyarakat telah meningkat pula.

Namun demikian pada akhir-akhir ini terdapat ketakutan akan kolesterol yang memang hanya terdapat dalam pangan asal hewan (terutama telur) akan mempengaruhi konsumsi produk-produk hewani. Sebenarnya ketakutan ini tidaklah beralasan karena konsumsi kolesterol di Indonesia masih sangat rendah. Sekarang, benarkah kolesterol telur dapat menyebabkan penyakit jantung ?

Kandungan gizi telur.

Dewasa ini telur bukan lagi merupakan bahan pangan yang asing bagi masyarakat Indonesia. Telur tidak hanya sebagai hidangan yang murah dan sedia setiap saat, tetapi juga merupakan sumber protein hewani yang padat gizi, nikmat dan merakyat. Dikatakan demikian lantaran telur dapat dikonsumsi oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Bahkan orang Amerika menyebutnya "wonderful food", sementara yang lain menamakan "kapsul gizi". Mengapa ?, karena telur adalah sumber protein, sumber asam lemak dan sumber mineral. Sebagai makanan yang esensial, telur yang mempunyai berat antara 45 - 70 gram mempunyai kadar kalori 88 (396 Joule) dan berbagai zat makanan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia (Tabel 5.6.1).

Dari Tabel 5.6.1 tersebut menunjukkan bahwa sebutir telur apabila dikonsumsi seseorang setiap harinya maka kebutuhan akan protein sudah terpenuhi 10%, vitamin A 13%, vitamin B 10%, vitamin D 24% dan ditambah kandungan mineral yang lain.

Tabel 5.6.1.
Kandungan gizi sebutir (50 gram) telur.

| Zat gizi | Kadar | Zat gizi | Kadar |
|-----------------------|--------|-------------------|--------|
| Kalori (Kkal) | 86,50 | Asam Folat (mcg) | 35,00 |
| Protein (g) | 6,50 | Inositol (mg) | 16,50 |
| Lemak (g) | 6,50 | Vitamin B12 (mcg) | 0,90 |
| Karbohidrat (g) | 0,05 | Biotin (mcg) | 11,40 |
| Kolesterol (mg) | 275,00 | Mineral : | |
| Vitamin A (mcg) aktif | 330,00 | - Kalsium (mg) | 30,00 |
| Vitamin D (mcg) | 0,65 | - Phosphor (mg) | 120,00 |
| Vitamin E (mcg) | 1,00 | - Magnesium (mg) | 6,00 |
| Vitamin B1 (mg) | 0,20 | - Besi (mg) | 1,10 |
| Riboflavin (mg) | 0,15 | - Kalium (mg) | 74,50 |
| Asam Nicotinat (mg) | 0,05 | - Natrium (mg) | 88,50 |
| Pyridoxin (mg) | 0,13 | - Zinc (mg) | 0,65 |

Sumber : Ditjenak (1992).

Suatu percobaan telah membuktikan bahwa nilai penggunaan untuk telur adalah 100%, sementara untuk daging ayam 80% dan susu 75%. Hal ini menunjukkan susunan dan jumlah asam amino pada telur sangat baik sehingga protein telur itu hampir seluruhnya dapat digunakan untuk pertumbuhan maupun pengganti sel-sel yang rusak. Oleh karena telur dianggap paling komplis dan seimbang susunan asam aminonya maka selalu dipakai perbandingan kandungan asam amino suatu bahan sumber protein dengan telur disebut nilai kimia (chemical score), indeks asam amino, nilai biologi dan daya cernanya.

Telur memiliki kandungan lemak seperti trigliserida (lemak netral), phospholipida dan kolesterol. Trigliserida dan phospholipida pada dasarnya berfungsi menyediakan energi yang diperlukan tubuh sehari-hari sedangkan kolesterol digunakan

untuk membentuk garam-garam empedu yang diperlukan untuk pencernaan lemak yang berasal dari pangan dan diperlukan sebagai komponen pembentukan hormon seksual. Bentuk lemak dalam telur sudah dalam keadaan emulsi sehingga mudah dicerna. Ini merupakan faktor penting terutama bagi anak-anak yang sedang tumbuh serta orang tua. Telur mengandung hampir semua vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh. Vitamin dan mineral adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit tetapi sangat penting untuk mengaktifkan proses-proses yang diperlukan sebagai motor kehidupan dalam tubuh, misalnya proses pembakaran zat-zat gizi untuk kegiatan tubuh.

Kandungan utama dari mineral yang lengkap pada telur tidak dapat disamai oleh bahan pangan tunggal lainnya kecuali susu. Kandungan kalsium (Ca) misalnya, mineral ini sangat penting untuk pembentukan tulang, gigi dan lainnya. Telur mengandung Ca dalam jumlah yang cukup banyak, demikian pula dengan zat besi (Fe) yang dalam bentuk yang langsung dapat digunakan oleh tubuh untuk membentuk haemoglobin (Hb) darah yang penting untuk pertukaran oksigen (O₂) tubuh.

Manfaat telur

Adanya kandungan gizi yang demikian sempurna membuat telur sangat perlu dikonsumsi oleh ibu hamil, menyusui, balita, anak sekolah, remaja, dewasa bahkan orang tua. Ibu hamil dan ibu menyusui serta anak-anak yang tengah dalam masa pertumbuhan sangat membutuhkan protein hewani karena protein hewani merupakan zat gizi yang diperlukan untuk membentuk dan mengganti sel-sel yang rusak. Kebutuhannya seperti itu dapat dipenuhi dari telur yang memiliki kandungan gizi yang demikian sempurna.

Pangan yang dikonsumsi oleh ibu hamil mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap bayi. Zat-zat pangan itu akan tercermin pada bayi yang dilahirkan nantinya, baik karakteristik fisik maupun ciri-ciri psikologisnya. Pada minggu kedua sampai kedelapan sebagian besar organ sudah mulai tumbuh berbentuk seperti jantung, ginjal, paru-paru dan rangka. Pada tahap ini diperlukan tambahan vitamin dan mineral

untuk mencapai kesempurnaan pertumbuhan organ-organ tersebut. Dengan demikian cacat bawaan bisa dihindari. Dengan memakan dua butir telur sehari kebutuhan tadi sudah dapat terpenuhi.

Anak balita sampai dewasa yang kekurangan gizi, sel-sel tubuhnya yang ada akan digunakan sekaligus untuk pertumbuhan dan kecerdasan dan karena tidak ada penambahan sel maka mereka akan tumbuh secara lambat dan bodoh serta mudah sakit. Mereka juga kurang kreatif dan lamban. Telur sebagai pangan padat gizi sangat cocok untuk balita sampai dewasa. Mereka akan bisa tumbuh dengan baik, cerdas, kreatif, bergairah, penuh vitalitas dan sehat, karena telur yang mereka konsumsi akan bisa menambah sel dan mengganti sel yang mati dengan sel baru. Menurut penelitian FK-UI bahwa konsumsi pangan yang sebagian besar dari protein nabati dapat mengakibatkan terjadinya Anemia Gizi (keadaan kurang darah sebagai akibat dari kekurangan zat besi dan protein). Untuk memperbaiki keadaan tersebut perlu ditambahkan satu butir telur dalam makanan sehari-hari.

Kholesterol dan Penyakit Jantung

Dewasa ini timbul keraguan orang mengonsumsi telur karena anggapan bahwa telur mengandung banyak kholesterol yang dapat menyebabkan penyakit jantung. Pendapat ini sama sekali tidak benar!. Mengapa?. Pada penderita penyakit jantung koroner, didapati kadar kholesterol yang meningkat. Sementara itu dalam pembuluh darah jantung terdapat endapan-endapan kholesterol dan lemak lain pada dinding pembuluh darah yang membuat pembuluh darah menyempit. Keadaan ini dijumpai pada dua golongan. Pertama, orang-orang yang memang mempunyai penyakit keturunan (hyperlipidemia primer) dimana kadar kholesterol dan lemak lainnya tinggi, karena ada gangguan proses metabolisme lemak dalam tubuhnya dan kedua, orang-orang yang mengonsumsi lemak dalam jumlah yang tinggi seperti orang-orang di negara maju, dimana konsumsi lemaknya 30-40% dari jumlah kalori yang dimakan.

Oleh karena itu apabila seseorang tidak termasuk kedua kelompok di atas tidak perlu khawatir terkena penyakit jantung akibat makan telur, apalagi jika pola makanan sehari-hari selalu

disertai sayuran dan buah-buahan yang dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Kolesterol diperlukan bagi tubuh dalam jumlah besar antara 1000-1500 mg. Kalau seseorang mengkonsumsi dua butir telur baru didapat 400-600 mg kolesterol, penderita jantung sendiri masih diperbolehkan mengkonsumsi kolesterol sebanyak 200-300 mg atau sama dengan satu butir telur ayam sehari.

Kandungan kolesterol telur yang relatif banyak mengakibatkan seringnya dilakukan penelitian tentang pengaruh konsumsi telur terhadap kenaikan kadar kolesterol darah. Hasil penelitian tidak konklusif yakni tidak ada pola yang konsisten. Sebagian orang tidak terpengaruh dan sebagian ada yang naik kadar kolesterol darahnya. Malah ada penelitian akhir-akhir ini yang mengungkapkan bahwa makan banyak telur justru menurunkan kadar kolesterol darah. Mengapa banyak variasi terhadap respon kolesterol telur, belum dapat dijelaskan dan yang pasti respon tersebut bersifat individual.

Bagi orang normal yang tidak sensitif terhadap kolesterol dan lemak jenuh (saturated fat), kandungan lemak telur telah memberikan nilai aman yakni antara lain mengandung 4 gram lemak tidak jenuh dan 2 gram lemak jenuh yang terdapat pada kuning telur. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila telur telah dikonsumsi orang sebagai makanan pagi (sarapan) selama berabad-abad.***

(Suara Muhammadiyah No. 08/78/1993)

5.7.

MENINGKATKAN PRODUKSI TELUR AYAM BURAS

Meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti meningkatnya tingkat kesejahteraan, sudah tentu harus dibarengi dengan tersedianya bahan pangan yang cukup baik kuantitas maupun kualitasnya. Untuk menunjang upaya itu, pada bidang peternakan telah dikembangkan beberapa komoditi ternak termasuk di dalamnya adalah ayam kampung atau ayam buras. Ayam buras merupakan jenis ternak yang banyak dibudidayakan oleh penduduk Indonesia terutama di pedesaan. Hal ini disebabkan pemeliharaannya tidak memerlukan persyaratan yang rumit, sudah beradaptasi dengan lingkungan sehingga mempunyai daya tahan terhadap penyakit, dan dapat dipelihara sebagai usaha sampingan.

Menurut Sensus Pertanian 1983 terdapat 15,23 juta rumah tangga petani yang terlibat dalam kegiatan budidaya ayam buras. Pada tahun 1989 populasinya sudah mencapai 19.433.000 ekor, yang hampir 100% merupakan peternakan rakyat dengan pola pemeliharaan yang masih tradisional, yaitu skala pemilikan sedikit, dengan cara diumbar (tanpa kandang), tanpa pakan tambahan tanpa vaksinasi dan tanpa manajemen usaha yang baik. Dari data tersebut, ayam buras mempunyai potensi yang sangat besar untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia dan meningkatkan pendapatan masyarakat petani apabila ayam buras ini dikelola dengan manajemen yang lebih baik.

Dalam meningkatkan produktifitas ayam buras baik daging maupun telurnya dipandang perlu untuk meningkatkan cara pemeliharaannya dari pola tradisional menjadi cara yang lebih komersial. Ayam buras yang dipelihara dengan cara tradisional mempunyai produksi yang rendah baik daging maupun telurnya. Pemeliharaan tradisional tersebut perlu diubah ke arah usaha yang lebih intensif dengan menerapkan beberapa usaha mulai dari pemilihan bibit, pemberian pakan tambahan, perkandangan,

pencegahan penyakit. Pengelolaan reproduksi, penanganan pasca panen dan analisis usahanya, di satu segi ayam buras mempunyai kelebihan, diantaranya dagingnya disukai masyarakat, harga telur relatif lebih mahal, tetapi di segi lain pengembangan ayam buras mempunyai beberapa hambatan, seperti selang bertelur yang lama, pertumbuhan rendah, produksi telur rendah, mortalitas anak tinggi dan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional.

Produksi Telur

Dalam membahas produktifitas ayam buras, perlu mengidentifikasi kendala yang mempengaruhi produktifitas tersebut yaitu mutu genetik rendah dan lingkungannya (manajemen pemeliharaan tradisional). Selain itu produktifitas ayam buras juga dipengaruhi oleh adanya sifat mengeram, mengasuh anak dan dewasa kelamin yang lama. Pemeliharaan secara tradisional akan menghasilkan rendahnya pertumbuhan, produksi telur dan daya tetas, tingginya mortalitas serta panjangnya masa istirahat bertelur.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk meningkatkan produktifitas ayam buras terutama produksi telurnya adalah :

1. Peningkatan mutu bibit ayam buras. Mutu genetik ayam buras memang kurang menguntungkan bila ditinjau dari segi produksi daging maupun telurnya. Keadaan ini diperburuk dengan sistem pemeliharaannya yang masih tradisional. Peningkatan mutu genetik ayam buras dalam upaya meningkatkan produksi telur adalah dengan cara "grading up", yaitu dengan mengawinkan pejantan ayam ras petelur dengan ayam betina lokal. Dengan metode ini sifat-sifat ayam buras tidak hilang sama sekali dan cara pemeliharaan masih dapat diatasi secara tradisional maupun semi intensif. Dengan "grading up" diharapkan keturunannya akan mempunyai ketahanan penyakit dan daya adaptasi lingkungan seperti ayam buras dan produksi telur yang mendekati ayam ras.

Ayam buras dipelihara di pedesaan mempunyai masa dewasa kelamin 6-7 bulan dengan bobot badan dewasa 1,4-1,6 kg. Produksi telur rata-rata 10 butir per periode bertelur dan produksi telur per tahun sekitar 40-55 butir dengan berat telur sekitar 35-40 gram.

Dengan proses "grading up" ini ternyata ayam buras dapat

ditingkatkan produksi maupun berat telurnya. Produksi telur naik dari 19% menjadi 32% sedangkan ayam ras sekitar 55%. Berat telur ayam buras naik dari 38 g menjadi 44 g, sedangkan telur ayam ras petelur 54 g.

2. Peningkatan mutu pakan. Usaha yang tidak kalah pentingnya dalam upaya meningkatkan produksi telur ayam buras adalah pemberian pakan yang berkualitas. Umumnya peternak menyediakan pakan ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas pakan maupun kebutuhan zat-zat gizi ayam buras. Bahkan banyak pula peternak yang tidak memberi pakan pada ayam buras, ayam ini dilepas begitu saja untuk mencari makan sendiri. Dengan pola pemberian makan demikian, jelas produksi telur ayam buras itu jauh dari apa yang diharapkan.

Pakan sangat esensial bagi kehidupan ayam buras karena menyangkut fisiologis yang mengubah zat-zat makanan menjadi zat tubuh. Zat-zat makanan yang ada dalam tubuh diubah menjadi telur, daging, energi, dan lain-lain. Pemberian pakan yang berkualitas perlu diperhitungkan juga dengan biaya yang dikeluarkan. Memberi pakan yang berkualitas baik seringkali diikuti dengan harga pakan yang cukup mahal sehingga perlu diperhitungkan dengan sistem pengelolaan yang baik dan efisien. Pemberian pakan yang murah dengan kualitas rendah juga tidak akan meningkatkan produksi dan mendatangkan keuntungan. Jadi yang harus diberikan adalah pakan yang berkualitas baik dengan biaya yang paling murah sehingga dapat meningkatkan produksi dan mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pakan sebagai salah satu faktor utama dalam usaha peningkatan produksi ternak, sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Biaya pakan ini merupakan biaya produksi yang paling besar dalam usaha peternakan. Agar pemeliharaan ayam buras menguntungkan perlu dicari bahan pakan inkonvensional yang murah, cukup dan tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Pakan ayam buras tidak perlu sama dengan pakan ayam ras karena selain harganya lebih mahal, juga tingkat efisiensi dan konvensi pakan ayam buras lebih rendah daripada ayam ras. Ayam ras memerlukan pakan dengan kadar protein 18-24% dan energi (ME) 2900 kkal/ekor/hari. Ayam buras cukup diberi pakan dengan kadar protein 14-16% dan ME 2400 kkal/kg dengan konsumsi sekitar 90g/

ekor/hari. Pakan ayam buras tersebut dapat diperoleh dengan mencampur dedak/bekatul 70, jagung 6%, bungkil kedelai 10%, tepung ikan 1,5% dan sisanya vitamin dan mineral.

3. Intensifikasi pemeliharaan. Pemeliharaan ayam buras pola tradisional secara bertahap harus dialihkan ke pemeliharaan yang intensif atau dengan sistem battery. Usaha ini harus diikuti dengan perbaikan tatalaksana pemeliharaan, pemilihan bibit, pemberian pakan, menjaga kondisi kesehatan sampai pemasarannya. Dengan usaha ini laju peningkatan produksi telur ayam buras dapat ditingkatkan.

Produksi telur ayam buras yang dipelihara secara tradisional ternyata sangat rendah yaitu sekitar 30-60 butir/ekor/tahun dengan produksi telur per periode bertelur sekitar 10-11 butir/ekor. Produksi telur yang rendah ini juga disebabkan oleh adanya sifat mengasuh anak yang lama (107 hari), lambat dewasa kelamin (250 hari), kembali bertelur setelah penyapihan (23 hari). Adanya sifat mengeram dan mengasuh anak menyebabkan masa istirahat bertelur yang dapat mencapai 257 hari/tahun. Untuk meningkatkan produksi telur dapat dilakukan dengan mengintensifkan cara pemeliharaannya. Pemeliharaan yang diumbar diubah dengan menempatkan ayam pada kandang battery pada masa produksi bertelur (mulai umur 6 bulan). Pakan yang diberikan dapat berupa campuran pakan yang biasa diberikan pada ayam ras dengan bahan pakan tradisional seperti dedak dan jagung yang disusun dengan perbandingan tertentu dan mempertimbangkan nilai ekonominya. Dengan sistem battery yang diberi pakan dengan kadar protein 14-16% dapat meningkatkan produksi telur ayam buras dari 52 butir/ekor/ tahun pada pola tradisional menjadi 132 butir/ekor/ tahun pada pola intensif, masa istirahat bertelur berkurang 132 hari (dari 257 hari menjadi 125 hari) dan masa bertelur naik dari 108 hari menjadi 240 hari. ***

(Poultry Indonesia No. 158 April 1993)

5.8.

EMPAT TAHAP PENYUSUNAN RANSUM

Dalam usaha peternakan komersial sekitar 60 sampai 70% biaya produksi adalah biaya pakan (ransum), karena itu perlu diupayakan penyusunan ransum yang ideal. Ransum ideal adalah ransum yang dapat memaksimalkan produksi pada harga ransum yang paling rendah. Ransum yang mahal dapat pula menghasilkan keuntungan yang tinggi, tetapi secara ekonomi biaya per unit produksi dapat menyebabkan ransum tersebut tidak menguntungkan (*feasible*). Demikian pula ransum yang paling murah tidak selalu baik jika tidak dapat menghasilkan tingkat produksi yang memuaskan.

Oleh karena itu, biaya per unit produksi adalah faktor utama yang perlu diperhitungkan dalam menentukan bagaimana ransum yang tepat diberikan pada ternak. Dengan menyadari kenyataan ini akan dapat menghindarkan peternak dari pemborosan biaya pakan atau hal-hal yang merugikan lainnya.

Berikut ini adalah empat tahapan yang harus dipertimbangkan dalam upaya untuk mendapatkan ransum yang ekonomis dalam arti pada harga yang rendah dapat menghasilkan produksi yang maksimal;

1. Tentukan dan catat kebutuhan zat nutrisi (makanan) ternak dan/atau berilah sedikit kelebihan untuk ternak tertentu yang akan diberi pakan.

Menentukan kebutuhan zat makanan ternak dapat dengan cara melihat tabel standar kebutuhan zat makanan untuk masing-masing ternak. Misalnya kebutuhan serta kasar, energi, protein.. lemak, vitamin, mineral dan pakan tambahan lainnya. Perlu diingat bahwa kebutuhan zat makanan pada umumnya menggambarkan jumlah minimum zat makanan, karena itu pemberian sedikit kelebihan zat makanan dari standar kebutuhan dimaksudkan mencegah kekurangan zat makanan. Faktor-faktor yang perlu

diperhatikan dalam menetapkan kebutuhan zat makanan pada ternak adalah :

- Umur; anak, muda atau dewasa.
- Jenis kelamin; jantan atau betina
- Ukuran tubuh; kecil, sedang atau besar
- Tipe produksi; apakah pakan yang akan diberikan untuk maintenance (pemeliharaan) tubuh, pertumbuhan, penggemukan, reproduksi. Laktasi susu, produksi telur, produksi bulu atau tenaga kerja.
- Tingkat produksi. Pada ternak potong, berapa pertambahan berat badan (gain) per hari. Pada ternak perah, apakah baru beranak, puncak produksi atau periode kering. Pada ayam pedaging apakah pada periode starter, grower atau finisher dan layer, berapa persen produksi telurnya dan lain-lain.

1. Tentukan bahan pakan yang diperlukan dan catat komposisi (kandungan) zat makanan masing-masing bahan pakan. Bahan pakan harus cukup baik dan tinggi, kandungan nutrisinya. Batas penggunaan bahan baku pada kurun waktu yang relatif tahan lama, mudah disimpan dan tidak mudah busuk atau berjamur.

Pada ternak ruminansia, bahan kering, protein, energi, phosphor, kalsium dan vitamin A adalah zat-zat makanan yang umumnya dipertimbangkan dalam penyusunan ransum. Mineral tambahan juga perlu diberikan dalam bentuk mineral blok atau premix yang dicampur pada ransum. Ternak yang baru beranak memerlukan tambahan vitamin D. dalam penyusunan ransum ternak ruminansia, peternak juga perlu memastikan bahwa jumlah yang cukup dalam hal asam amino essensial, asam lemak essensial, vitamin D, E, B kompleks dan mineral yang perlu ditambahkan. Pada ayam broiler perlu diperhatikan keseimbangan protein dan energi agar pada waktu yang relatif singkat dapat dihasilkan bobot badan yang optimal dan pada ayam petelur perlu diperhatikan kebutuhan mineral untuk produksi telurnya.

Karena beberapa pertimbangan tersebut bagi perusahaan-perusahaan atau peternak di negara maju sudah menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam penyusunan ransum ternaknya.

2. Tentukan harga masing-masing bahan pakan yang dipilih. Bahan pakan sebaiknya yang tersedia dalam jumlah cukup di daerah

tersebut jika memungkinkan merupakan hasil potensi daerah tersebut. Jika tidak mudah didapatkan dengan transportasi yang mudah dan murah. Harga bahan pakan relatif murah dan tidak mudah melonjak karena persaingan dengan keperluan manusia dan lainnya. Penentuan ini bukan hanya harga pakan, tetapi juga biaya pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan. Beberapa bahan pakan memerlukan antioksidan dan bahkan pendinginan untuk mencegah kerusakan. Ada pula bahan pakan yang kehilangan zat makanannya jika disimpan dalam waktu yang relatif lama.

3. Pertimbangan pembatasan berbagai bahan pakan dan susunlah ransum yang paling ekonomis. Ingat bahwa tujuan utama penyusunan ransum adalah minimisasi biaya per unit produksi.***

(Bisnis Peternakan Ayam dan Telur Nopember 1995)

5.9.

PAKAN ALTERNATIF PENGGANTI JAGUNG

Populasi ternak ayam baik ayam buras, ayam petelur maupun ayam pedaging dalam periode lima tahun 1988-1992 mengalami kenaikan yang cukup pesat. Populasi ayam buras naik dari 182.879 ribu ekor pada tahun 1988 menjadi 216.608 ribu ekor pada tahun 1992 atau mengalami kenaikan rata-rata 4,30% per tahun, sedangkan ayam petelur naik dari 38.413 ribu ekor menjadi 50.186 ribu ekor (naik 6,92% per tahun) dan ayam pedaging naik dari 227.004 ribu ekor menjadi 492.630 ribu ekor (naik 21,43% per tahun). Kenaikan populasi ternak ayam ini membawa kenaikan turunan akan permintaan bahan pakan terutama jagung. Dalam periode lima tahun terakhir kebutuhan jagung untuk pakan ternak mengalami kenaikan rata-rata 9,22% per tahun dari 1.628 ribu ton pada tahun 1989 menjadi 2.293 ribu ton pada tahun 1993. Sebagian dari kebutuhan jagung ini diperoleh dari impor karena produksi jagung dalam negeri belum mencukupi semua kebutuhan jagung untuk berbagai keperluan.

Berdasarkan komposisi jenis bahan yang digunakan dalam pakan ayam, maka jagung memberikan sumbangan yang terbesar dalam komposisi yaitu 35-55% dari keseluruhan bahan pakan yang digunakan. Penggunaan jagung yang cukup besar itu antara lain karena jagung merupakan sumber energi yang terbesar dalam ransum pakan tersebut. Sebagai tambahan dari kandungan energinya yang tinggi (Energi Metabolis 3430 kkal/kg) jagung khususnya jagung kuning merupakan sumber pigmen xanthofil yang menimbulkan warna kuning pada kaki dan kulit ayam pedaging dan kuning telur. Sebagian dari pigmen-pigmen tersebut dapat diubah ke dalam vitamin A oleh mukosa usus ayam. Jagung juga mengandung sekitar 4% lemak yang mana 50% dari jumlah lemak tersebut adalah asam lemak esensial dalam ransum ayam.

Ditinjau dari segi harga, harga jagung sering mengalami fluktuasi dan sangat berpengaruh terhadap harga pakan ayam. Biasanya harga jagung berkisar antara 250-300 rupiah per kg. Pada akhir bulan Juli 1993 harga jagung naik menjadi 410 rupiah per kg sehingga menyebabkan harga pakan ayam meningkat antara 30-40 rupiah per kg. Keadaan ini merupakan beban berat bagi peternak ayam terutama peternak berskala kecil. Walaupun kesulitan jagung hanya terjadi pada waktu tertentu saja, akan tetapi kesulitan tersebut sangat berpengaruh terhadap produksi dan harga makanan ternak ayam. Untuk menanggulangi masalah kesulitan jagung ini perlu dicari bahan-bahan alternatif lain yang dapat menggantikan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya pemakaian jagung dalam ransum ayam sebagai sumber energi.

Peternak ayam di Indonesia pada dasarnya mempunyai peluang yang cukup besar untuk mengganti jagung sebagai bahan pakan terutama pada saat harga jagung terlalu tinggi karena banyaknya sumber energi pakan pengganti yang tersedia seperti ubi kayu, dedak gandum, sorgum, beras menir dan dedak padi. Persoalan yang timbul adalah mengenai komposisi bahan pengganti jagung tersebut agar keseimbangan nutrisi yang diperlukan dapat tetap dipertahankan. Kandungan nutrisi bahan pengganti antar - bahan maupun antar daerah - mempunyai spesifikasi yang sedikit berbeda, karena belum adanya standar pembinaan produksi bahan pakan pengganti jagung itu. Masalah lain dalam penggunaan bahan pengganti ini tidak lepas dari penanganan. Jagung umumnya keunggulan komperatif dibandingkan dengan bahan pakan yang lainnya. Demikian pula halnya dengan variasi kualitas bahan pengganti, karena pasarnya sebagai bahan pakan ternak belum terbina secara baik sebagaimana jagung, menimbulkan kesulitan tersendiri dalam penggunaannya. Sama halnya juga jarak antara daerah produksi bahan pengganti dengan lokasi peternak yang mempengaruhi pemasaran bahan tersebut.

Ubi Kayu

Ubi kayu (ketela pohon) yang digunakan untuk ransum

ayam adalah ubi yang telah diolah. Ubi yang segar mengandung asam hidrosianat (HCN) yang bersifat racun. Oleh karena itu sebelum digunakan sebagai ransum, ubi kayu harus mengalami pemrosesan agar kandungan atau sifat racun HCN berkurang. Beberapa cara pemrosesan ubi kayu diantaranya dengan mengeringkan dalam oven berudara tekan pada temperatur 70-80 oC, merebus dalam air panas sehingga merusak HCN dan mengurangi glukosidanya, dan dengan menjemur di bawah sinar matahari.

Di Amerika Serikat ubi kayu dapat digunakan untuk ransum ayam pedaging sebesar 10%, sedangkan untuk ayam petelur maksimal 20%. Pada tingkat 50% dalam ransum petelur harus ditambahkan dengan methionin 0,15% dan xanthofil. Penggunaan sampai 50% hanya dapat dilakukan jika pabrik makanan ternak benar-benar mendapat jaminan bahwa ubi kayu yang dibelinya bermutu baik dan diolah dengan baik pula. Ubi kayu adalah sumber energi pakan yang cukup baik (EM 2970 kkal/kg), tetapi mengandung protein yang rendah (1,8%). Penggunaan ubi kayu sebagai bahan pakan memberikan tambahan protein yang cukup jika dibandingkan dengan serealia lainnya. Namun karena peranannya yang cukup tinggi sebagai sumber devisa non-migas, maka dalam jangka pendek penggunaan ubi kayu (gaplek dan pellet) sebagai bahan pakan lebih diprioritaskan untuk ekspor terutama ke negara-negara Eropa daripada untuk penggunaan bahan pakan di dalam negeri.

Di Indonesia, produksi ubi kayu mengalami kenaikan rata-rata 1,66% per tahun dari 17.117 ribu ton pada tahun 1989 menjadi 16.356 ribu ton pada tahun 1993. Dalam kurun waktu yang sama kebutuhan ubi kayu sebagai bahan pakan mengalami kenaikan rata-rata 2,84% per tahun dari 371 ribu ton (1989) menjadi 415 ribu ton (1993). Sekalipun produksi ubi kayu cukup banyak ditemui di semua daerah tetapi penggunaannya untuk bahan pakan masih sangat terbatas. Penyebabnya antara lain karena harganya yang didasarkan pada harga ekspor, relatif lebih mahal dibandingkan dengan harga ubi kayu untuk pakan dalam negeri.

Dedak Gandum

Gandum yang digiling untuk menghasilkan tepung gandum akan menghasilkan beberapa hasil samping dari gandum tersebut yang dapat digunakan untuk makanan ternak. Meskipun nilai energi hasil samping gandum ini lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai energi gandum itu sendiri, di beberapa daerah harganya seringkali cukup murah sehingga secara ekonomis dapat digunakan dalam ransum ayam. Salah satu hasil samping dari hasil giling gandum adalah dedak gandum (pollard) yang hampir seluruhnya terdiri dari lapisan luar biji gandum yang kasar dan dapat digunakan sebagai bahan pakan pengganti jagung. Pollard gandum ini mengandung serat kasar yang cukup banyak dan kandungan proteinnya 60% lebih tinggi daripada jagung, tetapi hanya mempunyai kandungan energi setengah daripada jagung (EM 1300 kkal/kg). Oleh karena itu, apabila pollard gandum akan digunakan sebagai bahan pakan perlu ditambahkan dengan sumber energi lainnya.

Kadar protein pollard gandum rata-rata 15%, kadar lemak 4% dan biasanya kadar serat kasarnya mencapai 10%. Pollard merupakan bahan pakan yang kaya phosphor (1,1%) tetapi rendah kadar kalsiumnya (0,14%). Pollard gandum praktis tidak mengandung vitamin A dan vitamin D. Bahan pakan ini kaya akan niasin dan cukup tinggi kadar thiaminnya, akan tetapi rendah kadar riboflavinnya, meskipun dua kali lebih banyak daripada jumlah yang terdapat di seluruh biji gandum.

Sorgum

Secara umum sorgum dibedakan menjadi dua macam yaitu sorgum putih dan coklat. Sorgum dapat digunakan sebagai salah satu bahan pakan ayam untuk menggantikan sebagian atau seluruhnya bahan pakan jagung. Sebagai sumber energi sorgum mengandung 4.380 kkal GE (Gross Energy), 3.880 kkal DE (Digestible Energy) dan Energi Metabolis 3.307 kkal/kg, dihitung dari bahan kering. Kadar asam amino methionin dalam sorgum sangat rendah sehingga penggunaan sorgum untuk pakan ayam memerlukan penambahan asam amino komersial terutama methionin.

Pemakaian sorgum sebagai bahan pakan harus memperhatikan faktor penghambatnya antara lain protein sorgum yang dapat dicerna oleh hewan lebih sedikit daripada jagung, sorgum samasekali tidak mengandung provitamin A dan sorgum mengandung zat tanin yang menyebabkan rasa pahit pada ransum. Sorgum mengandung zat tanin 0-7%. Kadar tanin yang tinggi akan menurunkan kualitas sorgum di dalam pakan ayam karena akan menurunkan palatabilitas dan daya cerna. Selain itu kandungan tanin yang tinggi dalam pakan dapat akan mengurangi produksi telur dan berat ayam pedaging. Untuk sorgum coklat diperlukan penyosohan terlebih dahulu untuk mengurangi sebagian besar tanin yang ada, sedangkan untuk sorgum putih zat tanin tidak merupakan masalah.

Beras

Beras mempunyai kandungan energi (EM 3100 kkal/kg) yang paling mirip dengan jagung dan mempunyai kandungan protein (7,5%) yang sedikit lebih rendah daripada jagung. Biasanya beras yang kualitasnya rendah seperti beras menir saja yang dapat menjadi pengganti jagung sebagai sumber energi pakan karena beras merupakan makanan pokok utama bagi penduduk Indonesia. Beras patah (menir) ini karena harganya murah biasanya digunakan sebagai bahan pakan antara bulan September sampai Desember, pada saat harga jagung melonjak cukup tinggi, pada tingkat harga relatif tertinggi terhadap beras. Namun penggunaan menir ini tidak sepenuhnya menggantikan jagung karena kandungan karotin yang kurang baik bagi ayam. Oleh karena itu penggunaannya sebagai bahan pakan tetap akan dicampur dengan jagung kuning. Beras tidak mengandung vitamin A dan D. Beras merah kasar yang harganya lebih murah daripada beras putih dan mengandung thiamin, baik digunakan sebagai makanan berbutir untuk ternak ayam.

Dedak

Dedak padi adalah sisa penggilingan atau penumbukkan padi. Bahan pakan ini sangat populer dan banyak sekali digunakan

dalam ransum ternak. Dedak adalah pengganti jagung yang selalu tersedia di seluruh daerah. Kualitas dedak yang baik, memiliki kandungan serat kasar yang rendah dan bebas dari ketengikan lemak (minyak). Penggunaan dedak lebih dari 45% dalam rasio pakan akan memberikan tambahan berat badan ayam pedaging yang lebih cepat. Akan tetapi sebaliknya, dedak yang kualitasnya kurang baik, mempunyai kulit gabah yang cukup banyak dan ini berarti mengandung banyak serat kasar kurang baik bagi pertumbuhan ayam karena ayam tidak mampu mencerna selulosa yang terdapat dalam serat kasar. Demikian juga halnya dengan kandungan lemak dalam dedak, akan menimbulkan masalah dalam penyimpanan karena tidak boleh disimpan lebih dari dua minggu. Karena kelemahan-kelemahan tersebut, penggunaan dedak akan memberikan formulasi pakan yang cukup murah sebagai sumber energi pakan.

Dilihat dari mutunya dedak padi dibagi dalam tiga kelas, dedak kasar, dedak lunteh dan bekatul. Dedak kasar terdiri dari pecahan kulit gabah. Sebagai bahan pakan nilainya rendah, kadar proteinnya sangat rendah yaitu 3,1% dan daya cernanya juga sangat rendah. Dedak lunteh dapat merupakan hasil samping penumbukkan padi dengan kandungan protein sekitar 9,5% atau dapat merupakan hasil samping penggilingan padi untuk memperoleh beras asah. Kandungan proteinnya tinggi sekitar 13,5%. Dedak lunteh kaya akan thiamin dan kandungan niasinnya sangat tinggi. Dedak lunteh cukup enak bila segar, akan tetapi bahan pakan ini mudah tengik dalam penyimpanan karena kandungan minyaknya tinggi. Bekatul mengandung pecahan-pecahan menir halus. Dari semua dedak padi bekatul lebih tinggi harganya. Kandungan protein bekatul sekitar 12%, lemak 13% dan serat kasar 3%. Kandungan vitamin B lebih sedikit daripada lunteh. Seperti halnya dedak lunteh, bekatul cenderung menjadi tengik dalam penyimpanan, oleh karena itu sebaiknya diberikan pada ayam sesegar mungkin.

Penutup

Uraian di atas memperlihatkan cukup banyaknya bahan pengganti jagung sebagai sumber pakan. Namun, untuk

digunakan sebagai bahan pakan akan cukup menghadapi masalah dari segi standardisasi kualitas, kandungan serat yang cukup tinggi, harga dan produksi musiman yang cukup sulit ditentukan besarnya serta menyangkut masalah penyimpanan. Semua itu memberikan penilaian harga relatif lebih tinggi dibandingkan bila menggunakan jagung. Dalam banyak hal jagung mempunyai keuntungan bila dibandingkan dengan bahan lainnya, baik dari segi kelangsungan penyediaan bagi peternak, penanganan yang lebih mudah maupun variasi kualitas yang relatif terkontrol. Semuanya itu menyebabkan jagung menjadi bahan pakan utama yang meningkat jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bahan pakan lainnya. ***

(Infonet Edisi 056 April-Mei 1998)

5.10.

MEMANFAATKAN AZOLLA UNTUK MAKANAN TERNAK

Azolla adalah tanaman paku air yang mengapung di permukaan air seperti kolam, danau, saluran air, sawah dan sebagainya. Azolla mampu menambat nitrogen bebas dari udara, karena asosiasinya dengan sianobakteri anabaena yang hidup di dalam rongga daunnya. Azolla segar mengandung nitrogen sekitar 0,2 - 0,4%, sedangkan pada azolla kering sekitar 3 - 5%. Oleh karena itu selain dapat digunakan sebagai pupuk tanaman, azolla juga sangat potensial untuk digunakan sebagai makanan ternak. Secara tradisional, azolla telah lama digunakan di Asia dan sebagian Afrika baik dalam bentuk segar, kering maupun fermentasi sebagai pakan ternak babi, unggas dan ikan.

Nilai pakan

Dalam bentuk segar azolla mengandung sekitar 1,3% protein kasar, sedangkan dalam bentuk kering mengandung sekitar 13 - 24% atau lebih (Tabel 5.10.1). Kadar protein dan lemak azolla lebih tinggi daripada berbagai hijauan yang lain, sementara selulosanya lebih rendah, sehingga merupakan bahan pakan berkualitas tinggi. Tanaman azolla muda (umur satu minggu) lunak, berair dan sangat disukai oleh ternak unggas, ternak potong dan ikan. Tanaman azolla tua (umur lebih dari 20 hari) menjadi keras dan berserat, mengandung serat netral deterjen (neutral detergent fiber) yang tinggi yang menurunkan nilai pakannya.

Meskipun lebih rendah daripada bekatul dalam hal asam amino lysin dan tryptophan, azolla mengandung semua asam amino esensial (Tabel 5.10.2). Walaupun komposisi asam amino yang secara umum lengkap, azolla tidak cocok sebagai bahan

pakan tunggal bagi ternak berambung tunggal (monogastrik). Pemberian pakan azolla murni tidak direkomendasikan karena (1) meningkatkan tendensi ternak unggas dan ternak potong tumbuh berlemak, dan (2) memerlukan suplementasi tiga asam amino yaitu lysin, methionin dan histidin.

Tabel 5.10.1.

Analisis kimia Azolla pinnata berdasarkan % bahan kering

| Zat makanan | % Bahan Kering |
|---------------|----------------|
| Abu | 10,5 |
| Serat kasar | 9,1 |
| Lemak kasar | 3 - 3,36 |
| Protein kasar | 23 - 30 |
| Nitrogen | 4 - 5 |
| Phospor | 0,5 - 0,9 |
| Kalsium | 0,1 - 1,0 |
| Potassium | 2 - 4,5 |
| Magnesium | 0,5 - 0,65 |
| Mangan | 0,11 - 0,16 |
| Besi | 0,06 - 0,26 |
| Gula terlarut | 3,4 - 3,5 |
| Pati | 6,5 - 6,54 |
| Klorophil | 0,34 - 0,55 |

Sumber : Singh (1979)

Pada percobaan pemberian pakan Azolla filiculoides pada tikus ditemukan bahwa azolla mengandung serat netral deterjen yang menunjukkan kadar lignin yang tinggi sehingga merupakan faktor pembatas bagi efisiensi utilitas azolla sebagai sumber protein tunggal. Juga dilaporkan bahwa azolla tidak mudah dicerna oleh ternak berambung tunggal (monogastrik). Oleh karena itu, disarankan agar hanya azolla yang belum tua yang digunakan untuk suplemen pakan.

Hasil penelitian lain menyatakan bahwa tikus yang hanya diberi pakan azolla memerlukan suplementasi tiga asam amino yaitu lysin,

methionin dan histidin, selain tidak dapat tumbuh cepat. Dari penelitian pada tikus tersebut direkomendasikan bahwa azolla dapat mengganti 20% pakan dan perlu suplementasi tiga asam amino esensial.

Dengan manajemen yang baik, satu hektar azolla dapat menghasilkan pakan segar 1 - 2 ton/ hari yang ekuivalen dengan 10 - 30 kg protein/hari. Jumlah tersebut ekuivalen dengan 2,24 ton daun kentang dan dapat untuk mensuplai pakan segar cukup bagi 150 - 200 ekor babi atau 200 - 300 ekor kambing. Dalam satu bulan satu hektar azolla dapat menghasilkan 6 - 8 ton bahan kering dengan 540 - 720 kg protein kasar. Jika angka-angka ini diperhatikan, maka azolla tampak mempunyai potensi sebagai tanaman pakan khususnya di negara berkembang.

Tabel 5.10.2.

Perbandingan komposisi asam amino antara Azolla filiculoides, alfalfa, kedelai dan gandum

| Asam amino | g/100 g protein | | | |
|---------------|-----------------|---------|---------|--------|
| | azolla | alfalfa | kedelai | gandum |
| threonin | 4,70 | 5,11 | 3,91 | 3,71 |
| valin | 6,75 | 6,91 | 4,88 | 4,94 |
| methionin | 1,88 | 1,85 | 1,28 | 2,00 |
| isoleusin | 5,38 | 5,64 | 4,61 | 3,80 |
| leusin | 9,05 | 8,95 | 7,88 | 12,83 |
| phenilalanin | 5,64 | 6,13 | 5,01 | 5,04 |
| lysin | 6,45 | 5,01 | 6,47 | 2,76 |
| histidin | 2,31 | 2,28 | 2,56 | 2,76 |
| arginin | 6,62 | 4,91 | 7,35 | 4,28 |
| tryptophan | 2,01 | 2,68 | 1,30 | 0,76 |
| asam aspartat | 9,39 | 11,67 | 11,86 | 6,46 |
| asam glutamat | 12,72 | 11,82 | 18,98 | 19,39 |
| serin | 4,10 | 5,01 | 5,19 | 5,13 |
| prolin | 4,48 | 5,11 | 5,57 | 9,12 |
| glysin | 5,72 | 5,08 | 4,25 | 3,80 |
| alanin | 6,45 | 6,52 | 4,31 | 7,70 |
| systin | 2,26 | 1,17 | 1,35 | 1,62 |
| tyrosin | 4,10 | 3,36 | 3,19 | 3,90 |
| met + sys | 4,14 | 3,02 | 2,63 | 3,52 |
| phe + tyr | 9,74 | 9,48 | 8,20 | 8,94 |

Sumber : Buckingham et al. (1978)

Ada beberapa keuntungan dalam memproduksi azolla sebagai tanaman pakan : (1) mengandung kadar nutrisi yang sangat tinggi, (2) dapat tumbuh secara alami di permukaan air dan karena itu tidak mengganggu lahan pertanian, (3) dapat diberikan dalam bentuk segar kepada ternak, (4) tidak memerlukan pengolahan seperti pencacahan, pemotongan dan pengolahan lain karena konsistensinya baik, (5) dapat menyediakan sumber pakan hampir sepanjang tahun dan karena itu membantu keseimbangan suplai pakan, serta (6) dapat tumbuh dengan cepat dengan hasil yang banyak. Azolla dapat dikeringkan, dilembutkan dan dicampur dengan ransum berprotein rendah sampai 20 - 25%, jumlah yang sudah umum direkomendasikan untuk pakan ternak.

Dalam menggunakan azolla sebagai makanan ternak, harus diperhatikan bahwa insektisida atau fungisida yang digunakan untuk memproteksi tanaman ini tidak berbahaya atau dapat dieliminasi sebelum diberikan pada ternak.

Pakan Babi

Azolla digunakan secara luas sebagai pakan babi di China, dimana tanaman ini dikatakan berkualitas sama dengan daun kentang. Percobaan pemberian pakan di Propinsi Sichuan menunjukkan bahwa daun kentang dan azolla hijau sama esensial pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan karakteristik karkas pada babi. Di Vietnam, azolla dapat mengganti sekitar 50% bekatul dalam ransum babi. Babi yang tidak terbiasa diberikan pakan azolla pada mulanya tidak menyukai pakan ini. Peternak China mengatasinya dengan menambah sekitar 80 g air garam (sekitar 0,3% garam konsumsi) pada 50 kg azolla dan dengan pemberian bahwa sebelum pakan yang biasa diberikan pada babi.

Di China diperkirakan bahwa 1 mou (1/15 ha) azolla dapat menghasilkan pakan segar cukup untuk 10 - 20 ekor babi. Hal ini berarti bahwa satu hektar azolla dapat menyediakan pakan segar cukup untuk 150 - 300 ekor babi. Dilaporkan pula bahwa dengan pemberian pakan azolla dapat menghemat 40% biaya produksi pada peternakan babi.

Pakan Sapi

Belum ada laporan tentang penggunaan azolla sebagai pakan sapi di China, tetapi di Vietnam azolla telah digunakan sebagai pakan tambahan pada sapi dan diberikan dalam bentuk segar sekitar 7 - 10 kg/hari. Untuk mensuplai azolla sebanyak itu diperlukan sekitar 50 - 100 m² lahan azolla/ekor. Pada riset terakhir di Universitas G. B. Pant di India, sapi muda yang diberi ransum 0,9 kg azolla kering bersama dengan 2,1 kg campuran 2 : 1 jerami gandum dan pucuk tebu, mengalami pertambahan bobot badan 0,33 kg/hari. Ternak kontrol yang diberi pakan dengan jumlah sama jerami gandum dan pucuk tebu ditambah 1,5 kg konsentrat, hanya mengalami pertambahan bobot badan 0,14 kg/hari.

Pakan Unggas

Azolla segar telah lama diakui sebagai pakan unggas liar di Amerika Serikat dan sebagai pakan itik di China. Tetapi, pemberian azolla segar secara bebas pada unggas dapat menurunkan produktivitas bertelur. Di Philippina, pemberian azolla secara bebas menurunkan kemampuan bertelur menjadi 5 - 7 telur dibandingkan 25 - 27 telur/bulan.

Ternak unggas, khususnya itik dan ayam yang dikandangkan, dapat diberi pakan azolla segar sebagai pakan tambahan. Ternak itik di Vietnam diberi rata-rata 0,1 - 0,3 kg azolla segar/hari dan untuk mensuplai sejumlah itu diperlukan lahan 1 - 2 m² untuk budidaya azolla. Penambahan azolla pada pakan ayam yang dikandangkan di India telah memberikan hasil yang menakjubkan. Ayam yang diberi 75% pakan komersial dengan tambahan 12,5% Azolla pinnata segar mencapai bobot yang sama cepat dengan ayam kontrol, sedangkan ayam yang diberi pakan 100% pakan komersial dengan tambahan 5% azolla tumbuh lebih cepat daripada ayam kontrol dan juga bertelur lebih awal. Kuning telur ayam yang diberi Azolla pinnata lebih kuning daripada kuning telur ayam kontrol. Dari penelitian ini disimpulkan juga bahwa azolla segar dapat mengganti 20% pakan komersial pada ayam. Untuk mengganti pakan komersial sebanyak itu diperlukan 9 kg azolla segar/hari bagi 100 ekor ayam. Jumlah

azolla sebanyak itu dapat dihasilkan dari kolam seluas 60 m2. ***

(Infovet Edisi 035 Juni 1996)

DAFTAR PUSTAKA

- 5.1. Sutawi. 1991. Memilih dan Membedakan Daging Ternak. Suara Muhammadiyah No. 24/76/Desember 1991.
- 5.2. Sutawi. 2000. Daging Halal dan Tayyib. Poultry Indonesia April 2000.
- 5.3. Sutawi. 1996. Pemotongan Unggas Secara Halal. Suara Muhammadiyah No. 19/81/1991.
- 5.4. Sutawi. 1992. Protein Hewani bagi Tubuh Manusia. Bisnis Peternakan Ayam dan Telur No. 81 Oktober 1992.
- 5.5. Sutawi. 1996. Lemak Ikan Mencegah Jantung Koroner. Suara Muhammadiyah No. 01/81/1996.
- 5.6. Sutawi. 1993. Benarkah Telur Penyebab Penyakit Jantung. Suara Muhammadiyah No. 08/78/April 1993.
- 5.7. Sutawi. 1993. Meningkatkan Produksi Telur Ayam Buras. Poultry Indonesia No. 157 April 1993.
- 5.8. Sutawi. 1992. Empat Tahap Penyusunan Ransum. Bisnis Peternakan Ayam dan Telur No. 76 Juni 1992.
- 5.9. Sutawi. 1998. Pakan Alternatif Pengganti Jagung. Infovet Edisi 056 April-Mei 1998.
- 5.10. Sutawi. 1996. Memanfaatkan Azolla untuk Makanan Ternak. Infovet Edisi 035 Juni 1996.

A

Abdurrahman Wahid, 36
added value, 146, 157
 AFTA, 235
 Amerika Serikat, 137
 Anderson dan Cohen, 34, 222
 Arab Saudi, 102
 arteriosklerosis, 273
 asam amino esensial, 264, 288
 ATM ROC, 99
avian influenza (AI), 16, 46
 ayam buras, 283
 azzola, 297

B

basis ekonomi, 45
 Bioterrorisme, 49
 Break Even Point, 50
 Bungaran Saragih, 37
 capital-driven, 11
channeling agent, 166
 closed cooperative, 124
consumer loss, 210
contract farming, 154

D

daerah produksi, 61
 daging sehat, 248
 Damandiri, 93

daya saing, 27,
 absolute advantage, 27, 31
 comparative advantage, 2
 competitive advantage, 27
delivery obligation, 125
delivery right, 124
developed country, 3, 129
developing country, 3, 129
 Dinas Peternakan, 54
 DRC, 219

E

economies of scale, 153, 157, 208
 efisiensi pakan, 65
 technical efficiency, 65
 allocative efficiency, 65
 economic efficiency, 65
 ekonomi-politik, 152
 elastisitas harga, 188
 elastisitas pendapatan, 187
 elastisitas permintaan, 186
embryo transfer, 106
 EPR, 217
 era globalisasi, 120
executing agent, 166

F

FCR, 161, 178
 foot loose industry, 29
 fungsi produksi, 60, TPP, 61, APP,

61, MPP, 61

G

GATT/WTO, 109, 205, 211, 222, 233

Gema Palagung, 12

Gema Proteina, 104

gemah ripah loh jinawi, 111

GMP, 220, 260

GPPU, 231

H

Habibie, 35

HACCP, 220

Hafsah, 130

halal dan tayyib, 253

haram dan khabisah, 255

harga keseimbangan, 193

HDI, 20, 32

HDL-LDL, 275

hibridasi jagung, 75

hukum Engel, 185

I

IMF, 223

income elasticity of demand, 73

income over feed cost, 63

industrial concentration, 227

industrial countries, 19

infant industry, 207

innovation-driven, 11

inseminasi buatan, 106

investasi peternakan, 8

ISO, 220

J

jagung, 71

Jamil Musanif 1996, 235

jantung koroner, 273

JETRO, 41

K

kambing, 99, kambing PE, 101

kebangkitan peternakan, 15

kelompok plasma, 178

kelompok tani, 21, 32

kemitraan agribisnis, 158

kemitraan ayam ras, 143

keunggulan komparatif, 216

keunggulan kompetitif, 216

keuntungan maksimum, 66

KKP, 37

KKPA, 163

KOA, 133

kolusi, 202

koperasi generasi baru, 123

koperasi perunggasan, 117

koperasi susu, 18

koperasi tradisional, 123

kualitas SDM, 20, 31

L

lemak ikan, 274

Location Quotient, 45

LP-POM, 259

M

MACRO, 241

manfaat telur, 279

masalah produksi, 59

how much to produce, 59

how to produce, 59

what to produce, 59

modernisasi agribisnis, 11, 37

money lender, 92

monopoli, 96

monopsoni, 95

MUI, 259

multiplier effect, 163

Muncar, 81

N

natural barrier, 225

negara miskin, 55

NPR, 217

open cooperative, 124

operation intensive, 42

skill intensive, 42

brain intensive, 42

otonomi daerah, 53

P

PAD, 54

partnership, 151

PDB, 10

PDRB, 45

Pemaseka, 93

pemotongan unggas, 260

pengaruh tarif, 209

price effect, 209

consumption effect, 209

protective effect, 209

revenue effect, 209

redistribution effect, 209

pengganti jagung, 291

penilaian plasma, 176

penyakit peternak, 95

penyakit pemasaran, 95

penyakit produksi, 96

penyakit organisasi, 97

penyakit keuangan, 98

penyusunan ransum, 287

PERC, 17

perdagangan bebas, 110

perfect competition, 157

persaingan global, 131

peternak mandiri, 172

peternak plasma, 134, 170

pola kemitraan, 129

pola konsumsi, 184

politik kemitraan, 151

Porter, 28, 235

poultry shop, 160

PPAN, 231

PPN, 87

Prakosa, 36

Prawirokusumo, 264

price taker, 193

producer surplus, 210

Proksidatani, 12

protein hewani, 247, 263

pull-factor, 183

Pundi Kencana, 93

R

rentabilitas, 135

revitalisasi, 91

S

sapi perah, 109,

Saxowsky and Duncan, 131, 158

SBY, 45

Selandia Baru, 102, 112

self interested, 37

seller concentration, 227

siklus gejala, 6, 85

sistem kontrak, 137

open account, 139

guaranteed price, 139

flat-fee, 139

share contract, 139

feed conversion, 139\

combination, 139

skill-driven, 11

SNI, 220
Soeharto, 35
Sofjan Sudardjat, 103
SPS, 220
stabilisasi harga, 229
struktur pasar, 197
 pasar persaingan, 197
 pasar oligopoli, 200
subsistem agribisnis, 29
 up-stream agribusiness, 29
 on-farm agribusiness, 29
 down-stream agribusiness, 29
 supporting institution, 29
sumber protein hewani, 268
sumberdaya lokal, 31
swasembada daging, 103
syubhat, 256

T

tarif, 205
 ad volarem duty, 207
 specific duty, 207
teori penawaran, 192
teori permintaan, 191
teori produksi, 59
tepung ikan, 79
Tiga Serangkai, 165
 Mitra Inti, 165
 Mitra Dana, 165
 Mitra Plasma, 165
trade distortion, 205
trilogi pembangunan, 4
 stabilitas, 4
 pertumbuhan, 6
 pemerataan, 9,
triple track strategy, 91
 pro-growth, 91
 pro-employment 91
 pro-poor, 91

U

UMM, 93, 99
USDA, 132
UU LPM-PUTS, 226
UU Perkoperasian, 119

V

voluntary export restraints, 113

W

Widyakarya Pangan dan Gizi, 259

Y

Yusmichad Yusdja, 42